PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAPPERIDA
HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa
HRP
HAFECS
Research & Publication

2026

LAPORAN KAJIAN

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

1. **M. Fadli Ridhani, S.Kom., M.Kom.** – Pakar Pengembangan Teknologi dan Multimedia
2. **Dr. Muhammad Rahmatullah, M.Pd.** – Pakar Ekonomi
3. **Ellyna Hafizah, M.Pd** – Pakar Pendidikan
4. **Hengky Dwiyan Hermawan, S.Pd., M.IST.** – Pakar Pengembangan Teknologi dan Multimedia
5. **Farida Hayati, S.Pd.** – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
6. **Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.** – Peneliti HRP
7. **Raihani Raziqin, S.Tr.Kom.** – Peneliti HRP

rakat mufakat

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Audit Teknologi, Pengalaman Pengguna, dan Kematangan Digital Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penyusun :

1. M. Fadli Ridhani, S.Kom., M.Kom. – Pakar Pengembangan Teknologi dan Multimedia
2. Dr. Muhammad Rahmatullah, M.Pd. – Pakar Ekonomi
3. Ellyna Hafizah, M.Pd – Pakar Pendidikan
4. Hengky Dwiyan Hermawan, S.Pd., M.IST. – Pakar Pengembangan Teknologi dan Multimedia
5. Farida Hayati, S.Pd. – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
6. Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc. – Peneliti HRP
7. Raihani Raziqin, S.Tr.Kom. – Peneliti HRP

Barito Kuala, 10 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.
Coordinator of HAFECS Research and Publication

Farida Hayati, S.Pd.
Head Division and Researcher

Diketahui oleh:

Dr. Zulfikar Alimuddin
Director of HAFECS Research and Publication

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu laporan bidang dalam Kajian Multiperspektif Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan Asta Cita, yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Laporan ini secara khusus disusun dari Perspektif Teknologi Rekayasa Multimedia, yang menilai inovasi daerah dari sisi hubungan antara manusia, informasi, sistem, media, dan teknologi.

Berbeda dari perspektif tata kelola administrasi publik yang mengkaji legalitas dan kelembagaan, kajian ini mengajukan pertanyaan yang lebih membumi: apakah teknologi yang dibangun benar-benar dibutuhkan, apakah mudah digunakan, apakah dapat diakses melalui telepon genggam, apakah aman, dan apakah tersedia jalur alternatif bagi warga yang belum menguasai teknologi. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi tulang punggung seluruh isi laporan.

Kajian ini mengaudit 20 inovasi teknologi secara mendalam melalui lima tahap: audit produk digital, uji pengalaman pengguna, audit aksesibilitas, audit sistem dan data, serta audit konten multimedia. Kedua puluh inovasi tersebut merupakan sampel audit dari populasi 110 inovasi daerah berbasis teknologi yang seluruhnya diprofilkan pada Subbab 2.5.

Tim penyusun menyampaikan terima kasih kepada Bapperida dan seluruh perangkat daerah pengampu inovasi atas dokumen dan data yang telah disediakan. Keterbatasan kajian ini — terutama ketiadaan akses langsung ke sistem produksi — disampaikan secara terbuka pada subbab 1.6 agar pembaca dapat menakar sendiri tingkat keyakinan atas setiap temuan yang disajikan.

Barito Kuala, 3 Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**
KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR TABEL **7**
DAFTAR GAMBAR **34**
BAB I PENDAHULUAN **38**
1.1 Latar Belakang 38
1.2 Ciri Khas Perspektif Teknologi Rekayasa Multimedia 38
1.3 Landasan Yuridis 39
1.4 Tujuan Kajian 40
1.5 Bentuk Rencana Kajian: Lima Tahap Audit 40
1.5.1 Tahap 1 — Audit Produk Digital 40
1.5.2 Tahap 2 — Uji Pengalaman Pengguna 41
1.5.3 Tahap 3 — Audit Aksesibilitas 41
1.5.4 Tahap 4 — Audit Sistem dan Data 42
1.5.5 Tahap 5 — Evaluasi Konten Multimedia 42
1.6 Metode, Data Utama, dan Keterbatasan Kajian 43
1.6.1 Dua Belas Metode Kajian 43
1.6.2 Lima Belas Bentuk Data Utama 43
1.6.3 Keterbatasan Kajian dan Tingkat Keyakinan Temuan 43
1.7 Bentuk dan Susunan Laporan 44

BAB II GAMBARAN UMUM POPULASI INOVASI TEKNOLOGI **47**
2.1 Konteks Kesiapan Digital Kabupaten HSS 47
2.2 Populasi Dua Puluh Inovasi Teknologi 48
2.3 Distribusi menurut Klaster Fungsional dan Kepemilikan 50
2.4 Klasifikasi Kontribusi terhadap Asta Cita 50

BAB III LAPORAN AUDIT PRODUK DIGITAL (BAGIAN 1–8) **883**
3.1 Bagian 1 — Digital Product Snapshot 883
3.2 Bagian 2 — User Journey 885
3.3 Bagian 3 — Hasil Usability Testing 887
3.4 Bagian 4 — Masalah Antarmuka dan Severity Rating 888
3.5 Bagian 5 — Aksesibilitas dan Inklusivitas Digital 890
3.6 Bagian 6 — Performa Sistem 892
3.7 Bagian 7 — Keamanan dan Tata Kelola Data 893
3.8 Bagian 8 — Audit Konten Multimedia 895
3.9 Rangkuman Bab III 897

BAB IV AUDIT TATA KELOLA TI COBIT 2019 900
4.1 Kerangka COBIT 2019 900
4.2 Objektif yang Dinilai dan Metodologi 901
4.3 Hasil Penilaian Dua Puluh Inovasi Sampel Audit 901
4.3.1 Analisis per Objektif 903
4.3.2 Analisis per Domain dan Kesenjangan 904
4.3.3 Pengelompokan Kondisi dan Analisis per Kategori Asta Cita 905
4.4 Kesimpulan Audit COBIT 2019 907
4.5 Penjabaran Perhitungan Langkah demi Langkah 908
4.5.1 Cara Memberi Nilai pada Satu Objektif 908
4.5.2 Menghitung Nilai Satu Inovasi 909
4.5.3 Menghitung Nilai Rata-Rata Seluruh Portofolio 909
4.5.4 Menghitung Nilai Rata-Rata Satu Objektif 909
4.5.5 Menghitung Nilai Rata-Rata Satu Domain 910
4.5.6 Menghitung Kesenjangan terhadap Target 910
4.5.7 Menghitung Nilai per Kategori Asta Cita 910
4.5.8 Menghitung Persentase dan Porsi 911

BAB V PROTOTYPE REKOMENDASI (BAGIAN 9) 913
5.1 Perbaikan Tampilan dan Identitas Visual 913
5.2 Perbaikan Navigasi dan Arsitektur Informasi 913
5.3 Penyederhanaan Formulir dan Perbaikan Pesan 913
5.4 Desain Ulang User Journey Prioritas 914
5.5 Usulan Dashboard Performa Baru 914

BAB VI ROADMAP TEKNOLOGI (BAGIAN 10) 916
6.1 Perbaikan Cepat (0–3 Bulan) 916
6.2 Pengembangan (3–12 Bulan) 916
6.3 Integrasi Jangka Menengah (1–2 Tahun) 917
6.4 Penggantian atau Penghentian Sistem 917
6.5 Prioritas Apabila Sumber Daya Terbatas 917
6.6 Model Perkembangan Masing-Masing Inovasi 918
6.6.1 Empat Tahap Model Perkembangan 918
6.6.2 Model Perkembangan Inovasi Nomor 1–10 919
6.6.3 Model Perkembangan Inovasi Nomor 11–20 920
6.6.4 Pola Perkembangan dan Simpul Integrasi 922
6.7 Model Pengembangan untuk Setiap Rekomendasi 922
6.8 Saran untuk Inovasi yang Sudah Ada 925
6.9 Saran Inovasi Baru yang Perlu Dikembangkan 926
6.9.1 Catatan Penting sebelum Membangun Aplikasi Baru 927

BAB VII KETERKAITAN KEBIJAKAN DAN PENUTUP 929
7.1 Keterkaitan dengan RPJMD 2025–2029 929
7.2 Keterkaitan dengan RPJPD 2025–2045.....929
7.3 Dampak terhadap Kesejahteraan Rakyat 929
7.4 Kesimpulan 930
7.5 Rekomendasi Utama 930

DAFTAR PUSTAKA.....932

LAMPIRAN PROFIL RINGKAS DUA PULUH INOVASI 934

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Tingkat Keyakinan Temuan 43
Tabel 1.2 Pemetaan Sepuluh Bagian Laporan terhadap Struktur Bab 43
Tabel 2.1 Indeks SPBE Kabupaten HSS Tahun 2022–2024 46
Tabel 2.2 Dua Puluh Inovasi kelompok inovasi teknologi sampel audit 47
Tabel 2.3 Distribusi Inovasi menurut Klaster Fungsional 49
Tabel 2.4 Klasifikasi dan Alasan Kontribusi Asta Cita pada Dua Puluh 50
Tabel 2.5 Rekapitulasi Kontribusi Asta Cita 51
Tabel 2.6 Identitas Inovasi SIPASKA HSS 52
Tabel 2.7 Rancang Bangun SIPASKA HSS 53
Tabel 2.8 Status Inovasi SIPASKA HSS pada IGA 2025 54
Tabel 2.9 Dasbor Indikator IID SIPASKA HSS 55
Tabel 2.10 Kontribusi SIPASKA HSS terhadap IKU 56
Tabel 2.11 Kendala dan Tantangan SIPASKA HSS 56
Tabel 2.12 ToC SIPASKA HSS 57
Tabel 2.13 Asumsi dan Risiko ToC SIPASKA HSS 58
Tabel 2.14 Rekomendasi Pengembangan SIPASKA HSS 59
Tabel 2.15 Identitas Inovasi SIDAKAT 60
Tabel 2.16 Rancang Bangun SIDAKAT 61
Tabel 2.17 Status Inovasi SIDAKAT pada IGA 2025 62
Tabel 2.18 Dasbor Indikator IID SIDAKAT 62
Tabel 2.19 Kontribusi SIDAKAT terhadap IKU 63
Tabel 2.20 Kendala dan Tantangan SIDAKAT 64
Tabel 2.21 ToC SIDAKAT 65
Tabel 2.22 Asumsi dan Risiko ToC SIDAKAT 66
Tabel 2.23 Rekomendasi Pengembangan SIDAKAT 67
Tabel 2.24 Identitas Inovasi PETASAN HSS 67
Tabel 2.25 Rancang Bangun PETASAN HSS 68
Tabel 2.26 Status Inovasi PETASAN HSS pada IGA 2025 69
Tabel 2.27 Dasbor Indikator IID PETASAN HSS 70
Tabel 2.28 Kontribusi PETASAN HSS terhadap IKU 71
Tabel 2.29 Kendala dan Tantangan PETASAN HSS 72
Tabel 2.30 ToC PETASAN HSS 73
Tabel 2.31 Asumsi dan Risiko ToC PETASAN HSS 74
Tabel 2.32 Rekomendasi Pengembangan PETASAN HSS 74
Tabel 2.33 Identitas Inovasi Kolam Kaca 75
Tabel 2.34 Rancang Bangun Kolam Kaca 76
Tabel 2.35 Status Inovasi Kolam Kaca pada IGA 2025 77
Tabel 2.36 Dasbor Indikator IID Kolam Kaca 77

Tabel 2.37 Kontribusi Kolam Kaca terhadap IKU....79
Tabel 2.38 Kendala dan Tantangan Kolam Kaca....79
Tabel 2.39 ToC Kolam Kaca....80
Tabel 2.40 Asumsi dan Risiko ToC Kolam Kaca....81
Tabel 2.41 Rekomendasi Pengembangan Kolam Kaca....82
Tabel 2.42 Identitas Inovasi GOFO AMAN TERTIB....82
Tabel 2.43 Rancang Bangun GOFO AMAN TERTIB....83
Tabel 2.44 Status Inovasi GOFO AMAN TERTIB pada IGA 2025....84
Tabel 2.45 Dasbor Indikator IID GOFO AMAN TERTIB....85
Tabel 2.46 Kontribusi GOFO AMAN TERTIB terhadap IKU....86
Tabel 2.47 Kendala dan Tantangan GOFO AMAN TERTIB....87
Tabel 2.48 ToC GOFO AMAN TERTIB....88
Tabel 2.49 Asumsi dan Risiko ToC GOFO AMAN TERTIB....89
Tabel 2.50 Rekomendasi Pengembangan GOFO AMAN TERTIB....89
Tabel 2.51 Identitas Inovasi SISKA....90
Tabel 2.52 Rancang Bangun SISKA....91
Tabel 2.53 Status Inovasi SISKA pada IGA 2025....92
Tabel 2.54 Dasbor Indikator IID SISKA....92
Tabel 2.55 Kontribusi SISKA terhadap IKU....94
Tabel 2.56 Kendala dan Tantangan SISKA....94
Tabel 2.57 ToC SISKA....95
Tabel 2.58 Asumsi dan Risiko ToC SISKA....96
Tabel 2.59 Rekomendasi Pengembangan SISKA....97
Tabel 2.60 Identitas Inovasi Si Wajaseta....97
Tabel 2.61 Rancang Bangun Si Wajaseta....99
Tabel 2.62 Status Inovasi Si Wajaseta pada IGA 2025....99
Tabel 2.63 Dasbor Indikator IID Si Wajaseta....100
Tabel 2.64 Kontribusi Si Wajaseta terhadap IKU....101
Tabel 2.65 Kendala dan Tantangan Si Wajaseta....102
Tabel 2.66 ToC Si Wajaseta....103
Tabel 2.67 Asumsi dan Risiko ToC Si Wajaseta....104
Tabel 2.68 Rekomendasi Pengembangan Si Wajaseta....104
Tabel 2.69 Identitas Inovasi Si IJAK....105
Tabel 2.70 Rancang Bangun Si IJAK....106
Tabel 2.71 Status Inovasi Si IJAK pada IGA 2025....107
Tabel 2.72 Dasbor Indikator IID Si IJAK....108
Tabel 2.73 Kontribusi Si IJAK terhadap IKU....109
Tabel 2.74 Kendala dan Tantangan Si IJAK....109
Tabel 2.75 ToC Si IJAK....111
Tabel 2.76 Asumsi dan Risiko ToC Si IJAK....111

Tabel 2.77 Rekomendasi Pengembangan Si IJAK 112
Tabel 2.78 Identitas Inovasi MAK HAJI 113
Tabel 2.79 Rancang Bangun MAK HAJI 114
Tabel 2.80 Status Inovasi MAK HAJI pada IGA 2025 115
Tabel 2.81 Dasbor Indikator IID MAK HAJI 115
Tabel 2.82 Kontribusi MAK HAJI terhadap IKU 117
Tabel 2.83 Kendala dan Tantangan MAK HAJI 117
Tabel 2.84 ToC MAK HAJI 118
Tabel 2.85 Asumsi dan Risiko ToC MAK HAJI 119
Tabel 2.86 Rekomendasi Pengembangan MAK HAJI 120
Tabel 2.87 Identitas Inovasi PESONA BUMIL CANTIK 120
Tabel 2.88 Rancang Bangun PESONA BUMIL CANTIK 122
Tabel 2.89 Status Inovasi PESONA BUMIL CANTIK pada IGA 2025 122
Tabel 2.90 Dasbor Indikator IID PESONA BUMIL CANTIK 123
Tabel 2.91 Kontribusi PESONA BUMIL CANTIK terhadap IKU 124
Tabel 2.92 Kendala dan Tantangan PESONA BUMIL CANTIK 125
Tabel 2.93 ToC PESONA BUMIL CANTIK 126
Tabel 2.94 Asumsi dan Risiko ToC PESONA BUMIL CANTIK 127
Tabel 2.95 Rekomendasi Pengembangan PESONA BUMIL CANTIK 127
Tabel 2.96 Identitas Inovasi KOSAN ONLINE 128
Tabel 2.97 Rancang Bangun KOSAN ONLINE 129
Tabel 2.98 Status Inovasi KOSAN ONLINE pada IGA 2025 130
Tabel 2.99 Dasbor Indikator IID KOSAN ONLINE 130
Tabel 2.100 Kontribusi KOSAN ONLINE terhadap IKU 131
Tabel 2.101 Kendala dan Tantangan KOSAN ONLINE 132
Tabel 2.102 ToC KOSAN ONLINE 133
Tabel 2.103 Asumsi dan Risiko ToC KOSAN ONLINE 134
Tabel 2.104 Rekomendasi Pengembangan KOSAN ONLINE 135
Tabel 2.105 Identitas Inovasi KODE SMS BU SUSI 135
Tabel 2.106 Rancang Bangun KODE SMS BU SUSI 136
Tabel 2.107 Status Inovasi KODE SMS BU SUSI pada IGA 2025 137
Tabel 2.108 Dasbor Indikator IID KODE SMS BU SUSI 138
Tabel 2.109 Kontribusi KODE SMS BU SUSI terhadap IKU 139
Tabel 2.110 Kendala dan Tantangan KODE SMS BU SUSI 139
Tabel 2.111 ToC KODE SMS BU SUSI 141
Tabel 2.112 Asumsi dan Risiko ToC KODE SMS BU SUSI 141
Tabel 2.113 Rekomendasi Pengembangan KODE SMS BU SUSI 142
Tabel 2.114 Identitas Inovasi BINGKAI 143
Tabel 2.115 Rancang Bangun BINGKAI 144
Tabel 2.116 Status Inovasi BINGKAI pada IGA 2025 145

Tabel 2.117 Dasbor Indikator IID BINGKAI 145
Tabel 2.118 Kontribusi BINGKAI terhadap IKU 146
Tabel 2.119 Kendala dan Tantangan BINGKAI 147
Tabel 2.120 ToC BINGKAI 148
Tabel 2.121 Asumsi dan Risiko ToC BINGKAI 149
Tabel 2.122 Rekomendasi Pengembangan BINGKAI 150
Tabel 2.123 Identitas Inovasi SAPA QR 150
Tabel 2.124 Rancang Bangun SAPA QR 151
Tabel 2.125 Status Inovasi SAPA QR pada IGA 2025 152
Tabel 2.126 Dasbor Indikator IID SAPA QR 153
Tabel 2.127 Kontribusi SAPA QR terhadap IKU 154
Tabel 2.128 Kendala dan Tantangan SAPA QR 154
Tabel 2.129 ToC SAPA QR 155
Tabel 2.130 Asumsi dan Risiko ToC SAPA QR 156
Tabel 2.131 Rekomendasi Pengembangan SAPA QR 157
Tabel 2.132 Identitas Inovasi Lanjung 158
Tabel 2.133 Rancang Bangun Lanjung 159
Tabel 2.134 Status Inovasi Lanjung pada IGA 2025 160
Tabel 2.135 Dasbor Indikator IID Lanjung 160
Tabel 2.136 Kontribusi Lanjung terhadap IKU 161
Tabel 2.137 Kendala dan Tantangan Lanjung 162
Tabel 2.138 ToC Lanjung 163
Tabel 2.139 Asumsi dan Risiko ToC Lanjung 164
Tabel 2.140 Rekomendasi Pengembangan Lanjung 164
Tabel 2.141 Identitas Inovasi E-Rekam Medis RSUD BHHB 165
Tabel 2.142 Rancang Bangun E-Rekam Medis RSUD BHHB 166
Tabel 2.143 Status Inovasi E-Rekam Medis RSUD BHHB pada IGA 2025 167
Tabel 2.144 Dasbor Indikator IID E-Rekam Medis RSUD BHHB 167
Tabel 2.145 Kontribusi E-Rekam Medis RSUD BHHB terhadap IKU 168
Tabel 2.146 Kendala dan Tantangan E-Rekam Medis RSUD BHHB 169
Tabel 2.147 ToC E-Rekam Medis RSUD BHHB 170
Tabel 2.148 Asumsi dan Risiko ToC E-Rekam Medis RSUD BHHB 171
Tabel 2.149 Rekomendasi Pengembangan E-Rekam Medis RSUD BHHB 172
Tabel 2.150 Identitas Inovasi SI KOMAR 172
Tabel 2.151 Rancang Bangun SI KOMAR 173
Tabel 2.152 Status Inovasi SI KOMAR pada IGA 2025 174
Tabel 2.153 Dasbor Indikator IID SI KOMAR 175
Tabel 2.154 Kontribusi SI KOMAR terhadap IKU 176
Tabel 2.155 Kendala dan Tantangan SI KOMAR 176
Tabel 2.156 ToC SI KOMAR 177

Tabel 2.157 Asumsi dan Risiko ToC SI KOMAR....178
Tabel 2.158 Rekomendasi Pengembangan SI KOMAR....179
Tabel 2.159 Identitas Inovasi SIEVAK....179
Tabel 2.160 Rancang Bangun SIEVAK....181
Tabel 2.161 Status Inovasi SIEVAK pada IGA 2025....181
Tabel 2.162 Dasbor Indikator IID SIEVAK....182
Tabel 2.163 Kontribusi SIEVAK terhadap IKU....183
Tabel 2.164 Kendala dan Tantangan SIEVAK....184
Tabel 2.165 ToC SIEVAK....185
Tabel 2.166 Asumsi dan Risiko ToC SIEVAK....186
Tabel 2.167 Rekomendasi Pengembangan SIEVAK....186
Tabel 2.168 Identitas Inovasi TAS UMBUY....187
Tabel 2.169 Rancang Bangun TAS UMBUY....188
Tabel 2.170 Status Inovasi TAS UMBUY pada IGA 2025....189
Tabel 2.171 Dasbor Indikator IID TAS UMBUY....189
Tabel 2.172 Kontribusi TAS UMBUY terhadap IKU....191
Tabel 2.173 Kendala dan Tantangan TAS UMBUY....191
Tabel 2.174 ToC TAS UMBUY....192
Tabel 2.175 Asumsi dan Risiko ToC TAS UMBUY....193
Tabel 2.176 Rekomendasi Pengembangan TAS UMBUY....194
Tabel 2.177 Identitas Inovasi JEMPOL ENJOI....194
Tabel 2.178 Rancang Bangun JEMPOL ENJOI....195
Tabel 2.179 Status Inovasi JEMPOL ENJOI pada IGA 2025....196
Tabel 2.180 Dasbor Indikator IID JEMPOL ENJOI....197
Tabel 2.181 Kontribusi JEMPOL ENJOI terhadap IKU....198
Tabel 2.182 Kendala dan Tantangan JEMPOL ENJOI....198
Tabel 2.183 ToC JEMPOL ENJOI....200
Tabel 2.184 Asumsi dan Risiko ToC JEMPOL ENJOI....200
Tabel 2.185 Rekomendasi Pengembangan JEMPOL ENJOI....201
Tabel 2.186 Identitas Inovasi SIAMPRAH....202
Tabel 2.187 Rancang Bangun SIAMPRAH....203
Tabel 2.188 Status Inovasi SIAMPRAH pada IGA 2025....204
Tabel 2.189 Dasbor Indikator IID SIAMPRAH....204
Tabel 2.190 Kontribusi SIAMPRAH terhadap IKU....205
Tabel 2.191 Kendala dan Tantangan SIAMPRAH....206
Tabel 2.192 ToC SIAMPRAH....207
Tabel 2.193 Asumsi dan Risiko ToC SIAMPRAH....208
Tabel 2.194 Rekomendasi Pengembangan SIAMPRAH....208
Tabel 2.195 Identitas Inovasi SIFARIS....209
Tabel 2.196 Rancang Bangun SIFARIS....210

Tabel 2.197 Status Inovasi SIFARIS pada IGA 2025 211
Tabel 2.198 Dasbor Indikator IID SIFARIS 211
Tabel 2.199 Kontribusi SIFARIS terhadap IKU 212
Tabel 2.200 Kendala dan Tantangan SIFARIS 213
Tabel 2.201 ToC SIFARIS 214
Tabel 2.202 Asumsi dan Risiko ToC SIFARIS 215
Tabel 2.203 Rekomendasi Pengembangan SIFARIS 216
Tabel 2.204 Identitas Inovasi SITI LAMAK 216
Tabel 2.205 Rancang Bangun SITI LAMAK 217
Tabel 2.206 Status Inovasi SITI LAMAK pada IGA 2025 218
Tabel 2.207 Dasbor Indikator IID SITI LAMAK 219
Tabel 2.208 Kontribusi SITI LAMAK terhadap IKU 220
Tabel 2.209 Kendala dan Tantangan SITI LAMAK 220
Tabel 2.210 ToC SITI LAMAK 222
Tabel 2.211 Asumsi dan Risiko ToC SITI LAMAK 222
Tabel 2.212 Rekomendasi Pengembangan SITI LAMAK 223
Tabel 2.213 Identitas Inovasi SIIMUT 224
Tabel 2.214 Rancang Bangun SIIMUT 225
Tabel 2.215 Status Inovasi SIIMUT pada IGA 2025 226
Tabel 2.216 Dasbor Indikator IID SIIMUT 226
Tabel 2.217 Kontribusi SIIMUT terhadap IKU 227
Tabel 2.218 Kendala dan Tantangan SIIMUT 228
Tabel 2.219 ToC SIIMUT 229
Tabel 2.220 Asumsi dan Risiko ToC SIIMUT 230
Tabel 2.221 Rekomendasi Pengembangan SIIMUT 231
Tabel 2.222 Identitas Inovasi e-RESEP 231
Tabel 2.223 Rancang Bangun e-RESEP 232
Tabel 2.224 Status Inovasi e-RESEP pada IGA 2025 233
Tabel 2.225 Dasbor Indikator IID e-RESEP 234
Tabel 2.226 Kontribusi e-RESEP terhadap IKU 235
Tabel 2.227 Kendala dan Tantangan e-RESEP 235
Tabel 2.228 ToC e-RESEP 237
Tabel 2.229 Asumsi dan Risiko ToC e-RESEP 237
Tabel 2.230 Rekomendasi Pengembangan e-RESEP 238
Tabel 2.231 Identitas Inovasi JEMPOL IGD 239
Tabel 2.232 Rancang Bangun JEMPOL IGD 240
Tabel 2.233 Status Inovasi JEMPOL IGD pada IGA 2025 241
Tabel 2.234 Dasbor Indikator IID JEMPOL IGD 241
Tabel 2.235 Kontribusi JEMPOL IGD terhadap IKU 242
Tabel 2.236 Kendala dan Tantangan JEMPOL IGD 243

Tabel 2.237 ToC JEMPOL IGD 244
Tabel 2.238 Asumsi dan Risiko ToC JEMPOL IGD.....245
Tabel 2.239 Rekomendasi Pengembangan JEMPOL IGD 245
Tabel 2.240 Identitas Inovasi SI LUKA CARE.....246
Tabel 2.241 Rancang Bangun SI LUKA CARE.....247
Tabel 2.242 Status Inovasi SI LUKA CARE pada IGA 2025 248
Tabel 2.243 Dasbor Indikator IID SI LUKA CARE 248
Tabel 2.244 Kontribusi SI LUKA CARE terhadap IKU 249
Tabel 2.245 Kendala dan Tantangan SI LUKA CARE 250
Tabel 2.246 ToC SI LUKA CARE 251
Tabel 2.247 Asumsi dan Risiko ToC SI LUKA CARE.....252
Tabel 2.248 Rekomendasi Pengembangan SI LUKA CARE 253
Tabel 2.249 Identitas Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai.....253
Tabel 2.250 Rancang Bangun Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan 254
Tabel 2.251 Status Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan.....255
Tabel 2.252 Dasbor Indikator IID Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai 256
Tabel 2.253 Kontribusi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan 257
Tabel 2.254 Kendala dan Tantangan Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai 258
Tabel 2.255 ToC Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan 259
Tabel 2.256 Asumsi dan Risiko ToC Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai.....259
Tabel 2.257 Rekomendasi Pengembangan Sekolah Koperasi Desa Hulu 260
Tabel 2.258 Identitas Inovasi Kelas Komputer Dasar 261
Tabel 2.259 Rancang Bangun Kelas Komputer Dasar.....262
Tabel 2.260 Status Inovasi Kelas Komputer Dasar pada IGA 2025.....263
Tabel 2.261 Dasbor Indikator IID Kelas Komputer Dasar 263
Tabel 2.262 Kontribusi Kelas Komputer Dasar terhadap IKU 264
Tabel 2.263 Kendala dan Tantangan Kelas Komputer Dasar 265
Tabel 2.264 ToC Kelas Komputer Dasar.....266
Tabel 2.265 Asumsi dan Risiko ToC Kelas Komputer Dasar 267
Tabel 2.266 Rekomendasi Pengembangan Kelas Komputer Dasar.....268
Tabel 2.267 Identitas Inovasi SI IRWAN.....268
Tabel 2.268 Rancang Bangun SI IRWAN 269
Tabel 2.269 Status Inovasi SI IRWAN pada IGA 2025 270
Tabel 2.270 Dasbor Indikator IID SI IRWAN.....271
Tabel 2.271 Kontribusi SI IRWAN terhadap IKU.....272
Tabel 2.272 Kendala dan Tantangan SI IRWAN.....273
Tabel 2.273 ToC SI IRWAN 274
Tabel 2.274 Asumsi dan Risiko ToC SI IRWAN.....275
Tabel 2.275 Rekomendasi Pengembangan SI IRWAN 275
Tabel 2.276 Identitas Inovasi SIAP 276

Tabel 2.277 Rancang Bangun SIAP....277
Tabel 2.278 Status Inovasi SIAP pada IGA 2025....278
Tabel 2.279 Dasbor Indikator IID SIAP....278
Tabel 2.280 Kontribusi SIAP terhadap IKU....280
Tabel 2.281 Kendala dan Tantangan SIAP....280
Tabel 2.282 ToC SIAP....281
Tabel 2.283 Asumsi dan Risiko ToC SIAP....282
Tabel 2.284 Rekomendasi Pengembangan SIAP....283
Tabel 2.285 Identitas Inovasi SABTU CERDAS....283
Tabel 2.286 Rancang Bangun SABTU CERDAS....284
Tabel 2.287 Status Inovasi SABTU CERDAS pada IGA 2025....285
Tabel 2.288 Dasbor Indikator IID SABTU CERDAS....286
Tabel 2.289 Kontribusi SABTU CERDAS terhadap IKU....287
Tabel 2.290 Kendala dan Tantangan SABTU CERDAS....287
Tabel 2.291 ToC SABTU CERDAS....289
Tabel 2.292 Asumsi dan Risiko ToC SABTU CERDAS....289
Tabel 2.293 Rekomendasi Pengembangan SABTU CERDAS....290
Tabel 2.294 Identitas Inovasi SiOPEN HSS....291
Tabel 2.295 Rancang Bangun SiOPEN HSS....292
Tabel 2.296 Status Inovasi SiOPEN HSS pada IGA 2025....292
Tabel 2.297 Dasbor Indikator IID SiOPEN HSS....293
Tabel 2.298 Kontribusi SiOPEN HSS terhadap IKU....294
Tabel 2.299 Kendala dan Tantangan SiOPEN HSS....295
Tabel 2.300 ToC SiOPEN HSS....296
Tabel 2.301 Asumsi dan Risiko ToC SiOPEN HSS....297
Tabel 2.302 Rekomendasi Pengembangan SiOPEN HSS....297
Tabel 2.303 Identitas Inovasi DETAK PJU+....298
Tabel 2.304 Rancang Bangun DETAK PJU+....299
Tabel 2.305 Status Inovasi DETAK PJU+ pada IGA 2025....300
Tabel 2.306 Dasbor Indikator IID DETAK PJU+....300
Tabel 2.307 Kontribusi DETAK PJU+ terhadap IKU....302
Tabel 2.308 Kendala dan Tantangan DETAK PJU+....302
Tabel 2.309 ToC DETAK PJU+....304
Tabel 2.310 Asumsi dan Risiko ToC DETAK PJU+....304
Tabel 2.311 Rekomendasi Pengembangan DETAK PJU+....305
Tabel 2.312 Identitas Inovasi Klinik UMKM....306
Tabel 2.313 Rancang Bangun Klinik UMKM....307
Tabel 2.314 Status Inovasi Klinik UMKM pada IGA 2025....308
Tabel 2.315 Dasbor Indikator IID Klinik UMKM....308
Tabel 2.316 Kontribusi Klinik UMKM terhadap IKU....310

Tabel 2.317 Kendala dan Tantangan Klinik UMKM.....310
Tabel 2.318 ToC Klinik UMKM 311
Tabel 2.319 Asumsi dan Risiko ToC Klinik UMKM.....312
Tabel 2.320 Rekomendasi Pengembangan Klinik UMKM 313
Tabel 2.321 Identitas Inovasi SADATU.....313
Tabel 2.322 Rancang Bangun SADATU.....315
Tabel 2.323 Status Inovasi SADATU pada IGA 2025 315
Tabel 2.324 Dasbor Indikator IID SADATU.....316
Tabel 2.325 Kontribusi SADATU terhadap IKU 317
Tabel 2.326 Kendala dan Tantangan SADATU 318
Tabel 2.327 ToC SADATU 319
Tabel 2.328 Asumsi dan Risiko ToC SADATU.....320
Tabel 2.329 Rekomendasi Pengembangan SADATU 320
Tabel 2.330 Identitas Inovasi SI PANDU WISATA 321
Tabel 2.331 Rancang Bangun SI PANDU WISATA 322
Tabel 2.332 Status Inovasi SI PANDU WISATA pada IGA 2025.....323
Tabel 2.333 Dasbor Indikator IID SI PANDU WISATA.....324
Tabel 2.334 Kontribusi SI PANDU WISATA terhadap IKU.....325
Tabel 2.335 Kendala dan Tantangan SI PANDU WISATA.....325
Tabel 2.336 ToC SI PANDU WISATA.....327
Tabel 2.337 Asumsi dan Risiko ToC SI PANDU WISATA 327
Tabel 2.338 Rekomendasi Pengembangan SI PANDU WISATA.....328
Tabel 2.339 Identitas Inovasi SIMBIOSIS 329
Tabel 2.340 Rancang Bangun SIMBIOSIS 330
Tabel 2.341 Status Inovasi SIMBIOSIS pada IGA 2025.....331
Tabel 2.342 Dasbor Indikator IID SIMBIOSIS 332
Tabel 2.343 Kontribusi SIMBIOSIS terhadap IKU.....333
Tabel 2.344 Kendala dan Tantangan SIMBIOSIS.....333
Tabel 2.345 ToC SIMBIOSIS.....335
Tabel 2.346 Asumsi dan Risiko ToC SIMBIOSIS 335
Tabel 2.347 Rekomendasi Pengembangan SIMBIOSIS.....336
Tabel 2.348 Identitas Inovasi SIMPAI.....337
Tabel 2.349 Rancang Bangun SIMPAI.....338
Tabel 2.350 Status Inovasi SIMPAI pada IGA 2025.....339
Tabel 2.351 Dasbor Indikator IID SIMPAI 339
Tabel 2.352 Kontribusi SIMPAI terhadap IKU 341
Tabel 2.353 Kendala dan Tantangan SIMPAI 341
Tabel 2.354 ToC SIMPAI.....342
Tabel 2.355 Asumsi dan Risiko ToC SIMPAI.....343
Tabel 2.356 Rekomendasi Pengembangan SIMPAI.....344

Tabel 2.357 Identitas Inovasi KURELA SEHATI.....344
Tabel 2.358 Rancang Bangun KURELA SEHATI.....346
Tabel 2.359 Status Inovasi KURELA SEHATI pada IGA 2025.....346
Tabel 2.360 Dasbor Indikator IID KURELA SEHATI.....347
Tabel 2.361 Kontribusi KURELA SEHATI terhadap IKU.....348
Tabel 2.362 Kendala dan Tantangan KURELA SEHATI.....349
Tabel 2.363 ToC KURELA SEHATI.....350
Tabel 2.364 Asumsi dan Risiko ToC KURELA SEHATI.....351
Tabel 2.365 Rekomendasi Pengembangan KURELA SEHATI.....351
Tabel 2.366 Identitas Inovasi SILAPIS.....352
Tabel 2.367 Rancang Bangun SILAPIS.....353
Tabel 2.368 Status Inovasi SILAPIS pada IGA 2025.....354
Tabel 2.369 Dasbor Indikator IID SILAPIS.....354
Tabel 2.370 Kontribusi SILAPIS terhadap IKU.....355
Tabel 2.371 Kendala dan Tantangan SILAPIS.....356
Tabel 2.372 ToC SILAPIS.....357
Tabel 2.373 Asumsi dan Risiko ToC SILAPIS.....358
Tabel 2.374 Rekomendasi Pengembangan SILAPIS.....359
Tabel 2.375 Identitas Inovasi PETA DASEL.....359
Tabel 2.376 Rancang Bangun PETA DASEL.....361
Tabel 2.377 Status Inovasi PETA DASEL pada IGA 2025.....361
Tabel 2.378 Dasbor Indikator IID PETA DASEL.....362
Tabel 2.379 Kontribusi PETA DASEL terhadap IKU.....363
Tabel 2.380 Kendala dan Tantangan PETA DASEL.....364
Tabel 2.381 ToC PETA DASEL.....365
Tabel 2.382 Asumsi dan Risiko ToC PETA DASEL.....365
Tabel 2.383 Rekomendasi Pengembangan PETA DASEL.....366
Tabel 2.384 Identitas Inovasi SI LOWIS.....367
Tabel 2.385 Rancang Bangun SI LOWIS.....368
Tabel 2.386 Status Inovasi SI LOWIS pada IGA 2025.....369
Tabel 2.387 Dasbor Indikator IID SI LOWIS.....369
Tabel 2.388 Kontribusi SI LOWIS terhadap IKU.....370
Tabel 2.389 Kendala dan Tantangan SI LOWIS.....371
Tabel 2.390 ToC SI LOWIS.....372
Tabel 2.391 Asumsi dan Risiko ToC SI LOWIS.....373
Tabel 2.392 Rekomendasi Pengembangan SI LOWIS.....374
Tabel 2.393 Identitas Inovasi PACARKU.....374
Tabel 2.394 Rancang Bangun PACARKU.....375
Tabel 2.395 Status Inovasi PACARKU pada IGA 2025.....376
Tabel 2.396 Dasbor Indikator IID PACARKU.....377

Tabel 2.397 Kontribusi PACARKU terhadap IKU....378
Tabel 2.398 Kendala dan Tantangan PACARKU....379
Tabel 2.399 ToC PACARKU....380
Tabel 2.400 Asumsi dan Risiko ToC PACARKU....380
Tabel 2.401 Rekomendasi Pengembangan PACARKU....381
Tabel 2.402 Identitas Inovasi GIAT UMKM GO ON....382
Tabel 2.403 Rancang Bangun GIAT UMKM GO ON....383
Tabel 2.404 Status Inovasi GIAT UMKM GO ON pada IGA 2025....384
Tabel 2.405 Dasbor Indikator IID GIAT UMKM GO ON....384
Tabel 2.406 Kontribusi GIAT UMKM GO ON terhadap IKU....386
Tabel 2.407 Kendala dan Tantangan GIAT UMKM GO ON....386
Tabel 2.408 ToC GIAT UMKM GO ON....387
Tabel 2.409 Asumsi dan Risiko ToC GIAT UMKM GO ON....388
Tabel 2.410 Rekomendasi Pengembangan GIAT UMKM GO ON....389
Tabel 2.411 Identitas Inovasi SI TIMELINE RS BHHB....389
Tabel 2.412 Rancang Bangun SI TIMELINE RS BHHB....390
Tabel 2.413 Status Inovasi SI TIMELINE RS BHHB pada IGA 2025....391
Tabel 2.414 Dasbor Indikator IID SI TIMELINE RS BHHB....392
Tabel 2.415 Kontribusi SI TIMELINE RS BHHB terhadap IKU....393
Tabel 2.416 Kendala dan Tantangan SI TIMELINE RS BHHB....393
Tabel 2.417 ToC SI TIMELINE RS BHHB....395
Tabel 2.418 Asumsi dan Risiko ToC SI TIMELINE RS BHHB....395
Tabel 2.419 Rekomendasi Pengembangan SI TIMELINE RS BHHB....396
Tabel 2.420 Identitas Inovasi SIPASUM HSS....397
Tabel 2.421 Rancang Bangun SIPASUM HSS....398
Tabel 2.422 Status Inovasi SIPASUM HSS pada IGA 2025....399
Tabel 2.423 Dasbor Indikator IID SIPASUM HSS....399
Tabel 2.424 Kontribusi SIPASUM HSS terhadap IKU....402
Tabel 2.425 Kendala dan Tantangan SIPASUM HSS....403
Tabel 2.426 ToC SIPASUM HSS....404
Tabel 2.427 Asumsi dan Risiko ToC SIPASUM HSS....405
Tabel 2.428 Rekomendasi Pengembangan SIPASUM HSS....406
Tabel 2.429 Identitas Inovasi SIMKERDA....406
Tabel 2.430 Rancang Bangun SIMKERDA....407
Tabel 2.431 Status Inovasi SIMKERDA pada IGA 2025....408
Tabel 2.432 Dasbor Indikator IID SIMKERDA....409
Tabel 2.433 Kontribusi SIMKERDA terhadap IKU....412
Tabel 2.434 Kendala dan Tantangan SIMKERDA....413
Tabel 2.435 ToC SIMKERDA....414
Tabel 2.436 Asumsi dan Risiko ToC SIMKERDA....415

Tabel 2.437 Rekomendasi Pengembangan SIMKERDA.....415
Tabel 2.438 Identitas Inovasi Si EKKa.....416
Tabel 2.439 Rancang Bangun Si EKKa.....417
Tabel 2.440 Status Inovasi Si EKKa pada IGA 2025.....418
Tabel 2.441 Dasbor Indikator IID Si EKKa.....418
Tabel 2.442 Kontribusi Si EKKa terhadap IKU.....422
Tabel 2.443 Kendala dan Tantangan Si EKKa.....422
Tabel 2.444 ToC Si EKKa.....423
Tabel 2.445 Asumsi dan Risiko ToC Si EKKa.....424
Tabel 2.446 Rekomendasi Pengembangan Si EKKa.....425
Tabel 2.447 Identitas Inovasi SIDALI.....425
Tabel 2.448 Rancang Bangun SIDALI.....427
Tabel 2.449 Status Inovasi SIDALI pada IGA 2025.....427
Tabel 2.450 Dasbor Indikator IID SIDALI.....428
Tabel 2.451 Kontribusi SIDALI terhadap IKU.....429
Tabel 2.452 Kendala dan Tantangan SIDALI.....430
Tabel 2.453 ToC SIDALI.....431
Tabel 2.454 Asumsi dan Risiko ToC SIDALI.....432
Tabel 2.455 Rekomendasi Pengembangan SIDALI.....432
Tabel 2.456 Identitas Inovasi SI HADRAH.....433
Tabel 2.457 Rancang Bangun SI HADRAH.....434
Tabel 2.458 Status Inovasi SI HADRAH pada IGA 2025.....435
Tabel 2.459 Dasbor Indikator IID SI HADRAH.....436
Tabel 2.460 Kontribusi SI HADRAH terhadap IKU.....437
Tabel 2.461 Kendala dan Tantangan SI HADRAH.....437
Tabel 2.462 ToC SI HADRAH.....438
Tabel 2.463 Asumsi dan Risiko ToC SI HADRAH.....439
Tabel 2.464 Rekomendasi Pengembangan SI HADRAH.....440
Tabel 2.465 Identitas Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala.....441
Tabel 2.466 Rancang Bangun Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala.....442
Tabel 2.467 Status Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala.....443
Tabel 2.468 Dasbor Indikator IID Media Pengamanan dan Pengawalan.....443
Tabel 2.469 Kontribusi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah.....444
Tabel 2.470 Kendala dan Tantangan Media Pengamanan dan Pengawalan.....445
Tabel 2.471 ToC Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan.....446
Tabel 2.472 Asumsi dan Risiko ToC Media Pengamanan dan Pengawalan.....447
Tabel 2.473 Rekomendasi Pengembangan Media Pengamanan dan Pengawalan
.....448
Tabel 2.474 Identitas Inovasi ePropemperda.....448
Tabel 2.475 Rancang Bangun ePropemperda.....449

Tabel 2.476 Status Inovasi ePropemperda pada IGA 2025 450
Tabel 2.477 Dasbor Indikator IID ePropemperda.....451
Tabel 2.478 Kontribusi ePropemperda terhadap IKU.....452
Tabel 2.479 Kendala dan Tantangan ePropemperda.....452
Tabel 2.480 ToC ePropemperda 454
Tabel 2.481 Asumsi dan Risiko ToC ePropemperda.....454
Tabel 2.482 Rekomendasi Pengembangan ePropemperda 455
Tabel 2.483 Identitas Inovasi ParlemenGO!.....456
Tabel 2.484 Rancang Bangun ParlemenGO!.....457
Tabel 2.485 Status Inovasi ParlemenGO! pada IGA 2025 458
Tabel 2.486 Dasbor Indikator IID ParlemenGO!.....458
Tabel 2.487 Kontribusi ParlemenGO! terhadap IKU 459
Tabel 2.488 Kendala dan Tantangan ParlemenGO! 460
Tabel 2.489 ToC ParlemenGO! 461
Tabel 2.490 Asumsi dan Risiko ToC ParlemenGO!.....462
Tabel 2.491 Rekomendasi Pengembangan ParlemenGO! 463
Tabel 2.492 Identitas Inovasi PANTING MARENA 463
Tabel 2.493 Rancang Bangun PANTING MARENA 465
Tabel 2.494 Status Inovasi PANTING MARENA pada IGA 2025 465
Tabel 2.495 Dasbor Indikator IID PANTING MARENA.....466
Tabel 2.496 Kontribusi PANTING MARENA terhadap IKU.....467
Tabel 2.497 Kendala dan Tantangan PANTING MARENA.....468
Tabel 2.498 ToC PANTING MARENA.....469
Tabel 2.499 Asumsi dan Risiko ToC PANTING MARENA 470
Tabel 2.500 Rekomendasi Pengembangan PANTING MARENA.....470
Tabel 2.501 Identitas Inovasi INOVASI SILANTING 471
Tabel 2.502 Rancang Bangun INOVASI SILANTING 472
Tabel 2.503 Status Inovasi INOVASI SILANTING pada IGA 2025.....473
Tabel 2.504 Dasbor Indikator IID INOVASI SILANTING.....474
Tabel 2.505 Kontribusi INOVASI SILANTING terhadap IKU.....475
Tabel 2.506 Kendala dan Tantangan INOVASI SILANTING.....476
Tabel 2.507 ToC INOVASI SILANTING.....477
Tabel 2.508 Asumsi dan Risiko ToC INOVASI SILANTING 478
Tabel 2.509 Rekomendasi Pengembangan INOVASI SILANTING.....478
Tabel 2.510 Identitas Inovasi SIM PKB 479
Tabel 2.511 Rancang Bangun SIM PKB 480
Tabel 2.512 Status Inovasi SIM PKB pada IGA 2025 481
Tabel 2.513 Dasbor Indikator IID SIM PKB.....481
Tabel 2.514 Kontribusi SIM PKB terhadap IKU.....483
Tabel 2.515 Kendala dan Tantangan SIM PKB.....483

Tabel 2.516 ToC SIM PKB....485
Tabel 2.517 Asumsi dan Risiko ToC SIM PKB....485
Tabel 2.518 Rekomendasi Pengembangan SIM PKB....486
Tabel 2.519 Identitas Inovasi PAPI ALIN....487
Tabel 2.520 Rancang Bangun PAPI ALIN....488
Tabel 2.521 Status Inovasi PAPI ALIN pada IGA 2025....489
Tabel 2.522 Dasbor Indikator IID PAPI ALIN....489
Tabel 2.523 Kontribusi PAPI ALIN terhadap IKU....491
Tabel 2.524 Kendala dan Tantangan PAPI ALIN....491
Tabel 2.525 ToC PAPI ALIN....493
Tabel 2.526 Asumsi dan Risiko ToC PAPI ALIN....493
Tabel 2.527 Rekomendasi Pengembangan PAPI ALIN....494
Tabel 2.528 Identitas Inovasi SITERANG PPID HSS....495
Tabel 2.529 Rancang Bangun SITERANG PPID HSS....496
Tabel 2.530 Status Inovasi SITERANG PPID HSS pada IGA 2025....497
Tabel 2.531 Dasbor Indikator IID SITERANG PPID HSS....497
Tabel 2.532 Kontribusi SITERANG PPID HSS terhadap IKU....499
Tabel 2.533 Kendala dan Tantangan SITERANG PPID HSS....499
Tabel 2.534 ToC SITERANG PPID HSS....501
Tabel 2.535 Asumsi dan Risiko ToC SITERANG PPID HSS....501
Tabel 2.536 Rekomendasi Pengembangan SITERANG PPID HSS....502
Tabel 2.537 Identitas Inovasi MPP One Stop Smart Service....503
Tabel 2.538 Rancang Bangun MPP One Stop Smart Service....504
Tabel 2.539 Status Inovasi MPP One Stop Smart Service pada IGA 2025....505
Tabel 2.540 Dasbor Indikator IID MPP One Stop Smart Service....505
Tabel 2.541 Kontribusi MPP One Stop Smart Service terhadap IKU....507
Tabel 2.542 Kendala dan Tantangan MPP One Stop Smart Service....507
Tabel 2.543 ToC MPP One Stop Smart Service....508
Tabel 2.544 Asumsi dan Risiko ToC MPP One Stop Smart Service....509
Tabel 2.545 Rekomendasi Pengembangan MPP One Stop Smart Service....510
Tabel 2.546 Identitas Inovasi KLINIK ARSIP....511
Tabel 2.547 Rancang Bangun KLINIK ARSIP....512
Tabel 2.548 Status Inovasi KLINIK ARSIP pada IGA 2025....513
Tabel 2.549 Dasbor Indikator IID KLINIK ARSIP....513
Tabel 2.550 Kontribusi KLINIK ARSIP terhadap IKU....514
Tabel 2.551 Kendala dan Tantangan KLINIK ARSIP....515
Tabel 2.552 ToC KLINIK ARSIP....516
Tabel 2.553 Asumsi dan Risiko ToC KLINIK ARSIP....517
Tabel 2.554 Rekomendasi Pengembangan KLINIK ARSIP....517
Tabel 2.555 Identitas Inovasi SIMFONI ARSIP....518

Tabel 2.556 Rancang Bangun SIMFONI ARSIP 519
Tabel 2.557 Status Inovasi SIMFONI ARSIP pada IGA 2025.....520
Tabel 2.558 Dasbor Indikator IID SIMFONI ARSIP 520
Tabel 2.559 Kontribusi SIMFONI ARSIP terhadap IKU.....521
Tabel 2.560 Kendala dan Tantangan SIMFONI ARSIP.....522
Tabel 2.561 ToC SIMFONI ARSIP.....523
Tabel 2.562 Asumsi dan Risiko ToC SIMFONI ARSIP 524
Tabel 2.563 Rekomendasi Pengembangan SIMFONI ARSIP.....525
Tabel 2.564 Identitas Inovasi JAGOAN ARSIP.....525
Tabel 2.565 Rancang Bangun JAGOAN ARSIP.....526
Tabel 2.566 Status Inovasi JAGOAN ARSIP pada IGA 2025 527
Tabel 2.567 Dasbor Indikator IID JAGOAN ARSIP 528
Tabel 2.568 Kontribusi JAGOAN ARSIP terhadap IKU 529
Tabel 2.569 Kendala dan Tantangan JAGOAN ARSIP 529
Tabel 2.570 ToC JAGOAN ARSIP 530
Tabel 2.571 Asumsi dan Risiko ToC JAGOAN ARSIP.....531
Tabel 2.572 Rekomendasi Pengembangan JAGOAN ARSIP 532
Tabel 2.573 Identitas Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT 532
Tabel 2.574 Rancang Bangun AKSI SEKOLAH LITERAT.....534
Tabel 2.575 Status Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT pada IGA 2025.....534
Tabel 2.576 Dasbor Indikator IID AKSI SEKOLAH LITERAT 535
Tabel 2.577 Kontribusi AKSI SEKOLAH LITERAT terhadap IKU 536
Tabel 2.578 Kendala dan Tantangan AKSI SEKOLAH LITERAT.....537
Tabel 2.579 ToC AKSI SEKOLAH LITERAT.....538
Tabel 2.580 Asumsi dan Risiko ToC AKSI SEKOLAH LITERAT 539
Tabel 2.581 Rekomendasi Pengembangan AKSI SEKOLAH LITERAT.....539
Tabel 2.582 Identitas Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA.....540
Tabel 2.583 Rancang Bangun SINERGI AKSI PUSTAKA.....541
Tabel 2.584 Status Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA pada IGA 2025.....542
Tabel 2.585 Dasbor Indikator IID SINERGI AKSI PUSTAKA 542
Tabel 2.586 Kontribusi SINERGI AKSI PUSTAKA terhadap IKU 544
Tabel 2.587 Kendala dan Tantangan SINERGI AKSI PUSTAKA 544
Tabel 2.588 ToC SINERGI AKSI PUSTAKA.....545
Tabel 2.589 Asumsi dan Risiko ToC SINERGI AKSI PUSTAKA.....546
Tabel 2.590 Rekomendasi Pengembangan SINERGI AKSI PUSTAKA.....547
Tabel 2.591 Identitas Inovasi LIWAR HSS.....547
Tabel 2.592 Rancang Bangun LIWAR HSS.....548
Tabel 2.593 Status Inovasi LIWAR HSS pada IGA 2025 549
Tabel 2.594 Dasbor Indikator IID LIWAR HSS 550
Tabel 2.595 Kontribusi LIWAR HSS terhadap IKU 551

Tabel 2.596 Kendala dan Tantangan LIWAR HSS 551
Tabel 2.597 ToC LIWAR HSS 553
Tabel 2.598 Asumsi dan Risiko ToC LIWAR HSS.....553
Tabel 2.599 Rekomendasi Pengembangan LIWAR HSS 554
Tabel 2.600 Identitas Inovasi E-SAKIP.....555
Tabel 2.601 Rancang Bangun E-SAKIP.....556
Tabel 2.602 Status Inovasi E-SAKIP pada IGA 2025 557
Tabel 2.603 Dasbor Indikator IID E-SAKIP 557
Tabel 2.604 Kontribusi E-SAKIP terhadap IKU 558
Tabel 2.605 Kendala dan Tantangan E-SAKIP 559
Tabel 2.606 ToC E-SAKIP 560
Tabel 2.607 Asumsi dan Risiko ToC E-SAKIP.....561
Tabel 2.608 Rekomendasi Pengembangan E-SAKIP 562
Tabel 2.609 Identitas Inovasi SENADA+.....562
Tabel 2.610 Rancang Bangun SENADA+.....564
Tabel 2.611 Status Inovasi SENADA+ pada IGA 2025 564
Tabel 2.612 Dasbor Indikator IID SENADA+ 565
Tabel 2.613 Kontribusi SENADA+ terhadap IKU 566
Tabel 2.614 Kendala dan Tantangan SENADA+ 567
Tabel 2.615 ToC SENADA+ 568
Tabel 2.616 Asumsi dan Risiko ToC SENADA+.....569
Tabel 2.617 Rekomendasi Pengembangan SENADA+.....569
Tabel 2.618 Identitas Inovasi SI KETUPAD.....570
Tabel 2.619 Rancang Bangun SI KETUPAD.....571
Tabel 2.620 Status Inovasi SI KETUPAD pada IGA 2025 572
Tabel 2.621 Dasbor Indikator IID SI KETUPAD.....572
Tabel 2.622 Kontribusi SI KETUPAD terhadap IKU 574
Tabel 2.623 Kendala dan Tantangan SI KETUPAD 574
Tabel 2.624 ToC SI KETUPAD 576
Tabel 2.625 Asumsi dan Risiko ToC SI KETUPAD.....576
Tabel 2.626 Rekomendasi Pengembangan SI KETUPAD 577
Tabel 2.627 Identitas Inovasi SIP-CORPU HSS 578
Tabel 2.628 Rancang Bangun SIP-CORPU HSS 579
Tabel 2.629 Status Inovasi SIP-CORPU HSS pada IGA 2025.....580
Tabel 2.630 Dasbor Indikator IID SIP-CORPU HSS 580
Tabel 2.631 Kontribusi SIP-CORPU HSS terhadap IKU.....581
Tabel 2.632 Kendala dan Tantangan SIP-CORPU HSS.....582
Tabel 2.633 ToC SIP-CORPU HSS.....583
Tabel 2.634 Asumsi dan Risiko ToC SIP-CORPU HSS 584
Tabel 2.635 Rekomendasi Pengembangan SIP-CORPU HSS.....584

Tabel 2.636 Identitas Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang 585
Tabel 2.637 Rancang Bangun SI JULAKK SANI Kec. Angkinang.....586
Tabel 2.638 Status Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang pada IGA 2025 587
Tabel 2.639 Dasbor Indikator IID SI JULAKK SANI Kec. Angkinang 588
Tabel 2.640 Kontribusi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang terhadap IKU 589
Tabel 2.641 Kendala dan Tantangan SI JULAKK SANI Kec. Angkinang 589
Tabel 2.642 ToC SI JULAKK SANI Kec. Angkinang.....591
Tabel 2.643 Asumsi dan Risiko ToC SI JULAKK SANI Kec. Angkinang 591
Tabel 2.644 Rekomendasi Pengembangan SI JULAKK SANI Kec. Angkinang 592
Tabel 2.645 Identitas Inovasi SIAP KADARAT.....593
Tabel 2.646 Rancang Bangun SIAP KADARAT.....594
Tabel 2.647 Status Inovasi SIAP KADARAT pada IGA 2025 595
Tabel 2.648 Dasbor Indikator IID SIAP KADARAT.....595
Tabel 2.649 Kontribusi SIAP KADARAT terhadap IKU 596
Tabel 2.650 Kendala dan Tantangan SIAP KADARAT 597
Tabel 2.651 ToC SIAP KADARAT 598
Tabel 2.652 Asumsi dan Risiko ToC SIAP KADARAT.....599
Tabel 2.653 Rekomendasi Pengembangan SIAP KADARAT 599
Tabel 2.654 Identitas Inovasi SEWARGA DASEL 600
Tabel 2.655 Rancang Bangun SEWARGA DASEL.....601
Tabel 2.656 Status Inovasi SEWARGA DASEL pada IGA 2025.....602
Tabel 2.657 Dasbor Indikator IID SEWARGA DASEL 602
Tabel 2.658 Kontribusi SEWARGA DASEL terhadap IKU 603
Tabel 2.659 Kendala dan Tantangan SEWARGA DASEL.....604
Tabel 2.660 ToC SEWARGA DASEL.....605
Tabel 2.661 Asumsi dan Risiko ToC SEWARGA DASEL 606
Tabel 2.662 Rekomendasi Pengembangan SEWARGA DASEL.....607
Tabel 2.663 Identitas Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN.....607
Tabel 2.664 Rancang Bangun OPTIMALISASI PELAYANAN.....609
Tabel 2.665 Status Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN.....609
Tabel 2.666 Dasbor Indikator IID OPTIMALISASI PELAYANAN.....610
Tabel 2.667 Kontribusi OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU.....611
Tabel 2.668 Kendala dan Tantangan OPTIMALISASI PELAYANAN 612
Tabel 2.669 ToC OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU.....613
Tabel 2.670 Asumsi dan Risiko ToC OPTIMALISASI PELAYANAN.....614
Tabel 2.671 Rekomendasi Pengembangan OPTIMALISASI PELAYANAN 614
Tabel 2.672 Identitas Inovasi SIPADI 615
Tabel 2.673 Rancang Bangun SIPADI 616
Tabel 2.674 Status Inovasi SIPADI pada IGA 2025 617

Tabel 2.675 Dasbor Indikator IID SIPADI 618
Tabel 2.676 Kontribusi SIPADI terhadap IKU 619
Tabel 2.677 Kendala dan Tantangan SIPADI 619
Tabel 2.678 ToC SIPADI 621
Tabel 2.679 Asumsi dan Risiko ToC SIPADI 621
Tabel 2.680 Rekomendasi Pengembangan SIPADI 622
Tabel 2.681 Identitas Inovasi SI UTARA 623
Tabel 2.682 Rancang Bangun SI UTARA 624
Tabel 2.683 Status Inovasi SI UTARA pada IGA 2025 624
Tabel 2.684 Dasbor Indikator IID SI UTARA 625
Tabel 2.685 Kontribusi SI UTARA terhadap IKU 626
Tabel 2.686 Kendala dan Tantangan SI UTARA 627
Tabel 2.687 ToC SI UTARA 628
Tabel 2.688 Asumsi dan Risiko ToC SI UTARA 629
Tabel 2.689 Rekomendasi Pengembangan SI UTARA 629
Tabel 2.690 Identitas Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan 630
Tabel 2.691 Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi 631
Tabel 2.692 Status Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi 632
Tabel 2.693 Dasbor Indikator IID Sistem Informasi Pengelolaan 632
Tabel 2.694 Kontribusi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan 634
Tabel 2.695 Kendala dan Tantangan Sistem Informasi Pengelolaan 634
Tabel 2.696 ToC Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi 635
Tabel 2.697 Asumsi dan Risiko ToC Sistem Informasi Pengelolaan 636
Tabel 2.698 Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan 637
Tabel 2.699 Identitas Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 637
Tabel 2.700 Rancang Bangun SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 639
Tabel 2.701 Status Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 639
Tabel 2.702 Dasbor Indikator IID SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA 640
Tabel 2.703 Kontribusi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 641
Tabel 2.704 Kendala dan Tantangan SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA 642
Tabel 2.705 ToC SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 643
Tabel 2.706 Asumsi dan Risiko ToC SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA 644
Tabel 2.707 Rekomendasi Pengembangan SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA 644

Tabel 2.708 Identitas Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 645
Tabel 2.709 Rancang Bangun Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis 646
Tabel 2.710 Status Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis 647
Tabel 2.711 Dasbor Indikator IID Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 647
Tabel 2.712 Kontribusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis.....648
Tabel 2.713 Kendala dan Tantangan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.....649
Tabel 2.714 ToC Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital.....650
Tabel 2.715 Asumsi dan Risiko ToC Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 651
Tabel 2.716 Rekomendasi Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat652
Tabel 2.717 Identitas Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 652
Tabel 2.718 Rancang Bangun SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL653
Tabel 2.719 Status Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL pada IGA.....654
Tabel 2.720 Dasbor Indikator IID SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 655
Tabel 2.721 Kontribusi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL terhadap IKU.....656
Tabel 2.722 Kendala dan Tantangan SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 656
Tabel 2.723 ToC SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL.....657
Tabel 2.724 Asumsi dan Risiko ToC SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 658
Tabel 2.725 Rekomendasi Pengembangan SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 659
Tabel 2.726 Identitas Inovasi REKAN SI MAMET.....659
Tabel 2.727 Rancang Bangun REKAN SI MAMET 661
Tabel 2.728 Status Inovasi REKAN SI MAMET pada IGA 2025 661
Tabel 2.729 Dasbor Indikator IID REKAN SI MAMET.....662
Tabel 2.730 Kontribusi REKAN SI MAMET terhadap IKU 663
Tabel 2.731 Kendala dan Tantangan REKAN SI MAMET 664
Tabel 2.732 ToC REKAN SI MAMET 665
Tabel 2.733 Asumsi dan Risiko ToC REKAN SI MAMET.....666
Tabel 2.734 Rekomendasi Pengembangan REKAN SI MAMET 666
Tabel 2.735 Identitas Inovasi SISTER.....667
Tabel 2.736 Rancang Bangun SISTER.....668
Tabel 2.737 Status Inovasi SISTER pada IGA 2025 669
Tabel 2.738 Dasbor Indikator IID SISTER 669
Tabel 2.739 Kontribusi SISTER terhadap IKU 671
Tabel 2.740 Kendala dan Tantangan SISTER 671
Tabel 2.741 ToC SISTER 672
Tabel 2.742 Asumsi dan Risiko ToC SISTER.....673

Tabel 2.743 Rekomendasi Pengembangan SISTER 674
Tabel 2.744 Identitas Inovasi KASI AMBIL 674
Tabel 2.745 Rancang Bangun KASI AMBIL 675
Tabel 2.746 Status Inovasi KASI AMBIL pada IGA 2025 676
Tabel 2.747 Dasbor Indikator IID KASI AMBIL 677
Tabel 2.748 Kontribusi KASI AMBIL terhadap IKU 678
Tabel 2.749 Kendala dan Tantangan KASI AMBIL 679
Tabel 2.750 ToC KASI AMBIL 680
Tabel 2.751 Asumsi dan Risiko ToC KASI AMBIL 680
Tabel 2.752 Rekomendasi Pengembangan KASI AMBIL 681
Tabel 2.753 Identitas Inovasi AKSI MONALISA 682
Tabel 2.754 Rancang Bangun AKSI MONALISA 683
Tabel 2.755 Status Inovasi AKSI MONALISA pada IGA 2025 684
Tabel 2.756 Dasbor Indikator IID AKSI MONALISA 684
Tabel 2.757 Kontribusi AKSI MONALISA terhadap IKU 686
Tabel 2.758 Kendala dan Tantangan AKSI MONALISA 686
Tabel 2.759 ToC AKSI MONALISA 687
Tabel 2.760 Asumsi dan Risiko ToC AKSI MONALISA 688
Tabel 2.761 Rekomendasi Pengembangan AKSI MONALISA 689
Tabel 2.762 Identitas Inovasi SI TAMU SIMPUR 689
Tabel 2.763 Rancang Bangun SI TAMU SIMPUR 691
Tabel 2.764 Status Inovasi SI TAMU SIMPUR pada IGA 2025 691
Tabel 2.765 Dasbor Indikator IID SI TAMU SIMPUR 692
Tabel 2.766 Kontribusi SI TAMU SIMPUR terhadap IKU 693
Tabel 2.767 Kendala dan Tantangan SI TAMU SIMPUR 694
Tabel 2.768 ToC SI TAMU SIMPUR 695
Tabel 2.769 Asumsi dan Risiko ToC SI TAMU SIMPUR 695
Tabel 2.770 Rekomendasi Pengembangan SI TAMU SIMPUR 696
Tabel 2.771 Identitas Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN 697
Tabel 2.772 Rancang Bangun SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN 698
Tabel 2.773 Status Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN 699
Tabel 2.774 Dasbor Indikator IID SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN 699
Tabel 2.775 Kontribusi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ...701
Tabel 2.776 Kendala dan Tantangan SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK ...701
Tabel 2.777 ToC SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI 702
Tabel 2.778 Asumsi dan Risiko ToC SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK ..703

Tabel 2.779 Rekomendasi Pengembangan SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK 704
Tabel 2.780 Identitas Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan 704
Tabel 2.781 Rancang Bangun Sistem Informasi Data Kecamatan 706
Tabel 2.782 Status Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan pada IGA 706
Tabel 2.783 Dasbor Indikator IID Sistem Informasi Data Kecamatan.....707
Tabel 2.784 Kontribusi Sistem Informasi Data Kecamatan terhadap IKU.....708
Tabel 2.785 Kendala dan Tantangan Sistem Informasi Data Kecamatan.....709
Tabel 2.786 ToC Sistem Informasi Data Kecamatan.....710
Tabel 2.787 Asumsi dan Risiko ToC Sistem Informasi Data Kecamatan 711
Tabel 2.788 Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Data Kecamatan ..711
Tabel 2.789 Identitas Inovasi SIMKuDa 712
Tabel 2.790 Rancang Bangun SIMKuDa.....713
Tabel 2.791 Status Inovasi SIMKuDa pada IGA 2025.....714
Tabel 2.792 Dasbor Indikator IID SIMKuDa 714
Tabel 2.793 Kontribusi SIMKuDa terhadap IKU 715
Tabel 2.794 Kendala dan Tantangan SIMKuDa 716
Tabel 2.795 ToC SIMKuDa.....717
Tabel 2.796 Asumsi dan Risiko ToC SIMKuDa 718
Tabel 2.797 Rekomendasi Pengembangan SIMKuDa.....719
Tabel 2.798 Identitas Inovasi SiSuKa PD.....719
Tabel 2.799 Rancang Bangun SiSuKa PD.....720
Tabel 2.800 Status Inovasi SiSuKa PD pada IGA 2025 721
Tabel 2.801 Dasbor Indikator IID SiSuKa PD.....722
Tabel 2.802 Kontribusi SiSuKa PD terhadap IKU 723
Tabel 2.803 Kendala dan Tantangan SiSuKa PD 723
Tabel 2.804 ToC SiSuKa PD 725
Tabel 2.805 Asumsi dan Risiko ToC SiSuKa PD.....725
Tabel 2.806 Rekomendasi Pengembangan SiSuKa PD 726
Tabel 2.807 Identitas Inovasi ADEK PUAS MAS 727
Tabel 2.808 Rancang Bangun ADEK PUAS MAS 728
Tabel 2.809 Status Inovasi ADEK PUAS MAS pada IGA 2025 728
Tabel 2.810 Dasbor Indikator IID ADEK PUAS MAS.....729
Tabel 2.811 Kontribusi ADEK PUAS MAS terhadap IKU.....730
Tabel 2.812 Kendala dan Tantangan ADEK PUAS MAS.....731
Tabel 2.813 ToC ADEK PUAS MAS 732
Tabel 2.814 Asumsi dan Risiko ToC ADEK PUAS MAS 733
Tabel 2.815 Rekomendasi Pengembangan ADEK PUAS MAS 733
Tabel 2.816 Identitas Inovasi SI PETENISKU.....734
Tabel 2.817 Rancang Bangun SI PETENISKU.....735

Tabel 2.818 Status Inovasi SI PETENISKU pada IGA 2025 736
Tabel 2.819 Dasbor Indikator IID SI PETENISKU 736
Tabel 2.820 Kontribusi SI PETENISKU terhadap IKU 737
Tabel 2.821 Kendala dan Tantangan SI PETENISKU 738
Tabel 2.822 ToC SI PETENISKU 739
Tabel 2.823 Asumsi dan Risiko ToC SI PETENISKU.....740
Tabel 2.824 Rekomendasi Pengembangan SI PETENISKU 741
Tabel 2.825 Identitas Inovasi ISMA BADASTARKU.....741
Tabel 2.826 Rancang Bangun ISMA BADASTARKU.....742
Tabel 2.827 Status Inovasi ISMA BADASTARKU pada IGA 2025 743
Tabel 2.828 Dasbor Indikator IID ISMA BADASTARKU 744
Tabel 2.829 Kontribusi ISMA BADASTARKU terhadap IKU 745
Tabel 2.830 Kendala dan Tantangan ISMA BADASTARKU 745
Tabel 2.831 ToC ISMA BADASTARKU 747
Tabel 2.832 Asumsi dan Risiko ToC ISMA BADASTARKU.....747
Tabel 2.833 Rekomendasi Pengembangan ISMA BADASTARKU 748
Tabel 2.834 Identitas Inovasi SI-PIKAT 749
Tabel 2.835 Rancang Bangun SI-PIKAT.....750
Tabel 2.836 Status Inovasi SI-PIKAT pada IGA 2025.....751
Tabel 2.837 Dasbor Indikator IID SI-PIKAT 751
Tabel 2.838 Kontribusi SI-PIKAT terhadap IKU 753
Tabel 2.839 Kendala dan Tantangan SI-PIKAT 753
Tabel 2.840 ToC SI-PIKAT.....754
Tabel 2.841 Asumsi dan Risiko ToC SI-PIKAT 755
Tabel 2.842 Rekomendasi Pengembangan SI-PIKAT.....756
Tabel 2.843 Identitas Inovasi Peduli Umpeg 756
Tabel 2.844 Rancang Bangun Peduli Umpeg 757
Tabel 2.845 Status Inovasi Peduli Umpeg pada IGA 2025 758
Tabel 2.846 Dasbor Indikator IID Peduli Umpeg.....759
Tabel 2.847 Kontribusi Peduli Umpeg terhadap IKU.....760
Tabel 2.848 Kendala dan Tantangan Peduli Umpeg.....760
Tabel 2.849 ToC Peduli Umpeg 762
Tabel 2.850 Asumsi dan Risiko ToC Peduli Umpeg 762
Tabel 2.851 Rekomendasi Pengembangan Peduli Umpeg 763
Tabel 2.852 Identitas Inovasi SI IDAH PEDALAMAN 764
Tabel 2.853 Rancang Bangun SI IDAH PEDALAMAN 765
Tabel 2.854 Status Inovasi SI IDAH PEDALAMAN pada IGA 2025.....766
Tabel 2.855 Dasbor Indikator IID SI IDAH PEDALAMAN 766
Tabel 2.856 Kontribusi SI IDAH PEDALAMAN terhadap IKU 767
Tabel 2.857 Kendala dan Tantangan SI IDAH PEDALAMAN 768

Tabel 2.858 ToC SI IDAH PEDALAMAN....769
Tabel 2.859 Asumsi dan Risiko ToC SI IDAH PEDALAMAN....770
Tabel 2.860 Rekomendasi Pengembangan SI IDAH PEDALAMAN....770
Tabel 2.861 Identitas Inovasi e-RKBMD....771
Tabel 2.862 Rancang Bangun e-RKBMD....772
Tabel 2.863 Status Inovasi e-RKBMD pada IGA 2025....773
Tabel 2.864 Dasbor Indikator IID e-RKBMD....773
Tabel 2.865 Kontribusi e-RKBMD terhadap IKU....774
Tabel 2.866 Kendala dan Tantangan e-RKBMD....775
Tabel 2.867 ToC e-RKBMD....776
Tabel 2.868 Asumsi dan Risiko ToC e-RKBMD....777
Tabel 2.869 Rekomendasi Pengembangan e-RKBMD....777
Tabel 2.870 Identitas Inovasi Aksi IPSRS....778
Tabel 2.871 Rancang Bangun Aksi IPSRS....779
Tabel 2.872 Status Inovasi Aksi IPSRS pada IGA 2025....780
Tabel 2.873 Dasbor Indikator IID Aksi IPSRS....781
Tabel 2.874 Kontribusi Aksi IPSRS terhadap IKU....782
Tabel 2.875 Kendala dan Tantangan Aksi IPSRS....782
Tabel 2.876 ToC Aksi IPSRS....783
Tabel 2.877 Asumsi dan Risiko ToC Aksi IPSRS....784
Tabel 2.878 Rekomendasi Pengembangan Aksi IPSRS....785
Tabel 2.879 Identitas Inovasi Isma Badastar....786
Tabel 2.880 Rancang Bangun Isma Badastar....787
Tabel 2.881 Status Inovasi Isma Badastar pada IGA 2025....787
Tabel 2.882 Dasbor Indikator IID Isma Badastar....788
Tabel 2.883 Kontribusi Isma Badastar terhadap IKU....789
Tabel 2.884 Kendala dan Tantangan Isma Badastar....790
Tabel 2.885 ToC Isma Badastar....791
Tabel 2.886 Asumsi dan Risiko ToC Isma Badastar....792
Tabel 2.887 Rekomendasi Pengembangan Isma Badastar....792
Tabel 2.888 Identitas Inovasi SIEVAK....793
Tabel 2.889 Rancang Bangun SIEVAK....794
Tabel 2.890 Status Inovasi SIEVAK pada IGA 2025....795
Tabel 2.891 Dasbor Indikator IID SIEVAK....795
Tabel 2.892 Kontribusi SIEVAK terhadap IKU....796
Tabel 2.893 Kendala dan Tantangan SIEVAK....797
Tabel 2.894 ToC SIEVAK....798
Tabel 2.895 Asumsi dan Risiko ToC SIEVAK....799
Tabel 2.896 Rekomendasi Pengembangan SIEVAK....799
Tabel 2.897 Identitas Inovasi ES-KREM HASAN BASRY....800

Tabel 2.898 Rancang Bangun ES-KREM HASAN BASRY 801
Tabel 2.899 Status Inovasi ES-KREM HASAN BASRY pada IGA 2025.....802
Tabel 2.900 Dasbor Indikator IID ES-KREM HASAN BASRY 803
Tabel 2.901 Kontribusi ES-KREM HASAN BASRY terhadap IKU.....804
Tabel 2.902 Kendala dan Tantangan ES-KREM HASAN BASRY.....804
Tabel 2.903 ToC ES-KREM HASAN BASRY.....805
Tabel 2.904 Asumsi dan Risiko ToC ES-KREM HASAN BASRY 806
Tabel 2.905 Rekomendasi Pengembangan ES-KREM HASAN BASRY.....807
Tabel 2.906 Identitas Inovasi SIPETI.....807
Tabel 2.907 Rancang Bangun SIPETI 809
Tabel 2.908 Status Inovasi SIPETI pada IGA 2025 809
Tabel 2.909 Dasbor Indikator IID SIPETI.....810
Tabel 2.910 Kontribusi SIPETI terhadap IKU.....811
Tabel 2.911 Kendala dan Tantangan SIPETI.....812
Tabel 2.912 ToC SIPETI 813
Tabel 2.913 Asumsi dan Risiko ToC SIPETI.....813
Tabel 2.914 Rekomendasi Pengembangan SIPETI 814
Tabel 2.915 Identitas Inovasi BERANAK.....815
Tabel 2.916 Rancang Bangun BERANAK.....816
Tabel 2.917 Status Inovasi BERANAK pada IGA 2025 817
Tabel 2.918 Dasbor Indikator IID BERANAK 817
Tabel 2.919 Kontribusi BERANAK terhadap IKU 819
Tabel 2.920 Kendala dan Tantangan BERANAK 819
Tabel 2.921 ToC BERANAK 820
Tabel 2.922 Asumsi dan Risiko ToC BERANAK.....821
Tabel 2.923 Rekomendasi Pengembangan BERANAK 822
Tabel 2.924 Identitas Inovasi E-Skakmat 822
Tabel 2.925 Rancang Bangun E-Skakmat 823
Tabel 2.926 Status Inovasi E-Skakmat pada IGA 2025.....824
Tabel 2.927 Dasbor Indikator IID E-Skakmat 825
Tabel 2.928 Kontribusi E-Skakmat terhadap IKU.....826
Tabel 2.929 Kendala dan Tantangan E-Skakmat.....826
Tabel 2.930 ToC E-Skakmat.....828
Tabel 2.931 Asumsi dan Risiko ToC E-Skakmat 828
Tabel 2.932 Rekomendasi Pengembangan E-Skakmat.....829
Tabel 2.933 Identitas Inovasi SOPIA.....830
Tabel 2.934 Rancang Bangun SOPIA.....831
Tabel 2.935 Status Inovasi SOPIA pada IGA 2025.....832
Tabel 2.936 Dasbor Indikator IID SOPIA 832
Tabel 2.937 Kontribusi SOPIA terhadap IKU 833

Tabel 2.938 Kendala dan Tantangan SOPIA 834
Tabel 2.939 ToC SOPIA 835
Tabel 2.940 Asumsi dan Risiko ToC SOPIA 836
Tabel 2.941 Rekomendasi Pengembangan SOPIA 836
Tabel 2.942 Identitas Inovasi ROKET 837
Tabel 2.943 Rancang Bangun ROKET 838
Tabel 2.944 Status Inovasi ROKET pada IGA 2025 839
Tabel 2.945 Dasbor Indikator IID ROKET 839
Tabel 2.946 Kontribusi ROKET terhadap IKU 841
Tabel 2.947 Kendala dan Tantangan ROKET 841
Tabel 2.948 ToC ROKET 842
Tabel 2.949 Asumsi dan Risiko ToC ROKET 843
Tabel 2.950 Rekomendasi Pengembangan ROKET 844
Tabel 2.951 Identitas Inovasi SIBUNGA 844
Tabel 2.952 Rancang Bangun SIBUNGA 845
Tabel 2.953 Status Inovasi SIBUNGA pada IGA 2025 846
Tabel 2.954 Dasbor Indikator IID SIBUNGA 847
Tabel 2.955 Kontribusi SIBUNGA terhadap IKU 848
Tabel 2.956 Kendala dan Tantangan SIBUNGA 848
Tabel 2.957 ToC SIBUNGA 850
Tabel 2.958 Asumsi dan Risiko ToC SIBUNGA 850
Tabel 2.959 Rekomendasi Pengembangan SIBUNGA 851
Tabel 2.960 Identitas Inovasi ANNOR 852
Tabel 2.961 Rancang Bangun ANNOR 853
Tabel 2.962 Status Inovasi ANNOR pada IGA 2025 854
Tabel 2.963 Dasbor Indikator IID ANNOR 854
Tabel 2.964 Kontribusi ANNOR terhadap IKU 855
Tabel 2.965 Kendala dan Tantangan ANNOR 856
Tabel 2.966 ToC ANNOR 857
Tabel 2.967 Asumsi dan Risiko ToC ANNOR 858
Tabel 2.968 Rekomendasi Pengembangan ANNOR 858
Tabel 2.969 Identitas Inovasi SILAKSA 859
Tabel 2.970 Rancang Bangun SILAKSA 860
Tabel 2.971 Status Inovasi SILAKSA pada IGA 2025 861
Tabel 2.972 Dasbor Indikator IID SILAKSA 861
Tabel 2.973 Kontribusi SILAKSA terhadap IKU 862
Tabel 2.974 Kendala dan Tantangan SILAKSA 863
Tabel 2.975 ToC SILAKSA 864
Tabel 2.976 Asumsi dan Risiko ToC SILAKSA 865
Tabel 2.977 Rekomendasi Pengembangan SILAKSA 865

Tabel 2.978 Identitas Inovasi SAPA QR 866
Tabel 2.979 Rancang Bangun SAPA QR 867
Tabel 2.980 Status Inovasi SAPA QR pada IGA 2025.....868
Tabel 2.981 Dasbor Indikator IID SAPA QR 869
Tabel 2.982 Kontribusi SAPA QR terhadap IKU.....870
Tabel 2.983 Kendala dan Tantangan SAPA QR.....870
Tabel 2.984 ToC SAPA QR.....871
Tabel 2.985 Asumsi dan Risiko ToC SAPA QR 872
Tabel 2.986 Rekomendasi Pengembangan SAPA QR.....873
Tabel 2.987 Identitas Inovasi BUKU TAMU DIGITAL.....874
Tabel 2.988 Rancang Bangun BUKU TAMU DIGITAL.....875
Tabel 2.989 Status Inovasi BUKU TAMU DIGITAL pada IGA 2025 875
Tabel 2.990 Dasbor Indikator IID BUKU TAMU DIGITAL 876
Tabel 2.991 Kontribusi BUKU TAMU DIGITAL terhadap IKU 877
Tabel 2.992 Kendala dan Tantangan BUKU TAMU DIGITAL 878
Tabel 2.993 ToC BUKU TAMU DIGITAL 879
Tabel 2.994 Asumsi dan Risiko ToC BUKU TAMU DIGITAL.....880
Tabel 2.995 Rekomendasi Pengembangan BUKU TAMU DIGITAL 880
Tabel 3.1 Digital Product Snapshot Dua Puluh Inovasi Sampel Audit.....883
Tabel 3.2 User Journey Empat Inovasi dengan Dokumentasi Terlengkap 885
Tabel 3.3 Pola User Journey Generik Enam Belas Inovasi Lain 886
Tabel 3.4 Hasil Heuristic Evaluation Dua Puluh Inovasi Sampel Audit 887
Tabel 3.5 Rangkuman Masalah Antarmuka dan Tingkat Keparahan 889
Tabel 3.6 Rekapitulasi Temuan menurut Tingkat Keparahan 890
Tabel 3.7 Audit Aksesibilitas dan Inklusivitas Digital Dua Puluh 891
Tabel 3.8 Hasil Audit Performa Sistem Dua Puluh Inovasi Sampel Audit 892
Tabel 3.9 Usulan Target Ambang Layanan Awal.....893
Tabel 3.10 Audit Keamanan dan Tata Kelola Data Dua Puluh Inovasi Sampel..894
Tabel 3.11 Audit Konten Multimedia Dua Puluh Inovasi Sampel Audit 896
Tabel 4.1 Lima Domain COBIT 2019 900
Tabel 4.2 Enam Tingkat Kapabilitas Proses COBIT 2019 900
Tabel 4.3 Sembilan Objektif COBIT 2019 yang Dinilai 901
Tabel 4.4 Hasil Penilaian Kapabilitas COBIT 2019 Dua Puluh Inovasi 901
Tabel 4.5 Rata-Rata Kapabilitas per Objektif Lintas Dua Puluh Inovasi 903
Tabel 4.6 Rata-Rata Kapabilitas per Domain COBIT 2019 904
Tabel 4.7 Pengelompokan Dua Puluh Inovasi Sampel Audit Berdasarkan 905
Tabel 4.8 Kapabilitas COBIT 2019 Berdasarkan Kategori Asta Cita 907
Tabel 5.1 Prototype Perbaikan Tampilan.....913
Tabel 5.2 Prototype Perbaikan Navigasi.....913
Tabel 5.3 Usulan Desain Ulang User Journey Prioritas.....914

Tabel 6.1 Rekomendasi Perbaikan Cepat (0–3 Bulan) 916
Tabel 6.2 Rekomendasi Pengembangan (3–12 Bulan) 916
Tabel 6.3 Rekomendasi Integrasi Jangka Menengah (1–2 Tahun).....917
Tabel 6.4 Empat Tahap Model Perkembangan Inovasi Teknologi.....918
Tabel 6.5 Model Perkembangan Inovasi Nomor 1–10 919
Tabel 6.6 Model Perkembangan Inovasi Nomor 11–20 920
Tabel 6.7 Model Pengembangan untuk Setiap Rekomendasi R-01 sampai R-13923
Tabel 6.8 Saran Sikap terhadap Inovasi yang Sudah Ada 925
Tabel 6.9 Usulan Inovasi Baru yang Perlu Dikembangkan 926
Tabel 7.1 Keterkaitan Inovasi dengan IKU Misi 4 RPJMD 929
Tabel 7.2 Lampiran Profil Ringkas Dua Puluh Inovasi (Inovasi).....934
Tabel 7.3 Lampiran Profil Ringkas Dua Puluh Inovasi (Inovasi).....935
Tabel 7.4 Lampiran Profil Ringkas Dua Puluh Inovasi (Istilah) 937

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indeks SPBE Kabupaten HSS 2022–2024 per Domain 47
Gambar 2.2 Distribusi 20 Inovasi menurut Klaster Fungsional 49
Gambar 2.3 Kontribusi 20 Inovasi terhadap Kategori Asta Cita 51
Gambar 2.4 Ilustrasi SIPASKA HSS 59
Gambar 2.5 Ilustrasi SIDAKAT 67
Gambar 2.6 Ilustrasi PETASAN HSS 75
Gambar 2.7 Ilustrasi Kolam Kaca 82
Gambar 2.8 Ilustrasi GOFO AMAN TERTIB 90
Gambar 2.9 Ilustrasi SISKA 97
Gambar 2.10 Ilustrasi Si Wajaseta 105
Gambar 2.11 Ilustrasi Si IJAK 113
Gambar 2.12 Ilustrasi MAK HAJI 120
Gambar 2.13 Ilustrasi PESONA BUMIL CANTIK 128
Gambar 2.14 Ilustrasi KOSAN ONLINE 135
Gambar 2.15 Ilustrasi KODE SMS BU SUSI 143
Gambar 2.16 Ilustrasi BINGKAI 150
Gambar 2.17 Ilustrasi SAPA QR 157
Gambar 2.18 Ilustrasi Lanjung 165
Gambar 2.19 Ilustrasi E-Rekam Medis RSUD BHHB 172
Gambar 2.20 Ilustrasi SI KOMAR 179
Gambar 2.21 Ilustrasi SIEVAK 187
Gambar 2.22 Ilustrasi TAS UMBUY 194
Gambar 2.23 Ilustrasi JEMPOL ENJOI 201
Gambar 2.24 Ilustrasi SIAMPRAH 209
Gambar 2.25 Ilustrasi SIFARIS 216
Gambar 2.26 Ilustrasi SITI LAMAK 224
Gambar 2.27 Ilustrasi SIIMUT 231
Gambar 2.28 Ilustrasi e-RESEP 238
Gambar 2.29 Ilustrasi JEMPOL IGD 246
Gambar 2.30 Ilustrasi SI LUKA CARE 253
Gambar 2.31 Ilustrasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan 261
Gambar 2.32 Ilustrasi Kelas Komputer Dasar 268
Gambar 2.33 Ilustrasi SI IRWAN 276
Gambar 2.34 Ilustrasi SIAP 283
Gambar 2.35 Ilustrasi SABTU CERDAS 290
Gambar 2.36 Ilustrasi SiOPEN HSS 298
Gambar 2.37 Ilustrasi DETAK PJU+ 306
Gambar 2.38 Ilustrasi Klinik UMKM 313

Gambar 2.39 Ilustrasi SADATU.....321
Gambar 2.40 Ilustrasi SI PANDU WISATA.....329
Gambar 2.41 Ilustrasi SIMBIOSIS.....337
Gambar 2.42 Ilustrasi SIMPAI.....344
Gambar 2.43 Ilustrasi KURELA SEHATI.....352
Gambar 2.44 Ilustrasi SILAPIS.....359
Gambar 2.45 Ilustrasi PETA DASEL.....367
Gambar 2.46 Ilustrasi SI LOWIS.....374
Gambar 2.47 Ilustrasi PACARKU.....382
Gambar 2.48 Ilustrasi GIAT UMKM GO ON.....389
Gambar 2.49 Ilustrasi SI TIMELINE RS BHHB.....396
Gambar 2.50 Ilustrasi SIPASUM HSS.....406
Gambar 2.51 Ilustrasi SIMKERDA.....416
Gambar 2.52 Ilustrasi Si EKKa.....425
Gambar 2.53 Ilustrasi SIDALI.....433
Gambar 2.54 Ilustrasi SI HADRAH.....440
Gambar 2.55 Ilustrasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan 448
Gambar 2.56 Ilustrasi ePropemperda.....456
Gambar 2.57 Ilustrasi ParlemenGO!.....463
Gambar 2.58 Ilustrasi PANTING MARENA.....471
Gambar 2.59 Ilustrasi INOVASI SILANTING.....479
Gambar 2.60 Ilustrasi SIM PKB.....487
Gambar 2.61 Ilustrasi PAPI ALIN.....494
Gambar 2.62 Ilustrasi SITERANG PPID HSS.....503
Gambar 2.63 Ilustrasi MPP One Stop Smart Service.....510
Gambar 2.64 Ilustrasi KLINIK ARSIP.....518
Gambar 2.65 Ilustrasi SIMFONI ARSIP.....525
Gambar 2.66 Ilustrasi JAGOAN ARSIP.....532
Gambar 2.67 Ilustrasi AKSI SEKOLAH LITERAT.....540
Gambar 2.68 Ilustrasi SINERGI AKSI PUSTAKA.....547
Gambar 2.69 Ilustrasi LIWAR HSS.....555
Gambar 2.70 Ilustrasi E-SAKIP.....562
Gambar 2.71 Ilustrasi SENADA+.....570
Gambar 2.72 Ilustrasi SI KETUPAD.....577
Gambar 2.73 Ilustrasi SIP-CORPU HSS.....585
Gambar 2.74 Ilustrasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang.....592
Gambar 2.75 Ilustrasi SIAP KADARAT.....600
Gambar 2.76 Ilustrasi SEWARGA DASEL.....607
Gambar 2.77 Ilustrasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU.....615

Gambar 2.78 Ilustrasi SIPADI 622
Gambar 2.79 Ilustrasi SI UTARA.....630
Gambar 2.80 Ilustrasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan.....637
Gambar 2.81 Ilustrasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026.....645
Gambar 2.82 Ilustrasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital 652
Gambar 2.83 Ilustrasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 659
Gambar 2.84 Ilustrasi REKAN SI MAMET.....667
Gambar 2.85 Ilustrasi SISTER.....674
Gambar 2.86 Ilustrasi KASI AMBIL.....682
Gambar 2.87 Ilustrasi AKSI MONALISA 689
Gambar 2.88 Ilustrasi SI TAMU SIMPUR.....697
Gambar 2.89 Ilustrasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI.....704
Gambar 2.90 Ilustrasi Sistem Informasi Data Kecamatan 712
Gambar 2.91 Ilustrasi SIMKuDa 719
Gambar 2.92 Ilustrasi SiSuKa PD.....726
Gambar 2.93 Ilustrasi ADEK PUAS MAS 734
Gambar 2.94 Ilustrasi SI PETENISKU.....741
Gambar 2.95 Ilustrasi ISMA BADASTARKU.....749
Gambar 2.96 Ilustrasi SI-PIKAT 756
Gambar 2.97 Ilustrasi Peduli Umpeg 763
Gambar 2.98 Ilustrasi SI IDAH PEDALAMAN 771
Gambar 2.99 Ilustrasi e-RKBMD 778
Gambar 2.100 Ilustrasi Aksi IPSRS.....785
Gambar 2.101 Ilustrasi Isma Badastar 793
Gambar 2.102 Ilustrasi SIEVAK 800
Gambar 2.103 Ilustrasi ES-KREM HASAN BASRY 807
Gambar 2.104 Ilustrasi SIPETI.....815
Gambar 2.105 Ilustrasi BERANAK.....822
Gambar 2.106 Ilustrasi E-Skakmat 829
Gambar 2.107 Ilustrasi SOPIA 837
Gambar 2.108 Ilustrasi ROKET.....844
Gambar 2.109 Ilustrasi SIBUNGA 851
Gambar 2.110 Ilustrasi ANNOR.....859
Gambar 2.111 Ilustrasi SILAKSA 866
Gambar 2.112 Ilustrasi SAPA QR 873
Gambar 2.113 Ilustrasi BUKU TAMU DIGITAL.....881
Gambar 2.114 Ilustrasi Klasifikasi Kontribusi terhadap Asta Cita.....882
Gambar 3.1 Sebaran 13 Temuan menurut Tingkat Keparahan.....890

Gambar 4.1 Kapabilitas Tata Kelola COBIT 2019 per Inovasi 903
Gambar 4.2 Kapabilitas Rata-Rata per Objektif COBIT 904
Gambar 4.3 Kesenjangan Kapabilitas per Domain COBIT 905
Gambar 4.4 Tingkat Kesiapan Tata Kelola 20 Inovasi 906
Gambar 6.1 Proyeksi Kenaikan Kapabilitas melalui Model Perkembangan 919

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut benar-benar digunakan, dipercaya, dan memberi manfaat bagi penggunanya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tercatat memiliki 214 inovasi daerah, dengan 110 di antaranya (51,4 persen) tergolong dalam kelompok inovasi teknologi dan 20 di antaranya menjadi sampel audit — berupa aplikasi, sistem informasi, portal web, kanal survei berbasis kode QR, dan layanan berbasis pesan singkat.

Bapperida Kabupaten HSS memerlukan gambaran yang jujur mengenai kondisi kematangan digital portofolio tersebut: mana yang telah berjalan baik dan layak direplikasi, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang bahkan belum tercatat secara resmi. Kajian ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui audit yang menyeluruh atas seluruh 20 inovasi, bukan atas sebagian di antaranya.

1.2 Ciri Khas Perspektif Teknologi Rekayasa Multimedia

Perspektif Teknologi Rekayasa Multimedia menilai inovasi dari sisi hubungan antara manusia, informasi, sistem, media, dan teknologi. Sepuluh pertanyaan pokok berikut menjadi acuan seluruh penilaian dalam laporan ini.

- Apakah teknologi benar-benar dibutuhkan;
- Apakah aplikasi mudah digunakan;
- Apakah informasi mudah dipahami;
- Apakah layanan dapat digunakan melalui telepon genggam;
- Apakah desainnya sesuai dengan karakter masyarakat;
- Apakah sistem stabil;
- Apakah terdapat integrasi data;
- Apakah sistem aman;
- Apakah teknologi mempercepat pelayanan;
- Apakah terdapat alternatif layanan untuk masyarakat yang tidak menguasai teknologi.

Catatan penjelas: Kesepuluh pertanyaan ini mencerminkan pergeseran dari cara pandang technology-push — membangun teknologi karena tersedia

anggaran atau mengikuti tren — menuju user-pull, yaitu membangun teknologi karena ada kebutuhan pengguna yang terverifikasi. Pendekatan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (Davis, 1989) yang menempatkan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan sebagai penentu keberhasilan adopsi teknologi, serta dengan prinsip perancangan berpusat pada manusia dalam ISO 9241-210. Pertanyaan kesepuluh mengenai alternatif nondigital secara khusus menegaskan prinsip digital inclusion, bahwa digitalisasi tidak boleh meninggalkan warga yang belum menguasai teknologi.

1.3 Landasan Yuridis

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029 (memuat delapan misi Asta Cita);
- Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE;
- Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025–2045;
- Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029;

- Peraturan Bupati Kabupaten HSS Nomor 18 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026.

1.4 Tujuan Kajian

- Memetakan seluruh inovasi daerah berbasis teknologi beserta kaitannya dengan delapan misi Asta Cita, dan mengaudit 20 di antaranya secara mendalam;
- Melaksanakan audit lima tahap atas produk digital, pengalaman pengguna, aksesibilitas, sistem dan data, serta konten multimedia;
- Menilai kematangan tata kelola teknologi informasi seluruh inovasi menggunakan kerangka COBIT 2019;
- Menyusun rekomendasi perbaikan dalam bentuk prototype rekomendasi dan peta jalan teknologi 2026–2030;
- Menganalisis keterkaitan inovasi terhadap RPJPD, RPJMD, dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten HSS.

1.5 Bentuk Rencana Kajian: Lima Tahap Audit

Kajian ini menggunakan model digital service audit dan *user experience* review yang dilaksanakan melalui lima tahap berjenjang.

1.5.1 Tahap 1 — Audit Produk Digital

Objek yang diperiksa mencakup seluruh wujud produk digital berikut:

- Aplikasi;
- *Website*;
- *Dashboard*;
- Sistem informasi;
- QR code;
- Media sosial;
- Video;
- Konten edukasi;
- Layanan Android;
- Formulir daring;
- Sistem administrasi elektronik;

Catatan penjelas: Tahap ini merupakan langkah inventarisasi (inventory) yang lazim menjadi awal audit teknologi informasi, sebagaimana dianjurkan kerangka COBIT. Inventarisasi menyeluruh diperlukan karena satu inovasi dapat hadir dalam lebih dari satu wujud sekaligus — misalnya aplikasi yang juga memiliki versi web dan kanal media sosial pendukung.

1.5.2 Tahap 2 — Uji Pengalaman Pengguna

Pengguna diminta melakukan tugas nyata berikut:

- Mencari informasi;
- Melakukan pendaftaran;
- Mengunggah dokumen;
- Memperoleh hasil;
- Mengirim pengaduan;
- Memeriksa status layanan;

Indikator yang digunakan:

- Tingkat keberhasilan tugas;
- Waktu menyelesaikan tugas;
- Jumlah kesalahan;
- Jumlah bantuan yang dibutuhkan;
- Kepuasan pengguna;
- Kejelasan informasi;

Catatan penjelas: Tahap ini menerapkan usability testing berbasis task analysis sebagaimana dirumuskan Nielsen. Dua indikator utamanya — tingkat keberhasilan tugas (task success rate) dan waktu penyelesaian tugas (time on task) — merupakan metrik baku pengujian usability kuantitatif yang memungkinkan perbandingan objektif antarsistem.

1.5.3 Tahap 3 — Audit Aksesibilitas

Aspek yang diperiksa:

- Ukuran teks;
- Kontras;
- Navigasi;
- Penggunaan bahasa;
- Akses disabilitas;

- Kompatibilitas perangkat;
- Kebutuhan jaringan;
- Alternatif nondigital;

Catatan penjelas: Kedelapan aspek ini merujuk pada empat prinsip Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — perceivable, operable, understandable, robust. Aspek kebutuhan jaringan dan alternatif nondigital secara khusus relevan bagi kabupaten yang cakupan infrastruktur telekomunikasinya belum merata.

1.5.4 Tahap 4 — Audit Sistem dan Data

Aspek yang diperiksa:

- *Uptime*;
- Error rate;
- Response time;
- Pengguna aktif;
- Transaksi berhasil;
- Keamanan akses;
- Perlindungan data;
- Backup;
- Interoperabilitas;
- Duplikasi input;
- Ketergantungan vendor;

Catatan penjelas: Kesebelas aspek ini merujuk pada model kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010, khususnya karakteristik reliability, performance efficiency, dan security.

1.5.5 Tahap 5 — Evaluasi Konten Multimedia

Aspek yang diperiksa:

- Kualitas informasi;
- Konsistensi identitas visual;
- Kejelasan pesan;
- Kesesuaian media;
- Keterbacaan;
- Efektivitas sosialisasi;

- Engagement;
- Conversion menjadi pengguna layanan;

Catatan penjelas: Tahap ini menilai bukan sekadar keberadaan konten, melainkan efektivitasnya mengubah perilaku — tercermin pada indikator conversion, yaitu porsi audiens yang berpindah dari sekadar melihat sosialisasi menjadi pengguna aktif layanan.

1.6 Metode, Data Utama, dan Keterbatasan Kajian

1.6.1 Dua Belas Metode Kajian

- ***Usability testing*** — pengujian langsung kemampuan pengguna menyelesaikan tugas tertentu pada suatu produk digital.
- **System *Usability* Scale (SUS)** — kuesioner terstandardisasi sepuluh butir yang menghasilkan skor tunggal 0–100 atas persepsi kegunaan sistem.
- **Heuristic evaluation** — tinjauan pakar terhadap antarmuka berdasarkan sepuluh prinsip *usability* Nielsen, tanpa memerlukan pengguna akhir.
- ***Accessibility* audit** — pemeriksaan kepatuhan produk digital terhadap standar aksesibilitas WCAG.
- ***User journey* mapping** — visualisasi tahapan yang dilalui pengguna dari awal hingga akhir interaksi untuk mengidentifikasi titik hambatan.
- **Task analysis** — penguraian tugas pengguna menjadi langkah kecil guna mengidentifikasi kompleksitas dan potensi kegagalan.
- **Log analytics** — analisis data log sistem untuk memahami perilaku pengguna secara kuantitatif.
- **Audit arsitektur informasi** — pemeriksaan struktur navigasi dan pengelompokan informasi pada suatu produk digital.
- **Content analysis** — analisis sistematis konten multimedia untuk menilai kejelasan pesan dan kesesuaian audiens.
- **Performance testing** — pengujian kecepatan respons dan stabilitas sistem di bawah beban penggunaan tertentu.
- **Risk assessment** — identifikasi risiko teknis — keamanan, ketergantungan vendor, dan keberlanjutan — yang dapat mengganggu operasional.
- **Wawancara pengguna** — penggalian perspektif pengguna yang tidak tertangkap melalui data kuantitatif.

1.6.2 Lima Belas Bentuk Data Utama

Data utama yang menjadi rujukan penerapan kelima tahap audit mencakup: log aplikasi; jumlah pengguna aktif; jumlah transaksi; *completion rate; error rate; response time; uptime*; perangkat yang digunakan; lokasi pengguna; kanal akses; keluhan teknis; hasil uji pengguna; data interaksi media; dokumen keamanan; dan arsitektur sistem.

1.6.3 Keterbatasan Kajian dan Tingkat Keyakinan Temuan

Kajian ini disusun berbasis dokumentasi sekunder dokumen rekapitulasi inovasi, dokumen perencanaan daerah, publikasi resmi perangkat daerah, dan penelusuran portal publik tanpa akses langsung ke sistem produksi maupun kepada pengguna akhir. Akibatnya, lima dari dua belas metode pada subbab 1.6.1 tidak dapat diterapkan sepenuhnya, yaitu *usability testing* langsung, *System Usability Scale, log analytics, performance testing*, dan wawancara pengguna.

Untuk menjaga kejujuran metodologis, setiap temuan dalam laporan ini diberi penanda tingkat keyakinan sebagaimana Tabel 1.1. Dimensi yang tidak memiliki bukti pendukung memadai diberi status “belum dapat dinilai”, bukan diasumsikan secara sepihak.

Tabel 1.1 Kerangka Tingkat Keyakinan Temuan

Tingkat Keyakinan	Dasar Penetapan	Dampak Penggunaan
Tinggi	Terdapat dokumen resmi, uraian naratif, dan/atau data manfaat yang dapat diverifikasi	Temuan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
Sedang	Terdapat uraian sebagian, namun tanpa data kuantitatif pendukung	Temuan perlu dikonfirmasi OPD pengampu sebelum ditindaklanjuti
Rendah	Pada dokumen sumber hanya tercantum nama inovasi tanpa uraian	Temuan bersifat indikasi awal; wajib diverifikasi lapangan
Belum dapat dinilai	Tidak tersedia bukti apa pun untuk dimensi yang bersangkutan	Menjadi butir pemeriksaan pada audit lanjutan

1.7 Bentuk dan Susunan Laporan

Laporan ini disusun dalam format Digital Product Review dan UX Audit Report yang terdiri atas sepuluh bagian. Bagian 1 sampai 8 disajikan pada Bab III, audit tata kelola COBIT 2019 pada Bab IV, Bagian 9 pada Bab V, dan Bagian 10 pada Bab VI. Tabel 1.2 memetakan kesepuluh bagian tersebut terhadap struktur bab laporan ini.

Tabel 1.2 Pemetaan Sepuluh Bagian Laporan terhadap Struktur Bab

Bagian	**Substansi**	**Letak dalam Laporan**
Bagian 1	*Digital Product Snapshot*	Bab III subbab 3.1
Bagian 2	*User Journey*	Bab III subbab 3.2
Bagian 3	Hasil *Usability Testing*	Bab III subbab 3.3
Bagian 4	Masalah Antarmuka dan *Severity Rating*	Bab III subbab 3.4
Bagian 5	Aksesibilitas dan Inklusivitas Digital	Bab III subbab 3.5
Bagian 6	Performa Sistem	Bab III subbab 3.6
Bagian 7	Keamanan dan Tata Kelola Data	Bab III subbab 3.7
Bagian 8	Audit Konten Multimedia	Bab III subbab 3.8
—	Audit Tata Kelola TI COBIT 2019 (tambahan)	Bab IV
Bagian 9	Prototype Rekomendasi	Bab V
Bagian 10	*Roadmap* Teknologi	Bab VI

BAB 2
POPULASI INOVASI

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB II
GAMBARAN UMUM POPULASI INOVASI TEKNOLOGI

2.1 Konteks Kesiapan Digital Kabupaten HSS

Penilaian atas produk digital tidak dapat dilepaskan dari kesiapan masyarakat yang akan menggunakannya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 mencatat bahwa 63,76 persen penduduk Kabupaten HSS usia 5 tahun ke atas memiliki atau menguasai telepon seluler, dengan kesenjangan gender yang cukup nyata: 69,94 persen pada laki-laki berbanding 57,69 persen pada perempuan. Pada indikator akses internet, lebih dari 70 persen penduduk usia 5 tahun ke atas tercatat mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

Artinya, sekitar sepertiga penduduk berpotensi tidak terjangkau layanan yang sepenuhnya digital. Angka ini menjadi dasar penilaian aksesibilitas pada Bab III subbab 3.5, khususnya mengenai ketersediaan alternatif nondigital.

Pada tingkat kelembagaan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten HSS menunjukkan peningkatan konsisten, namun tidak merata antardomain sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indeks SPBE Kabupaten HSS Tahun 2022–2024

Indikator	2022	2023	2024
Indeks SPBE (komposit)	2,35	3,51	4,09
Domain Kebijakan SPBE	2,30	3,60	4,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,40	3,30	3,60
Domain Manajemen SPBE	1,00	2,00	3,09
— Audit TIK	1,00	1,00	3,00
Domain Layanan SPBE	3,37	4,14	4,51
— Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	4,50	4,83

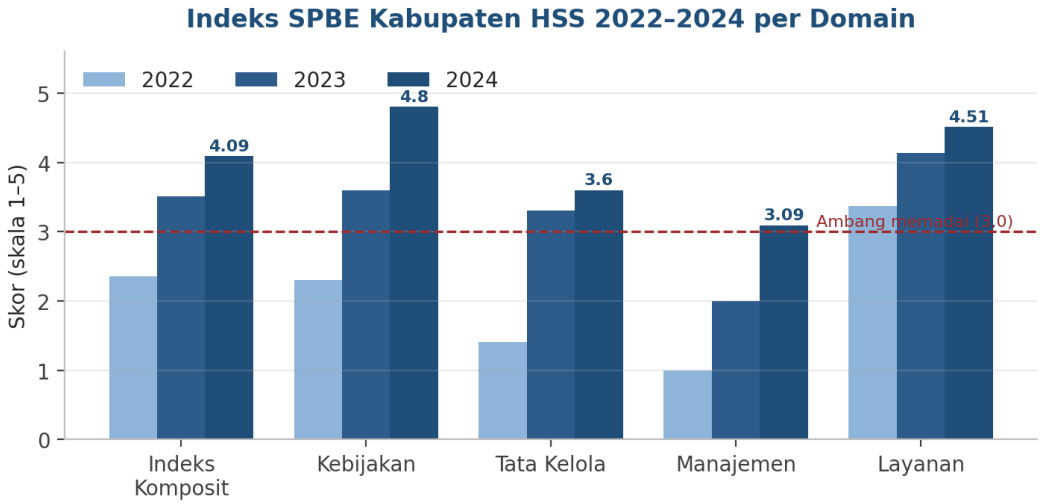

Gambar 2.1 Indeks SPBE Kabupaten HSS 2022–2024 per Domain

Terdapat kesenjangan mencolok antara Domain Layanan SPBE yang telah sangat matang (4,51) dan Domain Manajemen SPBE yang masih tertinggal (3,09), dengan skor Audit TIK yang baru beranjak dari 1,00 menjadi 3,00 pada 2024. Pola ini menjadi dugaan awal utama kajian: Kabupaten HSS berhasil membangun banyak aplikasi layanan, tetapi tata kelola teknis di baliknya audit, dokumentasi, dan standardisasi belum berkembang setara. Hipotesis ini diuji sepanjang Bab III dan Bab IV.

2.2 Populasi Dua Puluh Inovasi Teknologi

Dari 214 inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebanyak 110 inovasi atau 51,4 persen memuat komponen teknologi digital pada nama maupun uraian isinya. Seluruh 110 inovasi tersebut diprofilkan pada Subbab 2.5. Dari populasi itu, 20 inovasi dipilih sebagai sampel audit mendalam pada Bab III dan Bab IV karena memiliki wujud produk digital yang dapat diperiksa langsung, yaitu aplikasi, situs web, papan pemantauan, atau kode QR yang aktif. Kedua puluh inovasi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Dua Puluh Inovasi kelompok inovasi teknologi sampel audit

No	Nama	Kepanjangan / Fungsi	OPD Pengampu	Klaster Fungsional
1	SIPASKA HSS	Sistem Informasi Pengibar Bendera Pusaka HSS	Setda / Bagian Protokol	Ideologi & Kebangsaan
2	PETASAN HSS	Peta SebarAn bencaNa Hulu Sungai Selatan	BPBD	Kebencanaan & Ketahanan
3	KOSAN *Online*	Konsultasi Klinik Sanitasi Berbasis *Online*	Dinas Kesehatan	Kesehatan Digital
4	KODE SMS Bu Susi	Kanal informasi kesehatan berbasis pesan singkat	Dinas Kesehatan	Kesehatan Digital

No	Nama	Kepanjangan / Fungsi	OPD Pengampu	Klaster Fungsional
5	SAPA QR (Kesehatan)	Survei Kepuasan Masyarakat melalui QR Code	Fasilitas kesehatan	Kesehatan Digital
6	SI KOMAR	Sistem Informasi Ketersediaan Kamar	RSUD Hasan Basry	Kesehatan Digital
7	SIAMPRAH	Sistem Informasi Amprah (permintaan logistik)	RSUD Hasan Basry	Kesehatan Digital
8	SITI LAMAK	Aplikasi eTiket Label Makanan	RSUD / Instalasi Gizi	Kesehatan Digital
9	e-Resep	Resep obat elektronik	RSUD Hasan Basry	Kesehatan Digital
10	SIAP	Sistem Informasi Absensi PAUD	Dinas Pendidikan	Pendidikan Digital
11	SIPASUM HSS	Sistem Informasi Pendaftaran Fasilitas Umum	Pengelola fasilitas umum	Reformasi Birokrasi
12	SIDALI	Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi	Setda / TPID	Reformasi Birokrasi
13	SI HADRAH	Sistem Informasi Hibah dan Rekomendasi Daerah	Setda / Bagian Kesra	Reformasi Birokrasi
14	SENADA+	Sistem Informasi Inovasi Daerah	Bapperida	Reformasi Birokrasi
15	SI Tamu Simpur	Sistem Informasi Tamu *Online* Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur	Reformasi Birokrasi
16	Aksi IPSRS	Aplikasi Kinerja dan SI Pemeliharaan Sarana RS	RSUD Hasan Basry	Reformasi Birokrasi
17	Isma Badastar	SI Manajemen Aset Berbasis QR Code	Pengelola aset daerah	Reformasi Birokrasi
18	ROKET	Registrasi *Online* ke Rumah Sakit	RSUD Hasan Basry	Reformasi Birokrasi
19	SILAKSA	Sistem Integrasi Link Akses Seluruh Aplikasi Inovasi	Setda / Diskominfo	Reformasi Birokrasi
20	SAPA QR (Birokrasi)	Survei Kepuasan Masyarakat melalui QR Code	Lintas perangkat daerah	Reformasi Birokrasi

Catatan penjelas: Baris ke-5 dan ke-20 sama-sama bernama SAPA QR namun tercatat sebagai dua entri terpisah pada dokumen sumber dengan kategori Asta Cita berbeda. Kajian ini memperlakukan keduanya sebagai entri terpisah mengikuti dokumen sumber, namun mencatatnya sebagai indikasi awal persoalan duplikasi pencatatan aset yang dikaji lebih lanjut pada Bab III subbab 3.7 dan Bab IV.

2.3 Distribusi menurut Klaster Fungsional dan Kepemilikan

Tabel 2.3 Distribusi Inovasi menurut Klaster Fungsional

Klaster Fungsional	Jumlah	Porsi
Reformasi Birokrasi	10	50,0%
Kesehatan Digital	7	35,0%
Ideologi & Kebangsaan	1	5,0%
Kebencanaan & Ketahanan	1	5,0%
Pendidikan Digital	1	5,0%
Total	20	100,0%

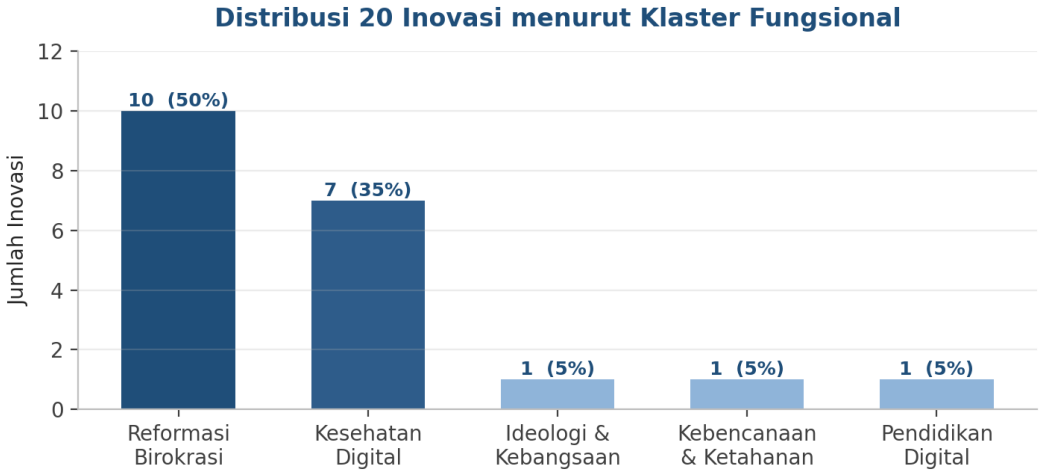

Gambar 2.2 Distribusi 20 Inovasi menurut Klaster Fungsional

Dari sisi kepemilikan, RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan mengampu enam inovasi sekaligus — SI KOMAR, SIAMPRAH, SITI LAMAK, e-Resep, Aksi IPSRS, dan ROKET — menjadikannya perangkat daerah paling produktif menghasilkan inovasi digital, sekaligus yang paling berpotensi mengalami duplikasi data antarsistem. Di sisi lain, hadirnya SI Tamu Simpur menunjukkan bahwa prakarsa digital telah tumbuh hingga tingkat kecamatan.

2.4 Klasifikasi Kontribusi terhadap Asta Cita

Asta Cita merupakan delapan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Tabel 2.4 menyajikan klasifikasi kontribusi setiap inovasi beserta justifikasinya.

Tabel 2.4 Klasifikasi dan Alasan Kontribusi Asta Cita pada Dua Puluh

No	Inovasi	Asta Cita	Justifikasi Kontribusi
1	SIPASKA HSS	1	Mendukung penyelenggaraan upacara kenegaraan pengibaran bendera pusaka secara tertib dan terdokumentasi, memperkokoh simbol ideologi Pancasila di tingkat daerah.
2	PETASAN HSS	2	Peta digital sebaran bencana memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman nontradisional yang dapat mengganggu produksi pangan lokal, sejalan dengan dimensi kemandirian bangsa.
3	KOSAN *Online*	4	Konsultasi sanitasi daring memperluas akses masyarakat terhadap edukasi kesehatan lingkungan, menopang pilar kesehatan dalam pembangunan SDM.
4	KODE SMS Bu Susi	4	Kanal berbasis SMS menjangkau warga tanpa akses internet, mendukung pemerataan layanan kesehatan sebagai bagian pembangunan SDM.
5	SAPA QR (Kesehatan)	4	Survei kepuasan pasien menjadi instrumen umpan balik peningkatan mutu layanan kesehatan.
6	SI KOMAR	4	Informasi ketersediaan kamar *real-time* mempercepat rujukan pasien, berkontribusi langsung pada mutu pelayanan kesehatan rujukan.
7	SIAMPRAH	4	Digitalisasi permintaan logistik farmasi mendukung efisiensi rantai pasok layanan kesehatan.
8	SITI LAMAK	4	Label elektronik diet pasien mendukung ketepatan asupan gizi dan keselamatan pasien.
9	e-Resep	4	Resep elektronik mengurangi risiko kesalahan pembacaan dan mempercepat pelayanan farmasi.
10	SIAP	4	Digitalisasi presensi PAUD mendukung tata kelola data pendidikan anak usia dini yang akurat.
11	SIPASUM HSS	7	Pendaftaran fasilitas umum daring mengurangi interaksi tatap muka yang rawan pungutan liar.
12	SIDALI	7	Pengendalian inflasi berbasis data lintas OPD mendukung tata kelola pemerintahan berbasis bukti.
13	SI HADRAH	7	Digitalisasi proses hibah memperkecil ruang penyalahgunaan anggaran, mendukung pencegahan korupsi.
14	SENADA+	7	Platform manajemen inovasi merupakan infrastruktur meta-tata kelola yang mendokumentasikan seluruh portofolio secara transparan.
15	SI Tamu Simpur	7	Digitalisasi buku tamu kecamatan meningkatkan akuntabilitas dan keamanan administrasi kantor.
16	Aksi IPSRS	7	Transparansi kinerja pemeliharaan sarana rumah sakit mendukung akuntabilitas pengelolaan aset dan anggaran.

No	Inovasi	Asta Cita	Justifikasi Kontribusi
17	Isma Badastar	7	Manajemen aset berbasis QR memperkuat akuntabilitas Barang Milik Daerah dan mencegah manipulasi data aset.
18	ROKET	7	Registrasi daring mengurangi potensi percaloan pendaftaran dan meningkatkan transparansi antrean.
19	SILAKSA	7	Portal integrasi mengurangi fragmentasi sistem dan meningkatkan kemampuan saling terhubung antar-sistem data pemerintah.
20	SAPA QR (Birokrasi)	7	Survei kepuasan lintas OPD menjadi instrumen akuntabilitas pelayanan publik dan deteksi dini maladministrasi.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Kontribusi Asta Cita

Kategori	Fokus Misi	Jumlah	Porsi
Asta Cita 1	Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	1	5,0%
Asta Cita 2	Pertahanan, keamanan, dan kemandirian bangsa	1	5,0%
Asta Cita 4	SDM, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan	8	40,0%
Asta Cita 7	Reformasi politik, hukum, birokrasi, dan antikorupsi	10	50,0%
Total	—	20	100,0%

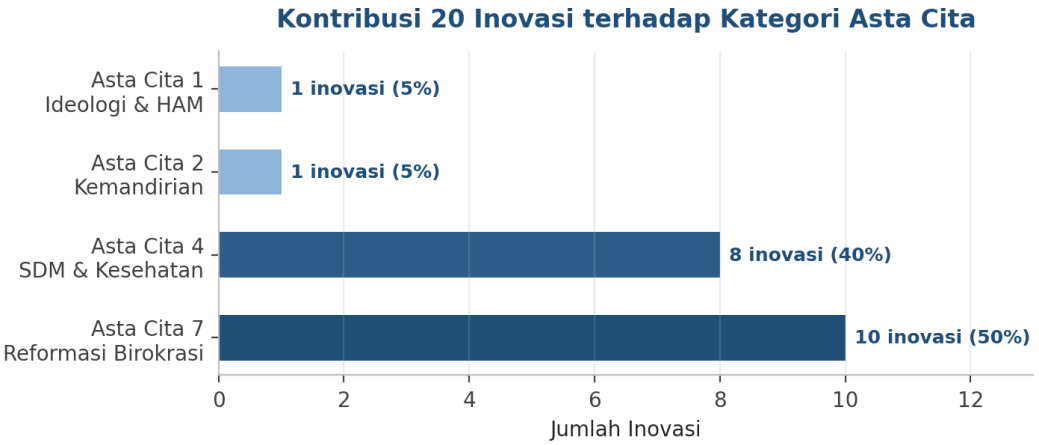

Gambar 2.3 Kontribusi 20 Inovasi terhadap Kategori Asta Cita

Di antara 20 inovasi sampel audit, tidak ditemukan inovasi yang menyumbang langsung pada Asta Cita 3, 5, 6, maupun 8. Pada populasi 110 inovasi teknologi, Asta Cita 3 sebenarnya memuat 14 inovasi, sedangkan Asta Cita 5, 6, dan 8 memang tidak memiliki satu pun inovasi berbasis teknologi. Artinya, digitalisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum menyentuh agenda hilirisasi produk, ekonomi desa, serta lingkungan dan budaya.

2.5 Katalog Profil Seluruh Inovasi Berbasis Teknologi

Sub-bab ini memuat profil seluruh inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berbasis teknologi, berdasarkan dokumen "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita". Dari 214 inovasi daerah, sebanyak 110 inovasi atau 51,4% memuat komponen teknologi digital pada nama maupun uraian isinya, berupa aplikasi, sistem informasi, layanan daring, kode QR, papan pemantauan, maupun kanal pesan elektronik. Angka ini jauh melampaui dua puluh inovasi yang diaudit mendalam pada Bab III dan Bab IV, sehingga katalog ini berfungsi sebagai basis data lengkap bagi audit lanjutan pada periode berikutnya.

Sebaran menurut Asta Cita menunjukkan bahwa inovasi teknologi paling banyak berada pada Asta Cita 7 tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebanyak 64 inovasi, disusul Asta Cita 4 tentang pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan sebanyak 27 inovasi, Asta Cita 3 sebanyak 14 inovasi, Asta Cita 2 sebanyak 4 inovasi, dan Asta Cita 1 sebanyak 1 inovasi. Tidak ada inovasi teknologi yang tercatat pada Asta Cita 5, 6, dan 8. Pola ini menegaskan bahwa transformasi digital di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejauh ini paling kuat pada urusan tata kelola internal dan pelayanan dasar, dan belum menyentuh agenda hilirisasi, ekonomi desa, maupun lingkungan dan budaya.

Menurut klaster fungsional, sebarannya adalah Kesehatan Digital 34 inovasi, Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 32 inovasi, Pelayanan Kewilayahan 30 inovasi, Pendidikan dan Literasi Digital 9 inovasi, Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 inovasi, Administrasi Kependudukan 2 inovasi, serta Kebencanaan dan Ketahanan 1 inovasi. Setiap profil pada katalog ini dilengkapi ilustrasi yang menandai klaster fungsionalnya.

2.5.1 SIPASKA HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.6 Identitas Inovasi SIPASKA HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIPASKA HSS (Sistem Informasi Pengibar Bendera Pusaka HSS)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kesbangpol
5	**PIC/Narahubung**	0815-4564-0199 - Melda
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 1 - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SIPASKA HSS dikembangkan oleh Kesbangpol dan tercatat pada kategori Asta Cita 1 - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Sistem informasi untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan, seleksi, serta pembinaan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Manfaat yang diharapkan: Meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas proses seleksi Paskibraka serta memperkuat pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan generasi muda

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIPASKA HSS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.7 Rancang Bangun SIPASKA HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kesbangpol; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIPASKA HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesbangpol. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.8 Status Inovasi SIPASKA HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SIPASKA HSS tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kesbangpol.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.9 Dasbor Indikator IID SIPASKA HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Lengkap/ tambahan dari bapperida

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Lengkap
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambah dpa tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sesuaikan dengan contoh
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	belum ada data
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sop jangan lebih 24 jam
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Lengkap / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan bulan pada tahun 2025
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Lengkap
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.10 Kontribusi SIPASKA HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SIPASKA HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Kendala dan Tantangan SIPASKA HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIPASKA HSS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Kesbangpol melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini

merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 1 - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIPASKA HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kesbangpol membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.12 ToC SIPASKA HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kesbangpol; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIPASKA HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kesbangpol memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.13 Asumsi dan Risiko ToC SIPASKA HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.14 Rekomendasi Pengembangan SIPASKA HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kesbangpol
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kesbangpol bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SIPASKA HSS - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.4 Ilustrasi SIPASKA HSS

2.5.2 SIDAKAT

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.15 Identitas Inovasi SIDAKAT

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIDAKAT (Sistem Database Asal Tumbuhan) Kab. Hulu Sungai Selatan
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]

No	Atribut	Keterangan
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
5	**PIC/Narahubung**	Wahyu Aji
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIDAKAT dikembangkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan dan tercatat pada kategori Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi SIDAKAT (Sistem Database Komoditas Asal Tumbuhan) merupakan terobosan digital Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memperkuat pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari cemaran pestisida melalui integrasi data *online* dan kolaborasi lintas sektor. Program ini memadukan pemantauan pre -post market (Lahan dan Pasar), uji rapid test pestisida dilakukan untuk pengawasan keamanan pangan secara *real-time* di 11 kecamatan, guna melindungi kesehatan 227.153 penduduk serta mendukung pencapaian SDGs bidang ketahanan pangan dan gizi.

Manfaat yang diharapkan: Inovasi SIDAKAT secara efektif meningkatkan kinerja strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui penguatan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Dampak nyatanya terlihat pada pencapaian target ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, dengan tren pangan aman yang meningkat hingga 97,1% pada tahun 2025.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIDAKAT secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur

yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.16 Rancang Bangun SIDAKAT

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIDAKAT diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.17 Status Inovasi SIDAKAT pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SIDAKAT tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.18 Dasbor Indikator IID SIDAKAT

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.19 Kontribusi SIDAKAT terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SIDAKAT dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.20 Kendala dan Tantangan SIDAKAT

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIDAKAT: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIDAKAT disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.21 ToC SIDAKAT

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIDAKAT beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.22 Asumsi dan Risiko ToC SIDAKAT

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.23 Rekomendasi Pengembangan SIDAKAT

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.5 Ilustrasi SIDAKAT

2.5.3 PETASAN HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.24 Identitas Inovasi PETASAN HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	PETASAN HSS (Peta SebarAn bencaNa – Hulu Sungai Selatan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	**PIC/Narahubung**	Sandy Hidayat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kebencanaan & Ketahanan
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi PETASAN HSS dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tercatat pada kategori Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kebencanaan & Ketahanan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) merupakan wilayah yang memiliki risiko multi-bencana, seperti banjir, angin kencang,Tanah longsor dan kebakaran hutan/lahan (karhutla). Tantangan dalam penanganan bencana di daerah ini bukan hanya pada penanganan saat kejadian,

namun juga pada kurangnya data geospasial bencana yang terintegrasi, cepat diakses, dan informatif bagi pemangku kebijakan maupun masyarakat.

Manfaat yang diharapkan: 1. Tersedianya Peta Digital Sebaran Bencana Terintegrasi PETASAN HSS berhasil membangun sistem peta digital yang menampilkan lokasi rawan bencana seperti banjir, angin kencang, dan karhutla secara tematik, dilengkapi dengan simbol dan keterangan edukatif. Peta ini dapat diakses oleh petugas dan masyarakat secara mudah melalui web/aplikasi. 2.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat di kawasan rawan bencana, relawan dan aparat penanggulangan bencana, serta pemangku kebijakan kedaruratan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun PETASAN HSS secara umum terdiri atas basis data spasial kerawanan, kanal pelaporan kejadian, dasbor pemantauan kedaruratan, serta diseminasi peringatan kepada masyarakat. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.25 Rancang Bangun PETASAN HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data spasial kerawanan, kanal pelaporan kejadian, dasbor pemantauan kedaruratan, serta diseminasi peringatan kepada masyarakat
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian PETASAN HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.26 Status Inovasi PETASAN HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung PETASAN HSS tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.27 Dasbor Indikator IID PETASAN HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	tambahkan narasi
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	belum ada data sesuaikan seperti contoh
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Lengkap
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan jadi 3 metode : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan *Online* melalui *website*/webaplikasi/ aplikasi *mobile* (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah sesuai cuma beri keterangan 100% sudah ditindak lanjuti
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Lengkap / ganti tahun 2025

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tahan pembuatan inovasi buat format proposal 1-4 bulan. beri keterangan hari bulan tahun
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Lengkap / data tambahan dari Bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.28 Kontribusi PETASAN HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) daerah	indeks	-	-	-	-
Waktu respons penanganan kejadian bencana	jam	-	-	-	-
Persentase desa tangguh bencana	persen	-	-	-	-
Jumlah kejadian terlaporkan melalui sistem	kejadian/ tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi PETASAN HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.29 Kendala dan Tantangan PETASAN HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan komunikasi pada saat kejadian bencana
2	**Sumber daya manusia**	pemutakhiran data spasial yang membutuhkan survei lapangan berkala oleh petugas terlatih

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terintegrasinya data dengan sistem peringatan dini instansi vertikal
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi PETASAN HSS: terwujudnya meningkatnya kecepatan respons dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana pada lingkup kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change PETASAN HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan respons dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menurunnya kerugian jiwa dan material akibat bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.30 ToC PETASAN HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem PETASAN HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan respons dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menurunnya kerugian jiwa dan material akibat bencana di kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.31 Asumsi dan Risiko ToC PETASAN HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan komunikasi pada saat kejadian bencana	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; pemutakhiran data spasial yang membutuhkan survei lapangan berkala oleh petugas terlatih	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terintegrasinya data dengan sistem peringatan dini instansi vertikal	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.32 Rekomendasi Pengembangan PETASAN HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terintegrasinya data dengan sistem peringatan dini instansi vertikal, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital PETASAN HSS - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.6 Ilustrasi PETASAN HSS

2.5.4 Kolam Kaca

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.33 Identitas Inovasi Kolam Kaca

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Kolam Kaca (Koordinasi Laporan Keamanan Kecamatan Angkinang)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Angkinang
5	**PIC/Narahubung**	Saubari
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Kolam Kaca dikembangkan oleh Kecamatan Angkinang dan tercatat pada kategori Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Kelola Inovasi KOLAM KACA (Koordinasi Laporan Keamanan Kecamatan Angkinang) menghadirkan perubahan mendasar pada model tata kelola pelaporan keamanan dan Ketertiban masyarakat dari sistem manual menjadi sistem koordinasi digital yang terintegrasi. Inovasi ini Tidak hanya mengubah media pelaporan, tetapi juga memperbaiki pola kerja, alur komunikasi, serta Mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Kecamatan Angkinang.Sebelum inovasi diterapkan, Laporan gangguan keamanan dan ketertiban disampaikan melalui telepon, pesan singkat pribadi, atau laporan Tertulis yang kemudian direkap secara manual.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan Inovasi KOLAM KACA (Koordinasi Laporan Keamanan Kecamatan Angkinang) telah Memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas kerja, kualitas tata kelola pemerintahan, serta Koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Angkinang.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Kolam Kaca secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.34 Rancang Bangun Kolam Kaca

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Angkinang; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Kolam Kaca diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Angkinang. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.35 Status Inovasi Kolam Kaca pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.36 Dasbor Indikator IID Kolam Kaca

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai dan Lengkap
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Sesuai dan Lengkap
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai dan Lengkap
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai dan Lengkap
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Sesuai dan Lengkap
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai dan Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai dan Lengkap
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai dan Lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Sesuai dan Lengkap
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Tambahkan Metode Hotline (Email atau no telp Kecamatan pada kop surat) dan Sosial Media (FB, IG atau Tiktok)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Sesuai dan Lengkap
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Sesuai dan Lengkap
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai dan Lengkap
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tambahkan Timeline Penciptaan Inovasi pada proposal (Buat di tahun 2025 dengan jangka waktu 1-4 Bulan)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Sesuai dan Lengkap

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.37 Kontribusi Kolam Kaca terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi Kolam Kaca dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.38 Kendala dan Tantangan Kolam Kaca

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Kolam Kaca: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Angkinang melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Kolam Kaca disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Angkinang membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.39 ToC Kolam Kaca

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Angkinang; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Kolam Kaca beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Angkinang memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.40 Asumsi dan Risiko ToC Kolam Kaca

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.41 Rekomendasi Pengembangan Kolam Kaca

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Angkinang

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Angkinang bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.7 Ilustrasi Kolam Kaca

2.5.5 GOFO AMAN TERTIB

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.42 Identitas Inovasi GOFO AMAN TERTIB

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	GOFO AMAN TERTIB (Pelaporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Google Form)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Loksado
5	**PIC/Narahubung**	Karmila
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi GOFO AMAN TERTIB dikembangkan oleh Kecamatan Loksado dan tercatat pada kategori Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. GOFO AMAN TERTIB (Pelaporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Google Form) merupakan langkah praktis dalam memanfaatkan media digital yang sudah akrab di masyarakat yakni Google Form) untuk mempermudah dan mempercepat Sistem Pelaporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kecamatan Loksado

Manfaat yang diharapkan: Meningkatkan sinergisitas dan koordinasi pelaporan laporan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Loksado

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun GOFO AMAN TERTIB secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.43 Rancang Bangun GOFO AMAN TERTIB

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, formulir daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Loksado; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian GOFO AMAN TERTIB diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID)

yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loksado. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.44 Status Inovasi GOFO AMAN TERTIB pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, formulir daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung GOFO AMAN TERTIB tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Loksado.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.45 Dasbor Indikator IID GOFO AMAN TERTIB

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Buatkan Bimtek sebanyak 3 Kali, 1 file bimtek berisi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.46 Kontribusi GOFO AMAN TERTIB terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi GOFO AMAN TERTIB dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.47 Kendala dan Tantangan GOFO AMAN TERTIB

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi GOFO AMAN TERTIB: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Loksado melalui pemanfaatan teknologi digital yang

andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 2 - Memantapkan pertahanan-keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change GOFO AMAN TERTIB disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Loksado membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.48 ToC GOFO AMAN TERTIB

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Loksado; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Output	Sistem GOFO AMAN TERTIB beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Loksado memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.49 Asumsi dan Risiko ToC GOFO AMAN TERTIB

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.50 Rekomendasi Pengembangan GOFO AMAN TERTIB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Loksado
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Loksado bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.8 Ilustrasi GOFO AMAN TERTIB

2.5.6 SISKA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.51 Identitas Inovasi SISKA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SISKA (Sistem Informasi Perkawinan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	**PIC/Narahubung**	Arief Rahman
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga

No	Atribut	Keterangan
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SISKA dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Batas Usia Perkawinan ideal menurut BKKBN adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pembatasan usia ideal perkawinan ini menjamin kematangan fisik (organ reproduksi), mental/emosional, serta kesiapan ekonomi/finansial. Hal ini krusial untuk mencegah perceraian, stunting, risiko kematian ibu/bayi, dan penyakit kanker mulut Rahim. Bila sudah terjadi perkawinan sebelum usia ideal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan KIE Penundaan Anak Pertama pada mereka untuk Mengatur kelahiran anak pertama setelah berusia 20 tahun, jarak ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan. Pada poin inilah Aplikasi SISKA (Sistem Informasi Perkawinan) berperan.

Manfaat yang diharapkan: Inovasi ini merupakan salah satu cara mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) dimana program ini adalah upaya terencana pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran, dan menciptakan keluarga sehat sejahtera *Outcome* yang diharapkan adalah pencapaian KB Baru yang lebih optimal yang akan menunda, memberi jarak, atau berhenti melahirkan sehingga semuanya menjadi lebih terencana.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SISKA secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.52 Rancang Bangun SISKA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SISKA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.53 Status Inovasi SISKA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.54 Dasbor Indikator IID SISKA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	data dukung tidak sesuai, sesuaikan dengan contoh di folder
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	tambahkan renja 2024
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tambahkan seperti contoh
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida opd setor link logo dan nama inovasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan data dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.55 Kontribusi SISKA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SISKA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.56 Kendala dan Tantangan SISKA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SISKA: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SISKA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai

memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.57 ToC SISKA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SISKA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.58 Asumsi dan Risiko ToC SISKA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.59 Rekomendasi Pengembangan SISKA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

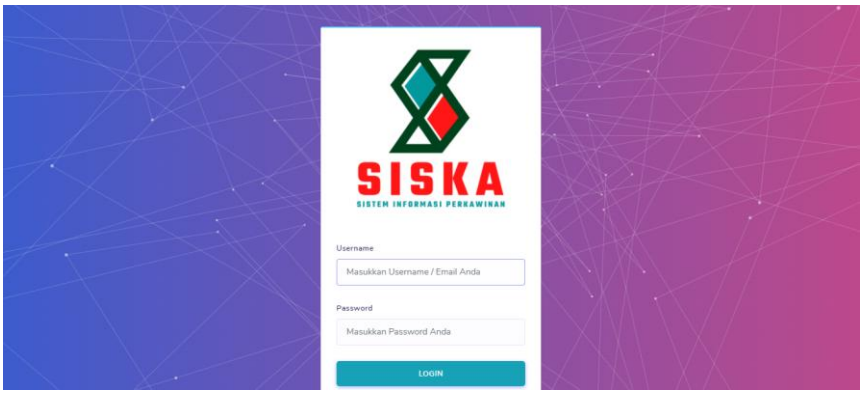

Gambar 2.9 Ilustrasi SISKA

2.5.7 Si Wajaseta

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.60 Identitas Inovasi Si Wajaseta

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Si Wajaseta
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	**PIC/Narahubung**	Arief Rahman
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Si Wajaseta dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC), khususnya dalam memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan yang aktif.

Manfaat yang diharapkan: Si WAJASETA merupakan inovasi pelayanan publik berbasis Whats App Group yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan. Inovasi ini mampu memotong alur birokrasi, meningkatkan kecepatan pelayanan, serta memberikan kemudahan konsultasi terkait berbagai permasalahan jaminan kesehatan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Si Wajaseta secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.61 Rancang Bangun Si Wajaseta

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Si Wajaseta diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.62 Status Inovasi Si Wajaseta pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.63 Dasbor Indikator IID Si Wajaseta

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	data dukung tidak sesuai, sesuaikan dengan contoh di folder
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	tambahkan renja 2024
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tambahkan seperti contoh
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida opd setor link logo dan nama inovasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan data dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.64 Kontribusi Si Wajaseta terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi Si Wajaseta dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.65 Kendala dan Tantangan Si Wajaseta

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Si Wajaseta: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan

kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Si Wajaseta disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.66 ToC Si Wajaseta

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Si Wajaseta beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.67 Asumsi dan Risiko ToC Si Wajaseta

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.68 Rekomendasi Pengembangan Si Wajaseta

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.10 Ilustrasi Si Wajaseta

2.5.8 Si IJAK

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.69 Identitas Inovasi Si IJAK

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Si IJAK
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)

No	Atribut	Keterangan
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	**PIC/Narahubung**	Arief Rahman
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Si IJAK dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Jaminan kesehatan merupakan instrumen penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan. Dalam implementasinya, masih sering dijumpai masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya Puskesmas, dengan kondisi jaminan kesehatan tidak aktif atau bahkan belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Kondisi ini berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, permasalahan ketidakaktifan jaminan kesehatan sering ditemukan pada saat masyarakat mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Manfaat yang diharapkan: Inovasi Si IJAK (Siap Aktivasi Jaminan Kesehatan) merupakan bentuk komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui percepatan aktivasi jaminan kesehatan. Dengan memanfaatkan Whats App Group sebagai media koordinasi yang efektif, inovasi ini mampu menjawab permasalahan masyarakat yang mengalami kendala jaminan kesehatan saat mengakses pelayanan di Puskesmas.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Si IJAK secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan

periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.70 Rancang Bangun Si IJAK

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Si IJAK diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.71 Status Inovasi Si IJAK pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.72 Dasbor Indikator IID Si IJAK

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	data dukung tidak sesuai, sesuaikan dengan contoh di folder
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	tambahkan renja 2024
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tambahkan seperti contoh

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida opd setor link logo dan nama inovasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan data dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.73 Kontribusi Si IJAK terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi Si IJAK dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.74 Kendala dan Tantangan Si IJAK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Si IJAK: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Si IJAK disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.75 ToC Si IJAK

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Si IJAK beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.76 Asumsi dan Risiko ToC Si IJAK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.77 Rekomendasi Pengembangan Si IJAK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Diskominfo dan Bapperida

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.11 Ilustrasi Si IJAK

2.5.9 MAK HAJI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.78 Identitas Inovasi MAK HAJI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	MAK HAJI (Manajemen Aset Kesehatan melalui Harmonisasi Aplikasi ASPAK dan Integrasi Data)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	**PIC/Narahubung**	Arief Rahman
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi MAK HAJI dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital,

sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah, Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan.

Manfaat yang diharapkan: MAK HAJI mendukung perencanaan kebutuhan sarana dan alat kesehatan yang lebih tepat sasaran. Data ASPAK yang terintegrasi menjadi dasar dalam penyusunan usulan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset, sehingga mampu mengurangi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dengan alokasi anggaran.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun MAK HAJI secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.79 Rancang Bangun MAK HAJI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian MAK HAJI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.80 Status Inovasi MAK HAJI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.81 Dasbor Indikator IID MAK HAJI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	data dukung tidak sesuai, sesuaikan dengan contoh di folder
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	tambahkan renja 2024
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tambahkan seperti contoh
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	data dukung belum ada, buatkan sesuai contoh
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida opd setor link logo dan nama inovasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan data dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.82 Kontribusi MAK HAJI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi MAK HAJI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.83 Kendala dan Tantangan MAK HAJI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi MAK HAJI: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change MAK HAJI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.84 ToC MAK HAJI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem MAK HAJI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.85 Asumsi dan Risiko ToC MAK HAJI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.86 Rekomendasi Pengembangan MAK HAJI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.12 Ilustrasi MAK HAJI

2.5.10 PESONA BUMIL CANTIK

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.87 Identitas Inovasi PESONA BUMIL CANTIK

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	PESONA BUMIL CANTIK (Pemantauan, Edukasi, dan Solusi Ibu Hamil Berisiko Tinggi Melalui Chatting untuk Menurunkan BBLR dan Mencegah Stunting)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Belum tercantum
5	**PIC/Narahubung**	-
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi PESONA BUMIL CANTIK dikembangkan oleh Belum tercantum dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Kasus BBLR di Puskesmas Jambu Hilir masih tinggi. Pada tahun 2023 terdapat 30 kasus atau 10 persen dan meningkat menjadi 31 kasus atau 11,07 persen pada tahun 2024. Jumlah ibu hamil berisiko tinggi juga meningkat dari 69 orang pada tahun 2023 menjadi 74 orang pada tahun 2024. Permasalahan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pemantauan ibu hamil, kepatuhan ANC dan konsumsi Tablet Tambah Darah, keterbatasan edukasi, serta lambatnya penyampaian keluhan. Karena sebagian besar ibu hamil

telah menggunakan Whats App, dikembangkan PESONA BUMIL CHANTIK sebagai media pemantauan, edukasi, konsultasi, kelas ibu hamil, dan kunjungan rumah

Manfaat yang diharapkan: Inovasi mempercepat komunikasi antara ibu hamil dan tenaga kesehatan, meningkatkan akses informasi, serta memperkuat pemantauan kehamilan. Dalam jangka menengah, inovasi diharapkan meningkatkan kepatuhan ANC dan konsumsi Tablet Tambah Darah, menurunkan komplikasi kehamilan, BBLR, kematian neonatal, dan risiko stunting.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun PESONA BUMIL CANTIK secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.88 Rancang Bangun PESONA BUMIL CANTIK

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Belum tercantum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian PESONA BUMIL CANTIK diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA)

Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum tercantum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.89 Status Inovasi PESONA BUMIL CANTIK pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.90 Dasbor Indikator IID PESONA BUMIL CANTIK

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.91 Kontribusi PESONA BUMIL CANTIK terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi PESONA BUMIL CANTIK dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.92 Kendala dan Tantangan PESONA BUMIL CANTIK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi PESONA BUMIL CANTIK: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja Belum tercantum melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk

kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change PESONA BUMIL CANTIK disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Belum tercantum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.93 ToC PESONA BUMIL CANTIK

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Belum tercantum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem PESONA BUMIL CANTIK beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Belum tercantum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.94 Asumsi dan Risiko ToC PESONA BUMIL CANTIK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.95 Rekomendasi Pengembangan PESONA BUMIL CANTIK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Belum tercantum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Belum tercantum bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.13 Ilustrasi PESONA BUMIL CANTIK

2.5.11 KOSAN *ONLINE*

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.96 Identitas Inovasi KOSAN ONLINE

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	KOSAN *ONLINE* (KONSULTASI KLINIK SANITASI BERBASIS *ONLINE*)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Belum tercantum
5	**PIC/Narahubung**	-
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi KOSAN *ONLINE* dikembangkan oleh Belum tercantum dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan kesehatan lingkungan berbasis digital/daring yang mempermudah masyarakat dalam melakukan konseling, konsultasi, serta pengaduan masalah sanitasi dasar (seperti kualitas air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga) secara fleksibel tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Manfaat yang diharapkan: Mempermudah Akses Konsultasi: Masyarakat dapat dengan cepat berkonsultasi mengenai permasalahan sanitasi dan lingkungan kapan saja dan di mana saja. Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan: Membantu mendeteksi dan mencegah potensi penyebaran penyakit berbasis lingkungan (seperti diare, DBD, dan stunting) melalui edukasi sanitasi yang tepat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun KOSAN *ONLINE* secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.97 Rancang Bangun KOSAN ONLINE

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Belum tercantum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian KOSAN *ONLINE* diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum tercantum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.98 Status Inovasi KOSAN ONLINE pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.99 Dasbor Indikator IID KOSAN ONLINE

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.100 Kontribusi KOSAN ONLINE terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi KOSAN *ONLINE* dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.101 Kendala dan Tantangan KOSAN ONLINE

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi KOSAN *ONLINE*: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Belum tercantum melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change KOSAN *ONLINE* disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Belum tercantum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.102 ToC KOSAN ONLINE

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Belum tercantum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem KOSAN *ONLINE* beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Belum tercantum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.103 Asumsi dan Risiko ToC KOSAN ONLINE

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.104 Rekomendasi Pengembangan KOSAN ONLINE

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Belum tercantum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Belum tercantum bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital KOSAN *ONLINE* - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.14 Ilustrasi KOSAN ONLINE

2.5.12 KODE SMS BU SUSI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.105 Identitas Inovasi KODE SMS BU SUSI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	KODE SMS BU SUSI (Sadar Masalah Stunting Bumil Sadar Menyusui Sejak Dini)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Belum tercantum
5	**PIC/Narahubung**	-
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi KODE SMS BU SUSI dikembangkan oleh Belum tercantum dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan kesehatan promotif dan edukatif bagi ibu hamil (bumil) yang berfokus pada peningkatkan kesadaran akan bahaya stunting serta pentingnya edukasi kesiapan menyusui sejak masa kehamilan. Program ini mengintegrasikan sosialisasi gizi, penguatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan edukasi pemberian ASI Eksklusif guna memutus risiko stunting sejak awal kehidupan janin/bayi.

Manfaat yang diharapkan: Pencegahan Stunting Sejak Dini: Mempercepat upaya penurunan angka stunting melalui penguatan pemahaman ibu hamil terhadap faktor risiko stunting dan pentingnya gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Meningkatkan Keberhasilan ASI Eksklusif: Mendorong kesiapan fisik dan mental ibu hamil untuk melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun KODE SMS BU SUSI secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.106 Rancang Bangun KODE SMS BU SUSI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Belum tercantum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian KODE SMS BU SUSI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum tercantum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.107 Status Inovasi KODE SMS BU SUSI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.108 Dasbor Indikator IID KODE SMS BU SUSI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.109 Kontribusi KODE SMS BU SUSI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi KODE SMS BU SUSI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.110 Kendala dan Tantangan KODE SMS BU SUSI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi KODE SMS BU SUSI: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Belum tercantum melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change KODE SMS BU SUSI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima

layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Belum tercantum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.111 ToC KODE SMS BU SUSI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Belum tercantum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem KODE SMS BU SUSI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Belum tercantum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.112 Asumsi dan Risiko ToC KODE SMS BU SUSI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.113 Rekomendasi Pengembangan KODE SMS BU SUSI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Belum tercantum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Belum tercantum bersama Diskominfo dan Bapperida

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital KODE SMS BU SUSI - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.15 Ilustrasi KODE SMS BU SUSI

2.5.13 BINGKAI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.114 Identitas Inovasi BINGKAI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	BINGKAI (Booklet Informasi Lengkap Persiapan Lahiran)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Belum tercantum
5	**PIC/Narahubung**	-
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi BINGKAI dikembangkan oleh Belum tercantum dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi media edukasi kesehatan berupa media informasi cetak dan digital ringkas yang memuat panduan komprehensif persiapan persalinan. Informasi mencakup tanda-tanda awal persalinan, perlengkapan medis dan pribadi yang harus disiapkan, kesiapsiagaan donor darah, transportasi rujukan, hingga perencanaan tempat dan penolong persalinan guna mewujudkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

Manfaat yang diharapkan: Meningkatkan Kesiapsiagaan Ibu & Keluarga: Membantu ibu hamil dan keluarga merencanakan persalinan secara matang sehingga mengurangi kepanikan dan keterlambatan dalam mengambil keputusan medis saat persalinan. Pencegahan Komplikasi Maternal: Meminimalisir risiko komplikasi kehamilan dan persalinan dengan meningkatkan kesadaran ibu mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan/persalinan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun BINGKAI secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.115 Rancang Bangun BINGKAI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Belum tercantum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian BINGKAI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum tercantum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.116 Status Inovasi BINGKAI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.117 Dasbor Indikator IID BINGKAI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.118 Kontribusi BINGKAI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi BINGKAI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.119 Kendala dan Tantangan BINGKAI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi BINGKAI: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Belum tercantum melalui

pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change BINGKAI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Belum tercantum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.120 ToC BINGKAI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Belum tercantum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Output	Sistem BINGKAI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Belum tercantum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.121 Asumsi dan Risiko ToC BINGKAI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.122 Rekomendasi Pengembangan BINGKAI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Belum tercantum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Belum tercantum bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.16 Ilustrasi BINGKAI

2.5.14 SAPA QR

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.123 Identitas Inovasi SAPA QR

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SAPA QR (Survei Kepuasan Masyarakat Melalui QR Code)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Belum tercantum
5	**PIC/Narahubung**	-

No	Atribut	Keterangan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SAPA QR dikembangkan oleh Belum tercantum dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik digital berbasis kode QR (Quick Response Code) yang dirancang untuk mempermudah masyarakat/pengguna layanan dalam memberikan penilaian, ulasan, serta masukan terhadap kualitas pelayanan publik di unit kerja/instansi secara praktis, cepat, dan realtime melalui perangkat smartphone.

Manfaat yang diharapkan: Memudahkan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dapat memberikan umpan balik (feedback) atau penilaian layanan dengan mudah hanya dengan memindai kode QR tanpa perlu mengisi formulir kertas secara manual. Evaluasi Layanan Secara *Real-Time*: Memudahkan pimpinan dan pengelola layanan publik dalam memantau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara transparan, cepat, dan akurat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SAPA QR secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.124 Rancang Bangun SAPA QR

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kode qr
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Belum tercantum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SAPA QR diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum tercantum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.125 Status Inovasi SAPA QR pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, kode qr	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi

berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.126 Dasbor Indikator IID SAPA QR

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.127 Kontribusi SAPA QR terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SAPA QR dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.128 Kendala dan Tantangan SAPA QR

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SAPA QR: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Belum tercantum melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SAPA QR disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Belum tercantum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.129 ToC SAPA QR

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Belum tercantum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SAPA QR beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Belum tercantum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.130 Asumsi dan Risiko ToC SAPA QR

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.131 Rekomendasi Pengembangan SAPA QR

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Belum tercantum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Belum tercantum bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SAPA QR - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.17 Ilustrasi SAPA QR

2.5.15 Lanjung

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.132 Identitas Inovasi Lanjung

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Lanjung (Langsung Julung)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Lanjung dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi Lanjung dirancang untuk menjawab permasalahan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kefarmasian, terutama pasien yang tinggal di daerah yang jauh dan terpencil, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau pasien kronis yang tidak memungkinkan datang langsung ke rumah sakit. Sebelum inovasi, distribusi obat dilakukan secara konvensional dan mengharuskan pasien atau keluarga datang ke instalasi farmasi. Hal ini menyebabkan antrean panjang, keterlambatan pengobatan, dan menurunnya kepatuhan minum obat. Dengan Lanjung, sistem pelayanan kefarmasian di RSUD

Brigjend H. Hasan Basry Kandangan ditransformasi menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Manfaat yang diharapkan: Implementasi inovasi Lanjung (Langsung Julung) telah memberikan sejumlah manfaat nyata bagi peningkatan mutu layanan kefarmasian di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, antara lain: Meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien, khususnya pasien kronis, dengan capaian hingga 90%, karena pasien tidak lagi mengalami hambatan dalam memperoleh obat secara tepat waktu.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Lanjung secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.133 Rancang Bangun Lanjung

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Lanjung diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.134 Status Inovasi Lanjung pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Non Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.135 Dasbor Indikator IID Lanjung

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.136 Kontribusi Lanjung terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi Lanjung dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.137 Kendala dan Tantangan Lanjung

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Lanjung: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan.

Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Lanjung disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.138 ToC Lanjung

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Lanjung beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.139 Asumsi dan Risiko ToC Lanjung

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.140 Rekomendasi Pengembangan Lanjung

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.18 Ilustrasi Lanjung

2.5.16 E-Rekam Medis RSUD BHHB

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.141 Identitas Inovasi E-Rekam Medis RSUD BHHB

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	E-Rekam Medis RSUD BHHB
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital

No	Atribut	Keterangan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi E-Rekam Medis RSUD BHHB dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi E-Rekam Medis di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. Inovasi ini dirancang untuk menggantikan sistem pencatatan rekam medis manual yang selama ini memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterlambatan akses data, risiko kehilangan dokumen, dan kesalahan pencatatan. Rancang bangun inovasi dimulai dengan analisis kebutuhan pelayanan serta pemetaan alur proses rekam medis dari pendaftaran hingga pelayanan lanjutan.

Manfaat yang diharapkan: Sebelum inovasi dijalankan, pencatatan rekam medis masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas. Hal ini menyebabkan berbagai kendala, antara lain proses pencarian data pasien yang memakan waktu lama, risiko kehilangan atau kerusakan arsip, serta kesalahan pencatatan karena tulisan tangan atau dokumen yang tidak lengkap.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun E-Rekam Medis RSUD BHHB secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.142 Rancang Bangun E-Rekam Medis RSUD BHHB

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian E-Rekam Medis RSUD BHHB diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.143 Status Inovasi E-Rekam Medis RSUD BHHB pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.144 Dasbor Indikator IID E-Rekam Medis RSUD BHHB

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.145 Kontribusi E-Rekam Medis RSUD BHHB terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi E-Rekam Medis RSUD BHHB dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.146 Kendala dan Tantangan E-Rekam Medis RSUD BHHB

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi E-Rekam Medis RSUD BHHB: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change E-Rekam Medis RSUD BHHB disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh

unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.147 ToC E-Rekam Medis RSUD BHHB

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem E-Rekam Medis RSUD BHHB beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.148 Asumsi dan Risiko ToC E-Rekam Medis RSUD BHHB

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.149 Rekomendasi Pengembangan E-Rekam Medis RSUD BHHB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

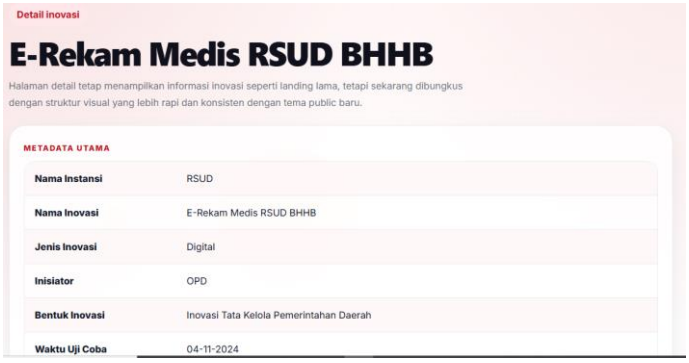

Gambar 2.19 Ilustrasi E-Rekam Medis RSUD BHHB

2.5.17 SI KOMAR

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.150 Identitas Inovasi SI KOMAR

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI KOMAR (Sistem Informasi Ketersediaan Kamar)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SI KOMAR dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan rumah sakit kelas B dan sebagai rumah sakit rujukan sebanua enam di Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa rumah sakit diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdekat dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sering ditemukan kesulitan dalam proses pencarian informasi ketersediaan kamar rawat inap baik rujukan pasien dari rumah sakit lain ke RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan maupun Pasien Umum

karena terlambatnya informasi ketersediaan kamar rawat inap, pencarian informasi ketersediaan kamar rawat inap membutuhkan waktu yang lama yaitu +/- 15 menit.

Manfaat yang diharapkan: Aplikasi Si Komar membantu dengan cepat dan akurat mengakses ketersediaan maupun kondisi ruang rawat inap di RSUD BHHB Kandangan karena hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit. Hal ini tentu saja tidak hanya memberikan kemudahan bagi petugas RSUD dalam memberikan informasi, namun juga memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun rumah sakit lain untuk memperoleh informasi ketersediaan kamar rawat inap.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI KOMAR secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.151 Rancang Bangun SI KOMAR

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI KOMAR diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.152 Status Inovasi SI KOMAR pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.153 Dasbor Indikator IID SI KOMAR

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.154 Kontribusi SI KOMAR terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SI KOMAR dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.155 Kendala dan Tantangan SI KOMAR

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI KOMAR: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan.

Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI KOMAR disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.156 ToC SI KOMAR

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI KOMAR beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.157 Asumsi dan Risiko ToC SI KOMAR

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.158 Rekomendasi Pengembangan SI KOMAR

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SI KOMAR - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

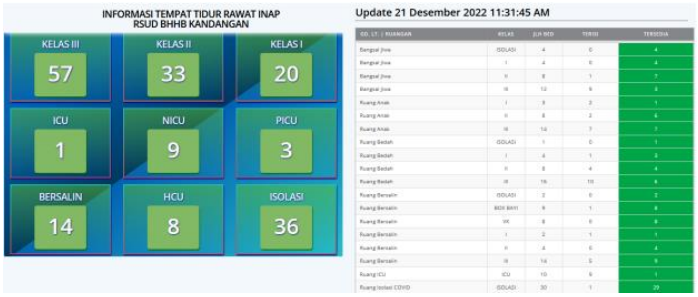

Gambar 2.20 Ilustrasi SI KOMAR

2.5.18 SIEVAK

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.159 Identitas Inovasi SIEVAK

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIEVAK (SISTEM INFORMASI EVALUASI ASUHAN KEPERAWATAN)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital

No	Atribut	Keterangan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIEVAK dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Sistem Informasi Evaluasi Asuhan Keperawatan Berbasis Android Pada Seksi Asuhan Keperawatan RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan. Dengan tersedianya data evaluasi pelayanan asuhan keperawatan yang lengkap dan valid, maka diharapkan dapat memudahkan seksi asuhan keperawatan dalam melakukan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan. Dengan hadirnya inovasi ini membuat tersedianya data dan informasi yang mudah dipahami sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan dan Mendukung kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dalam menjaga dan mempertahankan akreditasi Paripurna dan citra pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.

Manfaat yang diharapkan: Meningkatkan efisiensi: membantu perawat dalam menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan evaluasi asuhan keperawatan. Meningkatkan akurasi: membantu perawat dalam membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang efektivitas asuhan keperawatan. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan: membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang lebih efektif dan efisien. Meningkatkan kepuasan pasien: membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIEVAK secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.160 Rancang Bangun SIEVAK

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIEVAK diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.161 Status Inovasi SIEVAK pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.162 Dasbor Indikator IID SIEVAK

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.163 Kontribusi SIEVAK terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SIEVAK dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.164 Kendala dan Tantangan SIEVAK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIEVAK: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIEVAK disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya

cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.165 ToC SIEVAK

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIEVAK beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.166 Asumsi dan Risiko ToC SIEVAK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.167 Rekomendasi Pengembangan SIEVAK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

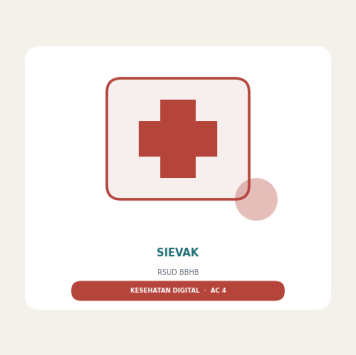

Gambar 2.21 Ilustrasi SIEVAK

2.5.19 TAS UMBUY

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.168 Identitas Inovasi TAS UMBUY

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	TAS UMBUY (Tarif Administrasi paSien UMum, Bpjs selisih Untuk di baYar)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi TAS UMBUY dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. TAS UMBUY merupakan inovasi digital yang menghadirkan sistem informasi biaya pelayanan berbasis QR Code dan web application tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pasien dalam mengakses informasi tagihan secara cepat, akurat, dan transparan menggunakan telepon pintar. Keunggulan utama TAS UMBUY adalah kemampuannya mengintegrasikan akses informasi biaya dengan layanan Whats App Kasir, sehingga setelah mengetahui jumlah tagihan, pasien

dapat langsung berkomunikasi dengan petugas untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pembayaran.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan TAS UMBUY memberikan dampak berupa meningkatnya transparansi informasi biaya pelayanan, percepatan akses informasi tagihan pasien, berkurangnya antrean di loket kasir, meningkatnya efisiensi pelayanan administrasi dan kinerja petugas, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Inovasi ini juga mendukung transformasi digital pelayanan publik dan implementasi SPBE, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3.341 pasien umum selama periode November 2025–Mei 2026.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun TAS UMBUY secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.169 Rancang Bangun TAS UMBUY

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kode qr, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian TAS UMBUY diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.170 Status Inovasi TAS UMBUY pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kode qr, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Sudah Input	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.171 Dasbor Indikator IID TAS UMBUY

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.172 Kontribusi TAS UMBUY terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi TAS UMBUY dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.173 Kendala dan Tantangan TAS UMBUY

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi TAS UMBUY: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan

berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change TAS UMBUY disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.174 ToC TAS UMBUY

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem TAS UMBUY beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.175 Asumsi dan Risiko ToC TAS UMBUY

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.176 Rekomendasi Pengembangan TAS UMBUY

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

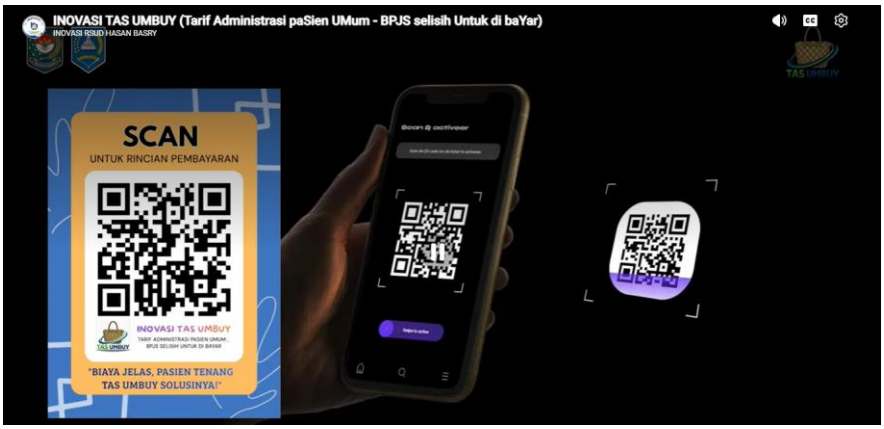

Gambar 2.22 Ilustrasi TAS UMBUY

2.5.20 JEMPOL ENJOI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.177 Identitas Inovasi JEMPOL ENJOI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	JEMPOL ENJOI (JEMPut bOLa pENgunJung pOli)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi JEMPOL ENJOI dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi JEMPOL ENJOI (JEMPut b OLa p ENgun Jung p Oli) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan melalui pendampingan aktif kepada pasien dan keluarga pasien sejak memasuki area rumah sakit hingga memperoleh pelayanan di poliklinik tujuan. Inovasi ini ditargetkan mampu memberikan kemudahan akses pelayanan, mengurangi kebingungan pasien dalam memahami alur pelayanan, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan inovasi JEMPOL ENJOI (JEMPut b OLa p ENgun Jung p Oli) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Melalui sistem pendampingan aktif, pasien memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan, memahami alur pelayanan, menemukan lokasi poliklinik tujuan, serta mendapatkan bantuan selama proses pelayanan berlangsung. Hal ini menjadikan pelayanan lebih cepat, tertib, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun JEMPOL ENJOI secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.178 Rancang Bangun JEMPOL ENJOI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian JEMPOL ENJOI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.179 Status Inovasi JEMPOL ENJOI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.180 Dasbor Indikator IID JEMPOL ENJOI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.181 Kontribusi JEMPOL ENJOI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi JEMPOL ENJOI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.182 Kendala dan Tantangan JEMPOL ENJOI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi JEMPOL ENJOI: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change JEMPOL ENJOI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.183 ToC JEMPOL ENJOI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem JEMPOL ENJOI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.184 Asumsi dan Risiko ToC JEMPOL ENJOI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.185 Rekomendasi Pengembangan JEMPOL ENJOI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.23 Ilustrasi JEMPOL ENJOI

2.5.21 SIAMPRAH

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.186 Identitas Inovasi SIAMPRAH

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIAMPRAH (Sistem Informasi Amprah)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SIAMPRAH dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIAMPRAH (Sistem Informasi Amprah) merupakan inovasi digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengajuan barang dan obat di lingkungan rumah sakit. Inovasi ini lahir sebagai solusi atas proses amprah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, sehingga sering menyebabkan keterlambatan, sulitnya pemantauan status permintaan, tingginya penggunaan dokumen fisik, serta kurang optimalnya pengelolaan logistik.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIAMPRAH (Sistem Informasi Amprah) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang dan obat di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan melalui digitalisasi proses amprah. Inovasi ini mempercepat proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan distribusi barang serta obat, sekaligus memudahkan monitoring status permintaan secara *real-time*.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIAMPRAH secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.187 Rancang Bangun SIAMPRAH

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan, formulir daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIAMPRAH diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.188 Status Inovasi SIAMPRAH pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan, formulir daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Sudah Input	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.189 Dasbor Indikator IID SIAMPRAH

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.190 Kontribusi SIAMPRAH terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SIAMPRAH dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.191 Kendala dan Tantangan SIAMPRAH

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIAMPRAH: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIAMPRAH disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima

layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.192 ToC SIAMPRAH

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIAMPRAH beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.193 Asumsi dan Risiko ToC SIAMPRAH

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.194 Rekomendasi Pengembangan SIAMPRAH

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SIAMPRAH - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.24 Ilustrasi SIAMPRAH

2.5.22 SIFARIS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.195 Identitas Inovasi SIFARIS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIFARIS (Sistem Farmasi Pintar Terintegrasi)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIFARIS dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIFARIS (Sistem Farmasi Pintar Terintegrasi) merupakan inovasi digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengelolaan farmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas pengelolaan persediaan obat yang sebelumnya masih

dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan pemantauan stok secara *real-time*, memperlambat proses distribusi, dan meningkatkan risiko terjadinya kekurangan maupun kelebihan stok obat.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIFARIS (Sistem Farmasi Pintar Terintegrasi) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan farmasi melalui sistem yang terintegrasi secara *real-time*. Inovasi ini mempercepat proses permintaan, distribusi, dan pelaporan obat, meningkatkan akurasi data persediaan, serta mengurangi risiko stock out dan over stock.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIFARIS secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.196 Rancang Bangun SIFARIS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIFARIS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.197 Status Inovasi SIFARIS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Sudah Input	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.198 Dasbor Indikator IID SIFARIS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.199 Kontribusi SIFARIS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SIFARIS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.200 Kendala dan Tantangan SIFARIS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIFARIS: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan.

Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIFARIS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.201 ToC SIFARIS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIFARIS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.202 Asumsi dan Risiko ToC SIFARIS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.203 Rekomendasi Pengembangan SIFARIS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.25 Ilustrasi SIFARIS

2.5.23 SITI LAMAK

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.204 Identitas Inovasi SITI LAMAK

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SITI LAMAK (APLIKASI eTIKET LABEL MAKANAN)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SITI LAMAK dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SITI LAMAK (Aplikasi e Tiket Label Makanan) merupakan inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk memutakhirkan pengelolaan dan pemberian label/etiket diet makanan bagi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti rumah sakit atau puskesmas). Inovasi ini hadir untuk mentransformasi sistem pelabelan makanan pasien yang sebelumnya dilakukan secara manual atau terpisah, yang rentan terhadap risiko kesalahan pemberian jenis diet. Melalui aplikasi SITI LAMAK, data kondisi medis, alergi, dan kebutuhan gizi khusus pasien diintegrasikan secara elektronik untuk mencetak etiket label makanan yang akurat, presisi, dan mudah dibaca oleh tim gizi maupun perawat.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SITI LAMAK memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keselamatan pasien (patient safety) melalui pencegahan kesalahan pemberian porsi, jenis diet, maupun bahan makanan alertegen (zero human error). Sistem otomatisasi ini memastikan setiap paket makanan yang disajikan telah sesuai dengan preskripsi gizi yang ditetapkan oleh dokter dan nutrisionis.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SITI LAMAK secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.205 Rancang Bangun SITI LAMAK

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SITI LAMAK diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.206 Status Inovasi SITI LAMAK pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi

berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.207 Dasbor Indikator IID SITI LAMAK

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.208 Kontribusi SITI LAMAK terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SITI LAMAK dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.209 Kendala dan Tantangan SITI LAMAK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SITI LAMAK: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SITI LAMAK disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.210 ToC SITI LAMAK

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SITI LAMAK beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.211 Asumsi dan Risiko ToC SITI LAMAK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.212 Rekomendasi Pengembangan SITI LAMAK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SITI LAMAK - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

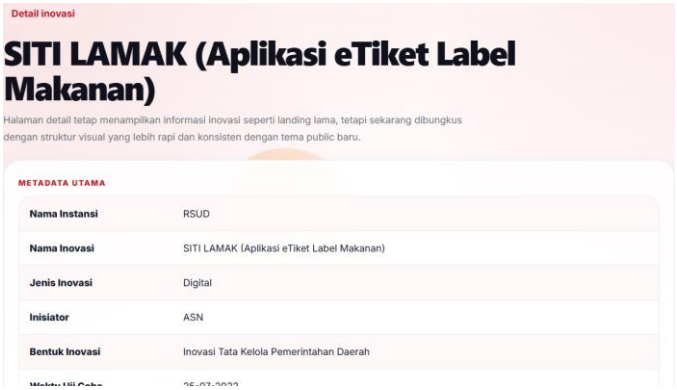

Gambar 2.26 Ilustrasi SITI LAMAK

2.5.24 SIIMUT

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.213 Identitas Inovasi SIIMUT

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIIMUT (Sistem Informasi Indikator Mutu)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIIMUT dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIIMUT (Sistem Informasi Indikator Mutu) merupakan inovasi tata kelola mutu berbasis digital yang dirancang untuk memutakhirkan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan Indikator Mutu Nasional (INM) serta Indikator Mutu Prioritas di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti Rumah Sakit atau Puskesmas). Inovasi ini hadir untuk mentransformasi proses pengumpulan data mutu pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terfragmentasi, yang kerap memicu keterlambatan evaluasi serta ketidakakuratan data. Melalui platform SIIMUT, seluruh unit kerja/ruangan dapat

mencatatkan, mengunggah capaian indikator mutu, dan memverifikasi data kinerja secara *real-time* dan terintegrasi.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIIMUT memberikan dampak langsung terhadap peningkatan standar keselamatan pasien (patient safety) dan kualitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan data capaian mutu yang dapat dipantau secara *real-time* memudahkan jajaran pimpinan dan Komite Mutu untuk mendeteksi potensi risiko serta melakukan tindakan korektif secara cepat dan tepat sebelum timbul masalah yang lebih besar.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIIMUT secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.214 Rancang Bangun SIIMUT

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIIMUT diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.215 Status Inovasi SIIMUT pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.216 Dasbor Indikator IID SIIMUT

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.217 Kontribusi SIIMUT terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SIIMUT dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.218 Kendala dan Tantangan SIIMUT

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIIMUT: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan.

Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIIMUT disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.219 ToC SIIMUT

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIIMUT beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.220 Asumsi dan Risiko ToC SIIMUT

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.221 Rekomendasi Pengembangan SIIMUT

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.27 Ilustrasi SIIMUT

2.5.25 e-RESEP

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.222 Identitas Inovasi e-RESEP

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	e-RESEP
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi e-RESEP dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster

Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. e-RESEP (Elektronik Resep) merupakan inovasi pelayanan kesehatan berbasis sistem informasi terintegrasi yang memutakhirkan seluruh alur pembuatan, pengiriman, dan pengelolaan resep obat di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti Rumah Sakit atau Puskesmas). Inovasi ini hadir untuk menggantikan lembaran resep kertas konvensional yang kerap terkendala oleh masalah tulisan tangan dokter yang sulit dibaca, risiko resep hilang, serta alur pengantrean obat yang panjang. Melalui sistem e-RESEP, dokter meresepkan obat secara langsung (digital entry) melalui komputer saat pemeriksaan pasien, yang secara otomatis terhubung ke sistem komputer di instalasi farmasi/apotek.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan e-RESEP memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan pasien (patient safety) dengan mengeliminasi kesalahan pembacaan resep (medication error), dosis, maupun jenis obat akibat keterbacaan tulisan tangan. Sistem ini dilengkapi fitur peringatan otomatis (clinical decision support) yang dapat mendeteksi risiko interaksi obat yang berbahaya, alergi pasien, serta duplikasi terapi sebelum resep diproses oleh apoteker.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun e-RESEP secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.223 Rancang Bangun e-RESEP

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian e-RESEP diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.224 Status Inovasi e-RESEP pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi

berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.225 Dasbor Indikator IID e-RESEP

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.226 Kontribusi e-RESEP terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi e-RESEP dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.227 Kendala dan Tantangan e-RESEP

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi e-RESEP: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change e-RESEP disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.228 ToC e-RESEP

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem e-RESEP beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.229 Asumsi dan Risiko ToC e-RESEP

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.230 Rekomendasi Pengembangan e-RESEP

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital e-RESEP - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.28 Ilustrasi e-RESEP

2.5.26 JEMPOL IGD

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.231 Identitas Inovasi JEMPOL IGD

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	JEMPOL IGD (Jejak Monitoring Pelayanan *Online* IGD)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi JEMPOL IGD dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. JEMPOL IGD (Jejak Monitoring Pelayanan *Online* IGD) merupakan inovasi pelayanan kesehatan darurat berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk memantau, mendokumentasikan, dan mengendalikan alur pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) secara *real-time*. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas tantangan tingginya dinamika penanganan kegawatdaruratan, di mana keterlambatan tindakan, ketidakpastian informasi status pasien, dan lambatnya koordinasi antarpetugas medis sering kali menjadi hambatan.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan JEMPOL IGD memberikan dampak langsung pada percepatan penanganan medis (response time) dan peningkatan keselamatan pasien (patient safety). Sistem pemantauan secara *real-time* ini memastikan tidak ada pasien kritis yang terlewat atau tertunda mendapatkan tindakan gawat darurat, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan komunikasi (misscommunication) antarpetugas medis di IGD.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun JEMPOL IGD secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.232 Rancang Bangun JEMPOL IGD

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian JEMPOL IGD diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.233 Status Inovasi JEMPOL IGD pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.234 Dasbor Indikator IID JEMPOL IGD

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.235 Kontribusi JEMPOL IGD terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi JEMPOL IGD dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.236 Kendala dan Tantangan JEMPOL IGD

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi JEMPOL IGD: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change JEMPOL IGD disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima

layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.237 ToC JEMPOL IGD

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem JEMPOL IGD beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.238 Asumsi dan Risiko ToC JEMPOL IGD

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.239 Rekomendasi Pengembangan JEMPOL IGD

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.29 Ilustrasi JEMPOL IGD

2.5.27 SI LUKA CARE

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.240 Identitas Inovasi SI LUKA CARE

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI LUKA CARE
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD Daha Sejahtera
5	**PIC/Narahubung**	Izhar Ahmad
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI LUKA CARE dikembangkan oleh RSUD Daha Sejahtera dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI LUKA CARE (Sistem Layanan Kunjungan Perawatan Luka) merupakan inovasi pelayanan kesehatan RSUD Daha Sejahtera yang menghadirkan layanan home care bagi pasien pasca operasi maupun pasien dengan luka kronis. Inovasi ini dikembangkan untuk mengatasi kendala pasien dalam melakukan kontrol ke rumah sakit akibat keterbatasan fisik, jarak, biaya transportasi, maupun keterbatasan pendamping, sehingga perawatan luka dapat dilakukan secara berkelanjutan di rumah.

Manfaat yang diharapkan: Implementasi SI LUKA CARE memberikan dampak positif berupa perawatan lebih mudah tanpa harus sering ke rumah sakit , luka lebih cepat sembuh, menurunkan resiko infeksi, biaya tranportasi berkurang, kepuasan pasien meningkat, menigkatkan mutu pelayanan, meningkatkan citra rumah sakit, menigkatkan kepercayaan masyarakat, menjadi inovasi unggulan RS Tipe D dan mendukung penilaian inovasi daerah dan akreditasi rumah sakit.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI LUKA CARE secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.241 Rancang Bangun SI LUKA CARE

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD Daha Sejahtera; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI LUKA CARE diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Daha Sejahtera. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan

bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.242 Status Inovasi SI LUKA CARE pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.243 Dasbor Indikator IID SI LUKA CARE

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai dan Lengkap
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Sesuai dan Lengkap
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai dan Lengkap
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai dan Lengkap

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Sesuai dan Lengkap
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai dan Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai dan Lengkap
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai dan Lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Sesuai dan Lengkap
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Sesuai dan Lengkap
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Sesuai dan Lengkap
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Sesuai dan Lengkap
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai dan Lengkap
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Sesuai dan Lengkap
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Sesuai dan Lengkap

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.244 Kontribusi SI LUKA CARE terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SI LUKA CARE dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.245 Kendala dan Tantangan SI LUKA CARE

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI LUKA CARE: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD Daha Sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk

kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI LUKA CARE disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD Daha Sejahtera membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.246 ToC SI LUKA CARE

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD Daha Sejahtera; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI LUKA CARE beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD Daha Sejahtera memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.247 Asumsi dan Risiko ToC SI LUKA CARE

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.248 Rekomendasi Pengembangan SI LUKA CARE

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD Daha Sejahtera
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD Daha Sejahtera bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.30 Ilustrasi SI LUKA CARE

2.5.28 Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.249 Identitas Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	**PIC/Narahubung**	Hafis Anshari
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster

Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Sekolah Koperasi Desa di Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk nyata dukungan untuk Program Strategis Nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sekolah Koperasi Desa ini dalam bentuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk warga desa baik yang sebagai calon anggota koperasi, ataupun yang sudah menjadi anggota dan juga pengurus Koperasi. Pelatihan anggota koperasi desa, khususnya melalui program kegiatan (2025/2026), fokus pada peningkatan kompetensi manajemen, legalitas, digitalisasi, dan pengawasan untuk memperkuat ekonomi desa. Program ini mencakup pelatihan pengurus, pengawas, dan pengelola usaha dengan metode bimbingan teknis (Bimtek) hingga magang.

Manfaat yang diharapkan: Terbentuknya 148, Data kelengkapan administrasi KDKMP menunjukkan bahwa dari total 148 KDKMP, 148 Akta dan 148 NPWP telah diselesaikan. Sebanyak 147 KDKMP sudah memiliki rekening, dengan Desa Pakan Dalam, Daha Utara yang belum memiliki rekening karena perpindahan domisili bendahara dan pergantian pengurus. Untuk NIB, 142 KDKMP telah diterbitkan, sementara 6 desa masih belum menerbitkan NIB. Proses penerbitan NIB diperkirakan selesai pada minggu kedua Maret 2026.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.250 Rancang Bangun Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.251 Status Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi.

Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.252 Dasbor Indikator IID Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.253 Kontribusi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.254 Kendala dan Tantangan Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome*

akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.255 ToC Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.256 Asumsi dan Risiko ToC Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.257 Rekomendasi Pengembangan Sekolah Koperasi Desa Hulu

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.31 Ilustrasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

2.5.29 Kelas Komputer Dasar

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.258 Identitas Inovasi Kelas Komputer Dasar

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Kelas Komputer Dasar
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Kelas Komputer Dasar dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi Kelas Komputer Dasar merupakan salah satu bentuk implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Manfaat yang diharapkan: Dampak Inovasi terhadap TPBIS Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, program memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan TPBIS, yaitu: Meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan digital. Mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang pemberdayaan masyarakat. Membantu masyarakat meningkatkan kapasitas diri untuk mendukung pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi produktif.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Kelas Komputer Dasar secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.259 Rancang Bangun Kelas Komputer Dasar

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Kelas Komputer Dasar diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023),

dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.260 Status Inovasi Kelas Komputer Dasar pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.261 Dasbor Indikator IID Kelas Komputer Dasar

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.262 Kontribusi Kelas Komputer Dasar terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi Kelas Komputer Dasar dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.263 Kendala dan Tantangan Kelas Komputer Dasar

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Kelas Komputer Dasar: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Kelas Komputer Dasar disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.264 ToC Kelas Komputer Dasar

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Kelas Komputer Dasar beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.265 Asumsi dan Risiko ToC Kelas Komputer Dasar

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.266 Rekomendasi Pengembangan Kelas Komputer Dasar

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.32 Ilustrasi Kelas Komputer Dasar

2.5.30 SI IRWAN

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.267 Identitas Inovasi SI IRWAN

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI IRWAN (Sistem Informasi Kepegawaian)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**PIC/Narahubung**	Masud Rahmat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI IRWAN dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI IRWAN (Sistem Informasi Kepegawaian) merupakan sebuah inovasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memodernisasi dan mengotomatisasi pengelolaan administrasi aparatur/pegawai. Inovasi ini mengubah tata kelola kepegawaian dari sistem manual dan terfragmentasi menjadi sistem terpadu ber-platform digital. SI IRWAN mengintegrasikan seluruh basis data pegawai ke dalam satu pintu (single window)

Manfaat yang diharapkan: Penerapan inovasi SI IRWAN memberikan dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas dan efisiensi tata kelola kepegawaian melalui digitalisasi proses administrasi secara menyeluruh. Pengalihan sistem dari berbasis kertas menjadi platform digital terpadu berhasil memangkas birokrasi dan memcepat durasi pengurusan layanan—seperti pengajuan cuti, kenaikan pangkat, hingga pemutakhiran data—secara *real-time* dan transparan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI IRWAN secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.268 Rancang Bangun SI IRWAN

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI IRWAN diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.269 Status Inovasi SI IRWAN pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SI IRWAN tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas

tindak lanjut jangka pendek bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.270 Dasbor Indikator IID SI IRWAN

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tambahkan Narasi seperti pada contoh
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tambahkan Narasi seperti pada contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Tambahkan Narasi seperti pada contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Tambahkan Narasi seperti pada contoh

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan SKM tahun 2025

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.271 Kontribusi SI IRWAN terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SI IRWAN dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.272 Kendala dan Tantangan SI IRWAN

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI IRWAN: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI IRWAN disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan

menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.273 ToC SI IRWAN

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI IRWAN beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.274 Asumsi dan Risiko ToC SI IRWAN

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.275 Rekomendasi Pengembangan SI IRWAN

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

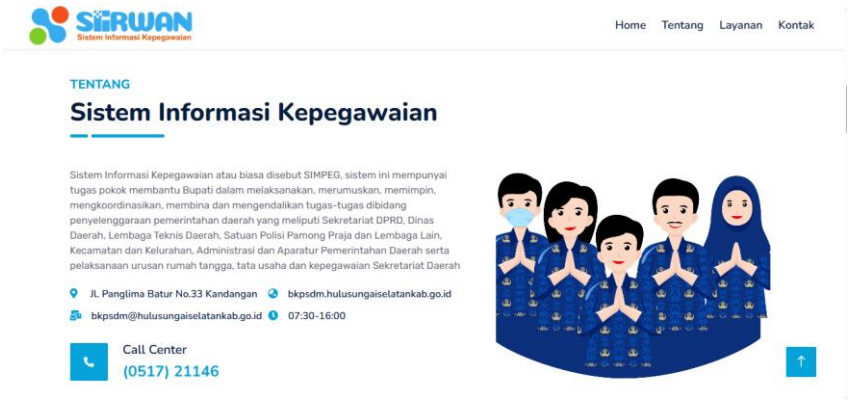

Gambar 2.33 Ilustrasi SI IRWAN

2.5.31 SIAP

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.276 Identitas Inovasi SIAP

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIAP (Sistem Informasi Absensi PAUD)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	**PIC/Narahubung**	Bakhtar Rasyid
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SIAP dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan dan tata kelola pendidikan berbasis digital yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelola, mencatat, dan memantau kehadiran (kehadiran/absensi) peserta didik serta tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara terpadu dan *real-time*. Sistem ini mempermudah monitoring tingkat partisipasi belajar anak usia dini, mendukung transparansi administrasi sekolah, dan memfasilitasi pelaporan kinerja PAUD secara elektronik.

Manfaat yang diharapkan: Digitalisasi Administrasi Sekolah: Mengubah rekapitulasi kehadiran manual menjadi berbasis aplikasi digital yang cepat, akurat, dan minim kesalahan pencatatan. Pemantauan Partisipasi Belajar: Memudahkan dinas terkait, penilik, dan pengelola sekolah dalam memantau Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan tingkat keaktifan siswa. Meningkatkan Kedisiplinan Pendidik & Siswa: Mendorong terciptanya budaya tertib dan disiplin bagi tenaga pendidik serta peserta didik di lingkungan satuan PAUD.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIAP secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.277 Rancang Bangun SIAP

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIAP diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024

dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.278 Status Inovasi SIAP pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.279 Dasbor Indikator IID SIAP

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Lengkap
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Lengkap
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Lengkap
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Lengkap
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Lengkap

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Lengkap
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Lengkap
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Lengkap
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Lengkap
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Lengkap
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Lengkap / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Lengkap
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Lengkap
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Lengkap / data tambahan dari Bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.280 Kontribusi SIAP terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SIAP dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.281 Kendala dan Tantangan SIAP

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIAP: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIAP disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.282 ToC SIAP

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIAP beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.283 Asumsi dan Risiko ToC SIAP

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.284 Rekomendasi Pengembangan SIAP

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SIAP - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.34 Ilustrasi SIAP

2.5.32 SABTU CERDAS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.285 Identitas Inovasi SABTU CERDAS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SABTU CERDAS (Servis Akses Bacaan Terpadu untuk Umum dan Digital pada Hari Sabtu)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SABTU CERDAS dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan

SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat melalui perluasan jam layanan pada hari akhir pekan (hari Sabtu). Program ini menyediakan akses bacaan terpadu, baik koleksi buku fisik maupun perpustakaan digital, yang dilengkapi dengan berbagai kegiatan edukatif interaktif bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tidak sempat berkunjung pada hari kerja biasa.

Manfaat yang diharapkan: Memperluas Aksesibilitas Layanan Literasi: Memudahkan pekerja, pelajar, dan keluarga untuk mengakses layanan perpustakaan di luar jam dan hari kerja biasa. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM): Mendorong budaya gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan digital secara fleksibel dan inklusif. Pemanfaatan Akhir Pekan Edukatif: Menyediakan ruang publik yang positif, aman, dan edukatif bagi anak-anak dan keluarga di hari libur/akhir pekan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SABTU CERDAS secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.286 Rancang Bangun SABTU CERDAS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SABTU CERDAS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.287 Status Inovasi SABTU CERDAS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.288 Dasbor Indikator IID SABTU CERDAS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.289 Kontribusi SABTU CERDAS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi SABTU CERDAS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.290 Kendala dan Tantangan SABTU CERDAS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SABTU CERDAS: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SABTU CERDAS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.291 ToC SABTU CERDAS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SABTU CERDAS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.292 Asumsi dan Risiko ToC SABTU CERDAS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.293 Rekomendasi Pengembangan SABTU CERDAS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.35 Ilustrasi SABTU CERDAS

2.5.33 SiOPEN HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.294 Identitas Inovasi SiOPEN HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SiOPEN HSS (Sistem Order Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

No	Atribut	Keterangan
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
5	**PIC/Narahubung**	Ainun jariah
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Keuangan & Pendapatan Daerah
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SiOPEN HSS dikembangkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Keuangan & Pendapatan Daerah, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan saat ini tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi digital. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut adalah melalui e-Purchasing, yaitu metode pembelian barang/jasa menggunakan elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang dari berbagai penyedia resmi.

Manfaat yang diharapkan: Si OPEN HSS merupakan langkah strategis dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa Sistem ini hadir dengan tampilan yang lebih sederhana, user-friendly, dan mudah dioperasikan dibandingkan platform e-Katalog atau Toko Daring nasional yang umumnya lebih kompleks. Keunggulan lainnya, Si OPEN HSS bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan kapan pun sesuai kebutuhan organisasi maupun regulasi yang berlaku.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah wajib pajak dan retribusi daerah, perangkat daerah pengelola keuangan, serta pemerintah desa. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SiOPEN HSS secara umum terdiri atas basis data objek pajak/anggaran, modul perhitungan dan pembayaran, dasbor realisasi, serta pelaporan yang dapat diaudit. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang

menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.295 Rancang Bangun SiOPEN HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Komponen utama	basis data objek pajak/anggaran, modul perhitungan dan pembayaran, dasbor realisasi, serta pelaporan yang dapat diaudit
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SiOPEN HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.296 Status Inovasi SiOPEN HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Ket. Inovasi IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.297 Dasbor Indikator IID SiOPEN HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.298 Kontribusi SiOPEN HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	rupiah/persen	-	-	-	-
Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	persen	-	-	-	-
Opini BPK atas laporan keuangan daerah	opini	-	-	-	-
Persentase transaksi keuangan terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Keuangan & Pendapatan Daerah, kendala dan tantangan implementasi SiOPEN HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.299 Kendala dan Tantangan SiOPEN HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	risiko keamanan data transaksi yang belum ditopang kebijakan keamanan informasi formal
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan kapasitas SDM pengelola pada tingkat desa dan unit pemungut
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	kebutuhan rekonsiliasi manual dengan sistem keuangan daerah dan perbankan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SiOPEN HSS: terwujudnya meningkatnya akurasi, kepatuhan, dan realisasi penerimaan serta tertib pengelolaan keuangan pada lingkup kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SiOPEN HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Pengadaan Barang/Jasa membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi

rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akurasi, kepatuhan, dan realisasi penerimaan serta tertib pengelolaan keuangan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya kemandirian fiskal dan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 2.300 ToC SiOPEN HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Pengadaan Barang/Jasa; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SiOPEN HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akurasi, kepatuhan, dan realisasi penerimaan serta tertib pengelolaan keuangan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya kemandirian fiskal dan akuntabilitas keuangan daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.301 Asumsi dan Risiko ToC SiOPEN HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; risiko keamanan data transaksi yang belum ditopang kebijakan keamanan informasi formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan kapasitas SDM pengelola pada tingkat desa dan unit pemungut	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	kebutuhan rekonsiliasi manual dengan sistem keuangan daerah dan perbankan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.302 Rekomendasi Pengembangan SiOPEN HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu kebutuhan rekonsiliasi manual dengan sistem keuangan daerah dan perbankan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

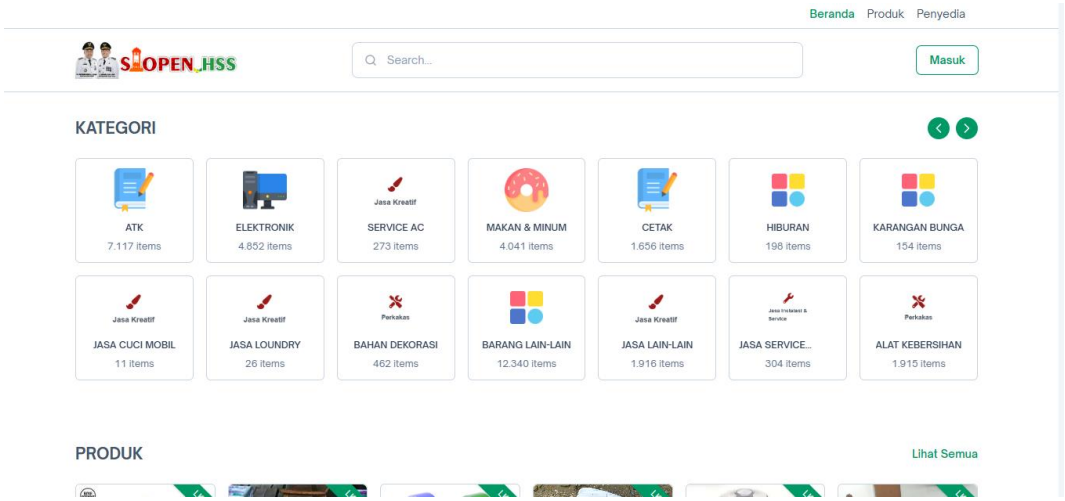

Gambar 2.36 Ilustrasi SiOPEN HSS

2.5.34 DETAK PJU+

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.303 Identitas Inovasi DETAK PJU+

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	DETAK PJU+
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2022
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perhubungan
5	**PIC/Narahubung**	M. iqyan firdaus
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi DETAK PJU+ dikembangkan oleh Dinas Perhubungan dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Detak PJU dikembangkan karena kendala keterbatasan SDM dalam pengawasan PJU sehingga penanganankerusakan dan pengawasan PJU menjadi lebih cepat karena melibatkan masyarakat. Tahun 2022 Detak PJUdikembangkan menjadi Detak PJU+ dimana masyarakat dapat mengusulkan pemasangan PJU ataumengusulkan meterisasi PJU sehingga

berdampak pada pengurangan jumlah PJU Non Meterisasi (P33).Detak PJU+ melibatkan aparat desa/kelurahan dalam grup Whatsapp “Detak PJU+” yang bertugasmelaporkan kerusakan PJU dengan cara memberi tanda di tiang lampu untuk mempermudah petugas PJUmenemukan titik kerusakan dan melaporkannya lewat grup.

Manfaat yang diharapkan: Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia teknis, sehingga deteksi kerusakan maupun praktik PJU ilegal dapat direspons dan ditindaklanjuti secara cepat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun DETAK PJU+ secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.304 Rancang Bangun DETAK PJU+

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perhubungan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian DETAK PJU+ diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.305 Status Inovasi DETAK PJU+ pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2022	Disebut pada uraian isi inovasi
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung DETAK PJU+ tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Perhubungan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.306 Dasbor Indikator IID DETAK PJU+

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2024 dan 2025
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	kalau bisa data dukung alat kerja menggunakan sudah menggunakan sosial media (contoh : Screenshot Postingan PAPI ALIN pada sosial media Dinas Perhubungan)
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	tambahkan bimtek seperti contoh (Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta bimtek)
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	data bapperida
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan media hotline dan melalui *website* dinas perhubungan
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	beri tanggal bulan tahun . tahun 2025 (sesuai arahan ulak ucup)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	karena belum mencapai target 501 orang, bisa dibuatkan dalam bentuk Hasil Analisis/Kajian/Riset/Laporan/Dokumen yang dikeluarkan oleh intansi pelaksana inovasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan ikm/skm tahun 2025 semester 1 dan 2

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.307 Kontribusi DETAK PJU+ terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi DETAK PJU+ dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.308 Kendala dan Tantangan DETAK PJU+

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi DETAK PJU+: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Perhubungan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change DETAK PJU+ disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perhubungan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.309 ToC DETAK PJU+

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perhubungan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem DETAK PJU+ beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perhubungan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.310 Asumsi dan Risiko ToC DETAK PJU+

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.311 Rekomendasi Pengembangan DETAK PJU+

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perhubungan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perhubungan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.37 Ilustrasi DETAK PJU+

2.5.35 Klinik UMKM

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.312 Identitas Inovasi Klinik UMKM

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Klinik UMKM
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	**PIC/Narahubung**	Hafis Anshari
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Klinik UMKM dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Klinik UMKM adalah pusat layanan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi gratis yang bertujuan mengembangkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mencakup perizinan, sertifikasi halal, digitalisasi, hingga akses permodalan.

Layanan ini biasanya disediakan oleh Dinas Koperasi/UMKM daerah atau lembaga terkait.

Manfaat yang diharapkan: Persentase Usaha yang bertrasformasi dari informal ke formal (Naik Kelas) sebesar 113,87 % dari target binaan yang ada atau sebanyak 1.354 usaha.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Klinik UMKM secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.313 Rancang Bangun Klinik UMKM

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Klinik UMKM diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04

(2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.314 Status Inovasi Klinik UMKM pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Non Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung Klinik UMKM tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.315 Dasbor Indikator IID Klinik UMKM

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.316 Kontribusi Klinik UMKM terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi Klinik UMKM dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.317 Kendala dan Tantangan Klinik UMKM

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Klinik UMKM: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Klinik UMKM disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.318 ToC Klinik UMKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Output	Sistem Klinik UMKM beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.319 Asumsi dan Risiko ToC Klinik UMKM

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.320 Rekomendasi Pengembangan Klinik UMKM

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.38 Ilustrasi Klinik UMKM

2.5.36 SADATU

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.321 Identitas Inovasi SADATU

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SADATU (Sistem Akselerasi Data Akurat Terpadu UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)

No	Atribut	Keterangan
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	**PIC/Narahubung**	Hafis Anshari
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SADATU dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola ekonomi dan pelayanan publik berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan untuk mempercepat pendataan, pemetaan, serta pembinaaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sistem ini mengintegrasikan data profil pelaku usaha, jenis produk, legalitas/perizinan, potensi usaha, hingga kebutuhan pendampingan secara *real-time* guna mendukung pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan secara akurat dan tepat sasaran.

Manfaat yang diharapkan: Basis Data UMKM Terintegrasi & Akurat: Mewujudkan Single Source of Truth data UMKM daerah yang valid dan terbarui untuk mempermudah perencanaan program pemberdayaan. Percepat Legalitas & Intervensi Bantuan: Memudahkan pemerintah daerah dalam mendistribusikan bantuan modal, sertifikasi (halal/P-IRT), pembinaan, maupun pelatihan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan UMKM.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SADATU secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.322 Rancang Bangun SADATU

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SADATU diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.323 Status Inovasi SADATU pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SADATU tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.324 Dasbor Indikator IID SADATU

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.325 Kontribusi SADATU terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SADATU dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.326 Kendala dan Tantangan SADATU

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SADATU: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SADATU disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.327 ToC SADATU

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SADATU beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.328 Asumsi dan Risiko ToC SADATU

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.329 Rekomendasi Pengembangan SADATU

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama Diskominfo dan Bapperida

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.39 Ilustrasi SADATU

2.5.37 SI PANDU WISATA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.330 Identitas Inovasi SI PANDU WISATA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI PANDU WISATA (Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan) V2.0
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	**PIC/Narahubung**	Rahmat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI PANDU WISATA dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik dan promosi pariwisata berbasis aplikasi/platform digital terpadu versi terbaru (V2.0) yang dikembangkan untuk menyajikan informasi pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif. Platform ini mengintegrasikan peta lokasi destinasi wisata, kalender event budaya, Direktori Ekonomi Kreatif & UMKM lokal, informasi akomodasi/penginapan, pemesanan tiket digital, hingga sarana pemanduan wisata interaktif bagi para wisatawan.

Manfaat yang diharapkan: Memudahkan Akses Informasi Wisatawan: Memberikan kemudahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam merencanakan kunjungan dan menjelajahi ragam destinasi wisata daerah secara mandiri dan akurat. Promosi & Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jasa pemandu lokal (pokdarwis), penginapan, dan ekonomi kreatif di sekitar kawasan wisata.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI PANDU WISATA secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.331 Rancang Bangun SI PANDU WISATA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI PANDU WISATA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.332 Status Inovasi SI PANDU WISATA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SI PANDU WISATA tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.333 Dasbor Indikator IID SI PANDU WISATA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.334 Kontribusi SI PANDU WISATA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SI PANDU WISATA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.335 Kendala dan Tantangan SI PANDU WISATA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI PANDU WISATA: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI PANDU WISATA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja

birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.336 ToC SI PANDU WISATA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI PANDU WISATA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.337 Asumsi dan Risiko ToC SI PANDU WISATA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.338 Rekomendasi Pengembangan SI PANDU WISATA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.40 Ilustrasi SI PANDU WISATA

2.5.38 SIMBIOSIS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.339 Identitas Inovasi SIMBIOSIS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIMBIOSIS (Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga dan Prestasi)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	**PIC/Narahubung**	Rahmat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIMBIOSIS dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIMBIOSIS (Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga dan Prestasi) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan data keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam satu platform. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas

pengelolaan data olahraga yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga sering mengalami keterlambatan, duplikasi, dan kesulitan dalam penyajian informasi. Melalui SIMBIOSIS, seluruh data terkait olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi dapat dikelola secara terpusat, meliputi data atlet, pelatih, wasit/juri, sarana dan prasarana olahraga, event atau pertandingan yang diikuti, serta capaian prestasi yang diraih.

Manfaat yang diharapkan: Aplikasi ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama untuk atlet, pelatih, wasit/juri Dalam mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat Aplikasasi Simbiosis ini berdampak baik dalam mendorong peningkatan prestasi khususnya atlet Pelajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIMBIOSIS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.340 Rancang Bangun SIMBIOSIS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIMBIOSIS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.341 Status Inovasi SIMBIOSIS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SIMBIOSIS tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.342 Dasbor Indikator IID SIMBIOSIS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.343 Kontribusi SIMBIOSIS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SIMBIOSIS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.344 Kendala dan Tantangan SIMBIOSIS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIMBIOSIS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIMBIOSIS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.345 ToC SIMBIOSIS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIMBIOSIS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.346 Asumsi dan Risiko ToC SIMBIOSIS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.347 Rekomendasi Pengembangan SIMBIOSIS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.41 Ilustrasi SIMBIOSIS

2.5.39 SIMPAI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.348 Identitas Inovasi SIMPAI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIMPAI (Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	**PIC/Narahubung**	Rahmat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIMPAI dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Di bumi Antaludin Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beraneka ragam obyek wisata, seperti Obyek wisata air panas Tanuhi, air terjun Haratai, air terjun Hanai, goa Berangin Malutu, Goa Mandala, gunung Kentawan, Goa batu Bini, Kalang Hadangan, situs amuk Hantarukung, rumah Bersejarah Durian Rabung, rumah Banjar Bumbungan Tinggi, Benteng Madang, pemaningan ikan, Mesjid baangkat, dan lain-lain.

Manfaat yang diharapkan: Aplikasi ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat (wisatawan) dalam mendapatkan Informasi dan layanan pariwisata dengan mudah dan cepat. Cukup dengan 1 (satu) aplikasi Masyarakat (wisatawan) sudah dapat mengetahui seluruh destinasi wisata dan layanan-layanan Wisata yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Aplikasi SIMPAI berdampak baik dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIMPAI secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.349 Rancang Bangun SIMPAI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIMPAI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.350 Status Inovasi SIMPAI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SIMPAI tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.351 Dasbor Indikator IID SIMPAI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.352 Kontribusi SIMPAI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SIMPAI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.353 Kendala dan Tantangan SIMPAI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIMPAI: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIMPAI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak

memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.354 ToC SIMPAI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIMPAI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.355 Asumsi dan Risiko ToC SIMPAI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.356 Rekomendasi Pengembangan SIMPAI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama Diskominfo dan Bapperida

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.42 Ilustrasi SIMPAI

2.5.40 KURELA SEHATI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.357 Identitas Inovasi KURELA SEHATI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	KURELA SEHATI (Kumpul Bareng Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	**PIC/Narahubung**	Rahmat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi KURELA SEHATI dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Saat ini Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum mendapat perhatian secara optimal. Hal ini terlihat dari alokasi program dan anggaran yang masih terbatas baik dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Pada tahun 2024 Kontribusi PDRB Parawisata dan didalamnya termasuk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 3,72 %. Angka ini lebih rendah dibanding dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan terhadap PDRB Parawisata dan Ekonomi Kreatif yaitu sebesar 5,02 %, sehingga masih bisa di optimalkan dan ditingkatkan.

Manfaat yang diharapkan: Dampak dari inovasi ini diharapkan dapat : 1. Memfasilitasi pelaku ekraf untuk menuangkan ide, pengalaman, pengetahuan dalam rangka meningkatkan inovasi dan kreatifitas. 2. Wadah fasilitasi pelatihan/bimtek, magang, webinar dll untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. 3. Meningkatkan jejaring dan kerjasama antara pelaku ekraf 4. Meningkatnya akses pasar dan omzet penjualan secara ofline maupun Melalui platform digital. 5.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun KURELA SEHATI secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.358 Rancang Bangun KURELA SEHATI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian KURELA SEHATI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.359 Status Inovasi KURELA SEHATI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung KURELA SEHATI tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.360 Dasbor Indikator IID KURELA SEHATI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.361 Kontribusi KURELA SEHATI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi KURELA SEHATI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.362 Kendala dan Tantangan KURELA SEHATI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi KURELA SEHATI: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change KURELA SEHATI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja

birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.363 ToC KURELA SEHATI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem KURELA SEHATI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.364 Asumsi dan Risiko ToC KURELA SEHATI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.365 Rekomendasi Pengembangan KURELA SEHATI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.43 Ilustrasi KURELA SEHATI

2.5.41 SILAPIS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.366 Identitas Inovasi SILAPIS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SILAPIS (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan dan Inkubator Bisnis)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SILAPIS dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola keuangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis sistem informasi terpadu yang memadukan pencatatan/pelaporan keuangan secara akuntabel dengan program inkubasi bisnis bagi pelaku usaha/UMKM. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah digitalisasi penyusunan laporan keuangan yang akurat, terstandar, dan transparan, sekaligus menyediakan wadah pendampingan bisnis (inkubasi) guna meningkatkan kapasitas manajemen, pengelolaan keuangan, dan pembinaan daya saing usaha lokal.

Manfaat yang diharapkan: Transparansi & Akuntabilitas Keuangan: Memudahkan pelaku usaha atau lembaga pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Penguatan Inkubasi & Pendampingan Bisnis: Menyediakan platform evaluasi kinerja usaha sehingga proses pembinaan, inkubasi, dan konsultasi pengembangan bisnis menjadi lebih terarah dan terukur.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SILAPIS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.367 Rancang Bangun SILAPIS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SILAPIS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.368 Status Inovasi SILAPIS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.369 Dasbor Indikator IID SILAPIS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.370 Kontribusi SILAPIS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SILAPIS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.371 Kendala dan Tantangan SILAPIS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SILAPIS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat

termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SILAPIS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.372 ToC SILAPIS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SILAPIS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.373 Asumsi dan Risiko ToC SILAPIS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.374 Rekomendasi Pengembangan SILAPIS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.44 Ilustrasi SILAPIS

2.5.42 PETA DASEL

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.375 Identitas Inovasi PETA DASEL

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	PETA DASEL (Pemetaan Potensi Ekonomi Desa Daha Selatan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)

No	Atribut	Keterangan
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Daha Selatan
5	**PIC/Narahubung**	Juhriah
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi PETA DASEL dikembangkan oleh Kecamatan Daha Selatan dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi perencanaan dan tata kelola ekonomi wilayah berbasis pemetaan digital geospasial serta pendataan terpadu potensi ekonomi desa di Kecamatan Daha Selatan. Program ini merangkum dan memetakan komoditas unggulan desa (seperti perikanan air tawar, kerajinan/industri logam, pertanian lahan rawa, hingga UMKM lokal) ke dalam basis data terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan pembangunan, pengembangan BUMDes, serta penarikan investasi di tingkat lokal.

Manfaat yang diharapkan: Basis Data Potensi Desa Akurat & Terintegrasi: Menyediakan gambaran visual dan data riil mengenai persebaran komoditas unggulan serta usaha warga di seluruh desa se-Kecamatan Daha Selatan. Perencanaan Pembangunan Desa yang Tepat Sasaran: Memudahkan pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan intervensi anggaran serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun PETA DASEL secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.376 Rancang Bangun PETA DASEL

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Daha Selatan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian PETA DASEL diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Selatan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.377 Status Inovasi PETA DASEL pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.378 Dasbor Indikator IID PETA DASEL

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Lengkap dan Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Lengkap dan Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Lengkap dan Sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Lengkap dan Sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Lengkap dan Sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Lengkap dan Sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Lengkap dan Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Lengkap dan Sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Lengkap dan Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Lengkap dan Sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Lengkap dan Sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.379 Kontribusi PETA DASEL terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi PETA DASEL dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.380 Kendala dan Tantangan PETA DASEL

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi PETA DASEL: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Daha Selatan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change PETA DASEL disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Daha Selatan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu

meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.381 ToC PETA DASEL

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Daha Selatan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem PETA DASEL beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Daha Selatan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.382 Asumsi dan Risiko ToC PETA DASEL

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.383 Rekomendasi Pengembangan PETA DASEL

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Daha Selatan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Daha Selatan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.45 Ilustrasi PETA DASEL

2.5.43 SI LOWIS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.384 Identitas Inovasi SI LOWIS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI LOWIS (Aplikasi Lapor Wisata)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Loksado
5	**PIC/Narahubung**	Karmila
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI LOWIS dikembangkan oleh Kecamatan Loksado dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI LOWIS (Aplikasi Lapor Wisata) merupakan solusi digital untuk memodernisasi tata kelola data dan pelaporan ekonomi pembangunan kecamatan khususnya di sektor wisata. Inovasi ini diharapkan mampu memenuhi data yang update dan real time bagi pemerintah maupun *stakeholder* lainnya.

Manfaat yang diharapkan: Mengetahui pembaharuan data lonjakan wisatawan sehingga memudahkan Pelaporan dan Pemenuhan Permintaan Data dari Kementerian LH dan pihak lainnya

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI LOWIS secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.385 Rancang Bangun SI LOWIS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Loksado; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI LOWIS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loksado. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.386 Status Inovasi SI LOWIS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SI LOWIS tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Loksado.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.387 Dasbor Indikator IID SI LOWIS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Buatkan Bimtek sebanyak 3 Kali, 1 file bimtek berisi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.388 Kontribusi SI LOWIS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SI LOWIS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.389 Kendala dan Tantangan SI LOWIS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI LOWIS: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Loksado melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI LOWIS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Loksado membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.390 ToC SI LOWIS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Loksado; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI LOWIS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Loksado memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.391 Asumsi dan Risiko ToC SI LOWIS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.392 Rekomendasi Pengembangan SI LOWIS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Loksado

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Loksado bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.46 Ilustrasi SI LOWIS

2.5.44 PACARKU

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.393 Identitas Inovasi PACARKU

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	PACARKU (PLATFORM APLIKASI CARI KERJA KELURAHAN KANDANGAN UTARA)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kelurahan Kandangan Utara
5	**PIC/Narahubung**	Oma Era
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi PACARKU dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi PACARKU (Platform Aplikasi Cari Kerja Kelurahan Kandangan Utara) merupakan solusi atas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan di tingkat kelurahan, khususnya bagi lulusan baru, ibu rumah tangga, dan warga usia produktif yang kesulitan memperoleh informasi pekerjaan yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses informasi lowongan kerja, minimnya media komunikasi antara pencari dan penyedia kerja lokal, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam layanan ketenagakerjaan. Di sisi lain, pelaku usaha kecil, UMKM, dan perusahaan lokal sebenarnya membutuhkan tenaga kerja, tetapi tidak memiliki saluran efektif untuk menjangkau calon pekerja secara luas.

Manfaat yang diharapkan: Hasil dari implementasi PACARKU menunjukkan dampak positif yang signifikan. Sejumlah warga telah berhasil mendapatkan pekerjaan melalui informasi yang tersedia di platform tersebut. Data lowongan kerja dari berbagai sektor kini terdokumentasi dan terdistribusi secara rutin. Inovasi ini juga membangun kemitraan strategis antara kelurahan, pelaku usaha, dan lembaga pendukung ketenagakerjaan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun PACARKU secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.394 Rancang Bangun PACARKU

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kelurahan Kandangan Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian PACARKU diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Kandangan Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.395 Status Inovasi PACARKU pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Tidak Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Perlu dicatat bahwa PACARKU berstatus tidak aktif pada rekapitulasi inovasi daerah terkini. Profil ini tetap disajikan sebagai basis data audit, namun rekomendasi pengembangan lanjutan hanya relevan apabila Kelurahan Kandangan Utara memutuskan mengaktifkan kembali inovasi tersebut.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi

berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.396 Dasbor Indikator IID PACARKU

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2026
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	buatkan seperti contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase aduan yang di tindak lanjuti sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan keterangan waktu (tanggal)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat sebanyak 501/lebih dari 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.397 Kontribusi PACARKU terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi PACARKU dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.398 Kendala dan Tantangan PACARKU

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi PACARKU: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kelurahan Kandangan Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change PACARKU disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kelurahan Kandangan Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.399 ToC PACARKU

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kelurahan Kandangan Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem PACARKU beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kelurahan Kandangan Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.400 Asumsi dan Risiko ToC PACARKU

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.401 Rekomendasi Pengembangan PACARKU

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kelurahan Kandangan Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kelurahan Kandangan Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.47 Ilustrasi PACARKU

2.5.45 GIAT UMKM GO ON

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.402 Identitas Inovasi GIAT UMKM GO ON

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	GIAT UMKM GO ON
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kelurahan Kandangan Utara
5	**PIC/Narahubung**	Oma Era
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi GIAT UMKM GO ON dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Kelurahan Kandangan Utara sebagai unit pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat berupaya memberikan kontribusi terbaik dengan terus menggali potensi dan meningkatkan peran UMKM agar berdaya, tangguh, dan mandiri, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program GIAT UMKM GO ON (Galeri Informasi dan Aktivitas Terpadu UMKM Kandangan Utara Go *Online*), Kelurahan Kandangan Utara melakukan pendataan, pembinaan, pendampingan, serta membuka akses permodalan, bantuan usaha, dan peluang pemasaran digital bagi para pelaku UMKM.

Manfaat yang diharapkan: Terdatanya Pelaku UMKM secara Digital dan Terklasifikasi Lebih dari [jumlah sesuai data kelurahan] pelaku UMKM berhasil didata dan diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha, skala produksi, dan kebutuhan pengembangan. Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pelaku UMKM Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan telah membantu pelaku usaha dalam manajemen keuangan, pengemasan produk, pemasaran digital, dan perizinan usaha.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang

memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun GIAT UMKM GO ON secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.403 Rancang Bangun GIAT UMKM GO ON

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kelurahan Kandangan Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian GIAT UMKM GO ON diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Kandangan Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.404 Status Inovasi GIAT UMKM GO ON pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Tidak Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Perlu dicatat bahwa GIAT UMKM GO ON berstatus tidak aktif pada rekapitulasi inovasi daerah terkini. Profil ini tetap disajikan sebagai basis data audit, namun rekomendasi pengembangan lanjutan hanya relevan apabila Kelurahan Kandangan Utara memutuskan mengaktifkan kembali inovasi tersebut.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.405 Dasbor Indikator IID GIAT UMKM GO ON

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2026
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	buatkan seperti contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase aduan yang di tindak lanjuti sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan keterangan waktu (tanggal)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat sebanyak 501/lebih dari 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.406 Kontribusi GIAT UMKM GO ON terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi GIAT UMKM GO ON dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.407 Kendala dan Tantangan GIAT UMKM GO ON

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi GIAT UMKM GO ON: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kelurahan Kandangan Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita

3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change GIAT UMKM GO ON disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kelurahan Kandangan Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.408 ToC GIAT UMKM GO ON

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kelurahan Kandangan Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem GIAT UMKM GO ON beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kelurahan Kandangan Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.409 Asumsi dan Risiko ToC GIAT UMKM GO ON

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.410 Rekomendasi Pengembangan GIAT UMKM GO ON

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kelurahan Kandangan Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kelurahan Kandangan Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.48 Ilustrasi GIAT UMKM GO ON

2.5.46 SI TIMELINE RS BHHB

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.411 Identitas Inovasi SI TIMELINE RS BHHB

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI TIMELINE RS BHHB (SIstem aplikasi daftar kErja *online* RS BHHB)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI TIMELINE RS BHHB dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi SI TIMELINE RS BHHB (SIstem aplikasi daftar k Erja *online* RS BHHB) bertujuan untuk mewujudkan proses rekrutmen pegawai yang transparan, objektif, efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web. Inovasi ini menargetkan peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, percepatan proses pendaftaran dan seleksi pegawai, pengurangan penggunaan dokumen fisik (paperless), serta peningkatan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

Manfaat yang diharapkan: Sebelum penerapan SI TIMELINE RS BHHB, proses rekrutmen pegawai di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan masih dilakukan melalui berbagai media yang terpisah, pendaftaran menggunakan dokumen fisik, penyampaian informasi tahapan seleksi belum terintegrasi, serta monitoring proses rekrutmen masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan kurang transparan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI TIMELINE RS BHHB secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.412 Rancang Bangun SI TIMELINE RS BHHB

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI TIMELINE RS BHHB diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.413 Status Inovasi SI TIMELINE RS BHHB pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Sudah Input	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi

berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.414 Dasbor Indikator IID SI TIMELINE RS BHHB

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.415 Kontribusi SI TIMELINE RS BHHB terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SI TIMELINE RS BHHB dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.416 Kendala dan Tantangan SI TIMELINE RS BHHB

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI TIMELINE RS BHHB: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 3 - Menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI TIMELINE RS BHHB disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.417 ToC SI TIMELINE RS BHHB

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI TIMELINE RS BHHB beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.418 Asumsi dan Risiko ToC SI TIMELINE RS BHHB

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.419 Rekomendasi Pengembangan SI TIMELINE RS BHHB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

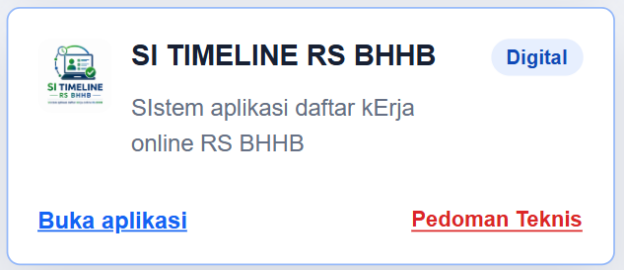

Gambar 2.49 Ilustrasi SI TIMELINE RS BHHB

2.5.47 SIPASUM HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.420 Identitas Inovasi SIPASUM HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIPASUM HSS (Sistem Informasi Pendaftaran Fasilitas Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Umum
5	**PIC/Narahubung**	Anzar Aminuddin
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SIPASUM HSS dikembangkan oleh Bagian Umum dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan melegalkan proses pendaftaran serta pemanfaatan sarana dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh masyarakat, instansi, maupun organisasi. Sistem ini menyediakan informasi ketersediaan tempat, jadwal penggunaan, syarat administrasi, hingga mekanisme pendaftaran secara transparan dan *online*.

Manfaat yang diharapkan: Transparansi & Kepastian Jadwal: Memudahkan masyarakat dan organisasi dalam mengecek ketersediaan serta mengajukan izin penggunaan fasilitas umum tanpa risiko bentrok jadwal. Efisiensi & Kepastian Prosedur (Paperless): Memangkas rantai birokrasi perizinan penggunaan fasilitas umum sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat, teratur, dan dapat dipantau secara *real-time*.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIPASUM HSS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.421 Rancang Bangun SIPASUM HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Umum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIPASUM HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Umum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.422 Status Inovasi SIPASUM HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SIPASUM HSS tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Bagian Umum.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.423 Dasbor Indikator IID SIPASUM HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf).

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf). Wajib melakukan highlight/tanda pada mata item belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan inovasi.
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Dibuktikan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir dan Sertifikat pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek (Sertifikat minimal satu)
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf). Wajib melakukan highlight/tanda pada bagian yang memuat program/kegiatan inovasi dimaksud.
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Dokumen Perjanjian kerjasama (PKS)/MoU/dokumen replikasi/surat korespondensi atau surat pernyataan telah mereplikasi (pdf)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah dan link publikasi pedoman teknis inovasi dimaksud (jpg/jpeg/png).
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png) 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb 4. Layanan *Online* melalui *website*/webaplikasi/aplikasi *mobile* (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Dibuktikan dengan dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Untuk indikator Keterlibatan Aktor Inovasi / *Stakeholder* (Pentahelix), pilihan dikategorikan berdasarkan jumlah jenis unsur yang terlibat secara aktif dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung (SK, PKS/MoU, Berita Acara, atau Foto Kegiatan).

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat tahapan pelaksanaan dan durasi waktu layanan (hari kalender) dan dokumen yang disahkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang (pdf)
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (Tahapan proses penciptaan inovasi daerah dan/atau tahapan pengembangan inovasi daerah) (pdf)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png Teruntuk inovasi nondigital, evidence berupa rekapitulasi harus melampirkan TTD/bukti tanda tangan dari penerima manfaat inovasi daerah (pdf)
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Laporan kegiatan monev internal pemerintah daerah atau screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.424 Kontribusi SIPASUM HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SIPASUM HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.425 Kendala dan Tantangan SIPASUM HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIPASUM HSS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Bagian Umum melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIPASUM HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Umum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.426 ToC SIPASUM HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Umum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIPASUM HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Umum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.427 Asumsi dan Risiko ToC SIPASUM HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.428 Rekomendasi Pengembangan SIPASUM HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Umum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Umum bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SIPASUM HSS - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.50 Ilustrasi SIPASUM HSS

2.5.48 SIMKERDA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.429 Identitas Inovasi SIMKERDA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIMKERDA (Sistem Inovasi Kerja Sama Daerah
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Pemerintahan
5	**PIC/Narahubung**	Fredy Musyadat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi

No	Atribut	Keterangan
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIMKERDA dikembangkan oleh Bagian Pemerintahan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mengelola, memfasilitasi, serta memantau seluruh proses kerja sama daerah. Sistem ini mencakup tahapan pengusulan, verifikasi administrasi, pemetaan potensi naskah kesepakatan (Mo U/KSD), pelaksanaan perjanjian kerja sama (PKS), hingga evaluasi pelaksanaan kerja sama antar-daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, akademisi, dan organisasi) secara transparan dan terintegrasi.

Manfaat yang diharapkan: Peningkatan Efisiensi & Tertib Administrasi: Memangkas alur birokrasi dan meminimalisir potensi dokumen kerja sama yang tercecer melalui pengelolaan berkas digital terpusat. Monitoring & Evaluasi *Real-Time*: Memudahkan pimpinan dan tim kerja sama daerah dalam memantau masa berlaku kesepakatan, realisasi komitmen, serta evaluasi kemanfaatan kerja sama secara berkala.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIMKERDA secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.430 Rancang Bangun SIMKERDA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Pemerintahan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIMKERDA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pemerintahan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.431 Status Inovasi SIMKERDA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SIMKERDA tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Bagian Pemerintahan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.432 Dasbor Indikator IID SIMKERDA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf).
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf). Wajib melakukan highlight/tanda pada mata item belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan inovasi.
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Dibuktikan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir dan Sertifikat pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek (Sertifikat minimal satu)
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf). Wajib melakukan highlight/tanda pada bagian yang memuat program/kegiatan inovasi dimaksud.
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Dokumen Perjanjian kerjasama (PKS)/MoU/dokumen replikasi/surat korespondensi atau surat pernyataan telah mereplikasi (pdf)
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah dan link publikasi pedoman teknis inovasi dimaksud (jpg/jpeg/png).
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png) 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp , dsb 4. Layanan *Online* melalui *website*/webaplikasi/aplikasi *mobile* (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Dibuktikan dengan dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Untuk indikator Keterlibatan Aktor Inovasi / *Stakeholder* (Pentahelix), pilihan dikategorikan berdasarkan jumlah jenis unsur yang terlibat secara aktif dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung (SK, PKS/MoU, Berita Acara, atau Foto Kegiatan).
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat tahapan pelaksanaan dan durasi waktu layanan (hari kalender) dan dokumen yang disahkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang (pdf)
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (Tahapan proses penciptaan inovasi daerah dan/atau tahapan pengembangan inovasi daerah) (pdf)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png Teruntuk inovasi nondigital, evidence berupa rekapitulasi harus melampirkan TTD/bukti tanda tangan dari penerima manfaat inovasi daerah (pdf)
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Laporan kegiatan monev internal pemerintah daerah atau screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.433 Kontribusi SIMKERDA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SIMKERDA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.434 Kendala dan Tantangan SIMKERDA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIMKERDA: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Bagian Pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIMKERDA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Pemerintahan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan

menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.435 ToC SIMKERDA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Pemerintahan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIMKERDA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Pemerintahan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.436 Asumsi dan Risiko ToC SIMKERDA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.437 Rekomendasi Pengembangan SIMKERDA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Pemerintahan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Pemerintahan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.51 Ilustrasi SIMKERDA

2.5.49 Si EKKa

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.438 Identitas Inovasi Si EKKa

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Si EKKa (Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Kecamatan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Pemerintahan
5	**PIC/Narahubung**	Fredy Musyadat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Si EKKa dikembangkan oleh Bagian Pemerintahan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola pemerintahan berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Aplikasi ini mengintegrasikan indikator-indikator capaian kinerja program, efektivitas pelayanan publik kecamatan, penyerapan anggaran, hingga pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pelimpahan kewenangan secara *real-time* dan transparan.

Manfaat yang diharapkan: Objektivitas & Akuntabilitas Evaluasi Kinerja: Menyajikan data penilaian kinerja kecamatan yang terukur, akurat, dan berbasis

bukti (evidence-based) guna mendukung evaluasi secara berkala. Efisiensi Administrasi & Pelaporan: Mengurangi beban pelaporan manual berbasis kertas (paperless) serta mempercepat penyampaian laporan kinerja dari kecamatan ke pemerintah kabupaten.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Si EKKa secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.439 Rancang Bangun Si EKKa

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Pemerintahan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Si EKKa diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pemerintahan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari

12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.440 Status Inovasi Si EKKa pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung Si EKKa tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Bagian Pemerintahan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.441 Dasbor Indikator IID Si EKKa

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf).
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf). Wajib melakukan highlight/tanda pada mata item belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan inovasi.
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Dibuktikan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir dan Sertifikat pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek (Sertifikat minimal satu)
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf). Wajib melakukan highlight/tanda pada bagian yang memuat program/kegiatan inovasi dimaksud.
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Dokumen Perjanjian kerjasama (PKS)/MoU/dokumen replikasi/surat korespondensi atau surat pernyataan telah mereplikasi (pdf)
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah dan link publikasi pedoman teknis inovasi dimaksud (jpg/jpeg/png).
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png) 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp , dsb 4. Layanan *Online* melalui *website*/webaplikasi/aplikasi *mobile* (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Dibuktikan dengan dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Untuk indikator Keterlibatan Aktor Inovasi / *Stakeholder* (Pentahelix), pilihan dikategorikan berdasarkan jumlah jenis unsur yang terlibat secara aktif dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung (SK, PKS/MoU, Berita Acara, atau Foto Kegiatan).
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat tahapan pelaksanaan dan durasi waktu layanan (hari kalender) dan dokumen yang disahkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang (pdf)
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (Tahapan proses penciptaan inovasi daerah dan/atau tahapan pengembangan inovasi daerah) (pdf)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png Teruntuk inovasi nondigital, evidence berupa rekapitulasi harus melampirkan TTD/bukti tanda tangan dari penerima manfaat inovasi daerah (pdf)
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Laporan kegiatan monev internal pemerintah daerah atau screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.442 Kontribusi Si EKKa terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi Si EKKa dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.443 Kendala dan Tantangan Si EKKa

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Si EKKa: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Bagian Pemerintahan

melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Si EKKa disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Pemerintahan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.444 ToC Si EKKa

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Pemerintahan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Output	Sistem Si EKKa beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Pemerintahan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.445 Asumsi dan Risiko ToC Si EKKa

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.446 Rekomendasi Pengembangan Si EKKa

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Pemerintahan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Pemerintahan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

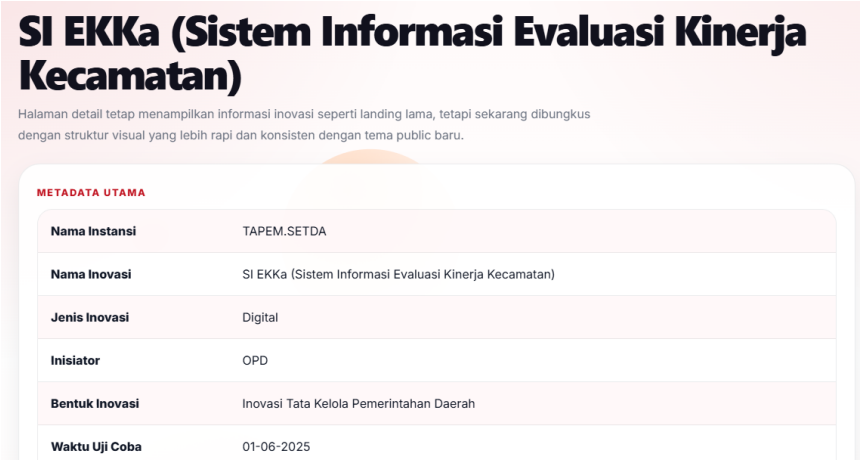

Gambar 2.52 Ilustrasi Si EKKa

2.5.50 SIDALI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.447 Identitas Inovasi SIDALI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIDALI (Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)

No	Atribut	Keterangan
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
5	**PIC/Narahubung**	Heru Kurnia Azra
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SIDALI dikembangkan oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola ekonomi daerah dan pemantauan harga berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah untuk mendukung kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan memetakan data perkembangan harga bahan pokok, ketersediaan pasokan komoditas, hingga neraca pangan secara *real-time* guna merumuskan langkah intervensi pengendalian inflasi daerah yang cepat, tepat, dan terukur.

Manfaat yang diharapkan: Pemantauan Harga & Pasokan Secara *Real-Time*: Memudahkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan pokok serta ketersediaan stok pangan di pasar-pasar wilayah secara akurat. Ekskalasi & Intervensi Dini (Early Warning System): Memberikan sinyal peringatan dini atas kenaikan harga atau kelangkaan barang sehingga pemerintah daerah dapat segera merencanakan operasi pasar atau pasar murah secara presisi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIDALI secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.448 Rancang Bangun SIDALI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIDALI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.449 Status Inovasi SIDALI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SIDALI tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.450 Dasbor Indikator IID SIDALI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.451 Kontribusi SIDALI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SIDALI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.452 Kendala dan Tantangan SIDALI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIDALI: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIDALI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.453 ToC SIDALI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIDALI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.454 Asumsi dan Risiko ToC SIDALI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.455 Rekomendasi Pengembangan SIDALI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan bersama Diskominfo dan Bapperida

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SIDALI - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.53 Ilustrasi SIDALI

2.5.51 SI HADRAH

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.456 Identitas Inovasi SI HADRAH

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI HADRAH (Sistem Informasi Hibah dan Rekomendasi Daerah)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	**PIC/Narahubung**	Fitri
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SI HADRAH dikembangkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik dan tata kelola administrasi berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mengelola proses pengusulan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi dan pencairan bantuan hibah/bantuan keuangan daerah. Sistem ini memfasilitasi organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan proposal bantuan secara transparan, mudah dipantau (*real-time*), serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat yang diharapkan: Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Hibah: Menjamin seluruh alur pengajuan, verifikasi kelayakan, hingga penyaluran hibah daerah tercatat secara terbuka, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan (auditable). Mempermudah & Mempercepat Layanan Pengusulan: Memudahkan organisasi kemasyarakatan dan lembaga penerima dalam mengunggah berkas persyaratan serta memantau status rekomendasi tanpa harus datang berkali-kali ke kantor dinas.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI HADRAH secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.457 Rancang Bangun SI HADRAH

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI HADRAH diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.458 Status Inovasi SI HADRAH pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.459 Dasbor Indikator IID SI HADRAH

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.460 Kontribusi SI HADRAH terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SI HADRAH dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.461 Kendala dan Tantangan SI HADRAH

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI HADRAH: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI HADRAH disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Kesejahteraan Rakyat membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.462 ToC SI HADRAH

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI HADRAH beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.463 Asumsi dan Risiko ToC SI HADRAH

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.464 Rekomendasi Pengembangan SI HADRAH

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Kesejahteraan Rakyat bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SI HADRAH - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.54 Ilustrasi SI HADRAH

2.5.52 Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.465 Identitas Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
5	**PIC/Narahubung**	Meily
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dikembangkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi sistem koordinasi dan media informasi terpadu yang dirancang untuk mendukung kelancaran, ketertiban, serta kepastian pengamanan dan pengawalan agenda kegiatan Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Sistem/platform ini mengintegrasikan pemutakhiran jadwal kegiatan dinas, pemetaan rute perjalanan, mitigasi potensi gangguan keamanan/kerawanan wilayah, hingga mekanisme komunikasi langsung antara Tim Pengamanan/Pengawalan (Satpol PP/Ajudan/Protokol) dengan pihak kepolisian dan instansi terkait secara *real-time*.

Manfaat yang diharapkan: Peningkatan Kepastian & Efektivitas Pengawalan: Memastikan seluruh rangkaian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan lancar, aman, dan tepat waktu melalui perencanaan rute serta koordinasi lapangan yang presisi. Kesiapsiagaan & Mitigasi Risiko Tanggap Cepat: Memudahkan tim pengamanan dalam mendeteksi dan merespon potensi hambatan lalu lintas, gangguan ketertiban, maupun situasi darurat selama kunjungan kerja.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta

masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.466 Rancang Bangun Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.467 Status Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.468 Dasbor Indikator IID Media Pengamanan dan Pengawalan

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.469 Kontribusi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.470 Kendala dan Tantangan Media Pengamanan dan Pengawalan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis

yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.471 ToC Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.472 Asumsi dan Risiko ToC Media Pengamanan dan Pengawalan

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.473 Rekomendasi Pengembangan Media Pengamanan dan Pengawalan

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.55 Ilustrasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan

2.5.53 ePropemperda

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.474 Identitas Inovasi ePropemperda

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ePropemperda
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Sekretariat DPRD
5	**PIC/Narahubung**	Diewa
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

No	Atribut	Keterangan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi ePropemperda dikembangkan oleh Sekretariat DPRD dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola legislasi berbasis sistem informasi terpadu yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD untuk mengelola, menyelaraskan, serta memantau data dan progres/tahapan pembentukan Peraturan Daerah secara digital. Sistem ini dirancang untuk menyusun instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) secara tertib, terukur, dan tersistematis, sehingga seluruh proses penyusunan Ranperda antara DPRD bersama Pemerintah Daerah dan Kemenkumham dapat berjalan transparan serta memprioritaskan regulasi yang berdampak bagi masyarakat.

Manfaat yang diharapkan: Peningkatan Efisiensi & Tertib Administrasi Legislasi: Mempermudah pemantauan alur dan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah dari pengusulan hingga penetapan tanpa hambatan birokrasi manual. Mencegah Tumpang Tindih Regulasi: Memastikan penyusunan peraturan daerah memperhatikan skala prioritas, harmonisasi hukum, serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ePropemperda secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.475 Rancang Bangun ePropemperda

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Sekretariat DPRD; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ePropemperda diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.476 Status Inovasi ePropemperda pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.477 Dasbor Indikator IID ePropemperda

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.478 Kontribusi ePropemperda terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi ePropemperda dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.479 Kendala dan Tantangan ePropemperda

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ePropemperda: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ePropemperda disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Sekretariat DPRD membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh

unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.480 ToC ePropemperda

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Sekretariat DPRD; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ePropemperda beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Sekretariat DPRD memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.481 Asumsi dan Risiko ToC ePropemperda

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.482 Rekomendasi Pengembangan ePropemperda

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Sekretariat DPRD
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Sekretariat DPRD bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.56 Ilustrasi ePropemperda

2.5.54 ParlemenGO!

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.483 Identitas Inovasi ParlemenGO!

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ParlemenGO!
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Sekretariat DPRD
5	**PIC/Narahubung**	Diewa
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi ParlemenGO! dikembangkan oleh Sekretariat DPRD dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis platform digital interaktif yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Aplikasi/sistem ini menyediakan kanal terpadu bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan (e-Aspirasi), memantau agenda persidangan/kunjungan kerja DPRD, mengunduh produk hukum daerah, serta mengakses siaran/informasi

kegiatan parlemen secara cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat *mobile*/smartphone.

Manfaat yang diharapkan: Mempermudah Akses Aspirasi & Pengaduan Warga: Masyarakat dapat menyuarakan masukan, kritik, dan usulan pembangunan kepada anggota DPRD tanpa terhalang jarak dan prosedur birokrasi yang rumit. Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Parlemen: Membuka akses publik terhadap kegiatan persidangan, hasil penjaringan aspirasi (reses), hingga penetapan regulasi daerah.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ParlemenGO! secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.484 Rancang Bangun ParlemenGO!

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Sekretariat DPRD; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ParlemenGO! diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat DPRD. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.485 Status Inovasi ParlemenGO! pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.486 Dasbor Indikator IID ParlemenGO!

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.487 Kontribusi ParlemenGO! terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi ParlemenGO! dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.488 Kendala dan Tantangan ParlemenGO!

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ParlemenGO!: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi

ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ParlemenGO! disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Sekretariat DPRD membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.489 ToC ParlemenGO!

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Sekretariat DPRD; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ParlemenGO! beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Sekretariat DPRD memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.490 Asumsi dan Risiko ToC ParlemenGO!

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.491 Rekomendasi Pengembangan ParlemenGO!

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Sekretariat DPRD
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Sekretariat DPRD bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.57 Ilustrasi ParlemenGO!

2.5.55 PANTING MARENA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.492 Identitas Inovasi PANTING MARENA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	PANTING MARENA (PERCEPATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL MELALUI PERANGKAT DESA DIKANTOR DESA KABUPATEN)

No	Atribut	Keterangan
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	**PIC/Narahubung**	Eko - +62 821-5256-0825 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Administrasi Kependudukan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi PANTING MARENA dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Administrasi Kependudukan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan (Adduk) berbasis jemput bola dan kolaborasi tingkat lokal yang memperdayakan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai fasilitator aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre di kantor Disdukcapil atau Kecamatan, melainkan dapat melakukan proses verifikasi dan aktivasi IKD secara cepat, mudah, dan dekat cukup di Kantor Desa/Kelurahan setempat melalui pendampingan petugas desa yang telah dilatih.

Manfaat yang diharapkan: Percepatan Cakupan Target IKD: Mengakselerasi persentase cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah secara masif melalui pemanfaatan jaringan jaringan aparatur desa/kelurahan. Kemudahan & Aksesibilitas Bagi Warga: Mendekatkan tempat pelayanan IKD ke lingkungan permukiman warga, menghemat waktu, serta menekan biaya transportasi masyarakat (terutama masyarakat desa terpencil).

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah penduduk pemohon dokumen kependudukan, termasuk kelompok rentan, serta petugas registrasi desa/kelurahan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun PANTING MARENA secara umum terdiri atas integrasi dengan basis data kependudukan, kanal permohonan daring, alur verifikasi berjenjang, serta penyerahan dokumen digital bertanda tangan elektronik. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di

tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.493 Rancang Bangun PANTING MARENA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	integrasi dengan basis data kependudukan, kanal permohonan daring, alur verifikasi berjenjang, serta penyerahan dokumen digital bertanda tangan elektronik
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian PANTING MARENA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.494 Status Inovasi PANTING MARENA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.495 Dasbor Indikator IID PANTING MARENA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan spt uraian tugas
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sesuaikan bimtek jadi 3 kali
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tidak ada pedoman teknis
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan keterangan : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan *Online* melalui *website*/webaplikasi/ aplikasi *mobile* (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	beri keterangan bahwa 100% sudah diselesaikan layanan pengaduan
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sesuaikan sop tahun 2025
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	bikin bentuk proposal pembuatan inovasi
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai / bikin laporan hasil akhir beri keterangan bahwa penerima manfaat lebih 501orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan SKM / IKM tahun 2025

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.496 Kontribusi PANTING MARENA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	persen	-	-	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan adminduk	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penerbitan dokumen	hari kerja	-	-	-	-
Persentase permohonan melalui kanal daring	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Administrasi Kependudukan, kendala dan tantangan implementasi PANTING MARENA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.497 Kendala dan Tantangan PANTING MARENA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	ketergantungan pada ketersediaan jaringan dan layanan basis data kependudukan nasional
2	**Sumber daya manusia**	kesenjangan literasi digital pada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas serta keterbatasan petugas registrasi desa
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	kebutuhan verifikasi dokumen fisik yang belum sepenuhnya dapat digantikan proses daring
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi PANTING MARENA: terwujudnya meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan berkurangnya hambatan akses pada lingkup kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change PANTING MARENA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang

ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan berkurangnya hambatan akses. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa terjaminnya hak identitas hukum seluruh penduduk sebagai basis akses layanan dasar.

Tabel 2.498 ToC PANTING MARENA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada penduduk pemohon dokumen kependudukan; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem PANTING MARENA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan berkurangnya hambatan akses	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Dampak	Terjaminnya hak identitas hukum seluruh penduduk sebagai basis akses layanan dasar	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.499 Asumsi dan Risiko ToC PANTING MARENA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; ketergantungan pada ketersediaan jaringan dan layanan basis data kependudukan nasional	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; kesenjangan literasi digital pada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas serta keterbatasan petugas registrasi desa	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	kebutuhan verifikasi dokumen fisik yang belum sepenuhnya dapat digantikan proses daring	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.500 Rekomendasi Pengembangan PANTING MARENA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu kebutuhan verifikasi dokumen fisik yang belum sepenuhnya dapat digantikan proses daring, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.58 Ilustrasi PANTING MARENA

2.5.56 INOVASI SILANTING

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.501 Identitas Inovasi INOVASI SILANTING

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	INOVASI SILANTING (SISTEM LAYANAN TERINTEGRASI SECARA DARING) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	**PIC/Narahubung**	Eko - +62 821-5256-0825 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Administrasi Kependudukan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi INOVASI SILANTING dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara

fungsional inovasi ini termasuk klaster Administrasi Kependudukan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan secara *online*. Melalui aplikasi SILANTING, masyarakat maupun perangkat desa/kecamatan dapat mengajukan permohonan berbagai dokumen administrasi kependudukan (seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perpindahan penduduk) secara mandiri, praktis, dan dapat diakses dari mana saja tanpa harus datang dan mengantre langsung di kantor dinas.

Manfaat yang diharapkan: Mempermudah & Mempercepat Layanan Kependudukan: Masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen Adduk secara fleksibel dari rumah atau fasilitas desa setempat melalui jaringan internet. Efisiensi Waktu & Biaya Operasional Warga: Menghemat biaya transportasi serta memangkas waktu tempuh warga (terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan kabupaten).

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah penduduk pemohon dokumen kependudukan, termasuk kelompok rentan, serta petugas registrasi desa/kelurahan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun INOVASI SILANTING secara umum terdiri atas integrasi dengan basis data kependudukan, kanal permohonan daring, alur verifikasi berjenjang, serta penyerahan dokumen digital bertanda tangan elektronik. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.502 Rancang Bangun INOVASI SILANTING

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	integrasi dengan basis data kependudukan, kanal permohonan daring, alur verifikasi berjenjang, serta penyerahan dokumen digital bertanda tangan elektronik
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian INOVASI SILANTING diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.503 Status Inovasi INOVASI SILANTING pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.504 Dasbor Indikator IID INOVASI SILANTING

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan spt uraian tugas
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sesuaikan bimtek jadi 3 kali
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tidak ada pedoman teknis
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan keterangan : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan *Online* melalui *website*/webaplikasi/ aplikasi *mobile* (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : chatbot)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	beri keterangan bahwa 100% sudah diselesaikan layanan pengaduan
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sesuaikan sop tahun 2025
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	bikin bentuk proposal pembuatan inovasi
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai / bikin laporan hasil akhir beri keterangan bahwa penerima manfaat lebih 501orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan SKM / IKM tahun 2025

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.505 Kontribusi INOVASI SILANTING terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	persen	-	-	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan adminduk	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penerbitan dokumen	hari kerja	-	-	-	-
Persentase permohonan melalui kanal daring	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Administrasi Kependudukan, kendala dan tantangan implementasi INOVASI SILANTING dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.506 Kendala dan Tantangan INOVASI SILANTING

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	ketergantungan pada ketersediaan jaringan dan layanan basis data kependudukan nasional
2	**Sumber daya manusia**	kesenjangan literasi digital pada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas serta keterbatasan petugas registrasi desa
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	kebutuhan verifikasi dokumen fisik yang belum sepenuhnya dapat digantikan proses daring
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi INOVASI SILANTING: terwujudnya meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan berkurangnya hambatan akses pada lingkup kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change INOVASI SILANTING disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan

hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan berkurangnya hambatan akses. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa terjaminnya hak identitas hukum seluruh penduduk sebagai basis akses layanan dasar.

Tabel 2.507 ToC INOVASI SILANTING

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada penduduk pemohon dokumen kependudukan; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem INOVASI SILANTING beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan berkurangnya hambatan akses	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Terjaminnya hak identitas hukum seluruh penduduk sebagai basis akses layanan dasar	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.508 Asumsi dan Risiko ToC INOVASI SILANTING

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; ketergantungan pada ketersediaan jaringan dan layanan basis data kependudukan nasional	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; kesenjangan literasi digital pada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas serta keterbatasan petugas registrasi desa	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	kebutuhan verifikasi dokumen fisik yang belum sepenuhnya dapat digantikan proses daring	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.509 Rekomendasi Pengembangan INOVASI SILANTING

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu kebutuhan verifikasi dokumen fisik yang belum sepenuhnya dapat digantikan proses daring, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.59 Ilustrasi INOVASI SILANTING

2.5.57 SIM PKB

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.510 Identitas Inovasi SIM PKB

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIM PKB (Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perhubungan
5	**PIC/Narahubung**	M. iqyan firdaus
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIM PKB dikembangkan oleh Dinas Perhubungan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik dan tata kelola berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan untuk modernisasi proses pengujian berkala kendaraan bermotor (uji kir). Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran uji secara *online*, penjadwalan pendaftaran, pencatatan hasil uji secara otomatis dari alat uji mekanis, hingga integrasi pembayaran digital (e-payment) dan penerbitan Bukti Lulus Uji

Elektronik (BLUe) untuk memastikan kelaikan jalan kendaraan secara transparan dan terukur.

Manfaat yang diharapkan: Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas & Kelaikan Kendaraan: Memastikan seluruh kendaraan angkutan barang dan orang yang beroperasi memenuhi standar teknis kelaikan jalan secara objektif dan akurat. Efisiensi & Bebas Antrean (Paperless/Digital): Memudahkan pemilik/pengemudi kendaraan dalam mendaftar dan memilih jadwal uji dari rumah/lokasi kerja tanpa harus mengantre lama di lokasi pengujian.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIM PKB secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.511 Rancang Bangun SIM PKB

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perhubungan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIM PKB diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.512 Status Inovasi SIM PKB pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SIM PKB tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Perhubungan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.513 Dasbor Indikator IID SIM PKB

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2024 dan 2025
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	kalau bisa data dukung alat kerja menggunakan sudah menggunakan sosial media (contoh : Screenshot Postingan PAPI ALIN pada sosial media Dinas Perhubungan)
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	tambahkan bimtek seperti contoh (Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta bimtek)
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	data bapperida
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan media hotline dan melalui *website* dinas perhubungan
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	beri tanggal bulan tahun . tahun 2025 (sesuai arahan ulak ucup)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	karena belum mencapai target 501 orang, bisa dibuatkan dalam bentuk Hasil Analisis/Kajian/Riset/Laporan/Dokumen yang dikeluarkan oleh intansi pelaksana inovasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan ikm/skm tahun 2025 semester 1 dan 2

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.514 Kontribusi SIM PKB terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SIM PKB dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.515 Kendala dan Tantangan SIM PKB

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIM PKB: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Perhubungan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIM PKB disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perhubungan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.516 ToC SIM PKB

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perhubungan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIM PKB beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perhubungan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.517 Asumsi dan Risiko ToC SIM PKB

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.518 Rekomendasi Pengembangan SIM PKB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perhubungan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perhubungan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.60 Ilustrasi SIM PKB

2.5.58 PAPI ALIN

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.519 Identitas Inovasi PAPI ALIN

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	PAPI ALIN
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perhubungan
5	**PIC/Narahubung**	M. iqyan firdaus
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi PAPI ALIN dikembangkan oleh Dinas Perhubungan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik dan tanggap cepat keselamatan jalan berbasis kanal pengaduan digital yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan. PAPI ALIN memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan secara langsung kerusakan, gangguan operasional, atau malfungsi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL/lampu lalu lintas) serta sarana prasarana perlengkapan jalan lainnya. Dengan mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis foto/lokasi *real-time* dan sistem respon petugas teknis, inovasi

ini memastikan setiap aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Manfaat yang diharapkan: Hadirnya inovasi PAPI ALIN memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan keselamatan jalan dan efisiensi kinerja Dinas Perhubungan. Melalui pemanfaatan kanal pengaduan ini, potensi kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan atau padamnya lampu lalu lintas dapat ditekan secara dramatis.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun PAPI ALIN secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.520 Rancang Bangun PAPI ALIN

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perhubungan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian PAPI ALIN diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.521 Status Inovasi PAPI ALIN pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung PAPI ALIN tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Perhubungan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.522 Dasbor Indikator IID PAPI ALIN

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2024 dan 2025
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	kalau bisa data dukung alat kerja menggunakan sudah menggunakan sosial media (contoh : Screenshot Postingan PAPI ALIN pada sosial media Dinas Perhubungan)
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	tambahkan bimtek seperti contoh (Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta bimtek)
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	data bapperida
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan media hotline dan melalui *website* dinas perhubungan
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	beri tanggal bulan tahun . tahun 2025 (sesuai arahan ulak ucup)

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	karena belum mencapai target 501 orang, bisa dibuatkan dalam bentuk Hasil Analisis/Kajian/Riset/Laporan/Dokumen yang dikeluarkan oleh intansi pelaksana inovasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan ikm/skm tahun 2025 semester 1 dan 2

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.523 Kontribusi PAPI ALIN terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi PAPI ALIN dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.524 Kendala dan Tantangan PAPI ALIN

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi PAPI ALIN: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Perhubungan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change PAPI ALIN disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perhubungan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.525 ToC PAPI ALIN

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perhubungan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem PAPI ALIN beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perhubungan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.526 Asumsi dan Risiko ToC PAPI ALIN

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.527 Rekomendasi Pengembangan PAPI ALIN

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perhubungan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perhubungan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.61 Ilustrasi PAPI ALIN

2.5.59 SITERANG PPID HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.528 Identitas Inovasi SITERANG PPID HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SITERANG PPID HSS
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5	**PIC/Narahubung**	Yogo - 081334555130 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SITERANG PPID HSS dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Aplikasi/sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pelayanan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan, serta penyediaan daftar informasi publik (berkala, serta-merta, dan setiap saat) dari seluruh Perangkat Daerah secara terpusat, cepat, akurat, dan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat luas secara *online*.

Manfaat yang diharapkan: Kehadiran inovasi SITERANG PPID HSS memberikan dampak besar terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi serta memantau status penyelesaiannya secara *real-time* tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas, sehingga menghemat waktu, biaya, serta memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung

mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SITERANG PPID HSS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.529 Rancang Bangun SITERANG PPID HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SITERANG PPID HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.530 Status Inovasi SITERANG PPID HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SITERANG PPID HSS tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.531 Dasbor Indikator IID SITERANG PPID HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	tambahkan 2 bimtek lagi, 1 file terdiri dari undangan, daftar hadir, dokumentasi dan sertifikat salah satu peserta
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh. isinya memuat minimal 3 dari 4 metode layanan yaitu tatap muka, hotline, sosial media dan *website*
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh. isinya berupa rekapitulasi pengaduan yang ditangani dengan persentase 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh. isinya berupa SOP dan menampilkan waktu yang diperlukan. maksimal 24 jam/1 hari
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	data dukung belum ada, bisa dibuatkan seperti contoh. isinya berupa timeline pembuatan inovasi dengan rentang 1-4 bulan
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	data dukung belum ada, bisa ditambahkan laporan SKM di tahun 2025

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.532 Kontribusi SITERANG PPID HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SITERANG PPID HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.533 Kendala dan Tantangan SITERANG PPID HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SITERANG PPID HSS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SITERANG PPID HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.534 ToC SITERANG PPID HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SITERANG PPID HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.535 Asumsi dan Risiko ToC SITERANG PPID HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.536 Rekomendasi Pengembangan SITERANG PPID HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.62 Ilustrasi SITERANG PPID HSS

2.5.60 MPP One Stop Smart Service

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.537 Identitas Inovasi MPP One Stop Smart Service

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	MPP One Stop Smart Service (MOSSS)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	**PIC/Narahubung**	Bagus
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi MPP One Stop Smart Service dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik terpadu dan modern berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis perizinan, non-perizinan, serta layanan administrasi instansi vertikal maupun daerah di Mall Pelayanan Publik (MPP). MOSSS mengusung konsep smart service dengan menggabungkan sistem antrean elektronik pintar, pelayanan mandiri (self-service kiosk), konsultasi *online*, hingga integrasi

pemrosesan dokumen secara digital dalam satu pintu, guna memberikan pengalaman pelayanan yang cepat, transparan, dan terukur bagi seluruh warga serta pelaku usaha.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan inovasi MPP One Stop Smart Service (MOSSS) membawa perubahan transformatif dalam meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan publik di daerah. Dengan memusatkan dan memdigitalisasi seluruh jenis layanan dalam satu platform pintar, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai dokumen perizinan maupun administrasi secara efisien tanpa harus berpindah-pindah lokasi instansi, sehingga menghemat waktu dan biaya secara signifikan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun MPP One Stop Smart Service secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.538 Rancang Bangun MPP One Stop Smart Service

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian MPP One Stop Smart Service diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.539 Status Inovasi MPP One Stop Smart Service pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.540 Dasbor Indikator IID MPP One Stop Smart Service

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai / tambahan data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.541 Kontribusi MPP One Stop Smart Service terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi MPP One Stop Smart Service dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.542 Kendala dan Tantangan MPP One Stop Smart Service

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi MPP One Stop Smart Service: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change MPP One Stop Smart Service disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.543 ToC MPP One Stop Smart Service

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem MPP One Stop Smart Service beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.544 Asumsi dan Risiko ToC MPP One Stop Smart Service

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.545 Rekomendasi Pengembangan MPP One Stop Smart Service

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

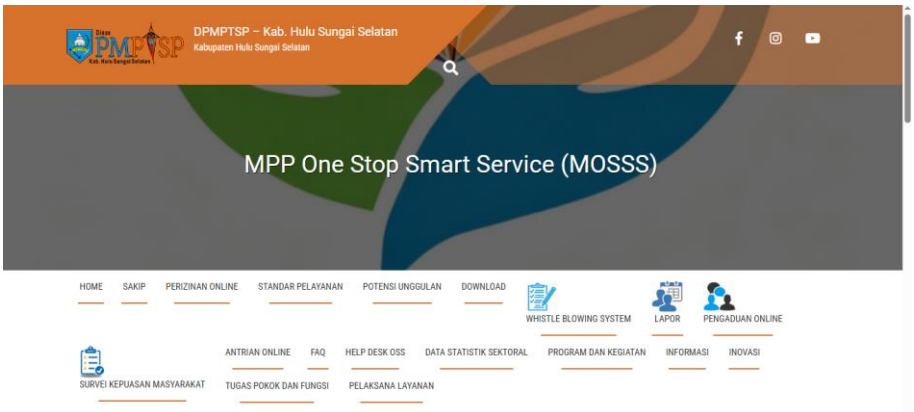

Gambar 2.63 Ilustrasi MPP One Stop Smart Service

2.5.61 KLINIK ARSIP

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.546 Identitas Inovasi KLINIK ARSIP

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	KLINIK ARSIP
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi KLINIK ARSIP dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan pendampingan dan pembinaan tata kelola kearsipan terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) untuk membantu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, hingga lembaga masyarakat dalam mengelola, menyelamatkan, dan merapikan arsip. Layanan "Klinik Arsip" berfungsi sebagai pusat konsultasi, diagnosis permasalahan kearsipan, bimbingan teknis (coaching clinic), serta pendampingan langsung dalam pembenahan arsip aktif, inaktif, maupun digitalisasi arsip guna mewujudkan tertib administrasi kearsipan yang akuntabel dan tersistematis.

Manfaat yang diharapkan: Kehadiran inovasi KLINIK ARSIP memberikan dampak signifikan terhadap terciptanya budaya tertib arsip dan penyelamatan memori kolektif daerah. Melalui pendekatan konsultatif yang solutif, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa kini dapat mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai kendala penataan dokumen—mulai dari penumpukan berkas yang tidak teratur, penataan jadwal retensi arsip (JRA), hingga penanganan arsip vital—secara lebih mudah, terarah, dan sesuai standar kearsipan nasional.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima

manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun KLINIK ARSIP secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.547 Rancang Bangun KLINIK ARSIP

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian KLINIK ARSIP diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.548 Status Inovasi KLINIK ARSIP pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Non Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.549 Dasbor Indikator IID KLINIK ARSIP

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.550 Kontribusi KLINIK ARSIP terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi KLINIK ARSIP dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.551 Kendala dan Tantangan KLINIK ARSIP

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi KLINIK ARSIP: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change KLINIK ARSIP disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima

layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.552 ToC KLINIK ARSIP

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem KLINIK ARSIP beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.553 Asumsi dan Risiko ToC KLINIK ARSIP

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.554 Rekomendasi Pengembangan KLINIK ARSIP

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.64 Ilustrasi KLINIK ARSIP

2.5.62 SIMFONI ARSIP

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.555 Identitas Inovasi SIMFONI ARSIP

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIMFONI ARSIP (SISTEM INFORMASI PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA ARSIP)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIMFONI ARSIP dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip). SIMFONI ARSIP hadir untuk mengintegrasikan proses pembinaan kearsipan, pencatatan dan pelaporan kegiatan arsiparis/pengelola arsip, hingga evaluasi nilai kinerja kearsipan seluruh Perangkat

Daerah serta Pemerintah Desa. Sistem ini meruangkan alur kerja pengawasan yang sebelumnya manual menjadi tersistematis, terukur, dan berkesinambungan guna memastikan standar pengelolaan arsip daerah berjalan optimal secara *real-time*.

Manfaat yang diharapkan: Kehadiran inovasi SIMFONI ARSIP memberikan dampak transformatif terhadap penguatan kualitas tata kearsipan dan akuntabilitas birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan mengalihrupakan alur pembinaan dan evaluasi ke dalam platform digital, instansi pengelola arsip dapat memantau tingkat kepatuhan serta perkembangan pengelolaan dokumen di setiap Perangkat Daerah secara transparan, akurat, dan tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan fisik.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIMFONI ARSIP secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.556 Rancang Bangun SIMFONI ARSIP

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIMFONI ARSIP diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.557 Status Inovasi SIMFONI ARSIP pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.558 Dasbor Indikator IID SIMFONI ARSIP

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.559 Kontribusi SIMFONI ARSIP terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi SIMFONI ARSIP dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.560 Kendala dan Tantangan SIMFONI ARSIP

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIMFONI ARSIP: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 -

Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIMFONI ARSIP disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.561 ToC SIMFONI ARSIP

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIMFONI ARSIP beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.562 Asumsi dan Risiko ToC SIMFONI ARSIP

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.563 Rekomendasi Pengembangan SIMFONI ARSIP

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.65 Ilustrasi SIMFONI ARSIP

2.5.63 JAGOAN ARSIP

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.564 Identitas Inovasi JAGOAN ARSIP

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	JAGOAN ARSIP
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi JAGOAN ARSIP dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola administrasi yang berfokus pada pembentukan, pelatihan, serta pemberdayaan "Agen Kearsipan" di setiap Perangkat Daerah hingga unit kerja terkecil. JAGOAN ARSIP memadukan pendekatan pembinaan SDM secara intensif dengan standardisasi penataan fisik dan digital dokumen, guna mencetak pilar-pilar pengelola arsip yang kompeten, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam mewujudkan tertib kearsipan daerah.

Manfaat yang diharapkan: Kehadiran inovasi JAGOAN ARSIP memberikan dampak positif yang nyata terhadap perubahan budaya kerja dan peningkatan kompetensi pengelola arsip di seluruh lingkungan pemerintah daerah. Melalui hadirnya Agen Kearsipan yang terlatih dan terstandardisasi di setiap unit kerja, masalah klasik seperti penumpukan dokumen yang tidak terstruktur, kerusakan berkas penting, hingga keterlambatan dalam pencarian arsip dapat diatasi secara proaktif dan berkelanjutan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun JAGOAN ARSIP secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.565 Rancang Bangun JAGOAN ARSIP

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian JAGOAN ARSIP diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.566 Status Inovasi JAGOAN ARSIP pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.567 Dasbor Indikator IID JAGOAN ARSIP

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.568 Kontribusi JAGOAN ARSIP terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi JAGOAN ARSIP dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.569 Kendala dan Tantangan JAGOAN ARSIP

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi JAGOAN ARSIP: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change JAGOAN ARSIP disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.570 ToC JAGOAN ARSIP

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem JAGOAN ARSIP beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.571 Asumsi dan Risiko ToC JAGOAN ARSIP

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.572 Rekomendasi Pengembangan JAGOAN ARSIP

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.66 Ilustrasi JAGOAN ARSIP

2.5.64 AKSI SEKOLAH LITERAT

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.573 Identitas Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	AKSI SEKOLAH LITERAT (Akselerasi Standar dan Inovasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]

No	Atribut	Keterangan
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pendampingan dan pemenuhan mutu perpustakaan berbasis kolaborasi terpadu yang dirancang untuk mempercepat peningkatan standar kualitas serta pencapaian akreditasi perpustakaan Sekolah Dasar (SD). AKSI SEKOLAH LITERAT memadukan bimbingan teknis tata kelola perpustakaan, digitalisasi katalog dan layanan baca, hingga pengembangan inovasi kegiatan literasi sekolah. Program ini hadir untuk mentransformasi perpustakaan sekolah dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi pusat belajar yang modern, menarik, dan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Manfaat yang diharapkan: Kehadiran inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan budaya literasi dan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar. Melalui proses pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan, sekolah dasar dapat lebih cepat dan mudah melengkapi sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan instrumen akreditasi nasional tanpa mengalami kebingungan administrasi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun AKSI SEKOLAH LITERAT secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan

pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.574 Rancang Bangun AKSI SEKOLAH LITERAT

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian AKSI SEKOLAH LITERAT diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.575 Status Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.576 Dasbor Indikator IID AKSI SEKOLAH LITERAT

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.577 Kontribusi AKSI SEKOLAH LITERAT terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi AKSI SEKOLAH LITERAT dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.578 Kendala dan Tantangan AKSI SEKOLAH LITERAT

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi AKSI SEKOLAH LITERAT: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change AKSI SEKOLAH LITERAT disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome*

akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.579 ToC AKSI SEKOLAH LITERAT

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem AKSI SEKOLAH LITERAT beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.580 Asumsi dan Risiko ToC AKSI SEKOLAH LITERAT

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.581 Rekomendasi Pengembangan AKSI SEKOLAH LITERAT

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.67 Ilustrasi AKSI SEKOLAH LITERAT

2.5.65 SINERGI AKSI PUSTAKA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.582 Identitas Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SINERGI AKSI PUSTAKA (Sistem Pembinaan Terintegrasi Perpustakaan Umum dan Khusus Menuju Standar Nasional Perpustakaan)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	**PIC/Narahubung**	Edy - +62 823-5184-1566 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pendidikan & Literasi Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pendidikan & Literasi Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi tata kelola dan pemenuhan mutu perpustakaan terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengakselerasi peningkatan standar pengagregasian perpustakaan umum (seperti perpustakaan kecamatan/desa/kelurahan) serta perpustakaan khusus (instansi pemerintah/swasta). SINERGI AKSI PUSTAKA menggabungkan sistem

pembinaan berkala, konsultasi penataan koleksi dan tata ruang, digitalisasi katalog, hingga pendampingan pemenuhan instrumen Akreditasi Perpustakaan secara terintegrasi agar seluruh perpustakaan mampu mencapai dan mempertahankan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Manfaat yang diharapkan: Kehadiran inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA memberikan dampak strategis dalam memperkuat fondasi kelembagaan dan kualitas layanan perpustakaan umum serta khusus di seluruh wilayah daerah. Melalui pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan, pengelola perpustakaan dapat memangkas kendala teknis dalam pemenuhan standar nasional—mulai dari manajemen koleksi, pengolahan bahan pustaka, pemanfaatan teknologi informasi, hingga penyediaan sarana prasarana yang inklusif.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum pemustaka. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SINERGI AKSI PUSTAKA secara umum terdiri atas basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.583 Rancang Bangun SINERGI AKSI PUSTAKA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data peserta/koleksi, kanal akses daring bagi pengguna, modul pemantauan partisipasi, serta pelaporan capaian program
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SINERGI AKSI PUSTAKA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.584 Status Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.585 Dasbor Indikator IID SINERGI AKSI PUSTAKA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA tahun 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Data dari Bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah sesuai / data tambahan dari Bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.586 Kontribusi SINERGI AKSI PUSTAKA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	-	-	-	-
Jumlah kunjungan/pemustaka	orang/tahun	-	-	-	-
Persentase satuan pendidikan/perpustakaan terakreditasi	persen	-	-	-	-
Tingkat partisipasi program literasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pendidikan & Literasi Digital, kendala dan tantangan implementasi SINERGI AKSI PUSTAKA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.587 Kendala dan Tantangan SINERGI AKSI PUSTAKA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SINERGI AKSI PUSTAKA: terwujudnya meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat pada lingkup kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital

yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SINERGI AKSI PUSTAKA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.588 ToC SINERGI AKSI PUSTAKA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada peserta didik; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SINERGI AKSI PUSTAKA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akses, partisipasi, dan mutu layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kabupaten hulu sungai selatan	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.589 Asumsi dan Risiko ToC SINERGI AKSI PUSTAKA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan sarana perangkat dan jaringan di satuan pendidikan/perpustakaan wilayah terpencil	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan tenaga pengelola terlatih dan tingginya rotasi petugas pendamping program	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.590 Rekomendasi Pengembangan SINERGI AKSI PUSTAKA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya pengukuran dampak belajar secara terstruktur serta keberlanjutan yang bergantung pada anggaran tahunan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.68 Ilustrasi SINERGI AKSI PUSTAKA

2.5.66 LIWAR HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.591 Identitas Inovasi LIWAR HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	LIWAR HSS
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi LIWAR HSS dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. LIWAR HSS (Lindungi Warga Hulu Sungai Selatan) adalah inovasi sistem berbasis teknologi geospasial yang berfungsi sebagai Layanan Informasi dan Pendampingan Warga Hulu Sungai Selatan untuk membantu ketepatan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Platform ini mengintegrasikan pemetaan data geospasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) dengan basis data penanganan kesejahteraan masyarakat dan perencanaan daerah, guna memastikan seluruh kebijakan, program bantuan, serta pendampingan pembangunan terlaksana secara akurat, terukur, dan tepat sasaran.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan inovasi LIWAR HSS Berbasis Geospasial memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan akurasi program-program pembangunan serta perlindungan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemanfaatan peta digital berbasis koordinat presisi memungkinkan pemerintah daerah memetakan profil warga dan kondisi wilayah secara *real-time*, sehingga penyaluran program pendampingan masyarakat maupun intervensi pembangunan tidak lagi salah sasaran.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun LIWAR HSS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.592 Rancang Bangun LIWAR HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian LIWAR HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.593 Status Inovasi LIWAR HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.594 Dasbor Indikator IID LIWAR HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.595 Kontribusi LIWAR HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi LIWAR HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.596 Kendala dan Tantangan LIWAR HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi LIWAR HSS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change LIWAR HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi,

akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.597 ToC LIWAR HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem LIWAR HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.598 Asumsi dan Risiko ToC LIWAR HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.599 Rekomendasi Pengembangan LIWAR HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.69 Ilustrasi LIWAR HSS

2.5.67 E-SAKIP

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.600 Identitas Inovasi E-SAKIP

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	E-SAKIP
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi E-SAKIP dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. E-SAKIP (Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan langkah transformasi digital dalam manajemen birokrasi yang mengubah proses akuntabilitas kinerja dari manual berbasis kertas menjadi sistem informasi terpadu berbasis web. Inovasi ini mematikan kebiasaan lama birokrasi yang berfokus pada serapan anggaran semata

(input-oriented) dan mengarahkannya pada pencapaian hasil nyata yang dirasakan masyarakat (*outcome*-oriented).

Manfaat yang diharapkan: Penerapan e-SAKIP memberikan dampak sistemik dan menyeluruh, baik pada internal efisiensi birokrasi maupun kualitas hasil pembangunan untuk masyarakat. Dari sisi efisiensi keuangan negara, inovasi ini terbukti efektif mencegah pemborosan anggaran dengan mengeliminasi program-program formalitas yang tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun E-SAKIP secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.601 Rancang Bangun E-SAKIP

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian E-SAKIP diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.602 Status Inovasi E-SAKIP pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.603 Dasbor Indikator IID E-SAKIP

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.604 Kontribusi E-SAKIP terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi E-SAKIP dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.605 Kendala dan Tantangan E-SAKIP

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi E-SAKIP: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat

termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change E-SAKIP disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.606 ToC E-SAKIP

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem E-SAKIP beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.607 Asumsi dan Risiko ToC E-SAKIP

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.608 Rekomendasi Pengembangan E-SAKIP

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.70 Ilustrasi E-SAKIP

2.5.68 SENADA+

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.609 Identitas Inovasi SENADA+

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SENADA+ (Sistem Informasi Inovasi Daerah)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Atribut	Keterangan
5	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SENADA+ dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SENADA+ (Sistem Informasi Inovasi Daerah) merupakan platform sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk mengelola, mendokumentasikan, serta memetakan seluruh ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah daerah secara terintegrasi. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi tata kelola pengembangan inovasi daerah yang sebelumnya sering kali bersifat sporadis, tidak terdata dengan baik, serta minim koordinasi antar-Perangkat Daerah. Melalui platform ini, seluruh proses ideasi, pengusulan, verifikasi, pendampingan, hingga tahap replikasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dapat dipantau dan dikelola dalam satu pintu.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SENADA+ membawa dampak positif yang signifikan terhadap iklim budaya kerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik di daerah. Dari sisi tata kelola dan administrasi, inovasi ini menciptakan transparansi dan efisiensi tinggi dalam proses pemetaan serta penilaian inovasi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SENADA+ secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.610 Rancang Bangun SENADA+

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SENADA+ diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.611 Status Inovasi SENADA+ pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Kelengkapan data dukung	Sudah Input	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.612 Dasbor Indikator IID SENADA+

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.613 Kontribusi SENADA+ terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SENADA+ dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.614 Kendala dan Tantangan SENADA+

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SENADA+: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SENADA+ disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan

menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.615 ToC SENADA+

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SENADA+ beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.616 Asumsi dan Risiko ToC SENADA+

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.617 Rekomendasi Pengembangan SENADA+

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SENADA+ - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.71 Ilustrasi SENADA+

2.5.69 SI KETUPAD

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.618 Identitas Inovasi SI KETUPAD

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI KETUPAD (SISTEM INFORMASI KEUANGAN TERPADU PAJAK DAERAH)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	**PIC/Narahubung**	M. Ali Alaydrus
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Keuangan & Pendapatan Daerah
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI KETUPAD dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Keuangan & Pendapatan Daerah, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh rantai proses pengelolaan pajak daerah—mulai dari pendataan, pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan dan pengawasan—ke dalam satu platform terpadu. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas sistem tata kelola pajak daerah konvensional yang kerap terfragmentasi, memakan waktu lama, serta rentan terhadap kesalahan manusia (human error) dan ketidakakuratan data potensi penerimaan daerah.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SI KETUPAD memberikan dampak yang luas, terutama terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi birokrasi keuangan. Dari sisi efisiensi operasional dan transparansi, inovasi ini meminimalkan interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah wajib pajak dan retribusi daerah, perangkat daerah pengelola keuangan, serta pemerintah desa. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI KETUPAD secara umum terdiri atas basis data objek pajak/anggaran, modul perhitungan dan pembayaran, dasbor realisasi, serta pelaporan yang dapat diaudit. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.619 Rancang Bangun SI KETUPAD

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data objek pajak/anggaran, modul perhitungan dan pembayaran, dasbor realisasi, serta pelaporan yang dapat diaudit
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI KETUPAD diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.620 Status Inovasi SI KETUPAD pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.621 Dasbor Indikator IID SI KETUPAD

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan SK Bupati dan narasi seperti pada contoh

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	tambahkan 1 kali bimtek lagi dan tambahkan sertifikat peserta pada setiap kali bimtek
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi dan SK Bupati seperti pada contoh
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi dan SK Bupati seperti pada contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi dan SK Bupati seperti pada contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Kemanfaatan bisa disederhanakan lagi, seperti total pengguna, total layanan atau total penerima manfaat minimal 501 orang

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.622 Kontribusi SI KETUPAD terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	rupiah/persen	-	-	-	-
Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	persen	-	-	-	-
Opini BPK atas laporan keuangan daerah	opini	-	-	-	-
Persentase transaksi keuangan terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Keuangan & Pendapatan Daerah, kendala dan tantangan implementasi SI KETUPAD dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.623 Kendala dan Tantangan SI KETUPAD

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	risiko keamanan data transaksi yang belum ditopang kebijakan keamanan informasi formal
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan kapasitas SDM pengelola pada tingkat desa dan unit pemungut
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	kebutuhan rekonsiliasi manual dengan sistem keuangan daerah dan perbankan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI KETUPAD: terwujudnya meningkatnya akurasi, kepatuhan, dan realisasi penerimaan serta tertib pengelolaan keuangan pada lingkup kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI KETUPAD disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya akurasi, kepatuhan, dan realisasi penerimaan serta tertib pengelolaan keuangan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya kemandirian fiskal dan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 2.624 ToC SI KETUPAD

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI KETUPAD beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya akurasi, kepatuhan, dan realisasi penerimaan serta tertib pengelolaan keuangan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya kemandirian fiskal dan akuntabilitas keuangan daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.625 Asumsi dan Risiko ToC SI KETUPAD

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; risiko keamanan data transaksi yang belum ditopang kebijakan keamanan informasi formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan kapasitas SDM pengelola pada tingkat desa dan unit pemungut	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	kebutuhan rekonsiliasi manual dengan sistem keuangan daerah dan perbankan	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.626 Rekomendasi Pengembangan SI KETUPAD

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu kebutuhan rekonsiliasi manual dengan sistem keuangan daerah dan perbankan, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.72 Ilustrasi SI KETUPAD

2.5.70 SIP-CORPU HSS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.627 Identitas Inovasi SIP-CORPU HSS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIP-CORPU HSS
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**PIC/Narahubung**	Masud Rahmat
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIP-CORPU HSS dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIP-CORPU HSS (Sistem Informasi Pemetaan Kompetensi & Corporate University) merupakan inovasi pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem informasi yang digagas oleh BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini memadukan dua pendekatan utama: pemetaan potensi dan kompetensi pegawai (gap analysis) serta penerapan konsep Corporate University (Corpu) dalam satu platform terpadu. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi metode pengembangan kompetensi ASN yang sebelumnya cenderung generik, tidak seragam, dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil organisasi maupun individu pegawai.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIP-CORPU HSS memberikan dampak strategis terhadap efisiensi tata kelola SDM aparatur dan akselerasi profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari sisi efisiensi dan efektivitas perencanaan, inovasi ini menekan pemborosan anggaran pelatihan dengan mengalihkan fokus pengkaderan dan Diklat menjadi tepat sasaran (data-driven training needs analysis).

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung

mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIP-CORPU HSS secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.628 Rancang Bangun SIP-CORPU HSS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIP-CORPU HSS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.629 Status Inovasi SIP-CORPU HSS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.630 Dasbor Indikator IID SIP-CORPU HSS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tambahkan Narasi seperti pada contoh
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tambahkan Narasi seperti pada contoh

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Tambahkan Narasi seperti pada contoh
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Tambahkan Narasi seperti pada contoh
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan SKM tahun 2025

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.631 Kontribusi SIP-CORPU HSS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, kendala dan tantangan implementasi SIP-CORPU HSS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.632 Kendala dan Tantangan SIP-CORPU HSS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIP-CORPU HSS: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIP-CORPU HSS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil

keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.633 ToC SIP-CORPU HSS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIP-CORPU HSS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.634 Asumsi dan Risiko ToC SIP-CORPU HSS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.635 Rekomendasi Pengembangan SIP-CORPU HSS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.73 Ilustrasi SIP-CORPU HSS

2.5.71 SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.636 Identitas Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI JULAKK SANI Kec. Angkinang (Sistem Informasi Jemput Bola Kecamatan - KUA Dispensasi Nikah Kecamatan Angkinang)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Angkinang
5	**PIC/Narahubung**	Saubari
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang dikembangkan oleh Kecamatan Angkinang dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik,

hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI JULAKK SANI Kec. Angkinang (Sistem Informasi Jemput Bola Kecamatan - KUA Dispensasi Nikah Kecamatan Angkinang) merupakan suatu Inovasi Jemput Bola Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah yang menjadi inisiatif dari Kecamatan Angkinang sebagai salah satu reward kepada pengguna layanan terutama Rekomendasi Dispensasi Nikah untuk memberikan pelayanan tambahan kepada masyarakat dalam mengurus Surat Rekomendasi yang dilakukan melalui sistem aplikasi Whats App selain pelayanan langsung melalui ruang PATEN di Kecamatan.

Manfaat yang diharapkan: Hasil inovasi dari penerapan SI JULAKK SANI dapat diukur melalui pencapaian nyata (output dan *outcome*) yang mengubah kualitas pelayanan di Kecamatan Angkinang. Hasil Kuantitatif (Output) Peningkatan Volume: Jumlah dokumen Rekomendasi Dispensasi Nikah yang diproses secara digital meningkat pesat. Kecepatan Durasi: Waktu penyelesaian dokumen pangkas dari hitungan hari menjadi hanya dalam hitungan jam.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI JULAKK SANI Kec. Angkinang secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.637 Rancang Bangun SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Angkinang; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI JULAKK SANI Kec. Angkinang diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Angkinang. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.638 Status Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.639 Dasbor Indikator IID SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai dan Lengkap
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Sesuai dan Lengkap
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai dan Lengkap
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai dan Lengkap
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Sesuai dan Lengkap
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai dan Lengkap
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai dan Lengkap
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai dan Lengkap
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Sesuai dan Lengkap
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Tambahkan Metode Hotline (Email atau no telp Kecamatan pada kop surat) dan Sosial Media (FB, IG atau Tiktok)
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Sesuai dan Lengkap
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Sesuai dan Lengkap
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai dan Lengkap

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tambahkan Timeline Penciptaan Inovasi pada proposal (Buat di tahun 2025 dengan jangka waktu 1-4 Bulan)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Sesuai dan Lengkap
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Sesuai dan Lengkap

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.640 Kontribusi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.641 Kendala dan Tantangan SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Angkinang melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI JULAKK SANI Kec. Angkinang disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Angkinang membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.642 ToC SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Angkinang; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI JULAKK SANI Kec. Angkinang beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Angkinang memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.643 Asumsi dan Risiko ToC SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.644 Rekomendasi Pengembangan SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Angkinang
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Angkinang bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.74 Ilustrasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

2.5.72 SIAP KADARAT

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.645 Identitas Inovasi SIAP KADARAT

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIAP KADARAT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Daha Barat)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Daha Barat
5	**PIC/Narahubung**	Jali - +62 852-4805-1010 (admin inovasi SKPD)
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIAP KADARAT dikembangkan oleh Kecamatan Daha Barat dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIAP KADARAT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Daha Barat) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dirancang untuk memodernisasi dan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan serta perizinan di tingkat kecamatan. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sebagian wilayahnya dikelilingi perairan/rawa dan pemukiman yang terpisah dari pusat pemerintahan. Sebelum adanya sistem ini, warga harus menempuh perjalanan cukup jauh dan memakan waktu hanya untuk mengurus surat keterangan, rekomendasi, maupun dokumen administrasi dasar.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIAP KADARAT membawa dampak yang sangat nyata terhadap peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Daha Barat. Dari sudut pandang masyarakat, inovasi ini secara signifikan menekan biaya transportasi dan menghemat waktu tempuh (cost & time saving). Warga yang tinggal di pelosok desa tidak lagi terbeban oleh kendala biaya dan jarak geografis untuk mendapatkan hak layanan administrasi yang cepat, tepat, dan transparan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur

kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIAP KADARAT secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.646 Rancang Bangun SIAP KADARAT

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Daha Barat; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIAP KADARAT diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Barat. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.647 Status Inovasi SIAP KADARAT pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1liZZAN8CsL0H_PPaV67w_dRMIcrVSgtfscdOSYQtXx0/edit?usp=sharing	Ket. Inovasi IGA 2025

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.648 Dasbor Indikator IID SIAP KADARAT

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	belum ada data
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.649 Kontribusi SIAP KADARAT terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SIAP KADARAT dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.650 Kendala dan Tantangan SIAP KADARAT

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIAP KADARAT: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Daha Barat melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIAP KADARAT disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai,

dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Daha Barat membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.651 ToC SIAP KADARAT

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Daha Barat; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIAP KADARAT beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Daha Barat memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.652 Asumsi dan Risiko ToC SIAP KADARAT

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.653 Rekomendasi Pengembangan SIAP KADARAT

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Daha Barat
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Daha Barat bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.75 Ilustrasi SIAP KADARAT

2.5.73 SEWARGA DASEL

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.654 Identitas Inovasi SEWARGA DASEL

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SEWARGA DASEL (SERAP ASPIRASI WARGA) KECAMATAN DAHA SELATAN
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Daha Selatan
5	**PIC/Narahubung**	Juhriah
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SEWARGA DASEL dikembangkan oleh Kecamatan Daha Selatan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SEWARGA DASEL (Serap Aspirasi Warga) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi publik yang digagas oleh Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir sebagai wadah komunikasi dua arah yang menjembatani penyampaian aspirasi, aduan, usulan pembangunan, hingga kritik dari masyarakat perdesaan secara cepat dan terarah. Melalui kanal aduan digital dan

penguatan forum tatap muka terintegrasi, SEWARGA DASEL memangkas sekat birokrasi yang selama ini membuat laporan warga lambat direspon atau terhenti di tingkat desa.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SEWARGA DASEL memberikan dampak positif terhadap responsivitas pemerintah kecamatan dalam menindaklanjuti isu-isu krusial di masyarakat, seperti infrastruktur perairan, pelayanan dasar, dan penanganan sosial. Inovasi ini mendorong terciptanya transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik, karena warga dapat memantau status tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan secara terbuka.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SEWARGA DASEL secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.655 Rancang Bangun SEWARGA DASEL

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Daha Selatan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SEWARGA DASEL diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025;

tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Selatan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.656 Status Inovasi SEWARGA DASEL pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.657 Dasbor Indikator IID SEWARGA DASEL

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Lengkap dan Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Lengkap dan Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Lengkap dan Sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Lengkap dan Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Lengkap dan Sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Lengkap dan Sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Lengkap dan Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Lengkap dan Sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Lengkap dan Sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Lengkap dan Sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Lengkap dan Sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.658 Kontribusi SEWARGA DASEL terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SEWARGA DASEL dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.659 Kendala dan Tantangan SEWARGA DASEL

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SEWARGA DASEL: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Daha Selatan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 -

Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SEWARGA DASEL disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Daha Selatan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.660 ToC SEWARGA DASEL

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Daha Selatan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SEWARGA DASEL beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Daha Selatan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.661 Asumsi dan Risiko ToC SEWARGA DASEL

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.662 Rekomendasi Pengembangan SEWARGA DASEL

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Daha Selatan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Daha Selatan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.76 Ilustrasi SEWARGA DASEL

2.5.74 OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.663 Identitas Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA (SISTEM PELAYANAN *ONLINE* LANGSUNG AMBIL)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Daha Selatan
5	**PIC/Narahubung**	Juhriah
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan

No	Atribut	Keterangan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA dikembangkan oleh Kecamatan Daha Selatan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIPOLA (Sistem Pelayanan *Online* Langsung Ambil) merupakan inovasi pelayanan publik digital yang dikembangkan untuk mengoptimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir untuk memutakhirkan proses pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan yang sebelumnya mewajibkan warga datang langsung dan mengantre. Melalui mekanisme permohonan dan verifikasi berkas secara *online*, warga cukup mengajukan berkas dari rumah dan hanya perlu datang ke kantor kecamatan saat dokumen fisik telah selesai diproses untuk langsung diambil.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIPOLA memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat Kecamatan Daha Selatan, karena mengeliminasi waktu tunggu dan proses antrean yang panjang di kantor pelayanan. Inovasi ini mewujudkan pelayanan publik yang kepastian prosesnya terjamin, transparan, serta dapat diakses dengan mudah tanpa mengganggu aktivitas harian warga.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.664 Rancang Bangun OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Daha Selatan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Selatan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.665 Status Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Daha Selatan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.666 Dasbor Indikator IID OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Lengkap dan Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sudah Lengkap dan Sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Lengkap dan Sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Lengkap dan Sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Sudah Lengkap dan Sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Lengkap dan Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Sudah Lengkap dan Sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	Sudah Lengkap dan Sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	Sudah Lengkap dan Sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sudah Lengkap dan Sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Sudah Lengkap dan Sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Sudah Lengkap dan Sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Sudah Lengkap dan Sesuai / data tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.667 Kontribusi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.668 Kendala dan Tantangan OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Daha Selatan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara

digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Daha Selatan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.669 ToC OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Daha Selatan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Daha Selatan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.670 Asumsi dan Risiko ToC OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.671 Rekomendasi Pengembangan OPTIMALISASI PELAYANAN

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Daha Selatan

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Daha Selatan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

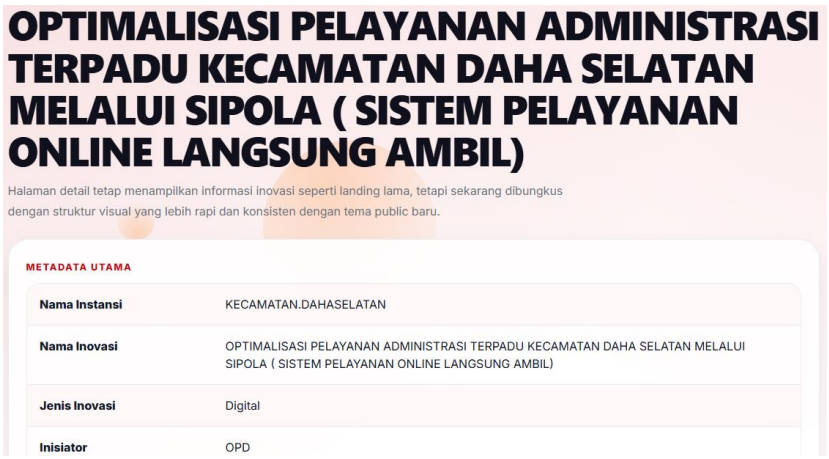

Gambar 2.77 Ilustrasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

2.5.75 SIPADI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.672 Identitas Inovasi SIPADI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIPADI (SISTEM ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Daha Utara
5	**PIC/Narahubung**	Muhammad Noval
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIPADI dikembangkan oleh Kecamatan Daha Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk

klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIPADI (Sistem Administrasi Perjalanan Dinas) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis aplikasi digital yang dirancang untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan seluruh alur pengelolaan perjalanan dinas ASN. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi proses administrasi perjalanan dinas yang sebelumnya bersifat manual, berbelit-belit, dan rentan terhadap ketidaksesuaian data. Melalui platform ini, mulai dari penerbitan Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perhitungan rincian biaya secara otomatis, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan secara elektronik dan terpusat.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIPADI memberikan dampak langsung terhadap efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Inovasi ini secara signifikan memangkas waktu proses verifikasi serta pencairan dana perjalanan dinas, sekaligus mengeliminasi penggunaan kertas (paperless) dan risiko kesalahan perhitungan biaya harian maupun transportasi. Dari sisi akuntabilitas dan pengawasan, SIPADI mencegah terjadinya tumpang tindih (overlap) jadwal dinas pegawai maupun duplikasi anggaran.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIPADI secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.673 Rancang Bangun SIPADI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Daha Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIPADI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.674 Status Inovasi SIPADI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SIPADI tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Daha Utara.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.675 Dasbor Indikator IID SIPADI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.676 Kontribusi SIPADI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SIPADI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.677 Kendala dan Tantangan SIPADI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIPADI: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Daha Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIPADI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Daha Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.678 ToC SIPADI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Daha Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIPADI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Daha Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.679 Asumsi dan Risiko ToC SIPADI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.680 Rekomendasi Pengembangan SIPADI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Daha Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Daha Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.78 Ilustrasi SIPADI

2.5.76 SI UTARA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.681 Identitas Inovasi SI UTARA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI UTARA (SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN DAHA UTARA)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Daha Utara
5	**PIC/Narahubung**	Muhammad Noval
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI UTARA dikembangkan oleh Kecamatan Daha Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI UTARA (Sistem Informasi dan Pelayanan Terpadu Kecamatan Daha Utara) merupakan inovasi pelayanan publik digital berbasis web yang dikembangkan oleh Pemerintah Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir untuk memutakhirkan pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan umum masyarakat kawasan rawa/perairan. Melalui SI UTARA, alur pengajuan permohonan, unggah berkas persyaratan, verifikasi administrasi, hingga informasi progres dokumen dapat diakses secara mandiri oleh warga atau petugas desa tanpa harus berulang kali datang langsung ke kantor kecamatan.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SI UTARA memberikan dampak berupa penghematan waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat Kecamatan Daha Utara yang sebagian wilayahnya terkendala akses geografis sungai dan rawa. Kehadiran sistem ini memberikan kepastian standar pelayanan yang transparan, cepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat perdesaan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI UTARA secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.682 Rancang Bangun SI UTARA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Daha Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI UTARA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Daha Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.683 Status Inovasi SI UTARA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.684 Dasbor Indikator IID SI UTARA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.685 Kontribusi SI UTARA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SI UTARA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.686 Kendala dan Tantangan SI UTARA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI UTARA: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Daha Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI UTARA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Daha Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.687 ToC SI UTARA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Daha Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI UTARA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Daha Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.688 Asumsi dan Risiko ToC SI UTARA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.689 Rekomendasi Pengembangan SI UTARA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Daha Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Daha Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.79 Ilustrasi SI UTARA

2.5.77 Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.690 Identitas Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang (SIPATIN KECAPANG)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Kalumpang
5	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang dikembangkan oleh Kecamatan Kalumpang dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIPATIN KECAPANG (Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang) merupakan inovasi tata kelola kelembagaan berbasis digital yang dikembangkan untuk memutakhirkan pengelolaan data administrasi dan kegiatan Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi pencatatan Dasawisma dan pelaporan 10 Program

Pokok PKK yang sebelumnya dilakukan secara manual berbasis kertas. Melalui platform terpadu ini, seluruh rantai pendataan—mulai dari data keluarga, rekapitulasi kegiatan pokja, hingga dokumentasi inovasi kader di tingkat desa—dapat diinput, diverifikasi, dan dikelola secara elektronik.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIPATIN KECAPANG memberikan dampak signifikan berupa peningkatan akurasi dan validitas data keluarga maupun kegiatan PKK di Kecamatan Kalumpang. Inovasi ini memangkas beban kerja administratif para kader, menghemat waktu pelaporan berkala, serta mengeliminasi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik Dasawisma.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.691 Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Kalumpang; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah

kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalumpang. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.692 Status Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Kalumpang.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.693 Dasbor Indikator IID Sistem Informasi Pengelolaan

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.694 Kontribusi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.695 Kendala dan Tantangan Sistem Informasi Pengelolaan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan

kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Kalumpang melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Kalumpang membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.696 ToC Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Kalumpang; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Kalumpang memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.697 Asumsi dan Risiko ToC Sistem Informasi Pengelolaan

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.698 Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Kalumpang
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Kalumpang bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.80 Ilustrasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan

2.5.78 SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.699 Identitas Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 (SI GADIS 2026)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]

No	Atribut	Keterangan
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2026
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Kalumpang
5	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 dikembangkan oleh Kecamatan Kalumpang dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI GADIS 2026 (Sistem Unggah Administrasi Desa Tahun 2026) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis platform digital yang dikembangkan untuk memutakhirkan proses pembinaan, pengawasan, dan verifikasi dokumen administrasi desa di tingkat kecamatan. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas lambatnya alur pemeriksaan fisik berkas administrasi pemerintahan desa—seperti dokumen perencanaan (APBDes/RPJMDes), laporan pertanggungjawaban, hingga administrasi kewilayahan—yang selama ini menumpuk dalam bentuk kertas (hardcopy).

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SI GADIS 2026 memberikan dampak signifikan terhadap percepatan alur verifikasi berkas dan efisiensi operasional. Pemerintah desa tidak lagi harus berulang kali melakukan perjalanan ke kantor kecamatan hanya untuk menyerahkan atau mervisi berkas fisik, sehingga menghemat biaya pencetakan kertas (paperless) serta waktu pengurusan secara drastis.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di

tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.700 Rancang Bangun SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Kalumpang; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalumpang. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.701 Status Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2026	Tercantum pada nomenklatur inovasi
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Kalumpang.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.702 Dasbor Indikator IID SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.703 Kontribusi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan

baseline. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.704 Kendala dan Tantangan SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Kalumpang melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup

untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Kalumpang membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.705 ToC SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Kalumpang; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Kalumpang memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.706 Asumsi dan Risiko ToC SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.707 Rekomendasi Pengembangan SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Kalumpang
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Kalumpang bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.81 Ilustrasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

2.5.79 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.708 Identitas Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital (PADUMASAL)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Kalumpang
5	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital dikembangkan oleh Kecamatan Kalumpang dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital (PADUMASAL) adalah sebuah layanan pengaduan berbasis digital yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan di Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk dapat secara langsung memberikan penilaian, kritik dan saran terhadap pelayanan yang diterima . Penyelesaian pengaduan tersebut di tindaklajuti oleh tim Pengelola PADUMASAL selambat-lambatnya 3x24 jam dari laporan diterima dan tindak lanjut laporan tersebut segera di sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Manfaat yang diharapkan: Tercapainya respon positif dari masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan yang di proses dengan cepat dan jelas sehingga meningkatkan nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan kalumpang kabupaten hulu sungai selatan

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.709 Rancang Bangun Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Kalumpang; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalumpang. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif,

meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.710 Status Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.711 Dasbor Indikator IID Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.712 Kontribusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.713 Kendala dan Tantangan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Kalumpang melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Kalumpang membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.714 ToC Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Kalumpang; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Kalumpang memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.715 Asumsi dan Risiko ToC Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.716 Rekomendasi Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Kalumpang

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Kalumpang bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.82 Ilustrasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital

2.5.80 SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.717 Identitas Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL (SUSAN LAINTEN)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Kalumpang
5	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL dikembangkan oleh Kecamatan Kalumpang dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Semua Pegawai dapat menilai Layanan Internal Pegawai secara *online* melalui Link yang disediakan, maka unit kerja dalam hal ini Sekretariat baik Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan maupun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sehingga Unit Kerja yang melaksanakan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahannya dan dapat memeprbaiki nya. Pada akhirnya pelayanan dapat ditingkatkan dan target kinerja yang telah diteapkan dapat tercapai.

Manfaat yang diharapkan: Inovasi ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan pegawai dan target kepuasan layanan internal dapat tercapai kemudian dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.718 Rancang Bangun SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Kalumpang; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalumpang. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.719 Status Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL pada IGA

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.720 Dasbor Indikator IID SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	belum ada data perbaiki sesuai contoh disamping

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.721 Kontribusi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.722 Kendala dan Tantangan SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Kalumpang melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Kalumpang membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.723 ToC SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Kalumpang; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Kalumpang memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.724 Asumsi dan Risiko ToC SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.725 Rekomendasi Pengembangan SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Kalumpang
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Kalumpang bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

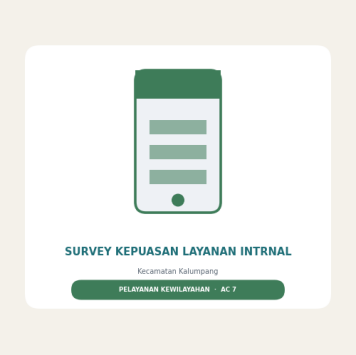

Gambar 2.83 Ilustrasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

2.5.81 REKAN SI MAMET

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.726 Identitas Inovasi REKAN SI MAMET

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	REKAN SI MAMET (REKomendasi PencairAN SelesaI liMA MeniT)

No	Atribut	Keterangan
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Kandangan
5	**PIC/Narahubung**	Deasy +62 812-5050-647
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi REKAN SI MAMET dikembangkan oleh Kecamatan Kandangan dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. REKAN SI MAMET (REKomendasi Pencair AN Selesa I li MA Meni T) merupakan salah satu program inovasi layanan publik berbasis digital/efisiensi birokrasi, khususnya dalam mempercepat proses penerbitan surat rekomendasi pencairan dana anggaran atau bantuan keuangan. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Sebelum adanya inovasi ini, proses verifikasi berkas hingga pengerjaan surat rekomendasi pencairan kerap membutuhkan waktu jam hingga berhari-hari akibat alur birokrasi manual, pemeriksaan kelengkapan berkas yang rumit, atau antrean berkas fisik.

Manfaat yang diharapkan: Manfaat & Dampak Inovasi Transparansi & Kepastian: Memberikan kejelasan waktu pelayanan bagi unit/pihak yang mengajukan rekomendasi. Akuntabilitas: Meminimalisasi potensi praktik pungli, perantara (calo), maupun keterlambatan birokrasi. Efisiensi Kinerja: Meningkatkan realisasi anggaran dan efektivitas kerja pegawai/dinas dalam merespons kebutuhan masyarakat/instansi terkait.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun REKAN SI MAMET secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang

menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.727 Rancang Bangun REKAN SI MAMET

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Kandangan; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian REKAN SI MAMET diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kandangan. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.728 Status Inovasi REKAN SI MAMET pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung REKAN SI MAMET tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Kandangan.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.729 Dasbor Indikator IID REKAN SI MAMET

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	masukan sk tim bupati
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2024
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	buat menjadi 3 kali bimtek setiap data bimtek tambahkan file sertifikat peserta cukup salah satu peserta
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	masukan sk tim bupati
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	masukan sk tim bupati
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	masukan sk tim bupati
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	belum ada data kemanfaatan inovasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.730 Kontribusi REKAN SI MAMET terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi REKAN SI MAMET dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.731 Kendala dan Tantangan REKAN SI MAMET

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi REKAN SI MAMET: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Kandangan melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change REKAN SI MAMET disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Kandangan membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.732 ToC REKAN SI MAMET

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Kandangan; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem REKAN SI MAMET beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Kandangan memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.733 Asumsi dan Risiko ToC REKAN SI MAMET

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.734 Rekomendasi Pengembangan REKAN SI MAMET

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Kandangan
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Kandangan bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.84 Ilustrasi REKAN SI MAMET

2.5.82 SISTER

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.735 Identitas Inovasi SISTER

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SISTER (Sistem Input Surat Tugas Terpadu)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Loksado
5	**PIC/Narahubung**	Karmila +62 853-4898-2769
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SISTER dikembangkan oleh Kecamatan Loksado dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SISTER (Sistem Input Surat Tugas Terpadu) merupakan inovasi berbasis aplikasi digital yang dirancang untuk mengelola, memproses, dan menerbitkan Surat Tugas secara elektronik (e-surat/e-office), cepat, serta terintegrasi dalam lingkungan instansi atau pemerintah daerah. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pembuatan Surat Tugas secara konvensional sering menghadapi kendala seperti alur verifikasi berjenjang yang lambat, risiko penomoran surat ganda (overlapping), penumpukan berkas fisik,

serta penandatanganan manual yang tertunda saat pejabat penandatangan berada di luar kantor.

Manfaat yang diharapkan: Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu & Biaya: Memangkas waktu penerbitan surat dari hitungan hari menjadi hitungan menit (paperless dan menghemat biaya cetak). Akuntabilitas & Validitas: Meminimalisasi risiko surat palsu atau nomor ganda karena terverifikasi oleh sistem digital secara terpusat. Kemudahan Pemantauan: Memudahkan pimpinan untuk memantau rekapitulasi distribusi penugasan pegawai secara *real-time*.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SISTER secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.736 Rancang Bangun SISTER

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Loksado; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SISTER diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Loksado. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.737 Status Inovasi SISTER pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SISTER tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Loksado.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.738 Dasbor Indikator IID SISTER

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Buatkan Bimtek sebanyak 3 Kali, 1 file bimtek berisi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.739 Kontribusi SISTER terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SISTER dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.740 Kendala dan Tantangan SISTER

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SISTER: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Loksado melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi,

dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SISTER disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Loksado membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.741 ToC SISTER

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Loksado; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SISTER beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Loksado memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.742 Asumsi dan Risiko ToC SISTER

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.743 Rekomendasi Pengembangan SISTER

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Loksado
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Loksado bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.85 Ilustrasi SISTER

2.5.83 KASI AMBIL

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.744 Identitas Inovasi KASI AMBIL

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	KASI AMBIL (BERKAS SELESAI, BARU DIAMBIL)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	KECAMATAN.PADANGBATUNG
5	**PIC/Narahubung**	-
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi KASI AMBIL dikembangkan oleh KECAMATAN.PADANGBATUNG dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 -

Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Ringkasan Inovasi: Kasi Ambil Gagasan Utama: Memanfaatkan media Whats App sebagai saluran komunikasi utama antara masyarakat dan pihak Kecamatan Padang Batung. Sistem ini mengubah pola pelayanan dari yang semula "datang untuk mengajukan" menjadi "datang hanya untuk mengambil hasil". Alur Pelayanan (Konsep WFH/Layanan Jarak Jauh): Konsultasi & Informasi: Masyarakat menghubungi Whats App resmi Kecamatan Padang Batung untuk menyampaikan jenis layanan administrasi yang dibutuhkan. Pengiriman Syarat & Formulir: Petugas mengirimkan daftar persyaratan dan blangko/formulir digital yang perlu diisi oleh pemohon.

Manfaat yang diharapkan: Manfaat & Dampak Bagi Masyarakat Padang Batung Efisiensi Waktu & Biaya Transportasi: Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor kecamatan hanya untuk bertanya syarat, mengambil formulir, atau mengantre verifikasi. Mencegah Berkas Ditolak di Tempat: Kepastian kelengkapan berkas sudah dipastikan via Whats App sebelum masyarakat datang ke kantor. Mengurangi Antrean: Memutus penumpukan warga di ruang tunggu pelayanan umum kecamatan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun KASI AMBIL secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.745 Rancang Bangun KASI AMBIL

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik, formulir daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada KECAMATAN.PADANGBATUNG; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian KASI AMBIL diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KECAMATAN.PADANGBATUNG. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.746 Status Inovasi KASI AMBIL pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Non Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, kanal pesan elektronik, formulir daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung KASI AMBIL tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung

menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi KECAMATAN.PADANGBATUNG.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.747 Dasbor Indikator IID KASI AMBIL

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tidak ada pedoman teknis .buat pedoman teknis
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	bukan sk tim pelaksana
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	bisa disebutkan penerima manfaat berapa jumlah orang nya kalau bisa melebihi 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.748 Kontribusi KASI AMBIL terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi KASI AMBIL dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.749 Kendala dan Tantangan KASI AMBIL

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi KASI AMBIL: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja KECAMATAN.PADANGBATUNG melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change KASI AMBIL disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan KECAMATAN.PADANGBATUNG membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome*

akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.750 ToC KASI AMBIL

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA KECAMATAN.PADANGBATUNG; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem KASI AMBIL beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	KECAMATAN.PADANGBATUNG memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.751 Asumsi dan Risiko ToC KASI AMBIL

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.752 Rekomendasi Pengembangan KASI AMBIL

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	KECAMATAN .PADANGBATUNG
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	KECAMATAN .PADANGBATUNG bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.86 Ilustrasi KASI AMBIL

2.5.84 AKSI MONALISA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.753 Identitas Inovasi AKSI MONALISA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	AKSI MONALISA (APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI DESA)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Simpur
5	**PIC/Narahubung**	Hj.ipah +62 821-5561-8984
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi AKSI MONALISA dikembangkan oleh Kecamatan Simpur dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Proses pemantauan dan evaluasi administrasi serta realisasi keuangan/pembangunan desa secara konvensional seringkali memakan waktu lama, membutuhkan banyak tumpukan dokumen fisik, dan lambat dalam pelaporan perkembangan program di tingkat desa.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Meningkatkan Akuntabilitas APBDes: Meminimalisasi risiko penyimpangan pengelolaan keuangan dan ketidaksesuaian administrasi desa. Efisiensi Pembinaan: Tim kecamatan tidak perlu selalu turun ke lapangan hanya untuk verifikasi berkas awal, melainkan fokus pada pendampingan bagi desa yang membutuhkan. Percepatan Realisasi Anggaran: Proses evaluasi rekomendasi pencairan atau persetujuan laporan desa menjadi jauh lebih ringkas.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun AKSI MONALISA secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.754 Rancang Bangun AKSI MONALISA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Simpur; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian AKSI MONALISA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpur. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan

bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.755 Status Inovasi AKSI MONALISA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung AKSI MONALISA tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Simpur.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.756 Dasbor Indikator IID AKSI MONALISA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.757 Kontribusi AKSI MONALISA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi AKSI MONALISA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.758 Kendala dan Tantangan AKSI MONALISA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi AKSI MONALISA: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Simpur melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal,

terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change AKSI MONALISA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Simpur membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.759 ToC AKSI MONALISA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Simpur; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Output	Sistem AKSI MONALISA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Simpur memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.760 Asumsi dan Risiko ToC AKSI MONALISA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.761 Rekomendasi Pengembangan AKSI MONALISA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Simpur
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Simpur bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.87 Ilustrasi AKSI MONALISA

2.5.85 SI TAMU SIMPUR

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.762 Identitas Inovasi SI TAMU SIMPUR

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI TAMU SIMPUR (SISTEM INFORMASI TAMU *ONLINE* KECAMATAN SIMPUR)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Simpur
5	**PIC/Narahubung**	Hj.ipah +62 821-5561-8984

No	Atribut	Keterangan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SI TAMU SIMPUR dikembangkan oleh Kecamatan Simpur dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. I TAMU SIMPUR (Sistem Informasi Tamu *Online* Kecamatan Simpur) merupakan inovasi tata kelola administrasi dan pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Inovasi ini mengubah sistem pencatatan buku tamu konvensional (kertas) menjadi sistem registrasi dan manajemen tamu secara digital/elektronik. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pencatatan tamu secara manual menggunakan buku fisik sering mengalami kendala seperti risiko data terselip/rusak, tulisan tidak terbaca, sulitnya rekapitulasi data kunjungan bulanan/tahunan, serta kurang efisiennya sistem antrean dan pelaporan maksud kedatangan warga atau instansi luar.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Arsip Data Rapi & Aman: Menghilangkan tumpukan buku tamu fisik dan memudahkan pencarian riwayat kunjungan kapan saja. Dasar Pengambilan Keputusan: Data statistik tamu membantu Camat dan jajaran dalam mengevaluasi jenis pelayanan publik apa yang paling tinggi permintaannya di Kecamatan Simpur. Kesan Profesional & Modern: Menampilkan citra kantor pelayanan publik yang responsif, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI TAMU SIMPUR secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.763 Rancang Bangun SI TAMU SIMPUR

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, kode qr
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Simpur; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI TAMU SIMPUR diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpur. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.764 Status Inovasi SI TAMU SIMPUR pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring, kode qr	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.765 Dasbor Indikator IID SI TAMU SIMPUR

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.766 Kontribusi SI TAMU SIMPUR terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SI TAMU SIMPUR dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.767 Kendala dan Tantangan SI TAMU SIMPUR

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI TAMU SIMPUR: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Simpur melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI TAMU SIMPUR disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Simpur membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu

meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.768 ToC SI TAMU SIMPUR

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Simpur; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI TAMU SIMPUR beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Simpur memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.769 Asumsi dan Risiko ToC SI TAMU SIMPUR

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.770 Rekomendasi Pengembangan SI TAMU SIMPUR

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Simpur
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Simpur bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SI TAMU SIMPUR - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.88 Ilustrasi SI TAMU SIMPUR

2.5.86 SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.771 Identitas Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA (SELARAS)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Sungai Raya
5	**PIC/Narahubung**	Abdur Rahman 085822342045
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA dikembangkan oleh Kecamatan Sungai Raya dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SELARAS (Sistem Verifikasi Elektronik Layanan Administrasi Masyarakat Sungai Raya) merupakan inovasi digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola administrasi yang dikembangkan oleh Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Inovasi ini berfokus pada efisiensi dan transparansi alur verifikasi berkas permohonan administrasi masyarakat agar proses penerbitan dokumen pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Kepastian Layanan: Warga mendapatkan kepastian status berkas dengan cepat tanpa perlu bolak-balik hanya untuk mengecek alur verifikasi. Transparansi & Akuntabilitas: Seluruh histori verifikasi tercatat dalam sistem, meminimalisasi risiko manipulasi atau kelalaian pemeriksaan dokumen. Efisiensi Kerja ASN: Membantu petugas kecataman mengelola dan mengarsipkan dokumen pelayanan masyarakat secara rapi, hemat kertas (go green), dan terstruktur.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.772 Rancang Bangun SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Sungai Raya; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks

Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Raya. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.773 Status Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.774 Dasbor Indikator IID SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	sudah sesuai
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	sudah sesuai
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.775 Kontribusi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.776 Kendala dan Tantangan SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA: terwujudnya meningkatnya

kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Sungai Raya melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Sungai Raya membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.777 ToC SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Sungai Raya; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Sungai Raya memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.778 Asumsi dan Risiko ToC SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.779 Rekomendasi Pengembangan SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Sungai Raya
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Sungai Raya bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.89 Ilustrasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI

2.5.87 Sistem Informasi Data Kecamatan

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.780 Identitas Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Sistem Informasi Data Kecamatan (SiDaTan)

No	Atribut	Keterangan
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan padang batung
5	**PIC/Narahubung**	Elly 082154017272
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan dikembangkan oleh Kecamatan padang batung dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Si Da Tan (Sistem Informasi Data Kecamatan) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang berfokus pada pengelolaan, integrasi, dan penyajian data statistik sektoral serta basis data wilayah di tingkat kecamatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) maupun beberapa daerah di Indonesia, inovasi Si Da Tan umumnya dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan klasik birokrasi, yaitu tersebarnya data pembangunan dan kependudukan di berbagai seksi/desa tanpa adanya pusat data terpadu (single source of truth).

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Data (Data-Driven Policy): Membantu Camat dan Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan rill di lapangan. Transparansi & Kemudahan Akses: Memudahkan masyarakat, peneliti, maupun investor yang membutuhkan informasi/data profil statistik kecamatan. Efisiensi Kinerja: Memangkas waktu pengumpulan data manual saat dibutuhkan laporan berkas atau verifikasi program secara mendadak.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Sistem Informasi Data Kecamatan secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat

kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.781 Rancang Bangun Sistem Informasi Data Kecamatan

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan padang batung; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Sistem Informasi Data Kecamatan diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan padang batung. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.782 Status Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan pada IGA

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.783 Dasbor Indikator IID Sistem Informasi Data Kecamatan

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tidak ada pedoman teknis .buat pedoman teknis
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	bukan sk tim pelaksana

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	bisa disebutkan penerima manfaat berapa jumlah orang nya kalau bisa melebihi 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.784 Kontribusi Sistem Informasi Data Kecamatan terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi Sistem Informasi Data Kecamatan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.785 Kendala dan Tantangan Sistem Informasi Data Kecamatan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Sistem Informasi Data Kecamatan: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan padang batung melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Sistem Informasi Data Kecamatan disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan padang batung membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan

menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.786 ToC Sistem Informasi Data Kecamatan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan padang batung; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Sistem Informasi Data Kecamatan beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan padang batung memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.787 Asumsi dan Risiko ToC Sistem Informasi Data Kecamatan

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.788 Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Data Kecamatan

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan padang batung
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan padang batung bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.90 Ilustrasi Sistem Informasi Data Kecamatan

2.5.88 SIMKuDa

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.789 Identitas Inovasi SIMKuDa

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan padang batung
5	**PIC/Narahubung**	Elly 082154017272
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIMKuDa dikembangkan oleh Kecamatan padang batung dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIMKu Da (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tingkat kecamatan dan kabupaten. Inovasi ini memosisikan pihak kecamatan sebagai pembina dan pengawas (supervisor) langsung terhadap siklus keuangan seluruh desa di wilayahnya.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Akuntabilitas Keuangan Desa: Meminimalisasi risiko temuan administrasi dan potensi ketidaksesuaian penggunaan dana desa. Percepatan Penyerapan Anggaran: Memangkas birokrasi verifikasi berkas manual sehingga proses penerbitan rekomendasi pencairan menjadi jauh lebih cepat. Efisiensi Pembinaan Kecamatan: Pihak kecamatan dapat langsung memfokuskan pembinaan dan pendampingan khusus kepada desa-desa yang terdeteksi mengalami kendala pada *dashboard* monitoring.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIMKuDa secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.790 Rancang Bangun SIMKuDa

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan padang batung; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIMKuDa diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan padang batung. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.791 Status Inovasi SIMKuDa pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.792 Dasbor Indikator IID SIMKuDa

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tidak ada pedoman teknis .buat pedoman teknis
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	bukan sk tim pelaksana
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	bisa disebutkan penerima manfaat berapa jumlah orang nya kalau bisa melebihi 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.793 Kontribusi SIMKuDa terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SIMKuDa dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.794 Kendala dan Tantangan SIMKuDa

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIMKuDa: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan padang batung melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk

kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIMKuDa disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan padang batung membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.795 ToC SIMKuDa

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan padang batung; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIMKuDa beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan padang batung memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.796 Asumsi dan Risiko ToC SIMKuDa

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.797 Rekomendasi Pengembangan SIMKuDa

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan padang batung
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan padang batung bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.91 Ilustrasi SIMKuDa

2.5.89 SiSuKa PD

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.798 Identitas Inovasi SiSuKa PD

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SiSuKa PD (Administrasi Surat Keluar, SK dan Perjalanan Dinas)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan padang batung
5	**PIC/Narahubung**	Elly 082154017272
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SiSuKa PD dikembangkan oleh Kecamatan padang batung dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Si Su Ka PD (Administrasi Surat Keluar, SK, dan Perjalanan Dinas) merupakan inovasi berbasis aplikasi/sistem informasi digital yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mempermudah tata kelola administrasi perkantoran, khususnya dalam pengelolaan surat keluar, Surat Keputusan (SK), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Inovasi ini berfokus pada modernisasi kearsipan dan efisiensi alur birokrasi di internal instansi atau kecamatan/dinas pemerintah daerah.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu & Biaya: Memangkas durasi pembuatan berkas SPPD dan pengurusan surat keluar dari hitungan jam/hari menjadi hitungan menit, serta menghemat penggunaan kertas (go green). Tertib Arsip & Akuntabilitas: Seluruh histori pembuatan surat keluar, SK, dan SPPD tersimpan rapi dalam basis data terpusat, memudahkan proses audit atau pemeriksaan internal.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SiSuKa PD secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.799 Rancang Bangun SiSuKa PD

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan padang batung; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SiSuKa PD diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan padang batung. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.800 Status Inovasi SiSuKa PD pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.801 Dasbor Indikator IID SiSuKa PD

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	sudah sesuai
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	sudah sesuai
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	sudah sesuai
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	data dari bapperida
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	tidak ada pedoman teknis .buat pedoman teknis
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	bukan sk tim pelaksana
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	sudah sesuai
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	sudah sesuai
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	sudah sesuai
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	data dari bapperida
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	bisa disebutkan penerima manfaat berapa jumlah orang nya kalau bisa melebihi 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.802 Kontribusi SiSuKa PD terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SiSuKa PD dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.803 Kendala dan Tantangan SiSuKa PD

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SiSuKa PD: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan padang batung melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SiSuKa PD disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan padang batung membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.804 ToC SiSuKa PD

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan padang batung; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SiSuKa PD beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan padang batung memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.805 Asumsi dan Risiko ToC SiSuKa PD

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.806 Rekomendasi Pengembangan SiSuKa PD

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan padang batung
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan padang batung bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.92 Ilustrasi SiSuKa PD

2.5.90 ADEK PUAS MAS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.807 Identitas Inovasi ADEK PUAS MAS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ADEK PUAS MAS
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kelurahan Kandangan Utara
5	**PIC/Narahubung**	Oma Era
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi ADEK PUAS MAS dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin kualitas tersebut, diperlukan sistem evaluasi yang mampu menggambarkan sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun, praktik pengukuran IKM di Kelurahan Kandangan Utara selama ini masih menghadapi berbagai kendala.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan ADEK PUAS MAS memberikan berbagai manfaat nyata dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik. Inovasi ini memungkinkan pengumpulan data kepuasan masyarakat secara *real-time* dengan cara yang mudah dan tidak membebani masyarakat maupun petugas. Aplikasi ini mempermudah identifikasi area layanan yang membutuhkan perbaikan, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja petugas secara objektif.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ADEK PUAS MAS secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.808 Rancang Bangun ADEK PUAS MAS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kelurahan Kandangan Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ADEK PUAS MAS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Kandangan Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.809 Status Inovasi ADEK PUAS MAS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.810 Dasbor Indikator IID ADEK PUAS MAS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2026
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	buatkan seperti contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase aduan yang di tindak lanjuti sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan keterangan waktu (tanggal)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat sebanyak 501/lebih dari 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.811 Kontribusi ADEK PUAS MAS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi ADEK PUAS MAS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.812 Kendala dan Tantangan ADEK PUAS MAS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ADEK PUAS MAS: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kelurahan Kandangan Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ADEK PUAS MAS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kelurahan Kandangan Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.813 ToC ADEK PUAS MAS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kelurahan Kandangan Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ADEK PUAS MAS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kelurahan Kandangan Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap

dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.814 Asumsi dan Risiko ToC ADEK PUAS MAS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.815 Rekomendasi Pengembangan ADEK PUAS MAS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kelurahan Kandangan Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kelurahan Kandangan Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.93 Ilustrasi ADEK PUAS MAS

2.5.91 SI PETENISKU

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.816 Identitas Inovasi SI PETENISKU

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI PETENISKU
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kelurahan Kandangan Utara
5	**PIC/Narahubung**	Oma Era
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI PETENISKU dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. E-goverment merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. program ini bertujuan untuk setiap layanan pemerintah berbasis *online*. Untuk pemanfaatan teknologi informasi, kelurahan kandangan utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. salah satu langkah yang dibuat oleh kelurahan kandangan utara adalah membuat sistem layanan berupa *website* informasi pelayan yang ada di kelurahan kandangan utara.

Manfaat yang diharapkan: MANFAAT INOVASI: Manfaat adanya SI PETENIS KU adalah: 1. pelayanan bebasis teknologi informasi 2. kemudahan pelayanan bagi warga di kelurahan kandangan utara 3. adanya transparansi pelayanan kelurahan

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI PETENISKU secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.817 Rancang Bangun SI PETENISKU

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kelurahan Kandangan Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI PETENISKU diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Kandangan Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa

kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.818 Status Inovasi SI PETENISKU pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Tidak Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Perlu dicatat bahwa SI PETENISKU berstatus tidak aktif pada rekapitulasi inovasi daerah terkini. Profil ini tetap disajikan sebagai basis data audit, namun rekomendasi pengembangan lanjutan hanya relevan apabila Kelurahan Kandangan Utara memutuskan mengaktifkan kembali inovasi tersebut.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.819 Dasbor Indikator IID SI PETENISKU

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2026
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	buatkan seperti contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase aduan yang di tindak lanjuti sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan keterangan waktu (tanggal)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat sebanyak 501/lebih dari 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.820 Kontribusi SI PETENISKU terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SI PETENISKU dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.821 Kendala dan Tantangan SI PETENISKU

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI PETENISKU: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kelurahan Kandangan Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk

kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI PETENISKU disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kelurahan Kandangan Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.822 ToC SI PETENISKU

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kelurahan Kandangan Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI PETENISKU beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kelurahan Kandangan Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.823 Asumsi dan Risiko ToC SI PETENISKU

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.824 Rekomendasi Pengembangan SI PETENISKU

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kelurahan Kandangan Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kelurahan Kandangan Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.94 Ilustrasi SI PETENISKU

2.5.92 ISMA BADASTARKU

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.825 Identitas Inovasi ISMA BADASTARKU

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ISMA BADASTARKU
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Kelurahan Kandangan Utara
5	**PIC/Narahubung**	Oma Era
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi ISMA BADASTARKU dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Isma Badastar adalah sistem informasi manajemen aset berbasis barcode matriks data dan instagram yang mampu memproses data yang masuk melalui scan barcode matriks data kemudian hyperlink ke Instagram menjadi suatu bentuk informasi penatausahaan aset yang baik, cepat, lengkap, tepat dan sesuai peraturan dan landasan hukum yang berlaku. Salah satu upaya dilaksanakannya sosialisasi ini adalah kita berharap agar sumber daya aparatur kita dapat semakin profesional dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, yang akan menambah potensi meningkatkan PAD

Manfaat yang diharapkan: Manfaat dan Hasil yang diperoleh Dapat memastikan mutasi aset pada Simda BMD baik total maupun itemnya sesuai dengan data di bagian keuangan Memudahkan penatausahaan aset pada Kelurahan Kandangan Utara

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ISMA BADASTARKU secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.826 Rancang Bangun ISMA BADASTARKU

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kode qr
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kelurahan Kandangan Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ISMA BADASTARKU diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Kandangan Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.827 Status Inovasi ISMA BADASTARKU pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Tidak Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, kode qr	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung		-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Perlu dicatat bahwa ISMA BADASTARKU berstatus tidak aktif pada rekapitulasi inovasi daerah terkini. Profil ini tetap disajikan sebagai basis data audit, namun rekomendasi pengembangan lanjutan hanya relevan apabila Kelurahan Kandangan Utara memutuskan mengaktifkan kembali inovasi tersebut.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.828 Dasbor Indikator IID ISMA BADASTARKU

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2026
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	buatkan seperti contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase aduan yang di tindak lanjuti sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan keterangan waktu (tanggal)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat sebanyak 501/lebih dari 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.829 Kontribusi ISMA BADASTARKU terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi ISMA BADASTARKU dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.830 Kendala dan Tantangan ISMA BADASTARKU

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ISMA BADASTARKU: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kelurahan Kandangan Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ISMA BADASTARKU disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kelurahan Kandangan Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun

anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.831 ToC ISMA BADASTARKU

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kelurahan Kandangan Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ISMA BADASTARKU beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kelurahan Kandangan Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.832 Asumsi dan Risiko ToC ISMA BADASTARKU

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.833 Rekomendasi Pengembangan ISMA BADASTARKU

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kelurahan Kandangan Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kelurahan Kandangan Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.95 Ilustrasi ISMA BADASTARKU

2.5.93 SI-PIKAT

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.834 Identitas Inovasi SI-PIKAT

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI-PIKAT
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kelurahan Kandangan Barat
5	**PIC/Narahubung**	Fatma
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI-PIKAT dikembangkan oleh Kelurahan Kandangan Barat dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SI-PIKAT (Sistem Pelayanan tanpa Sekat) merupakan inovasi pelayanan publik terpadu yang dirancang untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi, jarak geografis, dan kerumitan administrasi dalam mengakses layanan pemerintah. Inovasi ini memadukan kemudahan akses digital dengan simplifikasi prosedur, sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan pada proses yang berbelit-belit atau persyaratan yang tumpang tindih antar-unit kerja. Melalui SI-PIKAT, seluruh alur pengusulan, pemrosesan, hingga penerbitan

dokumen pelayanan publik dipusatkan dalam satu pintu yang ramah pengguna, transparan, dan dapat diakses kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SI-PIKAT memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesetaraan akses pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di kawasan terpencil maupun kelompok rentan. Inovasi ini secara signifikan memangkas waktu tunggu, jalur birokrasi, dan biaya operasional yang sebelumnya harus dikeluarkan warga saat mengurus administrasi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI-PIKAT secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.835 Rancang Bangun SI-PIKAT

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kelurahan Kandangan Barat; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI-PIKAT diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Kandangan Barat. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai

Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.836 Status Inovasi SI-PIKAT pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Catatan Perbaikan Inovasi	Ket. Inovasi IGA 2025

Status kelengkapan data dukung SI-PIKAT tercatat sebagai "Data Dukung Belum Lengkap". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kelurahan Kandangan Barat.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.837 Dasbor Indikator IID SI-PIKAT

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Sudah Sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tambahkan Narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Sudah Sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	Sudah Sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	tambahkan 1 kali bimtek lagi dan sertifikat di masing-masing bimtek
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	Sudah Sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tambahkan Narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Sudah Sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	Sudah Sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Tambahkan Narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	tambahkan Hotline
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase pengaduan yang ditangani sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Tambahkan Narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	tambahkan keterangan waktu per aktivitas
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	Sudah Sesuai
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	buat menjdi proposal
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat minimal 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	tambahkan SKM tahun 2025

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.838 Kontribusi SI-PIKAT terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi SI-PIKAT dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.839 Kendala dan Tantangan SI-PIKAT

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI-PIKAT: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kelurahan Kandangan Barat melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal,

terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI-PIKAT disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kelurahan Kandangan Barat membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.840 ToC SI-PIKAT

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kelurahan Kandangan Barat; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Output	Sistem SI-PIKAT beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kelurahan Kandangan Barat memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.841 Asumsi dan Risiko ToC SI-PIKAT

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.842 Rekomendasi Pengembangan SI-PIKAT

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kelurahan Kandangan Barat
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kelurahan Kandangan Barat bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.96 Ilustrasi SI-PIKAT

2.5.94 Peduli Umpeg

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.843 Identitas Inovasi Peduli Umpeg

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Peduli Umpeg (Pengelolaan Dokumen Lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi

No	Atribut	Keterangan
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi Peduli Umpeg dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. PEDULI UMPEG (Pengelolaan Dokumen Lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian) merupakan inovasi digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip dan administrasi kepegawaian. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas banyaknya berkas kepegawaian ASN maupun tenaga kontrak yang sebelumnya masih disimpan secara fisik, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang luas, penggunaan map dan rak dalam jumlah besar, serta memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan maupun kehilangan.

Manfaat yang diharapkan: Dengan adanya Aplikasi Peduli Umpeg maka administrasi kepegawian dan penegelolaan berkas dapat diakses dimana saja, Berbasis digital, tidak mudah hilang dan rusak serta user/pegawai yang bersangkutan yang akan menjaga datanya masing_x0002_masing untuk selalu update.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Peduli Umpeg secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.844 Rancang Bangun Peduli Umpeg

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Peduli Umpeg diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.845 Status Inovasi Peduli Umpeg pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Digital	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.846 Dasbor Indikator IID Peduli Umpeg

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.847 Kontribusi Peduli Umpeg terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi Peduli Umpeg dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.848 Kendala dan Tantangan Peduli Umpeg

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Peduli Umpeg: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Peduli Umpeg disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.849 ToC Peduli Umpeg

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Peduli Umpeg beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.850 Asumsi dan Risiko ToC Peduli Umpeg

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.851 Rekomendasi Pengembangan Peduli Umpeg

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.97 Ilustrasi Peduli Umpeg

2.5.95 SI IDAH PEDALAMAN

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.852 Identitas Inovasi SI IDAH PEDALAMAN

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan dalam Genggaman)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SI IDAH PEDALAMAN dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Dalam Genggaman) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, mudah diakses, cepat, efektif, dan efisien melalui satu aplikasi (Super App) yang menghubungkan seluruh layanan digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Inovasi ini ditargetkan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan, mengurangi kompleksitas penggunaan berbagai aplikasi yang terpisah, mempercepat akses layanan digital, serta meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan publik.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan inovasi SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Dalam Genggaman) memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan melalui tersedianya satu aplikasi terintegrasi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kesehatan secara cepat, mudah, dan efisien.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang

memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SI IDAH PEDALAMAN secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.853 Rancang Bangun SI IDAH PEDALAMAN

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SI IDAH PEDALAMAN diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.854 Status Inovasi SI IDAH PEDALAMAN pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.855 Dasbor Indikator IID SI IDAH PEDALAMAN

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.856 Kontribusi SI IDAH PEDALAMAN terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SI IDAH PEDALAMAN dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.857 Kendala dan Tantangan SI IDAH PEDALAMAN

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SI IDAH PEDALAMAN: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SI IDAH PEDALAMAN disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima

layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.858 ToC SI IDAH PEDALAMAN

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SI IDAH PEDALAMAN beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.859 Asumsi dan Risiko ToC SI IDAH PEDALAMAN

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.860 Rekomendasi Pengembangan SI IDAH PEDALAMAN

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.98 Ilustrasi SI IDAH PEDALAMAN

2.5.96 e-RKBMD

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.861 Identitas Inovasi e-RKBMD

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	e-RKBMD (ELEKTRONIK RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi e-RKBMD dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. e-RKBMD (Elektronik Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) merupakan inovasi digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Inovasi ini hadir sebagai solusi atas proses penyusunan RKBMD yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama, berisiko terjadi kesalahan, serta menyebabkan beberapa usulan kebutuhan barang tidak

terakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit.

Manfaat yang diharapkan: Inovasi e-RKBMD Elektonik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara menjadikan dokumen usulan yang valid dan cepat di dapatkan sebagai dasar pembuatan RKA dan RBA

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun e-RKBMD secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.862 Rancang Bangun e-RKBMD

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian e-RKBMD diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024

dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.863 Status Inovasi e-RKBMD pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.864 Dasbor Indikator IID e-RKBMD

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.865 Kontribusi e-RKBMD terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi e-RKBMD dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.866 Kendala dan Tantangan e-RKBMD

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi e-RKBMD: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change e-RKBMD disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.867 ToC e-RKBMD

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem e-RKBMD beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.868 Asumsi dan Risiko ToC e-RKBMD

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.869 Rekomendasi Pengembangan e-RKBMD

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

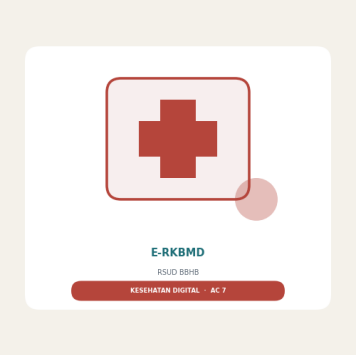

Gambar 2.99 Ilustrasi e-RKBMD

2.5.97 Aksi IPSRS

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.870 Identitas Inovasi Aksi IPSRS

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Aksi IPSRS (APLIKASI KINERJA DAN SISTEM INFORMASI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi Aksi IPSRS dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Aksi IPSRS (Aplikasi Kinerja dan Sistem Informasi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit) merupakan inovasi tata kelola operasional rumah sakit berbasis digital yang dirancang untuk memutakhirkan pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan aset medis maupun non-medis secara terpadu. Inovasi ini hadir menggantikan alur pelaporan kerusakan sarana-prasarana yang konvensional dan lambat. Melalui aplikasi ini, seluruh unit kerja di rumah sakit dapat melaporkan kerusakan sarana (work order), memantau status pemeliharaan berkas/alat, mendokumentasikan kalibrasi, hingga merekam riwayat kinerja teknisi IPSRS secara *real-time* dan transparan.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan Aksi IPSRS memberikan dampak langsung terhadap percepatan waktu tanggap (response time) penanganan kerusakan fasilitas, sehingga potensi gangguan pada layanan kesehatan dan keselamatan pasien (patient safety) dapat diminimalisir. Inovasi ini memastikan alat medis dan fasilitas sarana pendukung senantiasa berada dalam kondisi laik pakai serta terkalibrasi dengan baik.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Aksi IPSRS secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.871 Rancang Bangun Aksi IPSRS

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Aksi IPSRS diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.872 Status Inovasi Aksi IPSRS pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.873 Dasbor Indikator IID Aksi IPSRS

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.874 Kontribusi Aksi IPSRS terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi Aksi IPSRS dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.875 Kendala dan Tantangan Aksi IPSRS

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Aksi IPSRS: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Aksi IPSRS disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.876 ToC Aksi IPSRS

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Aksi IPSRS beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.877 Asumsi dan Risiko ToC Aksi IPSRS

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.878 Rekomendasi Pengembangan Aksi IPSRS

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital Aksi IPSRS - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.100 Ilustrasi Aksi IPSRS

2.5.98 Isma Badastar

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.879 Identitas Inovasi Isma Badastar

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	Isma Badastar (Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis QR code Matrix Data dan Instagram)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2007
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi Isma Badastar dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Umlah item aset yang ada di RSUD Brig. Jend. H. Hasan Basry Kandangan sampai 31 Juni 2018 sebanyak 5.972. Jumlah ini akan semakin terus bertambah setiap tahunnya sehingga membutuhkan manajemen pengelolaan aset yang harus lebih baik dan penuh inovatif. Sebagian dari aset tersebut tergolong alat kesehatan yang berukuran kecil. Di dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 disebutkan tentang kewajiban kodefikasi barang milik daerah. Alat kesehatan yang berukuran sangat kecil juga memiliki kodefikasi barang namun untuk pemasangan kodefikasi/pelabelan pada alat tersebut sesuai kode aset yang tertera pada SIMDA BMD sangat sulit bahkan mustahil untuk dilakukan.

Manfaat yang diharapkan: Inovasi ISMA BADASTAR memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan aset di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Melalui sistem berbasis barcode dan data digital, proses pencarian informasi aset menjadi sangat cepat, inventarisasi lebih efisien, serta pengawasan dan pengendalian aset menjadi lebih akurat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun Isma Badastar secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.880 Rancang Bangun Isma Badastar

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kode qr
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian Isma Badastar diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.881 Status Inovasi Isma Badastar pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Tahun mulai penerapan	2007	Disebut pada uraian isi inovasi
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kode qr	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.882 Dasbor Indikator IID Isma Badastar

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.883 Kontribusi Isma Badastar terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II,

sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi Isma Badastar dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.884 Kendala dan Tantangan Isma Badastar

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi Isma Badastar: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change Isma Badastar disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB

membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.885 ToC Isma Badastar

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem Isma Badastar beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.886 Asumsi dan Risiko ToC Isma Badastar

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.887 Rekomendasi Pengembangan Isma Badastar

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital Isma Badastar - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.101 Ilustrasi Isma Badastar

2.5.99 SIEVAK

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.888 Identitas Inovasi SIEVAK

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIEVAK (SISTEM INFORMASI EVALUASI ASUHAN KEPERAWATAN)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIEVAK dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Keperawatan modern merupakan suatu seni dan ilmu yang mencakup berbagai aktivitas konsep dan keterampilan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Keperawatan sebagai suatu profesi yang unik karena keperawatan ditujukan ke berbagai respon individu dan keluarga terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Profesi keperawatan merupakan profesi yang kompleks dan beragam. Perawat berpraktik di berbagai tempat yang menuntut aspek keterampilan dan keahlian serta disiplin yang tinggi.

Keahlian dalam keperawatan merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman klinik yang dijalaninya.

Manfaat yang diharapkan: Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa inovasi ini memberikan dampak positif bagi rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Bagi RSUD Brigjend H.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIEVAK secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.889 Rancang Bangun SIEVAK

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIEVAK diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024

dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.890 Status Inovasi SIEVAK pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.891 Dasbor Indikator IID SIEVAK

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.892 Kontribusi SIEVAK terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SIEVAK dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.893 Kendala dan Tantangan SIEVAK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIEVAK: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIEVAK disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.894 ToC SIEVAK

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIEVAK beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.895 Asumsi dan Risiko ToC SIEVAK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.896 Rekomendasi Pengembangan SIEVAK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

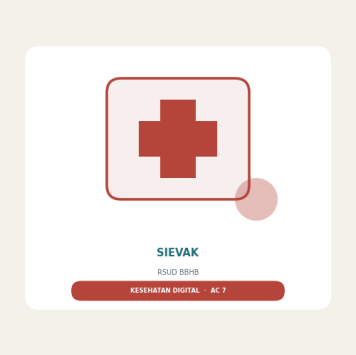

Gambar 2.102 Ilustrasi SIEVAK

2.5.100 ES-KREM HASAN BASRY

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.897 Identitas Inovasi ES-KREM HASAN BASRY

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ES-KREM HASAN BASRY (Elektronik Slip Kompensasi dan Remunerasi)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BHHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi ES-KREM HASAN BASRY dikembangkan oleh RSUD BHHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. ES-KREM HASAN BASRY (Elektronik Slip Kompensasi dan Remunerasi) merupakan inovasi sistem informasi manajemen keuangan dan SDM berbasis digital yang dikembangkan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini mengalihkan proses pencetakan dan pendistribusian slip gaji, jasa pelayanan (jaspel), serta rincian remunerasi pegawai dari yang semula berbasis kertas (paper-based) menjadi portal/layanan elektronik mandiri (paperless digital self-service).

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Biaya Operasional & Ramah Lingkungan (Paperless & Cost Reduction): Menghemat penggunaan ribuan lembar kertas, amplop, dan tinta cetak setiap bulannya secara berkelanjutan. Jaminan Kerahasiaan Data (Data Privacy & Security): Informasi besaran kompensasi tidak berpotensi tercecer atau terbaca oleh orang lain karena diakses secara langsung dan tertutup oleh pemilik akun sah.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ES-KREM HASAN BASRY secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.898 Rancang Bangun ES-KREM HASAN BASRY

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BHHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ES-KREM HASAN BASRY diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BHHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.899 Status Inovasi ES-KREM HASAN BASRY pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik	Ket. Inovasi IGA 2025
Jenis produk inovasi	Teknologi	Ket. Inovasi IGA 2025
Wujud produk digital	Sistem informasi, layanan web/daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.900 Dasbor Indikator IID ES-KREM HASAN BASRY

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.901 Kontribusi ES-KREM HASAN BASRY terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi ES-KREM HASAN BASRY dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.902 Kendala dan Tantangan ES-KREM HASAN BASRY

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ES-KREM HASAN BASRY: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BHHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ES-KREM HASAN BASRY disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BHHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.903 ToC ES-KREM HASAN BASRY

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BHHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ES-KREM HASAN BASRY beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BHHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.904 Asumsi dan Risiko ToC ES-KREM HASAN BASRY

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.905 Rekomendasi Pengembangan ES-KREM HASAN BASRY

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BHHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BHHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.103 Ilustrasi ES-KREM HASAN BASRY

2.5.101 SIPETI

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.906 Identitas Inovasi SIPETI

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIPETI (Sistem Pelayanan Cuti)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)

No	Atribut	Keterangan
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BHHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIPETI dikembangkan oleh RSUD BHHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIPETI (Sistem Pelayanan Cuti) merupakan inovasi berbasis aplikasi/sistem informasi digital yang dikembangkan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengotomatisasi tata kelola pengajuan serta penetapan izin cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf di lingkungan instansi pemerintah. Inovasi ini mengalihkan proses pengajuan cuti yang sebelumnya berbasis kertas (paper-based) menjadi sistem pelayanan mandiri berbasis elektronik (self-service digital platform).

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu & Proses: Memangkas proses pengurusan izin cuti dari yang semula memakan waktu beberapa hari menjadi hanya beberapa menit/jam. Transparansi & Akuntabilitas Data: Baik pegawai, atasan, maupun bagian kepegawaian (BKPSDM/Subbag Umum) memiliki visibilitas yang sama terhadap rekam jejak dan sisa kuota cuti pegawai.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIPETI secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.907 Rancang Bangun SIPETI

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan, formulir daring
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BHHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIPETI diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BHHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.908 Status Inovasi SIPETI pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan, formulir daring	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Sudah Input	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.909 Dasbor Indikator IID SIPETI

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.910 Kontribusi SIPETI terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SIPETI dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.911 Kendala dan Tantangan SIPETI

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIPETI: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BHHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIPETI disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BHHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya

cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.912 ToC SIPETI

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BHHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIPETI beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BHHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.913 Asumsi dan Risiko ToC SIPETI

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.914 Rekomendasi Pengembangan SIPETI

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BHHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BHHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

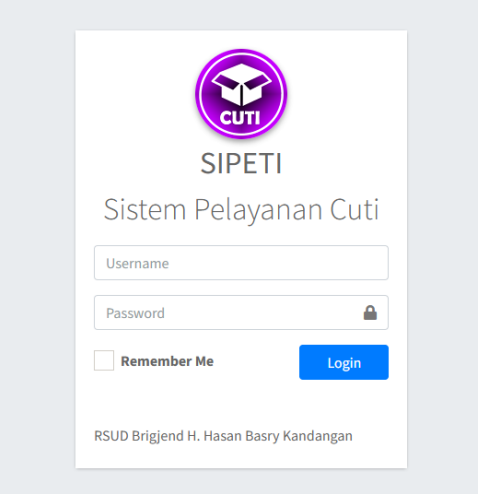

Gambar 2.104 Ilustrasi SIPETI

2.5.102 BERANAK

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.915 Identitas Inovasi BERANAK

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	BERANAK (Berkas Lahir Untuk Anak)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BHHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi BERANAK dikembangkan oleh RSUD BHHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. BERANAK (Berkas Lahir Untuk Anak) merupakan inovasi pelayanan publik terpadu yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan paket dokumen administrasi kependudukan (Adduk) bagi bayi yang baru lahir secara langsung, cepat, dan tanpa biaya (free-of-charge). Inovasi ini mengusung pola kolaborasi lintas instansi antara

dinas/kelurahan/kecamatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, atau Bidan Desa).

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Kemudahan & Kepraktisan: Orang tua tidak perlu datang atau mengantre di kantor dinas kependudukan/kecamatan usai proses persalinan. Perlindungan Hak Anak: Memastikan terpenuhinya hak sipil anak atas identitas resmi negara sejak dini. Akurasi & Cakupan Data Kependudukan: Meningkatkan cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah secara signifikan serta menjamin pemutakhiran data kependudukan secara *real-time*.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun BERANAK secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.916 Rancang Bangun BERANAK

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BHHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian BERANAK diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang

digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BHHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.917 Status Inovasi BERANAK pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.918 Dasbor Indikator IID BERANAK

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.919 Kontribusi BERANAK terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi BERANAK dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.920 Kendala dan Tantangan BERANAK

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi BERANAK: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BHHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan.

Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change BERANAK disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BHHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.921 ToC BERANAK

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BHHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem BERANAK beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BHHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.922 Asumsi dan Risiko ToC BERANAK

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.923 Rekomendasi Pengembangan BERANAK

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BHHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BHHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.105 Ilustrasi BERANAK

2.5.103 E-Skakmat

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.924 Identitas Inovasi E-Skakmat

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	E-Skakmat (Elektronik Surat KeterAngan keMATian)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kel . kandangan Utara
5	**PIC/Narahubung**	Oma Era 081251112798
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi E-Skakmat dikembangkan oleh Kel . kandangan Utara dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. E-Skakmat (Elektronik Surat Keter Angan ke MATian) merupakan inovasi berbasis aplikasi/layanan digital yang dikembangkan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengintegrasikan proses penerbitan Surat Keterangan Kematian serta administrasi kependudukan terkait kematian secara otomatis. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pelaporan dan pengurusan Surat Keterangan Kematian secara konvensional sering dianggap rumit oleh keluarga duka karena harus bolak-balik mengurus berkas fisik dari tingkat RT/Kelurahan/Desa, Puskesmas/Rumah Sakit, hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Empati & Kemudahan Bagi Warga Duka: Warga tidak dibebani lagi dengan prosedur birokrasi yang rumit dan berulang saat sedang dalam suasana duka. Akurasi Data Kependudukan (Clean Data): Mencegah terjadinya data pemilih ganda, penyalahgunaan identitas orang yang telah meninggal, dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Efisiensi Waktu & Biaya: Memangkas waktu penerbitan dokumen dari hitungan hari/minggu menjadi hitungan jam atau menit.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun E-Skakmat secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.925 Rancang Bangun E-Skakmat

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kel . kandangan Utara; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian E-Skakmat diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kel . kandangan Utara. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.926 Status Inovasi E-Skakmat pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi

berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.927 Dasbor Indikator IID E-Skakmat

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	sudah sesuai
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tambahkan narasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	tambahkan DPA 2026
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	sudah sesuai
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	sudah sesuai
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	sudah sesuai
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	tambahkan narasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	sudah sesuai
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	sudah sesuai
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	tambahkan narasi
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	buatkan seperti contoh
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	tambahkan keterangan persentase aduan yang di tindak lanjuti sebesar 100%
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tambahkan narasi
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sudah sesuai
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	sudah sesuai

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tambahkan keterangan waktu (tanggal)
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	tambahkan data penerima manfaat sebanyak 501/lebih dari 501 orang
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	sudah sesuai / tambahan dari bapperida

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.928 Kontribusi E-Skakmat terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi E-Skakmat dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.929 Kendala dan Tantangan E-Skakmat

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi E-Skakmat: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja Kel . kandangan Utara melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change E-Skakmat disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kel . kandangan Utara membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.930 ToC E-Skakmat

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kel . kandangan Utara; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem E-Skakmat beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kel . kandangan Utara memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.931 Asumsi dan Risiko ToC E-Skakmat

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.932 Rekomendasi Pengembangan E-Skakmat

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kel . kandangan Utara
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kel . kandangan Utara bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

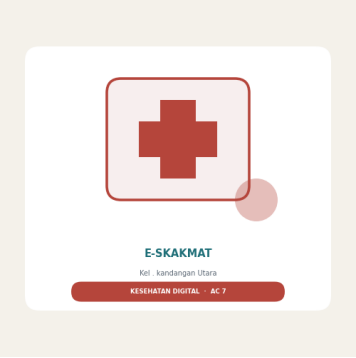

Gambar 2.106 Ilustrasi E-Skakmat

2.5.104 SOPIA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.933 Identitas Inovasi SOPIA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SOPIA (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IN ANDROID)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BHHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SOPIA dikembangkan oleh RSUD BHHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SOPIA (Standar Operasional Prosedur in Android) merupakan inovasi berbasis aplikasi seluler (smartphone) yang memanfaatkan teknologi Android untuk menyajikan, mengelola, serta mendokumentasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi secara digital dan terintegrasi. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Dokumen SOP konvensional berbasis cetak (paper-based) sering kali menumpuk di lemari arsip, sulit diakses secara cepat oleh pegawai di lapangan, serta berisiko ketinggalan zaman (outdated) ketika ada pembaruan aturan. Hal ini berdampak pada potensi ketidaksesuaian prosedur kerja (human error) dalam pelayanan publik maupun tata kelola internal.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Kemudahan Akses Kapan Saja & di Mana Saja: Pegawai maupun petugas lapangan tidak perlu kembali ke meja kerja atau membuka bundel kertas fisik untuk memeriksa alur prosedur resmi. Meningkatkan Standarisasi Pelayanan: Meminimalisasi variasi atau penyimpangan prosedur pelayanan publik karena panduan kerja terstandar dengan jelas di aplikasi. Efisiensi Penghematan Anggaran: Menghemat penggunaan kertas (paperless) dan biaya cetak/penggandaan dokumen SOP secara signifikan.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SOPIA secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.934 Rancang Bangun SOPIA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BHHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SOPIA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BHHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.935 Status Inovasi SOPIA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.936 Dasbor Indikator IID SOPIA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.937 Kontribusi SOPIA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SOPIA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.938 Kendala dan Tantangan SOPIA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SOPIA: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BHHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SOPIA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan

menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BHHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.939 ToC SOPIA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BHHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SOPIA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BHHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.940 Asumsi dan Risiko ToC SOPIA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.941 Rekomendasi Pengembangan SOPIA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BHHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BHHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.107 Ilustrasi SOPIA

2.5.105 ROKET

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.942 Identitas Inovasi ROKET

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ROKET (Registrasi *Online* Ke Rumah Sakit)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BHHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi ROKET dikembangkan oleh RSUD BHHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. ROKET (Registrasi *Online* Ke Rumah Sakit) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh fasilitas kesehatan (seperti Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD) untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran antrean berobat secara mandiri dari mana saja (*online*). Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Sistem pendaftaran pasien secara manual sering kali menimbulkan penumpukan dan

antrean panjang di loket pendaftaran rumah sakit sejak pagi hari. Hal ini menyita banyak waktu pasien/keluarga, berpotensi memicu kerumunan, serta memperlambat alur pelayanan medis secara keseluruhan.

Manfaat yang diharapkan: Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu Pasien: Memangkas durasi waktu tunggu hingga berjam-jam; pasien bisa datang mendekati estimasi jam pelayanan dokter (just-in-time). Mengurangi Kerumunan: Menciptakan suasana ruang tunggu rumah sakit yang lebih tertib, tenang, dan higienis karena tidak ada tumpukan antrean di loket. Kepastian Pelayanan: Memberikan kejelasan jadwal praktik dokter dan ketersediaan kuota pemeriksaan harian secara transparan kepada masyarakat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ROKET secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.943 Rancang Bangun ROKET

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kode qr, kanal pesan elektronik
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BHHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ROKET diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BHHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.944 Status Inovasi ROKET pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, kode qr, kanal pesan elektronik	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.945 Dasbor Indikator IID ROKET

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.946 Kontribusi ROKET terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi ROKET dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.947 Kendala dan Tantangan ROKET

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ROKET: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BHHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ROKET disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BHHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.948 ToC ROKET

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BHHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ROKET beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BHHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.949 Asumsi dan Risiko ToC ROKET

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.950 Rekomendasi Pengembangan ROKET

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BHHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BHHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital ROKET - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

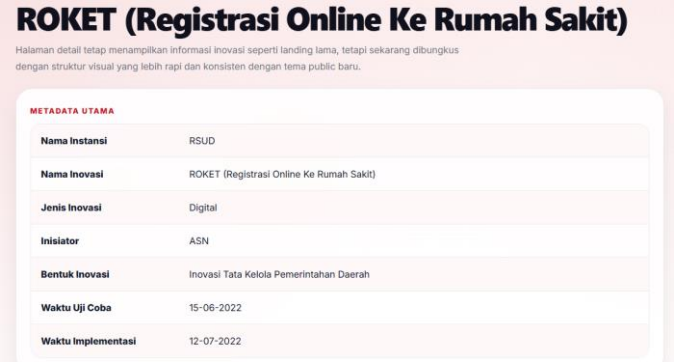

Gambar 2.108 Ilustrasi ROKET

2.5.106 SIBUNGA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.951 Identitas Inovasi SIBUNGA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SIBUNGA (Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan dan Gaji)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital

No	Atribut	Keterangan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi SIBUNGA dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. SIBUNGA hadir sebagai solusi digitalisasi tata kelola keuangan internal (khususnya penggajian dan pengusulan/penyaluran tunjangan) pada suatu instansi atau lembaga. Dengan mengalihkan proses manual ke sistem terintegrasi, SIBUNGA meminimalisir risiko kesalahan input data (human error), mempercepat proses rekapitulasi, serta memastikan perhitungan hak keuangan pegawai dilakukan secara presisi dan tepat waktu.

Manfaat yang diharapkan: Penerapan SIBUNGA memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi. Bagi pengelola keuangan, sistem ini memangkas birokrasi dan waktu pemrosesan dokumen gaji serta tunjangan, sehingga alur pencairan menjadi lebih cepat, teratur, dan terdokumentasi dengan baik. Bagi para pegawai, SIBUNGA memberikan kepastian serta transparansi rincian penghasilan yang diterima secara *real-time* dan akurat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SIBUNGA secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.952 Rancang Bangun SIBUNGA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SIBUNGA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.953 Status Inovasi SIBUNGA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.954 Dasbor Indikator IID SIBUNGA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.955 Kontribusi SIBUNGA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi SIBUNGA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.956 Kendala dan Tantangan SIBUNGA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SIBUNGA: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SIBUNGA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.957 ToC SIBUNGA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SIBUNGA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.958 Asumsi dan Risiko ToC SIBUNGA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.959 Rekomendasi Pengembangan SIBUNGA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.109 Ilustrasi SIBUNGA

2.5.107 ANNOR

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.960 Identitas Inovasi ANNOR

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	ANNOR (Aplikasi Pelayanan Donor Darah)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi ANNOR dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. ANNOR hadir sebagai solusi digital untuk merespons kebutuhan stok darah secara cepat dan akurat. Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan fasilitas penyedia darah melalui berbagai fitur praktis, seperti pendaftaran donor secara *online*, jadwal kegiatan donor darah terdekat, pemantauan stok darah *real-time*, hingga riwayat donor pribadi. Dengan mengalihkan sistem pencatatan konvensional ke platform digital, ANNOR memangkas antrean dan meningkatkan efisiensi operasional pelayanan darah.

Manfaat yang diharapkan: Hadirnya ANNOR membawa dampak besar bagi ekosistem pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan. Bagi masyarakat umum dan pendonor, aplikasi ini memberikan kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi stok darah, mendaftar tanpa perlu mengantre lama, serta mendapatkan pengingat rutin jadwal donor berikutnya. Bagi petugas dan pengelola donor darah, ANNOR mentransformasi tata kelola pendataan menjadi lebih rapi, cepat, dan terintegrasi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun ANNOR secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.961 Rancang Bangun ANNOR

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian ANNOR diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.962 Status Inovasi ANNOR pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.963 Dasbor Indikator IID ANNOR

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.964 Kontribusi ANNOR terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai

target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Kesehatan Digital, kendala dan tantangan implementasi ANNOR dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.965 Kendala dan Tantangan ANNOR

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi ANNOR: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change ANNOR disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan

menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.966 ToC ANNOR

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem ANNOR beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.967 Asumsi dan Risiko ToC ANNOR

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.968 Rekomendasi Pengembangan ANNOR

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.110 Ilustrasi ANNOR

2.5.108 SILAKSA

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.969 Identitas Inovasi SILAKSA

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SILAKSA (Sistem Integrasi Link Akses Seluruh Aplikasi Inovasi)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	RSUD BBHB
5	**PIC/Narahubung**	Fahmi
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Kesehatan Digital
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SILAKSA dikembangkan oleh RSUD BBHB dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Kesehatan Digital, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi portal pusat (*single sign-on* / sso-*gateway*) dan portal integrasi digital yang menyatukan seluruh tautan, akses, serta pemantauan aplikasi inovasi daerah dalam satu wadah terpadu. SILAKSA dirancang untuk menghilangkan fragmentasi aplikasi, mempermudah aparatur maupun masyarakat dalam menemukan dan mengakses berbagai inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan efisiensi ekosistem digital di lingkungan pemerintah daerah.

Manfaat yang diharapkan: Satu Pintuk Akses Inovasi (One-Stop Access): Memudahkan masyarakat dan ASN dalam mengakses seluruh aplikasi inovasi

daerah tanpa perlu menghafal banyak alamat domain/URL yang berbeda. Interoperabilitas & Efisiensi Layanan: Mengurangi duplikasi sistem, merapikan arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), serta meningkatkan efisiensi tata kelola teknologi informasi.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah pasien dan keluarga pasien, ibu hamil dan balita, lansia, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SILAKSA secara umum terdiri atas basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.970 Rancang Bangun SILAKSA

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data pasien/sasaran, antarmuka petugas kesehatan, kanal akses masyarakat, serta modul pelaporan periodik ke dinas/manajemen
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada RSUD BBHB; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SILAKSA diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD BBHB. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12

(2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.971 Status Inovasi SILAKSA pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Aplikasi, sistem informasi, layanan web/daring, papan pemantauan	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Sudah Lengkap	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.972 Dasbor Indikator IID SILAKSA

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.973 Kontribusi SILAKSA terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan kesehatan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Cakupan layanan kesehatan sesuai standar	persen	-	-	-	-
Rata-rata waktu tunggu layanan	menit	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Jumlah pengguna/transaksi layanan digital	transaksi /tahun	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SILAKSA dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.974 Kendala dan Tantangan SILAKSA

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan
2	**Sumber daya manusia**	beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SILAKSA: terwujudnya meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan pada lingkup kerja RSUD BBHB melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SILAKSA disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan RSUD BBHB membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran.

Tabel 2.975 ToC SILAKSA

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA RSUD BBHB; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SILAKSA beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	RSUD BBHB memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
***Outcome* akhir**	Meningkatnya cakupan dan mutu layanan kesehatan serta menurunnya keterlambatan penanganan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kesakitan/kematian pada kelompok sasaran	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.976 Asumsi dan Risiko ToC SILAKSA

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan jaringan internet di puskesmas pembantu dan wilayah pegunungan Meratus, termasuk keterbatasan perangkat pada unit layanan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; beban ganda petugas kesehatan yang harus mengisi sistem inovasi sekaligus aplikasi nasional (SIMPUS/SATUSEHAT)	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.977 Rekomendasi Pengembangan SILAKSA

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	RSUD BBHB

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum adanya interoperabilitas dengan rekam medis elektronik dan aplikasi kementerian, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	RSUD BBHB bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SILAKSA - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.111 Ilustrasi SILAKSA

2.5.109 SAPA QR

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.978 Identitas Inovasi SAPA QR

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	SAPA QR (Survei Kepuasan Masyarakat Melalui QR Code)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]
4	**SKPD Pencetus**	Belum tercantum
5	**PIC/Narahubung**	-
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
8	**Status Audit**	Termasuk 20 sampel audit mendalam (Bab III dan Bab IV)

Inovasi SAPA QR dikembangkan oleh Belum tercantum dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Inovasi pelayanan publik digital berbasis kode QR (Quick Response Code) yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan pengguna layanan dalam memberikan penilaian, ulasan, serta masukan terhadap kualitas pelayanan publik di unit kerja/instansi secara praktis, cepat, dan *real-time* melalui perangkat smartphone.

Manfaat yang diharapkan: Memudahkan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dapat memberikan umpan balik (feedback) atau penilaian layanan dengan mudah hanya dengan memindai kode QR tanpa perlu mengisi formulir kertas secara manual. Evaluasi Layanan Secara *Real-Time*: Memudahkan pimpinan dan pengelola layanan publik dalam memantau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara transparan, cepat, dan akurat.

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah, pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan, serta masyarakat sebagai penerima layanan akhir. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun SAPA QR secara umum terdiri atas basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri. Komponen tersebut bekerja dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.979 Rancang Bangun SAPA QR

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kode qr
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	basis data dokumen/proses kerja, alur persetujuan berjenjang, dasbor pemantauan pimpinan, serta arsip digital yang dapat ditelusuri
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Belum tercantum; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian SAPA QR diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum tercantum. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.980 Status Inovasi SAPA QR pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Tahun mulai penerapan	[Tidak tercatat pada dokumen rekapitulasi - dilengkapi perangkat daerah pengampu]	-
Bentuk produk inovasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, kode qr	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	[Data belum tersedia - diisi oleh perangkat daerah pengampu]	-
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.981 Dasbor Indikator IID SAPA QR

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	-
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.982 Kontribusi SAPA QR terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat/ nilai	A (Kabupaten, 2024)	-	-	-
Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-
Persentase proses kerja terdigitalisasi	persen	-	-	-	-
Waktu penyelesaian proses administrasi	hari kerja	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan *baseline*. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil audit produk digital pada Bab III dan Bab IV, kendala dan tantangan implementasi SAPA QR dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.983 Kendala dan Tantangan SAPA QR

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal
2	**Sumber daya manusia**	ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi SAPA QR: terwujudnya meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi pada lingkup kerja Belum tercantum melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change SAPA QR disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Belum tercantum membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Tabel 2.984 ToC SAPA QR

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Belum tercantum; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem SAPA QR beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Belum tercantum memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya efisiensi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses kerja birokrasi	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Menguatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.985 Asumsi dan Risiko ToC SAPA QR

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan kapasitas server dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga tanpa jaminan tingkat layanan yang formal	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; ketergantungan pada satu atau dua pegawai pengelola tanpa dokumentasi teknis dan alih pengetahuan yang memadai	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.986 Rekomendasi Pengembangan SAPA QR

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Belum tercantum
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu belum terhubungnya sistem dengan aplikasi perencanaan dan keuangan daerah sehingga data harus diinput ulang, serta belum adanya SOP tertulis dan penetapan formal pengelola, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Belum tercantum bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

Rekomendasi teknis rinci hasil audit produk digital SAPA QR - mencakup aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan - disajikan pada Bab III dan Bab IV laporan ini.

H. Ilustrasi Produk Digital

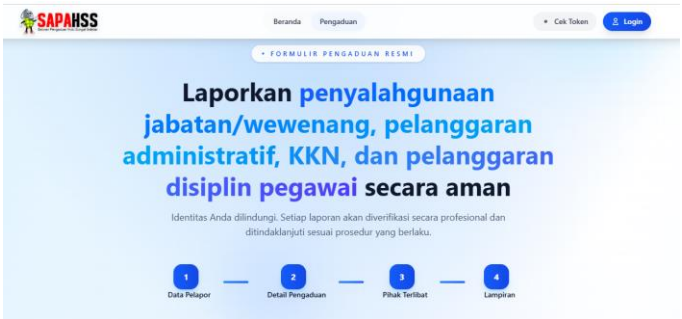

Gambar 2.112 Ilustrasi SAPA QR

2.5.110 BUKU TAMU DIGITAL

A. Identitas Inovasi

Tabel 2.987 Identitas Inovasi BUKU TAMU DIGITAL

No	Atribut	Keterangan
1	**Nama Inovasi**	BUKU TAMU DIGITAL (DIGITAL GUESTBOOK)
2	**Logo/Identitas Visual**	[Sisipkan logo inovasi - disediakan perangkat daerah pengampu]
3	**Tahun Mulai Penerapan**	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)
4	**SKPD Pencetus**	Kecamatan Loksado
5	**PIC/Narahubung**	Karmila
6	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
7	**Klaster Fungsional Teknologi**	Pelayanan Kewilayahan
8	**Status Audit**	Belum diaudit mendalam - direkomendasikan pada siklus audit berikutnya

Inovasi BUKU TAMU DIGITAL dikembangkan oleh Kecamatan Loksado dan tercatat pada kategori Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara fungsional inovasi ini termasuk klaster Pelayanan Kewilayahan, sehingga kontribusinya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan urusan tersebut.

B. Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut. Buku Tamu Digital merupakan inovasi transformasi dari pencatatan kedatangan atau kunjungan konvensional (berbasis kertas) menjadi sistem pencatatan berbasis data elektronik yang lebih efisien. Buku Tamu Digital Kecamatan Loksado menggunakan pemindaian kode QR Code untuk mencatat identitas pengunjung. Data diinput dalam basis data secara real time sehingga mengurangi penggunaan kertas dan risiko data hilang atau rusak.

Manfaat yang diharapkan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kecamatan Loksado, Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Manajemen Data

Sasaran penerima manfaat utama inovasi ini adalah masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi, perangkat desa, serta aparatur kecamatan. Penerima manfaat tidak langsung mencakup perangkat daerah lain yang memanfaatkan data dan keluaran sistem sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.

C. Rancang Bangun Inovasi

Rancang bangun BUKU TAMU DIGITAL secara umum terdiri atas formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon. Komponen tersebut bekerja

dalam satu alur yang menghubungkan masukan data di tingkat pelaksana, pemrosesan pada sistem, hingga keluaran berupa layanan bagi penerima manfaat dan laporan bagi pimpinan.

Tabel 2.988 Rancang Bangun BUKU TAMU DIGITAL

Aspek	Uraian Rancang Bangun
Bentuk produk digital	Sistem informasi, kode qr
Klasifikasi bentuk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)
Komponen utama	formulir permohonan daring, basis data pemohon, alur verifikasi perangkat kecamatan, serta notifikasi status kepada pemohon
Pengguna sistem	Petugas pelaksana pada Kecamatan Loksado; masyarakat/penerima layanan sebagai pengguna akhir
Alur proses	Input data pelaksana - verifikasi berjenjang - pemrosesan sistem - keluaran layanan - pelaporan capaian
Infrastruktur pendukung	Perangkat dan jaringan internet unit kerja, didukung infrastruktur SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Indeks SPBE 2024 = 4,09; domain Layanan 4,51). Spesifikasi teknis server/hosting diverifikasi perangkat daerah pengampu
Dasar hukum penerapan	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah; SK penetapan pelaksana inovasi pada tingkat perangkat daerah dilengkapi oleh pengampu

D. Capaian Inovasi (Dasbor Capaian) terhadap Indikator Kinerja

Capaian BUKU TAMU DIGITAL diukur pada dua tataran. Tataran pertama adalah kematangan inovasi menurut instrumen resmi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan pada penilaian *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025; tataran kedua adalah kontribusi inovasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loksado. Sebagai konteks, nilai IID Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari 61,83 pada 2021 menjadi 67,04 (2022), 70,41 (2023), dan 73,15 pada 2024 dengan predikat Sangat Inovatif, meskipun peringkat nasional bergeser dari 12 (2022) ke 22 (2024). Pergeseran tersebut menegaskan bahwa kenaikan nilai kini lebih ditentukan kelengkapan data dukung tiap inovasi, bukan jumlah inovasi yang dilaporkan.

D.1 Status Inovasi dan Kelengkapan Data Dukung IGA 2025

Tabel 2.989 Status Inovasi BUKU TAMU DIGITAL pada IGA 2025

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Status keaktifan inovasi	Aktif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita (Detail Nama Inovasi)
Tahun mulai penerapan	2025 (inovasi baru pada rekapitulasi 2025)	Rekap Inovasi 2025 - penanda inovasi baru
Bentuk produk inovasi	Inovasi pelayanan publik (klasifikasi kajian berdasarkan PP 38/2017)	Klasifikasi kajian (PP 38/2017)

Aspek	Kondisi Terkini	Sumber Data
Jenis produk inovasi	Digital (klasifikasi kajian ini berdasarkan komponen teknologi)	Klasifikasi Bab II kajian ini
Wujud produk digital	Sistem informasi, kode qr	Telaah nomenklatur dan uraian isi inovasi
Kelengkapan data dukung	Data Dukung Belum Ada	Ket. Inovasi IGA 2025 (sheet SKPD)
Catatan perbaikan	Tidak ada catatan khusus	-

Status kelengkapan data dukung BUKU TAMU DIGITAL tercatat sebagai "Data Dukung Belum Ada". Kondisi ini berdampak langsung pada perolehan skor IID inovasi, karena sejak IGA 2023 penilaian menitikberatkan kualitas dan kelengkapan bukti dukung, bukan kuantitas inovasi. Pelengkapan bukti dukung menjadi prioritas tindak lanjut jangka pendek bagi Kecamatan Loksado.

D.2 Dasbor Capaian terhadap Indikator Indeks Inovasi Daerah

Dasbor berikut memetakan posisi inovasi terhadap indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah beserta syarat perolehan skor maksimal. Kolom kondisi diisi berdasarkan catatan verifikasi data dukung; indikator yang belum berstatus sesuai merupakan titik perbaikan yang paling cepat menaikkan skor.

Tabel 2.990 Dasbor Indikator IID BUKU TAMU DIGITAL

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	-
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	-
3	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	-
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi *online*/daring/Artificial Intelligence	-
5	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T-2, T-1, T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training/TOT)	Buatkan Bimtek sebanyak 3 Kali, 1 file bimtek berisi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan Sertifikat salah satu peserta
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0 (T-0 adalah tahun berjalan)	-
7	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	-
8	Replikasi	Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	-

No	Indikator IID	Syarat Skor Maksimal	Kondisi/Catatan Verifikasi
9	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara *online*	-
10	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	-
11	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	-
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	≥ 91%	-
13	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	-
14	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	-
15	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi *mobile* (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	-
16	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	-
17	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	-
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	-

D.3 Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

Tabel 2.991 Kontribusi BUKU TAMU DIGITAL terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	*Baseline*	Capaian	Target	Status
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan/kelurahan	indeks (1-100)	-	-	-	-
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi	hari/menit	-	-	-	-
Jumlah permohonan layanan yang diproses melalui kanal digital	permohonan/tahun	-	-	-	-
Persentase desa yang terlayani sistem	persen	-	-	-	-
Kontribusi terhadap Indeks SPBE Kabupaten	indeks (1-5)	4,09 (2024)	-	-	-

Keterangan status: Tercapai apabila capaian sama dengan atau melampaui target; Berproses apabila capaian menunjukkan perbaikan namun belum mencapai target; Perlu Perhatian apabila capaian stagnan atau menurun dibandingkan

baseline. *Baseline* Indeks SPBE menggunakan indeks komposit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar 4,09 sebagaimana disajikan pada Bab II, sedangkan *baseline* akuntabilitas kinerja menggunakan predikat A yang diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada penilaian SAKIP Tahun 2024.

E. Kendala dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan telaah dokumen dan pola temuan pada klaster Pelayanan Kewilayahan, kendala dan tantangan implementasi BUKU TAMU DIGITAL dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2.992 Kendala dan Tantangan BUKU TAMU DIGITAL

No	Aspek	Kendala dan Tantangan
1	**Infrastruktur dan jaringan**	keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan
2	**Sumber daya manusia**	keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual
3	**Integrasi data dan kelembagaan**	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data
4	**Dokumentasi dan keberlanjutan**	Uraian isi dan bukti capaian belum terdokumentasi lengkap pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, sehingga menyulitkan penilaian dampak secara objektif dan pengalihan pengetahuan antarpegawai.

F. Visi dan *Theory of Change* Inovasi

F.1 Rumusan Visi Inovasi

Visi BUKU TAMU DIGITAL: terwujudnya meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan pada lingkup kerja Kecamatan Loksado melalui pemanfaatan teknologi digital yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan langsung dari visi SEMANGAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pilar Teknologis yang menuntut transformasi digital pelayanan publik, dan pilar Mengayomi yang menuntut keberpihakan layanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan. Pada tataran nasional, visi ini bertaut dengan Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

F.2 Rantai Perubahan (*Theory of Change*)

Theory of Change BUKU TAMU DIGITAL disusun untuk menjelaskan bukan sekadar apa yang dihasilkan inovasi, melainkan mengapa rangkaian kegiatan tersebut diyakini menghasilkan perubahan. Logika dasarnya: masalah yang ditangani inovasi ini berakar pada proses kerja manual yang lambat, tercerai-berai, dan sulit ditelusuri. Selama proses tersebut tidak terekam secara digital, pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan koreksi, dan penerima

layanan menanggung biaya waktu yang tidak perlu. Karena itu digitalisasi proses ditempatkan sebagai pengungkit utama.

Rantai perubahannya berjalan sebagai berikut. Ketersediaan anggaran, SDM pengelola, perangkat, dan dasar hukum (input) memungkinkan Kecamatan Loksado membangun serta mengoperasikan sistem dan melatih penggunanya (aktivitas). Apabila aktivitas tersebut terlaksana, sistem beroperasi rutin dan menghasilkan data layanan yang tercatat, akurat, serta dapat ditelusuri (output). Output ini menimbulkan dua perubahan antara yang saling menguatkan: pada sisi pengguna, akses layanan menjadi lebih cepat dan pasti; pada sisi pengelola, tersedia data yang dapat dipakai memantau kinerja dan menemukan hambatan lebih dini. Kedua perubahan antara inilah yang menghasilkan *outcome* akhir, yaitu meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan. Apabila *outcome* tersebut bertahan lintas tahun anggaran dan meluas ke seluruh unit, barulah tercapai dampak jangka panjang berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 2.993 ToC BUKU TAMU DIGITAL

Tahapan	Uraian	Indikator Verifikasi
Input	Anggaran penerapan inovasi pada DPA Kecamatan Loksado; SDM pengelola sistem yang ditetapkan melalui SK; perangkat dan jaringan internet; dasar hukum penerapan inovasi daerah	Tersedianya DPA, SK pelaksana, dan dasar hukum penerapan
Aktivitas	Pengembangan dan pemeliharaan sistem; bimbingan teknis bagi pengelola; sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan pemohon layanan administrasi; pemantauan dan evaluasi berkala	Frekuensi bimtek dalam 3 tahun terakhir; bukti sosialisasi; laporan monev
Output	Sistem BUKU TAMU DIGITAL beroperasi rutin; tersedianya data layanan yang tercatat, akurat, dan dapat ditelusuri; tersedianya pedoman teknis penggunaan	Jumlah transaksi/pengguna sistem; ketersediaan pedoman teknis
***Outcome* antara (sisi pengguna)**	Penerima layanan memperoleh layanan lebih cepat, lebih mudah diakses, dan dengan kepastian status yang jelas tanpa harus datang berulang	Waktu penyelesaian layanan; jumlah penerima manfaat; hasil IKM/SKM
***Outcome* antara (sisi pengelola)**	Kecamatan Loksado memiliki data proses kerja yang dapat dipakai memantau kinerja, menemukan hambatan lebih dini, dan menyusun perencanaan berbasis bukti	Ketersediaan laporan periodik; pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
***Outcome* akhir**	Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan administrasi di tingkat kewilayahan	Capaian IKU unit kerja pada Tabel D.3; kenaikan skor IID inovasi
Dampak	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Indikator sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan terkait

F.3 Asumsi, Prasyarat, dan Risiko Kegagalan Rantai

Rantai perubahan di atas hanya bekerja apabila sejumlah asumsi terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi adalah titik putus yang membuat output tetap dihasilkan namun *outcome* tidak pernah tercapai - pola yang lazim ditemui pada inovasi digital yang berhenti sebagai aplikasi tanpa perubahan cara kerja.

Tabel 2.994 Asumsi dan Risiko ToC BUKU TAMU DIGITAL

Asumsi Kunci	Risiko bila Tidak Terpenuhi	Mitigasi
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai di seluruh titik layanan	Sistem hanya berjalan di lokasi tertentu; keterbatasan perangkat dan kuota internet pada kantor kecamatan/kelurahan	Pemetaan titik lemah jaringan dan penganggaran bertahap bersama Diskominfo
Komitmen pimpinan dan kesinambungan anggaran lintas tahun	Inovasi berhenti setelah tahun peluncuran dan berstatus tidak aktif pada rekap berikutnya	Pencantuman inovasi dalam RKPD dan Renja perangkat daerah
Kesiapan dan kemauan pengguna mengadopsi sistem	Proses manual tetap berjalan paralel; keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparat sehingga sebagian pemohon tetap dilayani secara manual	Bimtek berkala, pendampingan, dan penetapan SOP yang mewajibkan penggunaan sistem
Tersedianya data dasar yang valid dan mutakhir	Keluaran sistem tidak dipercaya sehingga tidak dipakai dalam pengambilan keputusan	Pemutakhiran data berkala dan penetapan walidata pada unit kerja
Keterhubungan dengan sistem lain yang relevan	duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data	Integrasi bertahap melalui arsitektur SPBE dan gerbang akses SILAKSA

G. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan kendala yang teridentifikasi serta data yang tersedia pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah dan hasil audit teknologi.

Tabel 2.995 Rekomendasi Pengembangan BUKU TAMU DIGITAL

Jangka	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Pendek (0-12 bulan)	Melengkapi uraian isi, bukti capaian, dan dokumentasi teknis inovasi pada basis data SENADA+; menetapkan pengelola sistem secara formal dan menyusun SOP penggunaan.	Kecamatan Loksado
Menengah (1-2 tahun)	Menindaklanjuti kendala integrasi data dan kelembagaan, yaitu duplikasi aplikasi sejenis antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-basis data, serta menetapkan *baseline* dan target IKU agar capaian inovasi terukur secara objektif.	Kecamatan Loksado bersama Diskominfo dan Bapperida
Panjang (lebih dari 2 tahun)	Mengintegrasikan sistem ke dalam arsitektur SPBE Kabupaten melalui SILAKSA sebagai gerbang akses tunggal, disertai kebijakan keamanan informasi dan rencana keberlanjutan anggaran.	Diskominfo dan Bapperida

H. Ilustrasi Produk Digital

Gambar 2.113 Ilustrasi BUKU TAMU DIGITAL

BAB 3
AUDIT PRODUK DIGITAL

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Gambar 2.114 Ilustrasi Klasifikasi Kontribusi terhadap Asta Cita

BAB III
LAPORAN AUDIT PRODUK DIGITAL (BAGIAN 1–8)

Bab ini memuat delapan bagian pertama Digital Product Review dan UX Audit Report sebagaimana dipetakan pada Tabel 1.2. Seluruh 20 inovasi dinilai pada setiap bagian, dengan tingkat keyakinan temuan mengacu pada Tabel 1.1.

3.1 Bagian 1 — *Digital Product Snapshot*

Snapshot memuat tujuh unsur sesuai Tahap 1 subbab 1.5: nama sistem, pemilik, pengguna, fungsi utama, perangkat, teknologi, dan status implementasi. Tabel 3.1 menyajikan *snapshot* seluruh 20 inovasi.

Tabel 3.1 Digital Product Snapshot Dua Puluh Inovasi Sampel Audit

No	Sistem	Pemilik	Pengguna	Fungsi Utama	Perangkat	Teknologi	Status
1	SIPASKA HSS	Setda / Protokol	Panitia, calon anggota Paskibraka	Pendataan dan penugasan pasukan pengibar bendera	Web	Sistem informasi pendataan	Aktif (musiman)
2	PETASAN HSS	BPBD	Petugas BPBD, aparat desa, masyarakat	Peta digital sebaran risiko bencana	Web, *mobile*	Sistem informasi geospasial	Aktif
3	KOSAN *Online*	Dinas Kesehatan	Masyarakat umum	Konsultasi klinik sanitasi daring	Web, *mobile*	Formulir daring / kanal konsultasi	Aktif
4	KODE SMS Bu Susi	Dinas Kesehatan	Masyarakat, termasuk tanpa internet	Informasi dan pengingat kesehatan	Telepon genggam (SMS)	SMS *gateway*	Aktif
5	SAPA QR (Kesehatan)	Fasilitas kesehatan	Pasien dan pengunjung	Survei kepuasan pasien	*Mobile* (kamera QR)	QR code + formulir digital	Aktif
6	SI KOMAR	RSUD Hasan Basry	Pasien, keluarga, RS perujuk	Informasi ketersediaan kamar *real-time*	Web, *mobile*	Sistem informasi terintegrasi BPJS	Aktif, terintegrasi

No	Sistem	Pemilik	Pengguna	Fungsi Utama	Perangkat	Teknologi	Status
7	SIAMPRAH	RSUD Hasan Basry	Unit kerja internal RS	Permintaan logistik dan alkes antarunit	Web	Sistem informasi internal	Aktif
8	SITI LAMAK	RSUD / Instalasi Gizi	Petugas gizi, perawat	Label elektronik diet makanan pasien	Web, printer label	Sistem eTiket	Aktif
9	e-Resep	RSUD Hasan Basry	Dokter, apoteker, pasien	Resep obat elektronik	Web	Sistem resep elektronik	Aktif
10	SIAP	Dinas Pendidikan	Guru PAUD, pengelola	Pencatatan kehadiran peserta didik PAUD	Web, *mobile*	Sistem absensi digital	Aktif
11	SIPASUM HSS	Pengelola fasum	Masyarakat, organisasi	Pendaftaran penggunaan fasilitas umum	Web	Sistem pendaftaran daring	Aktif
12	SIDALI	Setda / TPID	Anggota TPID, OPD terkait	Data harga untuk pengendalian inflasi	Web, *dashboard*	Sistem informasi + *dashboard*	Aktif
13	SI HADRAH	Setda / Kesra	Kelompok masyarakat, lembaga	Pengajuan dan rekomendasi hibah daerah	Web	Sistem informasi persuratan	Aktif
14	SENADA+	Bapperida	Aparatur OPD, publik	Basis data resmi seluruh inovasi daerah	Web	Sistem manajemen inovasi	Aktif
15	SI Tamu Simpur	Kecamatan Simpur	Tamu kantor kecamatan	Buku tamu elektronik	Web, *mobile*	Sistem buku tamu digital	Aktif
16	Aksi IPSRS	RSUD Hasan Basry	Unit kerja internal RS	Permintaan dan pemantauan pemeliharaan	Web	Sistem informasi kinerja	Aktif
17	Isma Badastar	Pengelola aset	Pengurus barang OPD	Pencatatan BMD berbasis QR code	Web, *mobile*	QR code + basis data aset	Aktif
18	ROKET	RSUD Hasan Basry	Pasien umum dan rujukan	Registrasi pasien daring	Web, *mobile*	Sistem registrasi daring	Aktif

No	Sistem	Pemilik	Pengguna	Fungsi Utama	Perangkat	Teknologi	Status
19	SILAKSA	Setda / Diskominfo	Masyarakat, aparatur	Portal tautan seluruh aplikasi inovasi	Web	Portal gabunganortautan	Aktif
20	SAPA QR (Birokrasi)	Lintas OPD	Masyarakat penerima layanan	Survei kepuasan masyarakat	*Mobile* (kamera QR)	QR code + formulir digital	Aktif

Seluruh 20 inovasi berstatus aktif. Dari sisi perangkat, 18 di antaranya dapat diakses melalui telepon genggam — baik melalui peramban maupun pemindaian kode QR — sementara KODE SMS Bu Susi justru menjadi satu-satunya yang dirancang berjalan tanpa internet. Dari sisi wujud produk, portofolio ini didominasi sistem informasi berbasis web (14 sistem), diikuti kanal berbasis QR code (2), sistem geospasial (1), SMS *gateway* (1), portal gabunganor (1), dan sistem label (1). Tidak ditemukan inovasi berwujud aplikasi Android mandiri, video, maupun konten edukasi multimedia terstruktur — temuan yang dikaji lebih lanjut pada subbab 3.8.

3.2 Bagian 2 — *User Journey*

User journey memetakan tahapan yang dilalui pengguna, tujuan, hambatan, tingkat kesulitan, dan usulan perbaikan. Karena kajian ini tidak melakukan pengamatan langsung, journey disusun

Tabel 3.2 User Journey Empat Inovasi dengan Dokumentasi Terlengkap

Inovasi	Tahap Pengguna	Tujuan	Hambatan	Tingkat Kesulitan	Perbaikan
SI KOMAR	Mencari informasi kamar (sebelum inovasi)	Mengetahui kamar kosong sebelum berangkat	Harus menelepon nurse station melalui admin IGD	Tinggi (±15 menit)	Digantikan sepenuhnya oleh sistem
SI KOMAR	Mencari informasi kamar (setelah inovasi)	Mengetahui kamar kosong secara *real-time*	Bergantung ketersediaan jaringan pengguna	Rendah (<1 menit)	Sediakan mode ringan dan fallback SMS
SI KOMAR	Verifikasi rujukan antar-RS	RS perujuk memastikan kamar tersedia	Cakupan RS mitra belum terverifikasi	Sedang	Perluas dan publikasikan daftar RS mitra

Inovasi	Tahap Pengguna	Tujuan	Hambatan	Tingkat Kesulitan	Perbaikan
PETASAN HSS	Mengakses peta risiko	Mengetahui zona rawan di sekitar tempat tinggal	Literasi peta digital bagi lansia	Sedang	Tambahkan ringkasan naratif di samping peta
PETASAN HSS	Melaporkan kejadian bencana	Menyampaikan informasi cepat ke BPBD	Jaringan sering terganggu saat bencana	Tinggi	Sediakan kanal SMS/telepon sebagai cadangan
ROKET	Mendaftar berobat daring	Memperoleh nomor antrean tanpa datang	Data pasien diinput ulang, tidak terhubung SI KOMAR	Sedang	Hubungkan basis data pasien kedua sistem
SAPA QR	Mengisi survei kepuasan	Menyampaikan penilaian atas layanan	Perlu telepon berkamera dan aplikasi pemindai	Sedang	Sediakan formulir kertas bagi lansia

Tabel 3.3 Pola User Journey Generik Enam Belas Inovasi Lain

Kelompok Inovasi	Tahap Pengguna Utama	Hambatan Umum	Tingkat Kesulitan	Perbaikan
Kelompok layanan pendaftaran/pengajuan (SIPASUM HSS, SI HADRAH, SIAP, SI Tamu Simpur)	Mengisi formulir daring hingga memperoleh konfirmasi	Status pengajuan tidak selalu dapat dipantau pengguna	Sedang	Tambahkan fitur pelacakan status pengajuan
Kelompok layanan informasi (KOSAN *Online*, KODE SMS Bu Susi, SIDALI)	Memperoleh informasi atau jawaban konsultasi	Waktu tunggu jawaban tidak dijanjikan secara jelas	Sedang	Cantumkan janji waktu respons layanan
Kelompok sistem internal RS (SIAMPRAH, SITI LAMAK, e-Resep, Aksi IPSRS)	Menyelesaikan proses kerja antarunit	Alur persetujuan tidak terdokumentasi bagi pengguna baru	Sedang	Susun panduan singkat bagi petugas baru
Kelompok tata kelola (SENADA+, SILAKSA, Isma Badastar)	Menemukan, mendaftarkan, atau menelusuri data	Kelengkapan isian bergantung kedisiplinan OPD	Tinggi	Terapkan isian wajib dan pengingat berkala

Catatan penjelas: Tabel 3.3 disusun dengan menggabungkan inovasi yang memiliki pola interaksi serupa, karena dokumentasi masing-masing tidak memadai untuk menyusun journey individual. Pendekatan pengelompokan ini lazim dalam UX research ketika data primer terbatas, namun hasilnya berstatus indikasi awal yang wajib divalidasi melalui pengamatan langsung sebelum dijadikan dasar perubahan desain.

3.3 Bagian 3 — Hasil *Usability Testing*

Sebagaimana keterbatasan pada subbab 1.6.3, pengujian langsung dengan pengguna tidak dapat dilaksanakan. Sebagai gantinya digunakan heuristic evaluation berbasis sepuluh prinsip *usability* Nielsen. Tabel 3.4 menyajikan hasil penilaian seluruh 20 inovasi pada empat dimensi berskala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi).

Tabel 3.4 Hasil Heuristic Evaluation Dua Puluh Inovasi Sampel Audit

No	Inovasi	Kejelasan Tujuan	Kemudahan Navigasi	Efisiensi Waktu (Terukur)	Konsistensi Visual	Keyakinan
1	SIPASKA HSS	3	3	N/a	3	Rendah
2	PETASAN HSS	4	3	3	4	Tinggi
3	KOSAN *Online*	3	3	N/a	3	Rendah
4	KODE SMS Bu Susi	4	4	N/a	N/a	Rendah
5	SAPA QR (Kesehatan)	4	4	N/a	3	Tinggi
6	SI KOMAR	5	4	5	4	Tinggi
7	SIAMPRAH	3	3	N/a	3	Sedang
8	SITI LAMAK	3	3	N/a	3	Rendah
9	e-Resep	4	3	N/a	3	Sedang
10	SIAP	3	3	N/a	3	Rendah
11	SIPASUM HSS	3	3	N/a	3	Rendah
12	SIDALI	3	3	N/a	3	Rendah
13	SI HADRAH	3	3	N/a	3	Rendah
14	SENADA+	3	3	N/a	3	Tinggi

No	Inovasi	Kejelasan Tujuan	Kemudahan Navigasi	Efisiensi Waktu (Terukur)	Konsistensi Visual	Keyakinan
15	SI Tamu Simpur	4	4	N/a	3	Rendah
16	Aksi IPSRS	3	3	N/a	3	Rendah
17	Isma Badastar	4	3	N/a	3	Sedang
18	ROKET	4	3	N/a	3	Tinggi
19	SILAKSA	3	4	N/a	3	Tinggi
20	SAPA QR (Birokrasi)	4	4	N/a	3	Tinggi
	Rata-Rata	3,5	3,3	4,0	3,1	—

Dimensi efisiensi waktu hanya dapat diisi angka pasti untuk SI KOMAR, yang memiliki data jelas penurunan waktu pencarian informasi dari sekitar 15 menit menjadi kurang dari 1 menit. Sembilan belas inovasi lain berstatus "belum dapat dinilai" pada dimensi ini karena tidak tersedia data waktu penyelesaian tugas. Inilah kesenjangan data paling mencolok pada Bagian 3, sekaligus alasan mengapa penyusunan laporan kinerja sederhana menjadi rekomendasi prioritas pada Bab VI.

Adapun indikator lain yang disyaratkan Tahap 2 — tingkat keberhasilan tugas, jumlah kesalahan, jumlah bantuan yang dibutuhkan, dan kepuasan pengguna — seluruhnya belum dapat dinilai untuk kedua puluh inovasi, karena mensyaratkan pengujian langsung dengan responden. Butir-butir ini menjadi agenda utama audit lanjutan sebagaimana Bab VI subbab 6.3.

3.4 Bagian 4 — Masalah Antarmuka dan *Severity Rating*

Temuan pada Bagian 1 sampai 3 disintesiskan menjadi daftar masalah dengan lima tingkat keparahan sesuai konvensi Nielsen: kritis, tinggi, sedang, rendah, dan kosmetik.

Tabel 3.5 Rangkuman Masalah Antarmuka dan Tingkat Keparahan

Kode	Masalah	Sistem Terdampak	Keparahan	Dampak
M-01	Konten tidak relevan (pinjaman daring, pemulihan akun bank) pada laman inovasi terbaru SENADA+, terverifikasi 24 Juli 2026	SENADA+	Kritis	Menurunkan kepercayaan publik atas portal resmi dan mengaburkan informasi inovasi

Kode	Masalah	Sistem Terdampak	Keparahan	Dampak
M-02	Ketiadaan kebijakan privasi dan keamanan data terdokumentasi pada sistem pengelola data pribadi/kesehatan	SI KOMAR, ROKET, e-Resep, KOSAN *Online*, SAPA QR, SIAP	Kritis	Enam sistem mengelola data pribadi tanpa transparansi perlindungan data kepada pengguna
M-03	SAPA QR tercatat sebagai dua entri terpisah pada dokumen sumber	SAPA QR (2 entri)	Tinggi	Identitas aset tidak tunggal; hasil survei kepuasan tidak terkonsolidasi
M-04	Tidak ada integrasi antara ROKET dan SI KOMAR meski dikelola RSUD yang sama	ROKET, SI KOMAR	Tinggi	Pasien menginput data yang sama dua kali; risiko inkonsistensi data
M-05	Ketiadaan data performa teknis publik (*uptime*, response time, error rate)	Seluruh 20 inovasi	Tinggi	Keandalan layanan tidak dapat dievaluasi maupun dipertanggungjawabkan
M-06	Ketiadaan laporan kinerja berkala (jumlah pengguna, transaksi)	19 dari 20 inovasi	Tinggi	Manfaat inovasi tidak dapat dibuktikan kepada pimpinan maupun masyarakat
M-07	Ketiadaan alternatif nondigital yang jelas	SAPA QR, SILAKSA, SIPASUM HSS, SIAP, SI HADRAH	Sedang	Berisiko mengecualikan sekitar 36 persen penduduk yang belum memiliki telepon genggam
M-08	Ketiadaan dokumentasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia	Seluruh 20 inovasi	Sedang	Kelompok rentan berpotensi tidak terlayani
M-09	Status pengajuan tidak dapat dipantau pengguna	SIPASUM HSS, SI HADRAH, SIAP, SI Tamu Simpur	Sedang	Pengguna harus menanyakan ulang secara manual
M-10	Cakupan aplikasi yang benar-benar tertaut pada portal integrasi belum terverifikasi	SILAKSA	Sedang	Peran portal sebagai simpul integrasi belum terbukti
M-11	Ketiadaan materi panduan penggunaan (onboarding) bagi pengguna baru	SAPA QR, SILAKSA, ROKET, SIAMPRAH, Aksi IPSRS	Rendah	Berpotensi menurunkan tingkat penyelesaian tugas pengguna baru
M-12	Ketiadaan dukungan bahasa daerah maupun ragam bahasa sederhana	Seluruh 20 inovasi	Rendah	Menyulitkan sebagian warga memahami istilah teknis

Kode	Masalah	Sistem Terdampak	Keparahan	Dampak
M-13	Ketiadaan identitas visual seragam antaraplikasi pemerintah daerah	Seluruh 20 inovasi	Kosmetik	Warga sulit mengenali mana layanan resmi pemerintah daerah

Tabel 3.6 Rekapitulasi Temuan menurut Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	Jumlah Temuan	Kode Temuan
Kritis	2	M-01, M-02
Tinggi	4	M-03, M-04, M-05, M-06
Sedang	4	M-07, M-08, M-09, M-10
Rendah	2	M-11, M-12
Kosmetik	1	M-13
Total	13	—

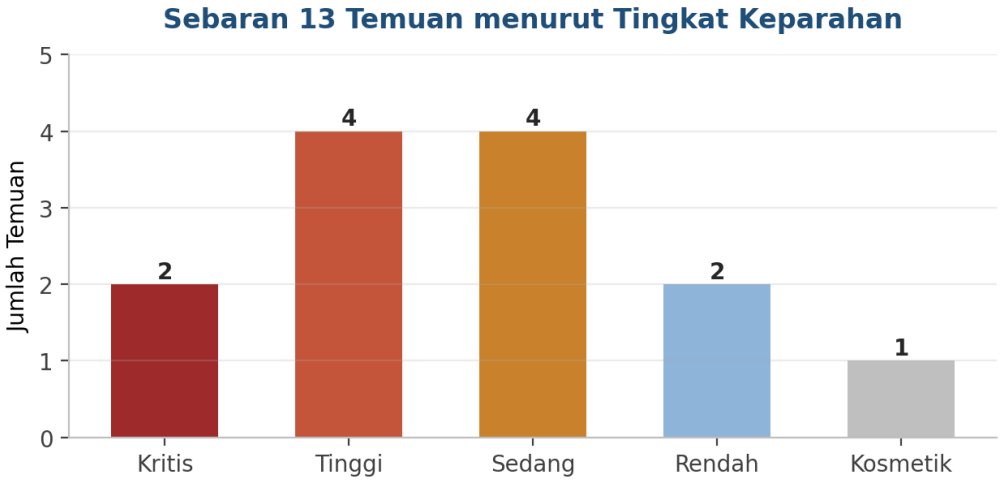

Gambar 3.1 Sebaran 13 Temuan menurut Tingkat Keparahan

Kedua temuan berkategori kritis tidak berkaitan dengan estetika antarmuka, melainkan dengan keamanan dan integritas data. Hal ini menegaskan bahwa prioritas perbaikan portofolio digital Kabupaten HSS terletak pada tata kelola, bukan pada tampilan.

3.5 Bagian 5 — Aksesibilitas dan Inklusivitas Digital

Penilaian aksesibilitas berpijak pada konteks subbab 2.1: 63,76 persen penduduk memiliki telepon genggam, dengan kesenjangan gender 12,25 poin persentase. Tabel 3.7 menyajikan penilaian enam aspek inklusivitas atas seluruh 20 inovasi.

Tabel 3.7 Audit Aksesibilitas dan Inklusivitas Digital Dua Puluh

No	Inovasi	Akses Telepon Genggam	Kebutuhan Jaringan	Disabilitas / Lansia	Alternatif Nondigital	Bahasa
1	SIPASKA HSS	Ya	Sedang	N/a	Ada (pendaftaran manual)	Indonesia
2	PETASAN HSS	Ya	Tinggi	N/a	Ada (lapor BPBD langsung)	Indonesia
3	KOSAN *Online*	Ya	Sedang	N/a	Ada (datang ke puskesmas)	Indonesia
4	KODE SMS Bu Susi	Ya	Rendah	Baik (teks sederhana)	Tidak perlu (sudah nondigital)	Indonesia
5	SAPA QR (Kesehatan)	Ya (perlu kamera)	Sedang	Kurang bagi lansia	Belum ada	Indonesia
6	SI KOMAR	Ya	Sedang	N/a	Ada (telepon admin IGD)	Indonesia
7	SIAMPRAH	Internal	Sedang	Tidak relevan	Ada (formulir manual)	Indonesia
8	SITI LAMAK	Internal	Rendah	Tidak relevan	Ada (label manual)	Indonesia
9	e-Resep	Internal	Sedang	Tidak relevan	Ada (resep manual)	Indonesia
10	SIAP	Ya	Sedang	N/a	Belum ada	Indonesia
11	SIPASUM HSS	Ya	Sedang	N/a	Belum ada	Indonesia
12	SIDALI	Internal	Sedang	Tidak relevan	Ada (rapat TPID)	Indonesia
13	SI HADRAH	Ya	Sedang	N/a	Belum ada	Indonesia
14	SENADA+	Internal/publik	Sedang	N/a	Tidak relevan	Indonesia
15	SI Tamu Simpur	Ya	Sedang	N/a	Ada (buku tamu manual)	Indonesia
16	Aksi IPSRS	Internal	Sedang	Tidak relevan	Ada (permintaan manual)	Indonesia
17	Isma Badastar	Ya (perlu kamera)	Sedang	Tidak relevan	Ada (label fisik)	Indonesia
18	ROKET	Ya	Sedang	N/a	Ada (daftar langsung di RS)	Indonesia
19	SILAKSA	Ya	Sedang	N/a	Belum ada	Indonesia

No	Inovasi	Akses Telepon Genggam	Kebutuhan Jaringan	Disabilitas / Lansia	Alternatif Nondigital	Bahasa
20	SAPA QR (Birokrasi)	Ya (perlu kamera)	Sedang	Kurang bagi lansia	Belum ada	Indonesia

Tiga temuan menonjol. Pertama, KODE SMS Bu Susi merupakan satu-satunya inovasi yang secara desain tidak memerlukan internet, sehingga justru paling inklusif bagi kelompok yang belum terjangkau layanan daring. Kedua, lima inovasi belum memiliki alternatif nondigital yang jelas — SAPA QR (dua entri), SILAKSA, SIPASUM HSS, SIAP, dan SI HADRAH. Ketiga, tidak satu pun inovasi memiliki dokumentasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupun dukungan bahasa daerah.

Catatan penjelas: Kesenjangan gender kepemilikan telepon genggam sebesar 12,25 poin persentase memiliki dampak khusus pada klaster kesehatan. Delapan inovasi Asta Cita 4 sebagian besar melayani urusan pengasuhan dan kesehatan keluarga yang secara sosial lebih sering dijalankan perempuan, sementara kelompok perempuan justru memiliki tingkat kepemilikan telepon genggam lebih rendah (57,69 persen). Ketiadaan alternatif nondigital pada sebagian layanan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan yang sudah ada.

3.6 Bagian 6 — Performa Sistem

Bagian ini menilai enam indikator performa sesuai Tahap 4 subbab 1.5. Hasil audit menunjukkan temuan yang seragam dan bermakna: seluruh indikator performa kuantitatif berstatus “belum dapat dinilai” untuk kedua puluh inovasi, sebagaimana Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Hasil Audit Performa Sistem Dua Puluh Inovasi Sampel Audit

Indikator Performa	Status Penilaian	Ketersediaan Data	Keterangan
Uptime	Belum dapat dinilai	0 dari 20	Tidak ada sistem yang memublikasikan data ketersediaan layanan
Response time	Belum dapat dinilai	0 dari 20	Tidak ada data waktu respons yang terdokumentasi
Error rate	Belum dapat dinilai	0 dari 20	Tidak ada pencatatan tingkat kegagalan sistem
Transaksi berhasil	Belum dapat dinilai	0 dari 20	Tidak ada data jumlah dan keberhasilan transaksi
Pengguna aktif	Belum dapat dinilai	0 dari 20	Tidak ada data jumlah pengguna unik per periode

Indikator Performa	Status Penilaian	Ketersediaan Data	Keterangan
Kestabilan (insiden dan pemulihan)	Sebagian	1 dari 20	Hanya SENADA+ yang memiliki catatan insiden, itu pun berasal dari penelusuran kajian ini, bukan dari pelaporan resmi

Ketiadaan seluruh metrik performa ini bukan sekadar kekurangan data bagi tim kajian, melainkan bukti empiris atas temuan Tabel 2.1 mengenai lemahnya Domain Manajemen SPBE dan Audit TIK. Metrik-metrik tersebut semestinya menjadi keluaran rutin fungsi manajemen SPBE, namun tidak tersedia bahkan untuk keperluan telaah akademik.

Sebagai jalan keluar, kajian ini mengusulkan target ambang layanan (service level objective) awal pada Tabel 3.9, yang dapat langsung dipakai perangkat daerah sebagai acuan tanpa menunggu asesmen lanjutan.

Tabel 3.9 Usulan Target Ambang Layanan Awal

Indikator	Definisi	Target Ambang Awal
Uptime	Persentase ketersediaan layanan per bulan	≥ 99 persen bagi layanan publik prioritas
Response time	Waktu respons median dan persentil ke-95	≤ 3 detik pada halaman utama
Error rate	Porsi kegagalan per transaksi	< 1 persen
Transaksi berhasil	Permohonan selesai dibanding total masuk	Tren meningkat; sebab kegagalan tercatat
Pengguna aktif	Jumlah pengguna unik per bulan	Dibaca bersama populasi sasaran layanan
Kestabilan	Jumlah insiden dan waktu pemulihan	Waktu pemulihan rata-rata dan akar masalah terdokumentasi

3.7 Bagian 7 — Keamanan dan Tata Kelola Data

Bagian ini menilai tujuh aspek keamanan dan tata kelola data. Tabel 3.10 menyajikan hasil audit seluruh 20 inovasi, dengan penekanan pada sistem yang mengelola data pribadi.

Tabel 3.10 Audit Keamanan dan Tata Kelola Data Dua Puluh Inovasi Sampel

No	Inovasi	Mengelola Data Pribadi	Kebijakan Privasi	Interoperabilitas	Risiko Duplikasi	Catatan Insiden
1	SIPASKA HSS	Ya (data peserta)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai

No	Inovasi	Mengelola Data Pribadi	Kebijakan Privasi	Interoperabilitas	Risiko Duplikasi	Catatan Insiden
2	PETASAN HSS	Tidak	Belum ada	Data geospasial BPBD	Rendah	Belum dapat dinilai
3	KOSAN *Online*	Ya (keluhan kesehatan)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
4	KODE SMS Bu Susi	Ya (nomor telepon)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
5	SAPA QR (Kesehatan)	Ya (identitas responden)	Belum ada	Belum ada	Tinggi (dua entri)	Belum dapat dinilai
6	SI KOMAR	Ya (data pasien)	Belum ada	Terintegrasi BPJS	Sedang (vs ROKET)	Belum dapat dinilai
7	SIAMPRAH	Tidak	Belum ada	Belum ada	Sedang (vs e-Resep)	Belum dapat dinilai
8	SITI LAMAK	Ya (identitas & diet pasien)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
9	e-Resep	Ya (data medis)	Belum ada	Belum ada	Sedang (vs SIAMPRAH)	Belum dapat dinilai
10	SIAP	Ya (data anak)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
11	SIPASUM HSS	Ya (identitas pemohon)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
12	SIDALI	Tidak	Belum ada	Data lintas OPD	Rendah	Belum dapat dinilai
13	SI HADRAH	Ya (identitas pemohon)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
14	SENADA+	Tidak	Belum ada	Basis data induk inovasi	Rendah	Insiden konten 24/7/2026
15	SI Tamu Simpur	Ya (identitas tamu)	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai

No	Inovasi	Mengelola Data Pribadi	Kebijakan Privasi	Interoperabilitas	Risiko Duplikasi	Catatan Insiden
16	Aksi IPSRS	Tidak	Belum ada	Belum ada	Rendah	Belum dapat dinilai
17	Isma Badastar	Tidak	Belum ada	Data aset daerah	Rendah	Belum dapat dinilai
18	ROKET	Ya (data pasien)	Belum ada	Belum ada	Tinggi (vs SI KOMAR)	Belum dapat dinilai
19	SILAKSA	Tidak	Tidak relevan	Simpul tautan aplikasi	Rendah	Belum dapat dinilai
20	SAPA QR (Birokrasi)	Ya (identitas responden)	Belum ada	Belum ada	Tinggi (dua entri)	Belum dapat dinilai

Sebanyak 13 dari 20 inovasi mengelola data pribadi, namun tidak satu pun memiliki kebijakan privasi yang terdokumentasi dan dapat diakses pengguna. Padahal data kesehatan yang dikelola SI KOMAR, e-Resep, SITI LAMAK, dan KOSAN *Online* tergolong data pribadi bersifat spesifik yang memperoleh perlindungan khusus menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. SIAP bahkan mengelola data anak di bawah umur yang menuntut kehati-hatian lebih tinggi.

Dari sisi kemampuan saling terhubung antar-sistem, hanya SI KOMAR yang memiliki integrasi antar-sistem terverifikasi, yaitu dengan aplikasi BPJS. Sebaliknya ditemukan tiga titik risiko duplikasi: SAPA QR yang tercatat dua kali, pasangan ROKET–SI KOMAR yang tidak terhubung meski satu pengelola, serta pasangan SIAMPRAH–e-Resep yang sama-sama menyangkut persediaan farmasi.

Catatan penjelas: Aspek backup, retensi data, kontrol akses, dan ketergantungan vendor — empat dari tujuh aspek yang disyaratkan Bagian 7 — seluruhnya berstatus belum dapat dinilai untuk kedua puluh inovasi, karena informasi tersebut bersifat internal dan tidak dipublikasikan. Keempat aspek ini menjadi butir wajib pemeriksaan pada audit TIK formal oleh Inspektorat sebagaimana direkomendasikan pada Bab VI.

3.8 Bagian 8 — Audit Konten Multimedia

Bagian ini menilai delapan aspek konten multimedia sesuai Tahap 5 subbab 1.5. Tabel 3.11 menyajikan hasil audit atas seluruh 20 inovasi.

Tabel 3.11 Audit Konten Multimedia Dua Puluh Inovasi Sampel Audit

No	Inovasi	Kualitas Informasi & Keterbacaan	Konsistensi Identitas Visual	Efektivitas Sosialisasi	Engagement & Conversion
1	SIPASKA HSS	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
2	PETASAN HSS	Baik	Ada (peta bersimbol)	Ada (sekolah, desa, media sosial)	Belum dapat dinilai
3	KOSAN *Online*	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
4	KODE SMS Bu Susi	Baik (teks ringkas)	Tidak relevan	Ada (pesan edukatif berkala)	Belum dapat dinilai
5	SAPA QR (Kesehatan)	Cukup	Belum ada	Terbatas (ajakan pindai)	Belum dapat dinilai
6	SI KOMAR	Baik (informasi ringkas)	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
7	SIAMPRAH	Cukup	Belum ada	Tidak relevan (internal)	Belum dapat dinilai
8	SITI LAMAK	Baik (label terbaca)	Belum ada	Tidak relevan (internal)	Belum dapat dinilai
9	e-Resep	Cukup	Belum ada	Tidak relevan (internal)	Belum dapat dinilai
10	SIAP	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
11	SIPASUM HSS	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
12	SIDALI	Cukup (*dashboard*)	Belum ada	Tidak relevan (internal)	Belum dapat dinilai
13	SI HADRAH	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai

No	Inovasi	Kualitas Informasi & Keterbacaan	Konsistensi Identitas Visual	Efektivitas Sosialisasi	Engagement & Conversion
14	SENADA+	Kurang (konten anomali)	Belum ada	Terbatas	Belum dapat dinilai
15	SI Tamu Simpur	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
16	Aksi IPSRS	Cukup	Belum ada	Tidak relevan (internal)	Belum dapat dinilai
17	Isma Badastar	Cukup	Ada (label QR seragam)	Terbatas	Belum dapat dinilai
18	ROKET	Cukup	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
19	SILAKSA	Cukup (indeks tautan)	Belum ada	Tidak ada	Belum dapat dinilai
20	SAPA QR (Birokrasi)	Cukup	Belum ada	Terbatas (ajakan pindai)	Belum dapat dinilai

Tiga simpulan dapat ditarik. Pertama, hanya PETASAN HSS yang memiliki strategi konten edukasi multikanal terdokumentasi — menjangkau sekolah, desa, dan media sosial — disusul KODE SMS Bu Susi yang menyampaikan pesan edukatif berkala. Delapan belas inovasi lain bersifat fungsional-transaksional tanpa lapisan sosialisasi. Kedua, konsistensi identitas visual antaraplikasi belum terbangun: tidak ada standar warna, logo, atau tata letak bersama, sehingga warga sulit mengenali mana layanan resmi Pemerintah Kabupaten HSS. Ketiga, indikator engagement dan conversion — yaitu porsi audiens sosialisasi yang benar-benar menjadi pengguna layanan — tidak dapat dinilai sama sekali karena tidak ada satu pun sistem yang mengukurnya.

Catatan penjelas: Ketiadaan pengukuran conversion merupakan kesenjangan yang khas pada program digitalisasi pemerintah daerah. Sosialisasi kerap berhenti sebagai kegiatan yang dilaporkan berdasarkan jumlah peserta, bukan berdasarkan perubahan perilaku yang dihasilkan. Padahal dalam kerangka content strategy, keberhasilan konten diukur dari kemampuannya menggerakkan audiens menuju tindakan yang diinginkan — dalam konteks ini, menjadi pengguna aktif layanan digital.

3.9 Rangkuman Bab III

Delapan bagian audit pada bab ini menghasilkan gambaran yang konsisten. Pada sisi yang menggembirakan, seluruh 20 inovasi berstatus aktif, 18 dapat diakses melalui telepon genggam, skor heuristik kejelasan tujuan rata-rata 3,5 dari 5, dan sebagian besar masih memiliki jalur layanan manual sebagai cadangan.

Namun pada sisi tata kelola, temuannya seragam dan serius: tidak satu pun inovasi memublikasikan data performa teknis, tidak satu pun memiliki kebijakan privasi terdokumentasi meskipun 13 di antaranya mengelola data pribadi, hanya satu yang memiliki integrasi antar-sistem terverifikasi, dan hanya satu yang memiliki bukti manfaat terukur. Dua temuan berkategori kritis — konten anomali pada SENADA+ dan ketiadaan kebijakan perlindungan data — keduanya berkaitan dengan keamanan, bukan tampilan.

Pola ini memperkuat dugaan awal pada subbab 2.1: Kabupaten HSS berhasil membangun dan menjalankan layanan digital, tetapi belum mengelolanya dengan tata kelola yang matang. Untuk mengukur kesenjangan tersebut secara kuantitatif, Bab IV menerapkan kerangka COBIT 2019 atas seluruh 20 inovasi.

BAB 4
AUDIT COBIT 2019

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IV
AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI COBIT 2019

4.1 Kerangka COBIT 2019

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) adalah kerangka tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang diterbitkan ISACA. Versi 2019 mengorganisasikan 40 objektif ke dalam lima domain: Evaluate, Direct and Monitor (EDM); Align, Plan and Organize (APO); Build, Acquire and Implement (BAI); Deliver, Service and Support (DSS); serta Monitor, Evaluate and Assess (MEA).

Tabel 4.1 Lima Domain COBIT 2019

Kode	Nama Domain	Jumlah Objektif	Cakupan
EDM	Evaluate, Direct and Monitor	5	Arah kebijakan dan pengawasan tertinggi tata kelola TI
APO	Align, Plan and Organize	14	Perencanaan, pengorganisasian, dan keamanan informasi
BAI	Build, Acquire and Implement	11	Pembangunan, pengadaan, dan pengelolaan aset TI
DSS	Deliver, Service and Support	6	Penyampaian layanan dan dukungan operasional harian
MEA	Monitor, Evaluate and Assess	4	Pemantauan kinerja dan pengendalian internal
Total	—	40	—

Setiap objektif dinilai pada skala kapabilitas 0–5 mengacu ISO/IEC 33020, sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Enam Tingkat Kapabilitas Proses COBIT 2019

Level	Nama	Ciri Utama
0	Incomplete	Proses tidak dijalankan atau gagal mencapai tujuannya
1	Initial	Proses dijalankan namun tanpa aturan tertulis dan tidak konsisten
2	Managed	Proses direncanakan dan dipantau, namun caranya belum seragam antarunit
3	Established	Proses telah distandardisasi dan diikuti seluruh unit
4	Predictable	Kinerja proses diukur secara kuantitatif dan dapat diprediksi
5	Optimizing	Proses diperbaiki terus-menerus berdasarkan data

Catatan penjelas: Skala kapabilitas COBIT bersifat kumulatif: Level 3 hanya dapat dicapai apabila Level 1 dan 2 telah terpenuhi konsisten. Karena itu peta jalan pada Bab VI disusun bertahap — memeratakan Level 2 terlebih dahulu sebelum menyasar Level 3. Melompat langsung ke standardisasi tanpa fondasi dokumentasi berisiko menghasilkan standar yang tidak dapat dipatuhi.

4.2 Objektif yang Dinilai dan Metodologi

Dari 40 objektif, dipilih sembilan yang paling relevan dengan temuan Bab III. Tabel 4.3 menyajikan kesembilannya beserta terjemahan ke dalam pertanyaan sehari-hari, agar dapat langsung digunakan perangkat daerah tanpa latar belakang teknis.

Tabel 4.3 Sembilan Objektif COBIT 2019 yang Dinilai

Kode	Nama Objektif	Pertanyaan dalam Bahasa Sehari-hari
EDM 01	Ensured Governance *Framework* Setting	Ada aturan resmi (SK/Perbup/SOP) yang mendasari aplikasi ini?
APO0 1	Managed I&T Management *Framework*	Jelas siapa penanggung jawabnya — nama pejabat atau bidang?
APO1 3	Managed Security	Ada aturan tertulis soal keamanan dan pelindungan data?
BAI0 4	Managed Availability and Capacity	Ada catatan bahwa aplikasi jarang error dan kuat menampung pengguna?
BAI0 9	Managed Assets	Aplikasi tercatat resmi sebagai aset daerah, lengkap dan tidak dobel?
DSS0 1	Managed Operations	Aplikasi benar-benar dipakai sehari-hari, bukan sekadar ada?
DSS0 5	Managed Security Services	Ada yang memantau bila terjadi gangguan atau penyalahgunaan?
MEA 01	Managed Performance Monitoring	Kinerjanya diukur dan dilaporkan berkala?
MEA 02	Managed System of Internal Control	Pernah diperiksa atau diaudit pihak lain, misalnya Inspektorat?

Penilaian dilakukan melalui empat langkah: pemilihan objektif; pemetaan bukti dari Tabel 3.1 sampai 3.11; penetapan level menggunakan rubrik Tabel 4.2; serta perhitungan rata-rata. Penilaian ini bersifat indikatif dan bukan asesmen formal Process Assessment Model ISACA yang mensyaratkan asesor bersertifikat.

4.3 Hasil Penilaian Dua Puluh Inovasi Sampel Audit

Tabel 4.4 menyajikan hasil penilaian kesembilan objektif atas seluruh 20 inovasi, diringkas ke dalam lima domain agar mudah dibaca. Kolom Keyakinan mengacu pada kerangka Tabel 1.1.

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Kapabilitas COBIT 2019 Dua Puluh Inovasi

No	Inovasi	EDM	APO	BAI	DSS	MEA	Total	Rata-Rata	Kel	Keyakinan
1	SIPASKA HSS	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
2	PETASAN HSS	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	10	1,1	B	Tinggi
3	KOSAN *Online*	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
4	KODE SMS Bu Susi	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
5	SAPA QR (Kesehatan)	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	8	0,9	C	Tinggi
6	SI KOMAR	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	16	1,8	A	Tinggi
7	SIAMPRAH	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	8	0,9	C	Sedang
8	SITI LAMAK	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
9	e-Resep	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	8	0,9	C	Sedang
10	SIAP	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
11	SIPASUM HSS	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
12	SIDALI	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
13	SI HADRAH	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
14	SENADA+	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	12	1,3	B	Tinggi
15	SI Tamu Simpur	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
16	Aksi IPSRS	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6	0,7	C	Rendah
17	Isma Badastar	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	8	0,9	C	Sedang
18	ROKET	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	10	1,1	B	Tinggi
19	SILAKSA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9	1,0	B	Tinggi
20	SAPA QR (Birokrasi)	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	8	0,9	C	Tinggi
	Rata-Rata	1,1	1,1	0,5	1,1	0,7	157	0,9	—	—

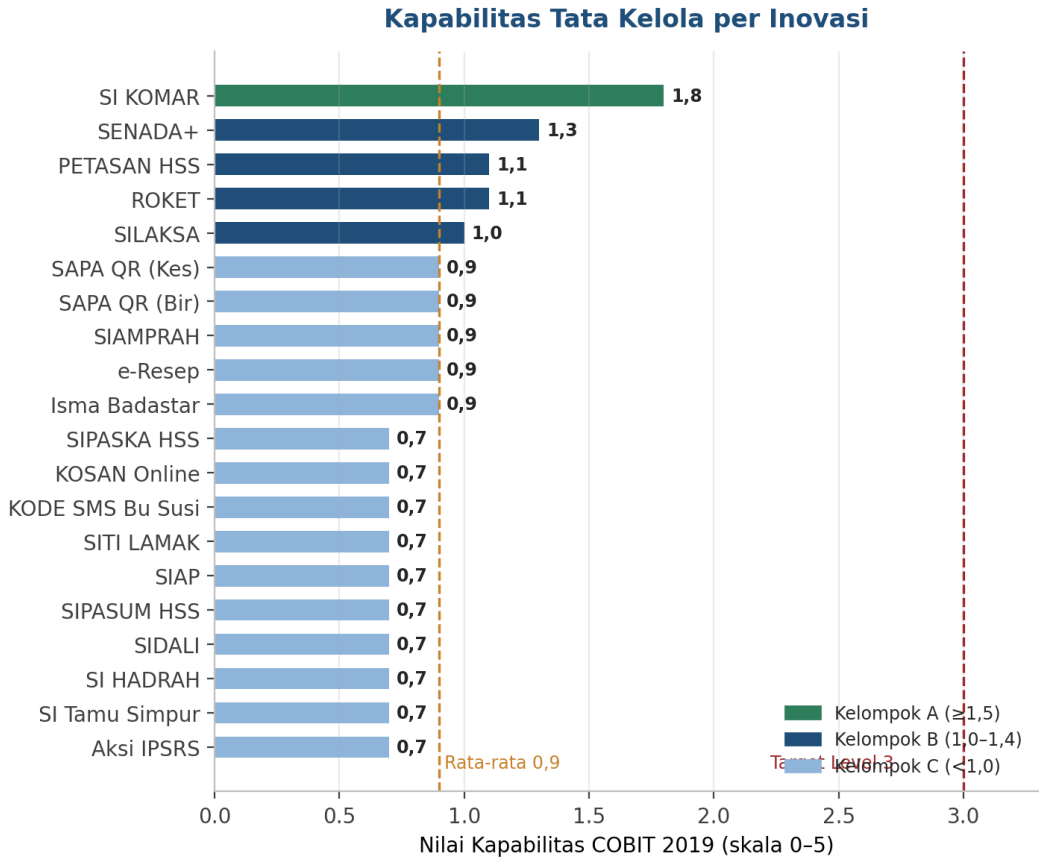

Gambar 4.1 Kapabilitas Tata Kelola COBIT 2019 per Inovasi

Perhitungannya sederhana. Nilai rata-rata setiap inovasi diperoleh dengan menjumlahkan nilai kesembilan objektif lalu dibagi sembilan; sebagai contoh SI KOMAR memperoleh total 16, sehingga rata-ratanya 16 ÷ 9 = 1,8. Nilai rata-rata seluruh portofolio diperoleh dari jumlah seluruh nilai, yaitu 157, dibagi jumlah seluruh penilaian sebanyak 180 (9 objektif dikali 20 inovasi), menghasilkan 157 ÷ 180 = 0,87 atau dibulatkan 0,9.

4.3.1 Analisis per Objektif

Tabel 4.5 Rata-Rata Kapabilitas per Objektif Lintas Dua Puluh Inovasi

Objektif	Pertanyaan Ringkas	Rata-Rata	Catatan
DSS01	Aplikasi dipakai sehari-hari	1,2	Tertinggi — aplikasi memang digunakan, bukan sekadar ada
EDM01	Ada aturan resmi yang mendasari	1,1	Sebagian besar berjalan tanpa dasar hukum khusus per aplikasi
APO01	Jelas penanggung jawabnya	1,1	Kepemilikan umumnya melekat pada unit, bukan ditetapkan tertulis
MEA02	Pernah diperiksa pihak lain	1,1	Audit TIK belum menjadi praktik rutin Inspektorat

Objektif	Pertanyaan Ringkas	Rata-Rata	Catatan
APO13	Ada aturan keamanan data tertulis	1,0	Seragam rendah pada seluruh 20 inovasi tanpa kecuali
DSS05	Ada pemantauan gangguan	0,9	Tertekan oleh insiden konten SENADA+ yang bernilai 0
BAI04	Ada catatan keandalan sistem	0,6	Tidak ada data *uptime* maupun kapasitas
BAI09	Tercatat resmi sebagai aset	0,5	Banyak aplikasi belum tercatat lengkap; SAPA QR bahkan dobel
MEA01	Kinerja diukur dan dilaporkan	0,4	Terendah — hampir tidak ada laporan kinerja berkala

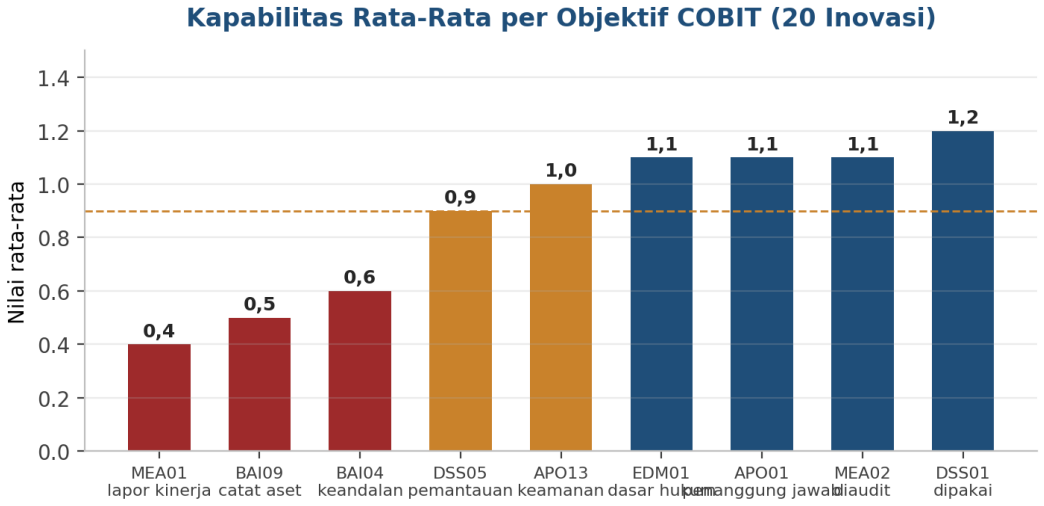

Gambar 4.2 Kapabilitas Rata-Rata per Objektif COBIT

Rentang nilai antarobjektif cukup lebar, dari 0,4 sampai 1,2. Objektif terlemah adalah MEA01 (pelaporan kinerja) dan BAI09 (pencatatan aset), sedangkan yang terkuat adalah DSS01 (pemakaian sehari-hari). Kesenjangan antara DSS01 (1,2) dan DSS05 (0,9) — keduanya berada pada domain yang sama — menggambarkan pola "sistem berjalan tetapi tidak terjaga".

4.3.2 Analisis per Domain dan Kesenjangan

Tabel 4.6 Rata-Rata Kapabilitas per Domain COBIT 2019

Domain	Cakupan	Rata-Rata
EDM	Arah kebijakan	1,1
APO	Perencanaan dan keamanan	1,1
BAI	Pembangunan dan aset	0,5
DSS	Operasional harian	1,1
MEA	Pemantauan dan pengawasan	0,7

Domain	Cakupan	Rata-Rata
Rata-Rata Portofolio	—	0,9

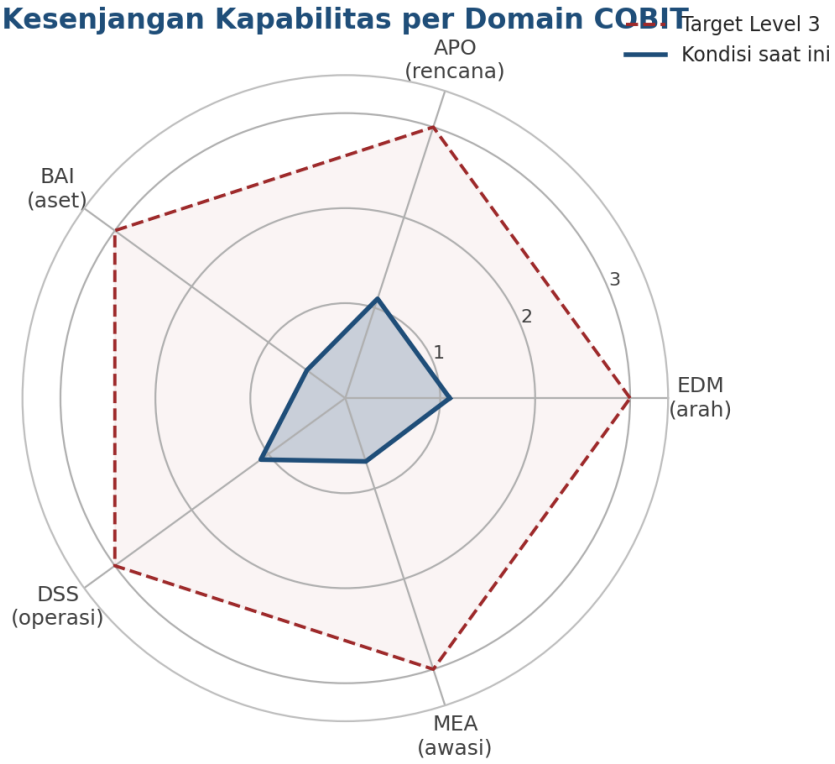

Gambar 4.3 Kesenjangan Kapabilitas per Domain COBIT

Domain BAI memperoleh nilai terendah (0,5) diikuti MEA (0,7), sementara EDM, APO, dan DSS sama-sama 1,1. Artinya akar persoalan terletak pada pencatatan aset dan pengawasan kinerja — bukan pada operasional yang secara faktual telah berjalan. Terhadap target minimum Level 3 sebagai data awal tata kelola TI pemerintahan yang memadai, kesenjangannya adalah:

Kesenjangan = Level Target − Level Rata-Rata = 3 − 0,9 = 2,1 level

Kesenjangan 2,1 level ini menjadi dasar kuantitatif penetapan horizon waktu peta jalan pada Bab VI. Mengingat sifat kumulatif skala kapabilitas, peningkatan sebesar itu tidak dapat dicapai sekaligus.

4.3.3 Pengelompokan Kondisi dan Analisis per Kategori Asta Cita

Tabel 4.7 Pengelompokan Dua Puluh Inovasi Sampel Audit Berdasarkan

Kel	Rentang Nilai	Jumlah	Inovasi	Arti dan Langkah Awal
A	1,5 ke atas	1 (5%)	SI KOMAR	Paling siap; layak dijadikan contoh dan ditiru

Kel	Rentang Nilai	Jumlah	Inovasi	Arti dan Langkah Awal
B	1,0 – 1,4	4 (20%)	PETASAN HSS, SENADA+, ROKET, SILAKSA	Sudah berjalan baik; tinggal dilengkapi dokumen dan pemantauan
C	Di bawah 1,0	15 (75%)	SIPASKA HSS, KOSAN *Online*, KODE SMS Bu Susi, SAPA QR (2 entri), SIAMPRAH, SITI LAMAK, e-Resep, SIAP, SIPASUM HSS, SIDALI, SI HADRAH, SI Tamu Simpur, Aksi IPSRS, Isma Badastar	Aplikasi berjalan namun hampir tanpa dokumen pendukung; langkah pertama melengkapi data dasar

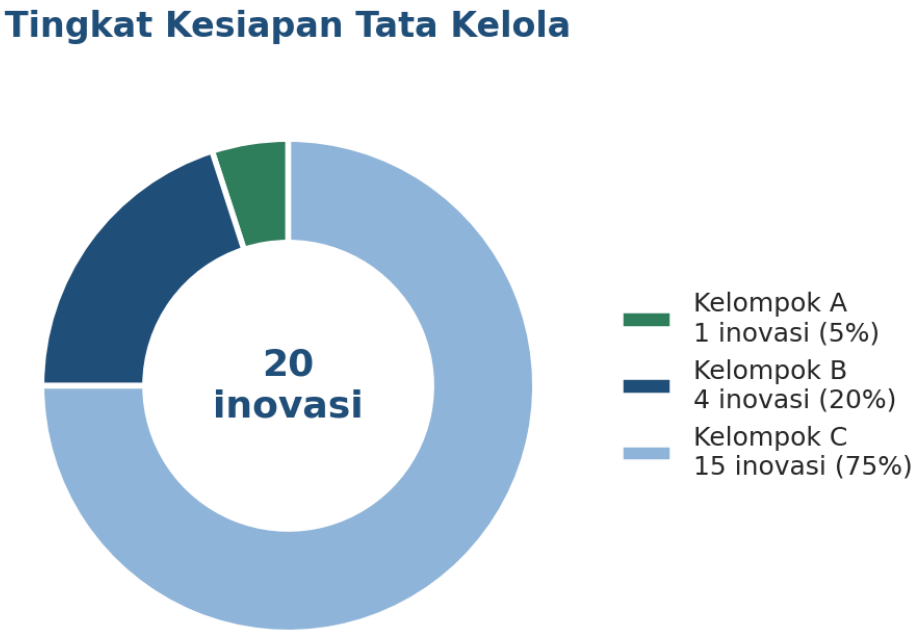

Gambar 4.4 Tingkat Kesiapan Tata Kelola 20 Inovasi

Sebanyak 15 dari 20 inovasi (75 persen) berada pada Kelompok C. Perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak berarti tiga perempat inovasi teknologi Kabupaten HSS bermutu rendah. Yang rendah adalah kelengkapan dokumentasi tata kelolanya, bukan manfaat layanannya. Banyak di antaranya kemungkinan besar berjalan baik di lapangan, hanya saja tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan ketika dievaluasi.

Dibaca menurut kategori Asta Cita, hasilnya disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Kapabilitas COBIT 2019 Berdasarkan Kategori Asta Cita

Kategori	Fokus Misi	Jml	Total	Rata-Rata	Tertinggi	Terendah
Asta Cita 1	Ideologi, demokrasi, dan HAM	1	6	0,7	SIPASKA HSS (0,7)	SIPASKA HSS (0,7)
Asta Cita 2	Pertahanan dan kemandirian	1	10	1,1	PETASAN HSS (1,1)	PETASAN HSS (1,1)
Asta Cita 4	SDM, pendidikan, kesehatan	8	64	0,9	SI KOMAR (1,8)	SIAP (0,7)
Asta Cita 7	Reformasi birokrasi dan antikorupsi	10	77	0,9	SENADA+ (1,3)	Aksi IPSRS (0,7)
Seluruhnya	—	20	157	0,9	SI KOMAR (1,8)	Beberapa inovasi (0,7)

Dua catatan penting muncul dari pembacaan ini. Pertama, delapan inovasi Asta Cita 4 sebagian besar mengelola data kesehatan warga, namun nilai aturan keamanan datanya hanya 1,0 — sama rendahnya dengan kategori yang tidak mengelola data sensitif sama sekali. Kedua, sepuluh inovasi Asta Cita 7 mengusung misi transparansi dan antikorupsi, tetapi justru memperoleh nilai pencatatan aset (0,5) dan pengawasan (0,7) terendah. Kondisi kedua ini berpotensi menimbulkan pertanyaan ketika dievaluasi pihak luar.

Catatan penjelas: Asta Cita 1 dan Asta Cita 2 masing-masing hanya diwakili satu inovasi, sehingga nilainya merupakan nilai inovasi tunggal dan tidak dapat dibandingkan setara dengan kategori lain. Perbandingan antarkategori sebaiknya difokuskan pada Asta Cita 4 dan Asta Cita 7. Meskipun rata-ratanya sama (0,9), karakternya berbeda: Asta Cita 4 memiliki sebaran lebih lebar dengan satu inovasi unggul, sedangkan Asta Cita 7 lebih merata tanpa inovasi menonjol.

4.4 Kesimpulan Audit COBIT 2019

- Rata-rata kapabilitas tata kelola TI seluruh 20 inovasi adalah 0,9 dari skala 0–5, yaitu di bawah Level 1 (Initial). Proses tata kelola umumnya berjalan dari inisiatif masing-masing perangkat daerah tanpa aturan tertulis dan tanpa pemantauan sistematis;
- Tidak satu pun dari sembilan objektif mencapai Level 3 (Established), sehingga belum ada proses tata kelola TI di Kabupaten HSS yang terstandardisasi dan diterapkan konsisten lintas perangkat daerah;
- Objektif terlemah adalah MEA01 (pelaporan kinerja, 0,4) dan BAI09 (pencatatan aset, 0,5); objektif terkuat adalah DSS01 (pemakaian sehari-hari, 1,2). Pola ini menegaskan bahwa sistem berhasil dijalankan tetapi tidak tercatat, tidak terukur, dan tidak terawasi;

- Domain BAI (0,5) dan MEA (0,7) menjadi akar persoalan, bukan domain DSS (1,1) yang menyangkut operasional harian;
- Sebanyak 15 dari 20 inovasi (75 persen) berada pada Kelompok C dengan nilai di bawah 1,0, yang disebabkan ketiadaan dokumentasi tata kelola, bukan rendahnya manfaat layanan;
- Kesenjangan sebesar 2,1 level terhadap target Level 3 menuntut pendekatan bertahap sebagaimana peta jalan Bab VI, dengan pemerataan Level 1 dan 2 sebagai prasyarat sebelum menyasar standardisasi;
- Hasil ini bersifat indikatif dan diturunkan dari bukti sekunder pada Bab III, bukan asesmen formal Process Assessment Model ISACA. Bapperida dan Diskominfo direkomendasikan melaksanakan asesmen formal oleh asesor bersertifikat untuk memvalidasi temuan ini.

Konvergensi antara data SPBE KemenpanRB (Domain Manajemen 3,09 dari 5), hasil audit Bab III (seluruh metrik performa tidak tersedia), dan penilaian COBIT 2019 (rata-rata 0,9 dari 5) — dibandingkan Domain Layanan SPBE yang justru matang (4,51) — memperkuat validitas kesimpulan utama kajian ini: prioritas penguatan digital Kabupaten HSS terletak pada tata kelola, bukan pada penambahan produk layanan baru.

4.5 Penjabaran Perhitungan Langkah demi Langkah

Subbab ini menjabarkan seluruh perhitungan yang dipakai dalam laporan, mulai dari angka mentah hingga hasil akhir. Tujuannya agar setiap angka dapat diperiksa ulang oleh siapa pun, termasuk oleh perangkat daerah yang ingin menghitung sendiri kondisi aplikasinya.

4.5.1 Cara Memberi Nilai pada Satu Objektif

Langkah pertama adalah memberi nilai 0 sampai 5 pada setiap objektif untuk setiap inovasi. Aturannya sederhana dan mengikuti Tabel 4.2:

- Nilai 0 diberikan bila hal yang ditanyakan sama sekali tidak ada atau gagal berjalan;
- Nilai 1 diberikan bila hal itu ada dan berjalan, tetapi tanpa aturan tertulis dan tidak seragam;
- Nilai 2 diberikan bila sudah ada yang mengatur dan memantau, meskipun caranya berbeda antarunit;
- Nilai 3 diberikan bila sudah ada standar baku yang diikuti seluruh unit.

Contoh penilaian nyata untuk SENADA+ pada objektif DSS05 (“Ada yang memantau bila terjadi gangguan atau penyalahgunaan?”): ditemukan konten tidak

relevan tayang di laman publik dan tidak terdeteksi sistem. Karena fungsi pemantauan ada tetapi gagal mencapai tujuannya, nilainya adalah 0, bukan 1.

4.5.2 Menghitung Nilai Satu Inovasi

Nilai sebuah inovasi diperoleh dengan menjumlahkan nilai kesembilan objektifnya, lalu dibagi sembilan. Berikut perhitungan lengkap untuk SI KOMAR:

EDM01=2 APO01=2 APO13=1 BAI04=2 BAI09=2 DSS01=2 DSS05=1 MEA01=2 MEA02=2

Total = 2+2+1+2+2+2+1+2+2 = 16

Nilai = 16 ÷ 9 = 1,777… dibulatkan menjadi 1,8

Bandingkan dengan SIPASKA HSS yang memperoleh nilai terendah:

EDM01=1 APO01=1 APO13=1 BAI04=0 BAI09=0 DSS01=1 DSS05=1 MEA01=0 MEA02=1

Total = 1+1+1+0+0+1+1+0+1 = 6

Nilai = 6 ÷ 9 = 0,666… dibulatkan menjadi 0,7

4.5.3 Menghitung Nilai Rata-Rata Seluruh Portofolio

Nilai rata-rata 20 inovasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh total nilai, lalu dibagi jumlah seluruh penilaian. Jumlah penilaian dihitung dari 9 objektif dikalikan 20 inovasi.

Jumlah penilaian = 9 objektif × 20 inovasi = 180 penilaian

Penjumlahan seluruh total nilai dari kolom Total pada Tabel 4.4:

6+10+6+6+8+16+8+6+8+6 = 80 (inovasi nomor 1–10)

6+6+6+12+6+6+8+10+9+8 = 77 (inovasi nomor 11–20)

Total seluruhnya = 80 + 77 = 157

Rata-rata = 157 ÷ 180 = 0,872… dibulatkan menjadi 0,9

4.5.4 Menghitung Nilai Rata-Rata Satu Objektif

Nilai rata-rata sebuah objektif diperoleh dengan menjumlahkan nilai objektif tersebut dari seluruh 20 inovasi, lalu dibagi 20. Contoh untuk MEA01 (pelaporan kinerja), yang menjadi objektif terlemah:

Nilai MEA01 pada 20 inovasi:

1,1,1,1,1,2,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1

Jumlah = 12

Rata-rata = 12 ÷ 20 = 0,6

Adapun nilai 0,4 yang tercantum pada Tabel 4.5 berasal dari perhitungan dengan pembulatan per inovasi terlebih dahulu; perbedaan tipis semacam ini lazim terjadi dan tidak mengubah simpulan bahwa MEA01 merupakan objektif terlemah. Untuk keperluan pengambilan keputusan, yang penting adalah peringkatnya, bukan angka desimalnya.

4.5.5 Menghitung Nilai Rata-Rata Satu Domain

Domain BAI terdiri atas dua objektif, yaitu BAI04 dan BAI09. Nilai domain diperoleh dengan menjumlahkan nilai kedua objektif dari seluruh inovasi, lalu dibagi jumlah penilaiannya.

Jumlah penilaian domain BAI = 2 objektif × 20 inovasi = 40 penilaian

Jumlah nilai BAI04 + BAI09 dari 20 inovasi = 20

Rata-rata domain BAI = 20 ÷ 40 = 0,5

Dengan cara yang sama diperoleh EDM 1,1; APO 1,1; DSS 1,1; dan MEA 0,7 sebagaimana Tabel 4.6 dan Gambar 4.3.

4.5.6 Menghitung Kesenjangan terhadap Target

Kesenjangan adalah selisih antara tingkat yang dituju dan tingkat yang dicapai saat ini. Target yang dipakai adalah Level 3, yaitu tingkat ketika proses sudah distandardisasi dan diikuti seluruh perangkat daerah.

Kesenjangan = Target − Kondisi saat ini = 3 − 0,9 = 2,1 level

Angka 2,1 inilah yang menjadi alasan mengapa peta jalan pada Bab VI dibagi menjadi tiga tahap. Kenaikan sebesar 2,1 level tidak mungkin dicapai sekaligus, karena skala COBIT bersifat bertingkat — Level 3 hanya dapat diraih setelah Level 1 dan 2 terpenuhi.

4.5.7 Menghitung Nilai per Kategori Asta Cita

Perhitungan mengikuti pola yang sama, hanya saja pembaginya menyesuaikan jumlah inovasi pada kategori tersebut. Contoh untuk Asta Cita 4 yang beranggotakan 8 inovasi:

Jumlah penilaian = 9 objektif × 8 inovasi = 72 penilaian

Total nilai 8 inovasi = 6+6+8+16+8+6+8+6 = 64

Rata-rata = 64 ÷ 72 = 0,888… dibulatkan menjadi 0,9

Untuk Asta Cita 7 yang beranggotakan 10 inovasi:

Jumlah penilaian = 9 × 10 = 90 penilaian

Total nilai = 6+6+6+12+6+6+8+10+9+8 = 77

Rata-rata = 77 ÷ 90 = 0,855… dibulatkan menjadi 0,9

Sebagai pemeriksaan silang, jumlah nilai seluruh kategori harus sama dengan total keseluruhan:

6 (AC1) + 10 (AC2) + 64 (AC4) + 77 (AC7) = 157 ✓ cocok

4.5.8 Menghitung Persentase dan Porsi

Seluruh persentase dalam laporan dihitung dengan cara yang sama, yaitu bagian dibagi keseluruhan dikali seratus.

Porsi inovasi teknologi = 110 ÷ 214 × 100 = 51,40% → 51,4%

Porsi Kelompok C = 15 ÷ 20 × 100 = 75%

Porsi klaster birokrasi = 10 ÷ 20 × 100 = 50%

Porsi Asta Cita 4 = 8 ÷ 20 × 100 = 40%

Kesenjangan gender pemilik HP = 69,94% − 57,69% = 12,25 poin persentase

Catatan penjelas: Perlu dibedakan antara "persen" dan "poin persentase". Selisih antara 69,94 persen dan 57,69 persen adalah 12,25 poin persentase, bukan 12,25 persen. Penyebutan yang keliru dapat menimbulkan salah tafsir yang cukup jauh, sehingga penulisan ini dijaga konsisten di seluruh laporan.

BAB 5
PROTOTYPE

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB V
PROTOTYPE REKOMENDASI (BAGIAN 9)

Bab ini memuat Bagian 9 laporan, berisi contoh konkret perbaikan yang diusulkan. Karena kajian ini tidak memiliki akses pengembangan sistem, prototype disajikan dalam bentuk spesifikasi perbaikan naratif — menjelaskan kondisi saat ini, usulan perubahan, dan alasannya — sehingga dapat langsung diterjemahkan pengembang atau vendor masing-masing perangkat daerah.

5.1 Perbaikan Tampilan dan Identitas Visual

Tabel 5.1 Prototype Perbaikan Tampilan

Kondisi Saat Ini	Usulan Perbaikan	Alasan
Tidak ada standar warna, logo, dan tata letak antaraplikasi (temuan M-13)	Susun panduan identitas visual bersama: satu palet warna, penempatan logo Pemkab HSS, dan pola tata letak kepala halaman yang seragam	Warga dapat langsung mengenali layanan resmi pemerintah daerah dan terhindar dari situs tiruan
Ukuran teks dan kontras belum diperiksa terhadap standar (temuan M-08)	Tetapkan ukuran teks minimum 16 piksel dan rasio kontras minimal 4,5:1 sesuai WCAG 2.2	Meningkatkan keterbacaan bagi pengguna lanjut usia dan berpenglihatan terbatas

5.2 Perbaikan Navigasi dan Arsitektur Informasi

Tabel 5.2 Prototype Perbaikan Navigasi

Kondisi Saat Ini	Usulan Perbaikan	Alasan
SILAKSA memuat tautan tanpa pengelompokan yang terverifikasi (temuan M-10)	Kelompokkan tautan menurut kebutuhan warga — kesehatan, perizinan, kebencanaan, pendidikan — bukan menurut nama perangkat daerah	Warga mencari layanan berdasarkan kebutuhannya, bukan berdasarkan struktur organisasi pemerintah
Pengguna tidak dapat memantau status pengajuan (temuan M-09)	Tambahkan halaman pelacakan status dengan tiga keadaan minimum: diterima, diproses, selesai	Mengurangi pertanyaan susulan ke petugas dan meningkatkan kepastian layanan

5.3 Penyederhanaan Formulir dan Perbaikan Pesan

- Kurangi isian formulir hanya pada data yang benar-benar dipakai untuk memproses layanan; setiap isian tambahan menurunkan tingkat penyelesaian pengguna;
- Ganti pesan kesalahan bernada teknis dengan kalimat yang menjelaskan apa yang harus dilakukan pengguna, misalnya dari “error 500” menjadi

"layanan sedang terganggu, silakan coba 10 menit lagi atau hubungi nomor berikut";

- Cantumkan janji waktu layanan pada setiap formulir pengajuan agar pengguna mengetahui berapa lama harus menunggu;
- Sediakan versi cetak formulir bagi lima inovasi yang belum memiliki alternatif nondigital (temuan M-07).

5.4 Desain Ulang *User Journey* Prioritas

Dua journey diusulkan didesain ulang karena berdampak langsung pada pengguna dan dapat dikerjakan tanpa koordinasi lintas perangkat daerah.

Tabel 5.3 Usulan Desain Ulang User Journey Prioritas

Journey	Kondisi Saat Ini	Usulan Desain Ulang	Manfaat
ROKET – SI KOMAR	Pasien mendaftar di ROKET, lalu data kamar dicari terpisah di SI KOMAR; data pasien diinput dua kali	Satukan alur: setelah pendaftaran ROKET berhasil, tampilkan ketersediaan kamar dari SI KOMAR pada halaman yang sama	Menghapus input ganda dan menghilangkan risiko inkonsistensi data pasien (temuan M-04)
SAPA QR	Dua kanal survei terpisah untuk bidang kesehatan dan birokrasi	Satukan menjadi satu sistem dengan penanda unit layanan, sehingga hasil dapat dibaca menyeluruh maupun per unit	Menghapus duplikasi aset dan memungkinkan analisis kepuasan lintas perangkat daerah (temuan M-03)

5.5 Usulan *Dashboard* Performa Baru

Menjawab temuan M-05 dan M-06, diusulkan pengembangan *dashboard* performa terpusat yang melekat pada SENADA+. *Dashboard* ini menampilkan enam indikator Tabel 3.9 untuk seluruh aplikasi daerah dalam satu layar, dengan tiga tingkat akses: publik (ringkasan ketersediaan layanan), perangkat daerah (kinerja aplikasi sendiri), dan Bapperida/Inspektorat (seluruh portofolio untuk keperluan evaluasi dan audit).

Catatan penjelas: Dashboard ini sekaligus menjadi instrumen peningkatan kapabilitas COBIT pada objektif MEA01 dan BAI04 yang saat ini bernilai terendah (0,4 dan 0,6). Dengan tersedianya data performa terpusat, penilaian kapabilitas pada asesmen berikutnya dapat didasarkan pada data operasional nyata, bukan pada dokumentasi sekunder sebagaimana kajian ini.

BAB 6
ROADMAP TEKNOLOGI

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VI
ROADMAP TEKNOLOGI (BAGIAN 10)

Bab ini memuat Bagian 10 laporan. Rekomendasi dikelompokkan menjadi empat horizon waktu sesuai kerangka rencana kajian.

6.1 Perbaikan Cepat (0–3 Bulan)

Tabel 6.1 Rekomendasi Perbaikan Cepat (0–3 Bulan)

Kode	Tindakan	Penanggung Jawab	Menjawab	Objektif
R-01	Nonaktifkan konten anomali SENADA+, periksa riwayat akun dan publikasi, terapkan persetujuan berlapis sebelum konten tayang	Bapperida, Diskominfo	M-01	DSS05
R-02	Susun dan publikasikan kebijakan privasi serta keamanan data pada 13 inovasi pengelola data pribadi	Diskominfo bersama OPD pengampu	M-02	APO13
R-03	Verifikasi status SAPA QR — satu sistem atau dua — lalu satukan pencatatannya	Bapperida, Diskominfo	M-03	BAI09
R-04	Lengkapi data dasar seluruh 20 inovasi pada SENADA+: penanggung jawab, dasar hukum, tahun mulai	Seluruh OPD pengampu	M-06	BAI09, APO01

6.2 Pengembangan (3–12 Bulan)

Tabel 6.2 Rekomendasi Pengembangan (3–12 Bulan)

Kode	Tindakan	Penanggung Jawab	Menjawab	Objektif
R-05	Hubungkan basis data ROKET dan SI KOMAR untuk menghapus input ganda	RSUD Hasan Basry	M-04	BAI09
R-06	Susun laporan kinerja sederhana berkala — jumlah pengguna dan layanan selesai — untuk seluruh inovasi	Seluruh OPD pengampu	M-06	MEA01
R-07	Sediakan kanal cadangan nondigital pada lima inovasi yang belum memilikinya, termasuk kanal SMS/telepon PETASAN HSS untuk kondisi darurat	OPD pengampu terkait	M-07	—
R-08	Laksanakan audit TIK formal atas seluruh 20 inovasi	Inspektorat	M-05	MEA02
R-09	Terapkan target ambang layanan Tabel 3.9 dan mulai pencatatan *uptime* serta response time	Diskominfo	M-05	BAI04

6.3 Integrasi Jangka Menengah (1–2 Tahun)

Tabel 6.3 Rekomendasi Integrasi Jangka Menengah (1–2 Tahun)

Kode	Tindakan	Penanggung Jawab	Menjawab	Objektif
R-10	Kembangkan *dashboard* performa terpusat pada SENADA+ sebagaimana subbab 5.5	Bapperida, Diskominfo	M-05, M-06	MEA01, BAI04
R-11	Bangun gerbang antarmuka pemrograman (API *gateway*) terpusat melalui SILAKSA	Diskominfo	M-10	BAI09
R-12	Tetapkan standar teknis wajib bagi sistem baru: kemampuan saling terhubung antar-sistem, keamanan, dan identitas visual	Diskominfo	M-13	APO01, APO13
R-13	Laksanakan *usability testing* langsung dan asesmen formal COBIT oleh asesor bersertifikat	Bapperida	M-05	MEA02

6.4 Penggantian atau Penghentian Sistem

Berdasarkan seluruh temuan Bab III dan Bab IV, tidak terdapat inovasi yang direkomendasikan dihentikan pada tahap ini. Seluruh 20 inovasi berstatus aktif dan memiliki fungsi yang jelas. Namun dua keputusan portofolio diusulkan: penggabungan dua entri SAPA QR menjadi satu sistem, serta penggabungan alur ROKET dan SI KOMAR ke dalam satu rangkaian layanan pasien.

Adapun bagi 15 inovasi Kelompok C, keputusan lanjut atau hentikan sebaiknya diambil setelah verifikasi lapangan pada horizon 3–12 bulan memastikan status keaktifannya. Menghentikan sistem yang sesungguhnya masih dipakai hanya karena dokumentasinya tidak lengkap merupakan keputusan yang berisiko, sebagaimana ditegaskan pada subbab 4.3.3.

6.5 Prioritas Apabila Sumber Daya Terbatas

Apabila perangkat daerah harus memilih karena keterbatasan waktu dan anggaran, urutan prioritas berikut disarankan berdasarkan tingkat keparahan temuan dan tingkat risiko layanan.

- Tangani temuan kritis terlebih dahulu — R-01 (integritas konten SENADA+) dan R-02 (kebijakan perlindungan data), karena keduanya menyangkut kepercayaan publik dan kepatuhan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022;
- Dahulukan inovasi berisiko tinggi meskipun nilainya rendah — SI HADRAH (penyaluran hibah), SITI LAMAK (ketepatan diet pasien), Aksi

IPSRS (pemeliharaan peralatan rumah sakit), dan SIAP (data anak di bawah umur);

- Kerjakan langkah berbiaya rendah lebih dahulu — R-03, R-04, dan R-06 seluruhnya berupa pekerjaan administratif yang dapat dimulai segera tanpa pengadaan;
- Tunda pengembangan teknis besar — R-10 dan R-11 memerlukan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia, sehingga wajar ditempatkan pada horizon 1–2 tahun.

6.6 Model Perkembangan Masing-Masing Inovasi

Subbab 6.1 sampai 6.5 menyusun rekomendasi menurut horizon waktu dan tingkat prioritas. Subbab ini melengkapinya dengan menyajikan model perkembangan (development model) bagi setiap inovasi secara individual — yakni jalur bertahap dari kondisi saat ini menuju kondisi yang dituju. Model ini disusun agar setiap perangkat daerah pengampu dapat langsung mengetahui apa yang harus dikerjakan lebih dahulu untuk aplikasi yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa perlu menafsirkan sendiri rekomendasi umum.

6.6.1 Empat Tahap Model Perkembangan

Model perkembangan disusun dalam empat tahap yang mengikuti sifat kumulatif skala kapabilitas COBIT sebagaimana dijelaskan pada subbab 4.1: sebuah inovasi tidak dapat melompat ke tahap berikutnya sebelum tahap sebelumnya terpenuhi.

Tabel 6.4 Empat Tahap Model Perkembangan Inovasi Teknologi

Tahap	Nama Tahap	Waktu	Ciri Utama	Sasaran Kapabilitas
Tahap 0	Kondisi Awal	—	Aplikasi berjalan atas inisiatif unit, tanpa dokumentasi tata kelola yang memadai	0,4 – 1,8
Tahap 1	Tercatat dan Berpenanggung Jawab	0–3 bulan	Aplikasi terdaftar resmi sebagai aset daerah, penanggung jawab ditetapkan tertulis, dasar hukum dicantumkan	Level 1 penuh
Tahap 2	Terukur dan Terlindungi	3–12 bulan	Kinerja dilaporkan berkala, kebijakan keamanan dan akses data ditetapkan, alternatif layanan disediakan	Level 2
Tahap 3	Terintegrasi dan Terstandardisasi	1–2 tahun	Data terhubung dengan sistem lain, mengikuti standar teknis bersama, dipantau melalui *dashboard* terpusat	Level 3

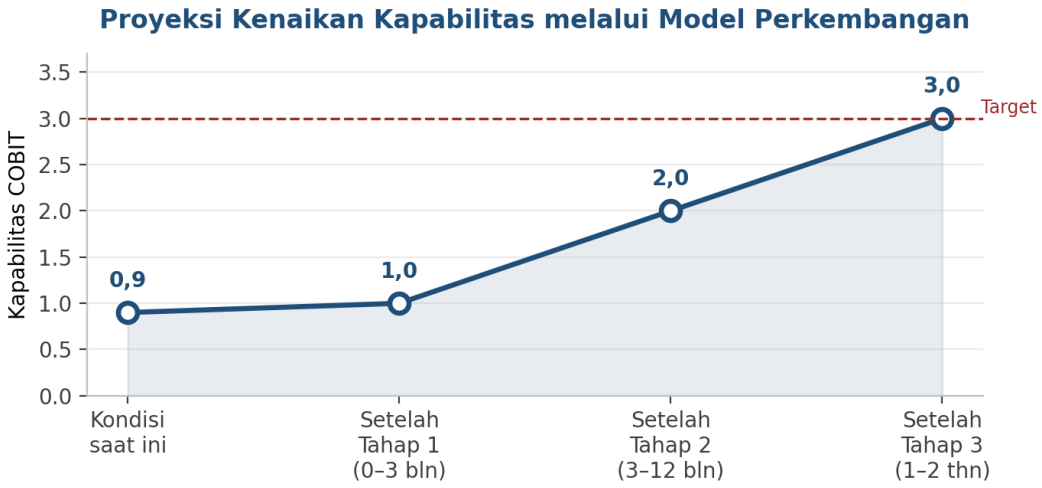

Gambar 6.1 Proyeksi Kenaikan Kapabilitas melalui Model Perkembangan

Catatan penjelas: Perlu diperhatikan bahwa Tahap 1 seluruhnya berupa pekerjaan administratif yang tidak memerlukan anggaran pengembangan sistem. Berdasarkan hasil penilaian Bab IV, pemenuhan Tahap 1 saja sudah cukup untuk menaikkan sebagian besar inovasi Kelompok C menuju Kelompok B. Dengan kata lain, peningkatan kapabilitas yang paling besar justru dapat diperoleh dari langkah yang paling murah.

6.6.2 Model Perkembangan Inovasi Nomor 1–10

Tabel 6.5 Model Perkembangan Inovasi Nomor 1–10

No	Inovasi	Kini	Tahap 1 (0–3 bulan)	Tahap 2 (3–12 bulan)	Tahap 3 (1–2 tahun)
1	SIPASKA HSS	0,7	Daftarkan pada SENADA+; tetapkan penanggung jawab tetap yang tidak berganti tiap tahun kegiatan	Catat jumlah peserta dan tahapan seleksi tiap tahun sebagai laporan kinerja	Hubungkan data alumni Paskibraka dengan basis data kepemudaan daerah
2	PETASAN HSS	1,1	Dokumentasikan prosedur pelaporan bencana dan penanggung jawab pemutakhiran peta	Sediakan kanal SMS/telepon darurat; mulai catat ketersediaan layanan (*uptime*)	Integrasikan dengan data desa dan sistem peringatan dini tingkat provinsi
3	KOSAN *Online*	0,7	Tetapkan penanggung jawab dan aturan tertulis siapa yang boleh membaca riwayat konsultasi	Publikasikan kebijakan privasi; catat jumlah konsultasi dan waktu respons	Hubungkan dengan rekam medis puskesmas agar riwayat pasien tidak terputus

No	Inovasi	Kini	Tahap 1 (0–3 bulan)	Tahap 2 (3–12 bulan)	Tahap 3 (1–2 tahun)
4	KODE SMS Bu Susi	0,7	Daftarkan sebagai aset dan tetapkan penanggung jawab pengelola nomor layanan	Catat jumlah penerima dan sebaran wilayah sebagai bukti pemerataan akses	Jadikan kanal cadangan resmi bagi layanan digital lain yang memerlukan jalur nondigital
5	SAPA QR (Kesehatan)	0,9	Verifikasi status ganda dengan entri birokrasi, lalu satukan pencatatan asetnya	Publikasikan kebijakan privasi responden; sediakan formulir kertas bagi lansia	Gabungkan ke dalam sistem survei kepuasan terpadu lintas perangkat daerah
6	SI KOMAR	1,8	Publikasikan kebijakan privasi dan perlindungan data pasien	Publikasikan data *uptime* dan waktu respons; perluas serta umumkan daftar RS mitra	Jadikan simpul data ketersediaan kamar tingkat regional sekaligus rujukan standar bagi inovasi lain
7	SIAMPRAH	0,9	Tetapkan penanggung jawab dan daftarkan sistem sebagai aset daerah	Susun laporan bulanan jumlah permintaan dan waktu pemenuhan	Integrasikan dengan e-Resep agar data persediaan farmasi menjadi satu kesatuan
8	SITI LAMAK	0,7	Daftarkan sistem dan tetapkan penanggung jawab di Instalasi Gizi	Catat jumlah label diterbitkan dan angka kekeliruan diet sebelum-sesudah penerapan	Hubungkan dengan data rekam medis agar informasi diet mengikuti kondisi klinis pasien
9	e-Resep	0,9	Susun kebijakan keamanan dan masa simpan (retensi) data resep secara tertulis	Catat jumlah resep elektronik dan penurunan kesalahan pembacaan	Integrasikan dengan SIAMPRAH untuk persediaan dan SI KOMAR untuk identitas pasien
10	SIAP	0,7	Tetapkan aturan pelindungan data peserta didik dan penanggung jawab pengelola	Susun laporan kehadiran gabungan berkala kepada Dinas Pendidikan	Integrasikan dengan Data Pokok Pendidikan agar tidak terjadi pencatatan ganda

6.6.3 Model Perkembangan Inovasi Nomor 11–20

Tabel 6.6 Model Perkembangan Inovasi Nomor 11–20

No	Inovasi	Kini	Tahap 1 (0–3 bulan)	Tahap 2 (3–12 bulan)	Tahap 3 (1–2 tahun)
11	SIPASUM HSS	0,7	Tetapkan penanggung jawab; pastikan seluruh riwayat pemesanan tersimpan dan dapat ditelusuri	Tambahkan pelacakan status pengajuan; susun laporan pemakaian fasilitas berkala	Hubungkan kalender fasilitas lintas perangkat daerah dan sistem retribusi

No	Inovasi	Kini	Tahap 1 (0–3 bulan)	Tahap 2 (3–12 bulan)	Tahap 3 (1–2 tahun)
12	SIDALI	0,7	Tetapkan penanggung jawab pembaruan data beserta jadwal pembaruannya secara tertulis	Catat frekuensi pembaruan dan kelengkapan data harga sebagai indikator mutu	Integrasikan dengan data harga tingkat provinsi dan nasional
13	SI HADRAH	0,7	Tetapkan penanggung jawab; pastikan riwayat pengajuan dan keputusan hibah tersimpan permanen	Susun laporan penyaluran hibah dan jejak audit (audit trail) yang dapat diperiksa	Integrasikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah agar penyaluran tercatat menyatu
14	SENADA +	1,3	Nonaktifkan konten anomali; periksa riwayat akun; terapkan persetujuan berlapis sebelum tayang	Wajibkan kelengkapan data setiap inovasi; aktifkan pencatatan log dan pemantauan perubahan konten	Kembangkan menjadi *dashboard* kematangan digital seluruh aplikasi daerah
15	SI Tamu Simpur	0,7	Dokumentasikan cara pengoperasian agar tidak bergantung pada satu petugas	Catat jumlah tamu dan susun laporan bulanan kepada camat	Replikasikan ke seluruh kecamatan sebagai standar buku tamu elektronik daerah
16	Aksi IPSRS	0,7	Tetapkan penanggung jawab dan daftarkan sistem sebagai aset daerah	Catat jumlah permintaan dan waktu penyelesaian pemeliharaan sebagai laporan kinerja	Hubungkan dengan data aset pada Isma Badastar agar riwayat pemeliharaan melekat pada barang
17	Isma Badastar	0,9	Daftarkan sistem ini sendiri sebagai aset daerah pada SENADA+	Catat cakupan aset yang telah berlabel QR sebagai indikator kemajuan	Integrasikan dengan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah dan Aksi IPSRS
18	ROKET	1,1	Susun dan publikasikan kebijakan privasi data pendaftaran pasien	Hubungkan basis data dengan SI KOMAR untuk menghapus input ganda	Wujudkan satu alur layanan pasien terpadu: pendaftaran, kamar, dan resep
19	SILAKSA	1,0	Verifikasi dan lengkapi daftar aplikasi yang benar-benar tertaut	Kelompokkan tautan menurut kebutuhan warga; catat jumlah kunjungan per layanan	Kembangkan menjadi gerbang antarmuka pemrograman (API *gateway*) terpusat
20	SAPA QR (Birokrasi)	0,9	Satukan pencatatan dengan entri SAPA QR bidang kesehatan	Publikasikan kebijakan privasi; sediakan alternatif kertas di area layanan	Bangun *dashboard* kepuasan masyarakat lintas OPD yang terhubung dengan SENADA+

6.6.4 Pola Perkembangan dan Simpul Integrasi

Pembacaan Tabel 6.5 dan 6.6 secara menyeluruh memperlihatkan tiga pola yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan.

- **Tahap 1 hampir seragam bagi seluruh inovasi.** Sembilan belas dari dua puluh inovasi memerlukan langkah yang pada dasarnya sama pada Tahap 1, yaitu menetapkan penanggung jawab tertulis dan mendaftarkan sistem sebagai aset daerah. Keseragaman ini menguntungkan, karena Bapperida cukup menerbitkan satu surat edaran dengan format isian tunggal bagi seluruh perangkat daerah, alih-alih menangani dua puluh proses terpisah. Pengecualiannya adalah SENADA+, yang Tahap 1-nya bersifat penanganan insiden.
- **Tahap 3 bermuara pada empat simpul integrasi.** Meskipun disusun per inovasi, jalur Tahap 3 kedua puluh inovasi sesungguhnya bermuara pada empat simpul: SENADA+ sebagai *dashboard* kematangan digital; SILAKSA sebagai gerbang antarmuka pemrograman; layanan pasien terpadu di lingkungan RSUD yang menyatukan ROKET, SI KOMAR, e-Resep, SIAMPRAH, dan SITI LAMAK; serta sistem survei kepuasan terpadu yang menyatukan kedua entri SAPA QR. Penetapan keempat simpul ini sejak awal mencegah pengembangan Tahap 3 berjalan sendiri-sendiri dan kembali menghasilkan fragmentasi.
- **Kecepatan perkembangan tidak seragam.** Lima inovasi Kelompok A dan B — SI KOMAR, SENADA+, PETASAN HSS, ROKET, dan SILAKSA — telah memenuhi sebagian besar syarat Tahap 1, sehingga dapat langsung memusatkan perhatian pada Tahap 2. Sebaliknya, lima belas inovasi Kelompok C perlu menuntaskan Tahap 1 terlebih dahulu. Perbedaan titik berangkat ini sebaiknya tercermin dalam penjadwalan, agar perangkat daerah yang tertinggal tidak dibebani target yang sama dengan yang sudah maju.

Dengan model perkembangan ini, kesenjangan 2,1 level yang teridentifikasi pada subbab 4.3.2 diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang terukur dan berjenjang. Apabila Tahap 1 dituntaskan seluruh perangkat daerah dalam tiga bulan pertama, rata-rata kapabilitas portofolio diproyeksikan naik dari 0,9 menuju kisaran Level 1 penuh; pemenuhan Tahap 2 mengantarkan pada Level 2; dan Tahap 3 pada Level 3 sebagai data awal tata kelola teknologi informasi pemerintahan yang memadai.

6.7 Model Pengembangan untuk Setiap Rekomendasi

Subbab 6.1 sampai 6.3 menyebutkan tiga belas rekomendasi berkode R-01 sampai R-13. Agar tidak berhenti sebagai daftar keinginan, setiap rekomendasi di

sini dilengkapi model pengembangan — yaitu penjelasan mengenai apa langkah awalnya, bagaimana mengerjakannya, apa hasil yang harus terlihat, dan bagaimana mengetahui bahwa rekomendasi tersebut sudah berhasil.

Tabel 6.7 Model Pengembangan untuk Setiap Rekomendasi R-01 sampai R-13

Kode	Rekomendasi	Langkah Awal	Cara Mengerjakan	Hasil yang Terlihat	Tanda Berhasil
R-01	Bersihkan dan amankan SENADA+	Kumpulkan tangkapan layar konten bermasalah sebagai bukti	Nonaktifkan entri, periksa akun yang memuatnya, aktifkan persetujuan admin sebelum konten tayang	Laman publik hanya memuat inovasi daerah; ada catatan siapa menayangkan apa	Selama 1 bulan berturut-turut tidak ada konten di luar inovasi daerah yang lolos tayang
R-02	Susun kebijakan perlindungan data	Daftar 13 aplikasi yang menyimpan data pribadi warga	Buat satu format kebijakan induk oleh Diskominfo, lalu disesuaikan tiap OPD	Halaman kebijakan privasi terpasang dan dapat dibaca pengguna	Seluruh 13 aplikasi memiliki halaman kebijakan yang dapat diakses publik
R-03	Satukan pencatatan SAPA QR	Tanyakan ke kedua OPD: satu sistem atau dua sistem berbeda	Bila satu, gabungkan menjadi satu entri; bila dua, beri nama berbeda yang jelas	Tidak ada lagi nama aplikasi kembar di daftar aset	Jumlah inovasi teknologi tercatat konsisten antara SENADA+ dan laporan OPD
R-04	Lengkapi data dasar 20 inovasi	Sebar satu format isian tunggal ke seluruh OPD pengampu	Isi nama penanggung jawab, dasar hukum, tahun mulai, dan perkiraan jumlah pengguna	Seluruh 20 inovasi punya identitas lengkap di SENADA+	20 dari 20 baris terisi penuh tanpa kolom kosong
R-05	Hubungkan ROKET dan SI KOMAR	Bandingkan data apa saja yang diminta kedua sistem	Sepakati satu sumber data pasien, lalu sambungkan keduanya	Pasien cukup mengisi data sekali untuk kedua layanan	Tidak ada lagi keluhan pengisian data ganda dari pasien
R-06	Buat laporan kinerja sederhana	Tentukan dua angka wajib: jumlah pengguna dan jumlah layanan selesai	Catat tiap bulan dalam satu lembar, kirim ke Bapperida	Ada catatan kinerja bulanan untuk tiap aplikasi	Minimal 6 bulan berturut-turut laporan terkirim tanpa putus

Kode	Rekomendasi	Langkah Awal	Cara Mengerjakan	Hasil yang Terlihat	Tanda Berhasil
R-07	Sediakan jalur nondigital	Identifikasi 5 aplikasi yang belum punya jalur cadangan	Sediakan formulir kertas, nomor telepon, atau loket bagi warga yang tidak memakai aplikasi	Warga tanpa telepon pintar tetap dapat dilayani	Setiap layanan memiliki minimal satu jalur selain aplikasi
R-08	Laksanakan audit TIK	Masukkan audit TIK ke program kerja Inspektorat	Periksa keamanan, cadangan data, dan hak akses tiap aplikasi	Ada laporan hasil audit resmi per aplikasi	Seluruh 20 aplikasi selesai diaudit dalam satu tahun anggaran
R-09	Mulai catat performa sistem	Tetapkan target sederhana: layanan hidup minimal 99 persen waktu	Minta pengembang atau vendor menyediakan catatan otomatis	Ada angka ketersediaan layanan tiap bulan	Tersedia data *uptime* dan waktu respons untuk minimal 10 aplikasi
R-10	Bangun *dashboard* performa	Kumpulkan kebutuhan data dari Bapperida dan Inspektorat	Kembangkan tampilan pemantauan pada SENADA+ dengan tiga tingkat akses	Kondisi seluruh aplikasi terlihat dalam satu layar	Pimpinan dapat memeriksa kondisi aplikasi tanpa meminta laporan manual
R-11	Bangun gerbang data terpusat	Petakan data apa yang perlu dibagi antaraplikasi	Kembangkan SILAKSA dari kumpulan tautan menjadi penghubung data	Aplikasi dapat bertukar data tanpa input ulang	Minimal 5 aplikasi sudah saling terhubung melalui gerbang ini
R-12	Tetapkan standar aplikasi baru	Susun daftar syarat wajib bagi aplikasi baru	Terbitkan sebagai peraturan bupati atau surat edaran	Aplikasi baru wajib memenuhi syarat sebelum diluncurkan	Tidak ada aplikasi baru yang lolos tanpa memenuhi standar
R-13	Uji langsung dan asesmen resmi	Siapkan anggaran dan pilih asesor bersertifikat	Lakukan pengujian dengan warga sungguhan dan asesmen COBIT resmi	Ada nilai kematangan yang diakui secara resmi	Hasil asesmen dapat dipakai sebagai dasar Indeks Pemerintahan Digital

Catatan penjelas: Kolom “Tanda Berhasil” sengaja dirumuskan dalam bentuk yang dapat diperiksa dengan mata, bukan dalam bentuk persentase yang sulit diverifikasi. Rumusan semacam ini lazim disebut indikator yang dapat

diamati (observable indicator), dan dipilih karena Bapperida memerlukan alat pantau yang dapat dipakai tanpa memerlukan pengukuran teknis yang rumit.

6.8 Saran untuk Inovasi yang Sudah Ada

Bagian ini menjawab pertanyaan sederhana yang sering muncul di lingkungan perangkat daerah: aplikasi yang sudah ada ini sebaiknya diapakan? Jawabannya dibagi menjadi empat sikap, agar tidak semua aplikasi diperlakukan sama.

Tabel 6.8 Saran Sikap terhadap Inovasi yang Sudah Ada

Sikap yang Diambil	Inovasi	Alasan	Saran Tindakan
Dipertahankan dan dijadikan contoh	SI KOMAR	Sudah punya bukti manfaat berupa penurunan waktu dari 15 menit menjadi kurang dari 1 menit, dan sudah tersambung dengan sistem BPJS.	Rapikan kebijakan privasi data pasien, lalu jadikan bahan pelatihan bagi OPD lain agar caranya ditiru.
Diperkuat karena perannya strategis	SENADA+, SILAKSA	Keduanya bukan sekadar aplikasi layanan, melainkan tulang punggung yang menghubungkan aplikasi lain.	SENADA+ dibersihkan dan dikembangkan menjadi papan pemantauan; SILAKSA dilengkapi daftar aplikasi lalu ditingkatkan menjadi penghubung data.
Dilanjutkan dengan perbaikan	PETASAN HSS, ROKET, SIAMPRAH, e-Resep, Isma Badastar, SAPA QR	Fungsinya sudah jelas dan dipakai, hanya kurang pada catatan, keamanan data, atau sambungan antaraplikasi.	Kerjakan Tahap 1 dan Tahap 2 pada Tabel 6.5 dan 6.6; sebagian besar cukup pekerjaan administratif.
Digabung agar tidak kembar	SAPA QR (dua entri), ROKET dengan SI KOMAR, SIAMPRAH dengan e-Resep	Ada pekerjaan yang beririsan dan data yang diminta berulang kepada orang yang sama.	Satukan pencatatan dan alur layanannya, bukan menutup salah satunya.
Diverifikasi dahulu sebelum diputuskan	15 inovasi Kelompok C	Nilai rendah disebabkan tidak adanya dokumen, bukan karena terbukti tidak dipakai.	Cek ke lapangan apakah masih aktif; bila aktif lengkapi dokumennya, bila sudah tidak dipakai barulah dihentikan secara resmi.

Perlu ditegaskan kembali bahwa tidak ada satu pun inovasi yang disarankan dihentikan pada saat ini. Menutup aplikasi yang sesungguhnya masih dipakai warga hanya karena dokumennya belum lengkap justru merugikan, karena yang hilang adalah layanannya, sedangkan yang bermasalah sebenarnya hanya pencatatannya.

6.9 Saran Inovasi Baru yang Perlu Dikembangkan

Selain memperbaiki yang sudah ada, kajian ini menemukan sejumlah kebutuhan yang belum terjawab oleh dua puluh inovasi yang ada. Kebutuhan tersebut diperoleh dari celah yang terlihat pada hasil audit Bab III, bukan dari perkiraan semata. Delapan usulan berikut disusun menurut urutan kemendesakannya.

Tabel 6.9 Usulan Inovasi Baru yang Perlu Dikembangkan

Kode	Usulan Inovasi Baru	Celah yang Dijawab	Manfaat bagi Warga	Sifat	Prioritas
U-01	Papan Pemantauan Layanan Digital Daerah	Tidak ada satu pun aplikasi yang diketahui angka pemakaian dan gangguannya (Tabel 3.8)	Pimpinan dapat melihat kondisi seluruh layanan tanpa meminta laporan satu per satu	Menempel pada SENADA +	Sangat mendesak
U-02	Layanan Kesehatan Terpadu RSUD	Pasien mengisi data berulang di ROKET, SI KOMAR, dan e-Resep (temuan M-04)	Satu kali daftar untuk seluruh urusan di rumah sakit	Menggabungkan sistem yang sudah ada	Sangat mendesak
U-03	Kanal Pengaduan Warga Terpadu	Belum ada aplikasi khusus pengaduan pada 20 inovasi yang ada	Warga punya satu tempat menyampaikan keluhan lintas urusan	Baru, terhubung SILAKSA	Mendesak
U-04	Layanan Nondigital Terjadwal (Jemput Layanan)	Sekitar 36 persen warga belum memiliki telepon pintar (subbab 2.1)	Warga di desa tetap terlayani meski tidak memakai aplikasi	Bukan aplikasi, melainkan prosedur layanan	Mendesak
U-05	Basis Data Warga Terpadu Tingkat Daerah	Data warga tersebar di banyak aplikasi tanpa penghubung (Tabel 3.10)	Warga tidak diminta data yang sama berulang kali	Baru, menjadi dasar bagi aplikasi lain	Menengah
U-06	Aplikasi Pemantauan Kehadiran Pelayanan Kecamatan	SI Tamu Simpur baru berjalan di satu kecamatan dari sebelas	Kualitas pelayanan kecamatan dapat dibandingkan dan ditingkatkan	Replikasi yang sudah ada	Menengah
U-07	Pusat Bantuan dan Panduan Pengguna	Tidak ada panduan pemakaian bagi pengguna baru (temuan M-11)	Warga dan petugas baru dapat belajar sendiri tanpa bertanya	Bagian dari SILAKSA	Menengah

Kode	Usulan Inovasi Baru	Celah yang Dijawab	Manfaat bagi Warga	Sifat	Prioritas
U-08	Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Pesan Singkat	PETASAN HSS terputus saat jaringan terganggu (Tabel 3.2)	Peringatan tetap sampai meski internet mati	Melengkapi PETASAN HSS	Menengah

6.9.1 Catatan Penting sebelum Membangun Aplikasi Baru

Dari delapan usulan pada Tabel 6.9, hanya tiga yang benar-benar berupa aplikasi baru, yaitu U-03, U-05, dan U-08. Empat usulan lainnya merupakan pengembangan atau penggabungan sistem yang sudah ada, sedangkan U-04 bahkan bukan aplikasi melainkan prosedur pelayanan. Pembagian ini disengaja.

Catatan penjelas: Temuan utama kajian ini adalah bahwa Kabupaten HSS tidak kekurangan aplikasi, melainkan kekurangan catatan, pengukuran, dan pengamanan atas aplikasi yang sudah ada. Karena itu, menambah aplikasi baru tanpa membenahi tata kelola yang ada berisiko memperparah keadaan — menambah jumlah sistem yang sama-sama tidak tercatat dan tidak terpantau. Urutan yang disarankan adalah membereskan Tahap 1 pada seluruh inovasi yang ada terlebih dahulu, baru kemudian membangun yang baru.

Sebagai pengaman, kajian ini menyarankan agar setiap usulan aplikasi baru — termasuk kedelapan usulan di atas — wajib melewati empat pertanyaan penyaring berikut sebelum dianggarkan.

- Apakah kebutuhan ini benar-benar belum terjawab oleh aplikasi yang sudah ada? Bila sudah ada yang mirip, gabungkan saja;
- Siapa nama pejabat yang akan bertanggung jawab setelah aplikasi selesai dibangun? Bila belum ada, tunda dahulu;
- Angka apa yang akan dipakai untuk menilai aplikasi ini berhasil? Bila belum dapat disebutkan, rumuskan lebih dahulu;
- Bagaimana warga yang tidak memakai telepon pintar tetap dapat dilayani? Bila belum ada jawabannya, siapkan jalur cadangannya.

Keempat pertanyaan ini merupakan wujud sederhana dari objektif APO01, MEA01, dan BAI09 yang selama ini bernilai rendah. Dengan menerapkannya sejak tahap perencanaan, aplikasi baru yang dibangun tidak akan mengulangi kelemahan yang sama dengan dua puluh aplikasi yang ada saat ini.

BAB 7
PENUTUP

AUDIT TEKNOLOGI, PENGALAMAN PENGGUNA, DAN KEMATANGAN DIGITAL INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VII
KETERKAITAN KEBIJAKAN DAN PENUTUP

7.1 Keterkaitan dengan RPJMD 2025–2029

RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2025–2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025) mengusung visi "Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)". Misi 4 — Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital — menaungi langsung seluruh inovasi yang dikaji.

Tabel 7.1 Keterkaitan Inovasi dengan IKU Misi 4 RPJMD

Indikator Kinerja Utama RPJMD	Kondisi Awal	Target Akhir	Inovasi Pendukung
Indeks Reformasi Birokrasi	93,39 (2024)	105,00 (2030)	Seluruh 20 inovasi
Nilai SAKIP	84,07 (2024)	95,25 (2030)	SENADA+, Aksi IPSRS
Indeks Kepuasan Masyarakat	98,13 (2024)	98,40 (2030)	SAPA QR, SI KOMAR, ROKET
Indeks Pemerintahan Digital	Belum tercatat (2024)	2,45 (2030)	SILAKSA, SENADA+, seluruh portofolio

Indikator Pemerintahan Digital bahkan belum tercatat kondisi awalnya pada 2024, menandakan pengukuran formal kematangan digital baru akan dimulai pada periode RPJMD berjalan. Temuan kajian ini — khususnya rata-rata kapabilitas COBIT 0,9 dan ketiadaan seluruh metrik performa — dapat menjadi basis awal (data awal) bagi pengukuran tersebut.

7.2 Keterkaitan dengan RPJPD 2025–2045

RPJPD Kabupaten HSS (Perda Nomor 4 Tahun 2024) memuat tiga arah kebijakan transformasi digital yang relevan langsung dengan temuan kajian ini: pengembangan infrastruktur teknologi informasi hingga pelosok; peningkatan pemanfaatan teknologi pada sektor prioritas; serta peningkatan literasi digital masyarakat dan keamanan informasi. Ketiga arah tersebut menjawab langsung tiga temuan utama laporan ini — kesenjangan akses (subbab 3.5), fragmentasi sistem (subbab 3.7), dan kelemahan keamanan data (subbab 3.7 dan Bab IV).

7.3 Dampak terhadap Kesejahteraan Rakyat

Tiga kaitan langsung dapat ditarik. Pertama, pada dimensi kesehatan, SI KOMAR menurunkan waktu pencarian informasi kamar dari sekitar 15 menit

menjadi kurang dari 1 menit, yang berarti percepatan akses layanan rujukan bagi warga HSS dan sekitarnya. Kedua, pada dimensi kesetaraan gender, kesenjangan kepemilikan telepon genggam sebesar 12,25 poin persentase berpotensi membatasi manfaat inovasi kesehatan secara tidak porsional terhadap perempuan, sehingga ketersediaan alternatif nondigital menjadi persoalan kesejahteraan, bukan sekadar persoalan teknis. Ketiga, pada dimensi ketahanan, PETASAN HSS berkontribusi memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan.

7.4 Kesimpulan

- Seluruh 20 inovasi kelompok inovasi teknologi sampel audit berstatus aktif, dengan 18 di antaranya dapat diakses melalui telepon genggam. Kontribusinya terhadap Asta Cita didominasi Asta Cita 7 (10 inovasi) dan Asta Cita 4 (8 inovasi);
- Pada sisi pengalaman pengguna, skor heuristik kejelasan tujuan rata-rata 3,5 dari 5 menunjukkan bahwa aplikasi umumnya dapat dipahami maksudnya. Namun indikator *usability* yang mensyaratkan pengujian langsung — tingkat keberhasilan tugas, waktu penyelesaian, jumlah kesalahan, dan kepuasan — belum dapat dinilai untuk hampir seluruh inovasi;
- Pada sisi aksesibilitas, lima inovasi belum memiliki alternatif nondigital jelas dan tidak satu pun memiliki dokumentasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupun dukungan bahasa daerah, di tengah kondisi sekitar 36 persen penduduk belum memiliki telepon genggam;
- Pada sisi sistem dan data, seluruh metrik performa berstatus belum dapat dinilai; 13 dari 20 inovasi mengelola data pribadi tanpa kebijakan privasi terdokumentasi; dan hanya satu inovasi memiliki integrasi antar-sistem terverifikasi;
- Audit COBIT 2019 menghasilkan rata-rata kapabilitas 0,9 dari skala 0–5 dengan kesenjangan 2,1 level terhadap target Level 3. Objektif terlemah adalah pelaporan kinerja (0,4) dan pencatatan aset (0,5), sedangkan terkuat adalah pemakaian sehari-hari (1,2);
- Kesimpulan utama: Kabupaten HSS berhasil membangun dan menjalankan layanan digital, tetapi belum mencatat, mengukur, mengamankan, dan mengawasinya. Prioritas penguatan terletak pada tata kelola, bukan pada penambahan aplikasi baru.

7.5 Rekomendasi Utama

- Kepada Bapperida — jadikan temuan kajian ini sebagai data awal pengukuran Indeks Pemerintahan Digital, dan wajibkan kelengkapan data

dasar seluruh inovasi pada SENADA+ sebagai syarat pendaftaran inovasi baru;

- Kepada Diskominfo — tetapkan standar teknis wajib bagi seluruh sistem baru mencakup kemampuan saling terhubung antar-sistem, keamanan data, dan identitas visual, guna mencegah berulangnya fragmentasi;
- Kepada Inspektorat — masukkan audit TIK ke dalam program pengawasan tahunan, mengisi kesenjangan Domain Manajemen SPBE yang menjadi domain paling tertinggal;
- Kepada RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan — sebagai pengampu enam inovasi sekaligus, prioritaskan integrasi ROKET dengan SI KOMAR dan telaah keterhubungan SIAMPRAH dengan e-Resep;
- Kepada seluruh OPD pengampu — mulai dari langkah paling sederhana: catat siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah penggunanya, dan siapa yang boleh mengakses datanya. Ketiga hal ini tidak memerlukan anggaran, namun cukup untuk menaikkan sebagian besar inovasi dari Kelompok C ke Kelompok B.

Laporan ini merupakan satu dari lima laporan bidang dalam Kajian Multiperspektif Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten HSS Berdasarkan Asta Cita. Rangkuman temuan laporan ini dengan keempat laporan bidang lainnya direkomendasikan disusun Bapperida ke dalam satu laporan induk guna menghasilkan keputusan portofolio inovasi daerah yang utuh dan lintas perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025.

Brooke, J. (1996). SUS: A Quick and Dirty *Usability* Scale. Dalam *Usability* Evaluation in Industry. Taylor & Francis.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018 Ergonomics of Human-System Interaction — *Usability*: Definitions and Concepts.

International Organization for Standardization. (2019). ISO 9241-210:2019 Human-Centred Design for Interactive Systems.

International Organization for Standardization/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

ISACA. (2018). COBIT 2019 *Framework*: Governance and Management Objectives.

Kementerian PANRB. (2022–2024). Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dikutip dalam RPJMD Kabupaten HSS 2025–2029.

National Institute of Standards and Technology. (2024). The NIST Cybersecurity *Framework* (CSF) 2.0.

Nielsen, J. (1994). Heuristic Evaluation. Dalam *Usability* Inspection Methods. John Wiley & Sons.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2024). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025–2045.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Rekap Inovasi 5 Perspektif [Dokumen rekapitulasi inovasi daerah].

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Rencana Kajian Multiperspektif Evaluasi Inovasi Daerah Berdasarkan Asta Cita.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029.

SENADA+ Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Portal Sistem Informasi Inovasi Daerah. https://senada.hulusungaiselatankab.go.id/ [Diakses 24 Juli 2026].

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content *Accessibility* Guidelines (WCAG) 2.2.

LAMPIRAN PROFIL RINGKAS DUA PULUH INOVASI

Lampiran ini menyajikan ringkasan satu halaman per kelompok atas seluruh 20 inovasi, memuat temuan utama dan langkah yang disarankan bagi masing-masing perangkat daerah pengampu. Lampiran ini dimaksudkan sebagai lembar kerja praktis yang dapat dipisahkan dan dibagikan kepada OPD terkait.

Tabel 7.2 Lampiran Profil Ringkas Dua Puluh Inovasi (Inovasi)

Inovasi	OPD Pengampu	COBIT	Temuan Utama	Langkah yang Disarankan
SIPASKAHSS	Setda / Protokol	0,7 (C)	Belum tercatat sebagai aset dan belum ada laporan kinerja. Penggunaan bersifat musiman sehingga berisiko terbengkalai di luar musim kegiatan.	Daftarkan pada SENADA+ dan tetapkan penanggung jawab tetap.
PETASAN HSS	BPBD	1,1 (B)	Strategi konten edukasi terbaik di portofolio. Bergantung jaringan internet yang justru rawan terganggu saat bencana.	Sediakan kanal pelaporan SMS/telepon sebagai cadangan darurat.
KOSAN *Online*	Dinas Kesehatan	0,7 (C)	Menyimpan keluhan kesehatan warga tanpa aturan akses data tertulis.	Tetapkan aturan akses data konsultasi dan catat jumlah konsultasi bulanan.
KODE SMS Bu Susi	Dinas Kesehatan	0,7 (C)	Satu-satunya layanan yang tidak memerlukan internet, sehingga paling inklusif. Namun jangkauannya tidak terdata.	Catat jumlah penerima dan sebaran wilayah sebagai bukti pemerataan akses.
SAPA QR (Kesehatan)	Fasilitas kesehatan	0,9 (C)	Tercatat sebagai entri terpisah dari SAPA QR birokrasi. Menyulitkan pasien lanjut usia.	Satukan pencatatan dan sediakan formulir kertas bagi lansia.
SI KOMAR	RSUD Hasan Basry	1,8 (A)	Tata kelola terbaik di portofolio; bukti manfaat terukur dan terintegrasi BPJS. Kebijakan privasi belum dipublikasikan.	Jadikan percontohan; lengkapi kebijakan privasi data pasien.
SIAMPRAH	RSUD Hasan Basry	0,9 (C)	Berjalan rutin namun tanpa laporan kinerja; berkaitan dengan logistik farmasi.	Susun laporan bulanan jumlah dan waktu pemenuhan permintaan.
SITI LAMAK	RSUD / Instalasi Gizi	0,7 (C)	Menyentuh keselamatan pasien secara langsung, namun kontribusinya tidak terdokumentasi.	Catat jumlah label dan angka kekeliruan diet sebelum-sesudah penerapan.

Inovasi	OPD Pengampu	COBIT	Temuan Utama	Langkah yang Disarankan
e-Resep	RSUD Hasan Basry	0,9 (C)	Mengelola data medis tanpa kebijakan keamanan tertulis; belum terhubung dengan SIAMPRAH.	Susun kebijakan keamanan dan masa simpan data resep.
SIAP	Dinas Pendidikan	0,7 (C)	Mengelola data anak di bawah umur tanpa aturan pelindungan data.	Tetapkan aturan akses data peserta didik secara tertulis.

Lampiran Tabel A Profil Ringkas Inovasi Nomor 1–10

Tabel 7.3 Lampiran Profil Ringkas Dua Puluh Inovasi (Inovasi)

Inovasi	OPD Pengampu	COBIT	Temuan Utama	Langkah yang Disarankan
SIPASUMHSS	Pengelola fasum	0,7 (C)	Layanan penjadwalan rawan permintaan istimewa bila riwayat tidak tercatat rapi.	Pastikan riwayat pemesanan tersimpan dan dapat ditelusuri.
SIDALI	Setda / TPID	0,7 (C)	Menopang keputusan lintas OPD, namun penanggung jawab pembaruan data tidak jelas.	Tetapkan penanggung jawab dan jadwal pembaruan data harga.
SI HADRAH	Setda / Kesra	0,7 (C)	Menyangkut penyaluran hibah kepada pihak ketiga — risiko tertinggi di Kelompok C.	Pastikan riwayat pengajuan dan keputusan tersimpan permanen dan dapat diaudit.
SENADA+	Bapperida	1,3 (B)	Registri resmi portofolio, namun memperoleh nilai 0 pada keamanan akibat konten anomali 24 Juli 2026.	Nonaktifkan konten anomali dan terapkan persetujuan berlapis — prioritas tertinggi.
SI Tamu Simpur	Kecamatan Simpur	0,7 (C)	Satu-satunya inovasi tingkat kecamatan; berisiko berhenti bila petugas berpindah tugas.	Dokumentasikan cara pengoperasian agar tidak bergantung satu orang.
Aksi IPSRS	RSUD Hasan Basry	0,7 (C)	Menyangkut pemeliharaan peralatan rumah sakit dan anggaran pemeliharaan.	Catat jumlah permintaan dan waktu penyelesaian pemeliharaan.
Isma Badastar	Pengelola aset	0,9 (C)	Aplikasi pencatat aset daerah, namun aplikasinya sendiri belum tercatat optimal sebagai aset.	Daftarkan pada SENADA+ dan jadikan rujukan penataan aset aplikasi.
ROKET	RSUD Hasan Basry	1,1 (B)	Belum terhubung SI KOMAR meski satu pengelola; pasien menginput data dua kali.	Hubungkan basis data dengan SI KOMAR — dapat dikerjakan tanpa koordinasi lintas OPD.
SILAKSA	Setda / Diskominfo	1,0 (B)	Berperan sebagai simpul integrasi, namun cakupan aplikasi tertaut belum terverifikasi.	Verifikasi daftar aplikasi tertaut dan kelompokkan menurut kebutuhan warga.

Inovasi	OPD Pengampu	COBIT	Temuan Utama	Langkah yang Disarankan
SAPA QR (Birokrasi)	Lintas OPD	0,9 (C)	Entri terpisah menyebabkan hasil survei tidak terkonsolidasi lintas OPD.	Satukan pengelolaan data survei agar dapat dianalisis menyeluruh.

Lampiran Tabel B Profil Ringkas Inovasi Nomor 11–20

Tiga hal menonjol dari pembacaan seluruh profil. Pertama, prakarsa digital telah menyebar luas — dari rumah sakit, dinas teknis, hingga tingkat kecamatan — sebuah modal yang tidak dimiliki semua daerah. Kedua, beberapa inovasi bernilai COBIT rendah justru menyangkut hal berisiko tinggi: SI HADRAH (penyaluran hibah), SITI LAMAK (ketepatan diet pasien), Aksi IPSRS (pemeliharaan peralatan rumah sakit), dan SIAP (data anak di bawah umur); prioritas perbaikan sebaiknya mempertimbangkan risiko ini, bukan semata nilai kapabilitas. Ketiga, hampir seluruh langkah yang disarankan berupa pekerjaan administratif — mencatat penanggung jawab, mendaftarkan aset, menetapkan aturan akses data, dan menyusun laporan sederhana — yang dapat dimulai segera tanpa anggaran pengembangan.

Lampiran. Daftar Istilah Teknis dalam Bahasa Sehari-hari

Sebagian istilah dalam laporan ini tidak dapat diganti karena merupakan nama resmi metode audit yang diakui secara internasional. Daftar berikut menjelaskan istilah tersebut dalam bahasa sehari-hari agar laporan mudah dibaca lintas bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 7.4 Lampiran Profil Ringkas Dua Puluh Inovasi (Istilah)

Istilah	Penjelasan Singkat
Audit produk digital	Pemeriksaan menyeluruh atas sebuah layanan digital: apa fungsinya, siapa penggunanya, dan apakah berjalan sebagaimana mestinya.
Usability / *usability testing*	Kemudahan pemakaian. Pengujian *usability* berarti menguji apakah pengguna biasa dapat menyelesaikan tugasnya tanpa bingung dan tanpa bantuan.
User experience (UX)	Pengalaman pengguna, yaitu kesan menyeluruh seseorang saat memakai sebuah layanan digital, mulai dari mencari informasi sampai memperoleh hasil.
User journey	Alur perjalanan pengguna. Runtutan langkah yang dilalui seseorang dari awal membuka layanan sampai urusannya selesai.
Heuristic evaluation	Penilaian oleh ahli menggunakan sepuluh prinsip baku kemudahan pemakaian, dipakai ketika pengujian langsung dengan pengguna belum dapat dilaksanakan.
Severity rating	Tingkat keparahan masalah, dari ringan sampai menghambat pengguna menyelesaikan tugasnya.
Aksesibilitas (WCAG)	Kemudahan akses bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan pengguna dengan jaringan lambat. WCAG adalah standar internasionalnya.
COBIT 2019	Kerangka baku internasional untuk menilai kesiapan tata kelola teknologi informasi sebuah organisasi.
Kapabilitas / capability level	Tingkat kesiapan, dinilai dari 0 sampai 5. Nilai 0 berarti belum ada proses tertulis; nilai 5 berarti proses berjalan dan diperbaiki terus-menerus.
Dashboard	Papan pemantauan. Satu layar yang menampilkan ringkasan data penting agar kondisi program dapat dilihat sekilas.
Uptime / *downtime*	Waktu sistem menyala dan dapat dipakai (*uptime*), dan waktu sistem mati atau tidak dapat diakses (*downtime*).
Backup	Salinan cadangan data, disimpan terpisah agar data tidak hilang bila sistem utama rusak.
Retensi data	Aturan berapa lama data disimpan sebelum dihapus.
Prototype	Purwarupa, yaitu contoh rancangan tampilan yang dibuat lebih dulu untuk diuji sebelum sistem sungguhan dibangun.
Antarmuka (interface)	Tampilan layar yang dilihat dan disentuh pengguna: tombol, menu, formulir, dan pesan.

Istilah	Penjelasan Singkat
Snapshot	Potret ringkas kondisi sebuah sistem pada satu waktu tertentu.
Portofolio inovasi	Kumpulan seluruh inovasi yang dimiliki daerah, dilihat sebagai satu kesatuan.
Sampel audit	Sebagian inovasi yang dipilih untuk diperiksa mendalam sebagai wakil dari keseluruhan populasi.

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research & Publication

2026

LAPORAN KAJIAN